



RKPD

(Rencana Kerja Pemerintah Daerah)

Provinsi Papua
Tahun 2018



Pemerintah Provinsi Papua
Tahun 2017



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI PAPUA TAHUN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Lampiran : 1 (satu).

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Provinsi Papua yang tematik, integrative, holistic dan spasial, maka disusun rencana kerja pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan;
 - b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2018;

Mengingat/2

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang...../3

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 14);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

MEMUTUSKAN/4

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Gubernur ialah Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua.
11. Rencana Strategis SKPD selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan Rencana Pemerintah Tahunan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. penyusunan RKPD;
- b. perubahan RKPD; dan
- c. pengendalian dan evaluasi RKPD.

Bagian Kesatu
Penyusunan RKPD
Pasal 3

- (1) RKPD Provinsi Papua sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018, sebagai berikut :
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.
- (2) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk Tahun 2018 dalam RPJMD, rencana kerja pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (3) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
- (4) Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Pasal 4

- (1) RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memuat :
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rancangan kerangka ekonomi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.

(3)Program/6

- (3) Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.
- (4) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (5) Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 5

- (1) SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua berkewajiban melaksanakan RKPD.
- (2) RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Bagian Kedua Perubahan RKPD Pasal 6

- (1) RKPD Provinsi Papua dapat diubah dalam hal terjadi :
 - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun ditingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (3) Perubahan RKPD dengan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan Perubahan PPAS, Renstra SKPD dan Renja SKPD untuk menyusun perubahan APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018.

Bagian Ketiga
Pengendalian dan Evaluasi RKPD
Pasal 7

- (1) Gubernur melalui BAPPEDA melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Papua.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. pengendalian kebijakan;
 - b. pengendalian pelaksanaan; dan
 - c. evaluasi hasil.

Pasal 8

- (1) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, untuk menjamin bahwa RKPD Provinsi Papua telah disusun sesuai tahapan dan tatacara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, telah selaras dengan sasaran, strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah dan program perangkat daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2018 dan program strategi nasional.
- (2) Berpedoman pada RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 dan program strategi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penyesuaian prioritas pembangunan daerah, program serta kegiatan tahunan daerah provinsi dengan tema “mengacu pembangunan infrastruktur dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar wilayah”.
- (3) Pengendalian kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan RKPD Provinsi Papua.

Pasal 9

- (1) Pengendalian pelaksanaan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, untuk menjamin bahwa prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta indikator kinerja dan pagu indikatif dalam RKPD Provinsi Papua telah dipedomani dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018.
- (2) Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan KUA dan PPAS Tahun 2018.

Pasal 10

Evaluasi hasil RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk menilai daya serap, capaian target kinerja program/kegiatan mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2018.

Pasal 11

Tahapan dan tata cara penyusunan, perubahan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Provinsi Papua.
- (2) Gubernur sebagai kepala daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD.
- (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD Kabupaten/ Kota Tahun 2018.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 25 Juli 2017

GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH

Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 26 Juli 2017
Sekretaris Daerah Provinsi Papua
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2017 NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002

KATA PENGANTAR

Puji serta syukur dihaturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karuniaNya sehingga proses penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 merupakan dokumen wajib yang dipersyaratkan untuk dibuat sebagai dasar pelaksanaan satu tahun rencana pembangunan.

Sebagaimana diatur Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dalam dokumen RKPD memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju. Dokumen Rancangan RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh pemerintah daerah.

Selain itu, Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi penekanan kepada penyusunan rencanan kerja pembangunan daerah agar memperhatikan pemisahan urusan sebagai bentuk peran, tugas dan tanggung jawab pelayanan pemerintah melalui usulan program dan kegiatan pembangunan yang dikerjakan pada masing-masing tingkatan pemerintahan.

RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 kali ini adalah RKPD yang sangat strategis karena merupakan RKPD tahap kelima, masa dimana tahun berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Periode 2013-2018, serta menjadi masa transisi untuk RPJMD periode berikutnya (2019-2024). Untuk itu Dokumen RKPD tahun 2018 ini menjadi *moment* yang sangat penting yang dapat mengakumulasi seluruh penilaian capaian kinerja pembangunan daerah tahunan sebelumnya, dan sebagai tolok ukur dari keberhasilan RPJMD Tahun 2013-

2018 yaitu dengan memastikan tercapainya sasaran-sasaran utama dalam proses mewujudkan visi pembangunan “*Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera*”.

Penyusunan Dokumen RKPD 2018 telah melalui proses Pembahasan di tingkat BAPPEDA dan juga antara BAPPEDA dengan seluruh Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua. Dalam proses pembahasan tetap mengacu kepada dokumen RPJMD 2013-2018. Hal ini dimaksudkan agar target-target, sasaran dan tujuan yang ada di RPJMD 2013-2018 dapat diakomodir didalam dokumen RKPD 2018.

Agar dokumen RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 ini dijadikan sebagai arahan dan acuan bagi semua SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah dalam Penyusunan RAPBD T.A. 2018 Provinsi Papua. Harapannya dokumen ini dapat bermanfaat bagi pembangunan di Provinsi Papua di masa mendatang.

Jayapura, Juli 2017

Tim Penyusun RKPD
Provinsi Papua

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Hubungan Antar Dokumen	7
1.3. Sistematika Penulisan.....	10
1.4. Maksud dan Tujuan	11

BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah	13
2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi	13
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	45
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum	57
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah	85
2.1.5. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.....	109
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.....	111
2.2.1. Evaluasi Kinerja Progran dan Kegiatan RKPD Tahun 2016	111
2.2.2. Evaluasi Pencapaian Misi RPJMD 2013-2018 Sampai Tahun 2016	146
2.3. Evaluasi Pengelolaan Dana Otsus.....	172
2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah	183
2.4.1. Permasalahan Pelayanan Kesehatan	183
2.4.2. Permasalahan Pelayanan Pendidikan.....	184
2.4.3. Permasalahan lainnya terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan sesuai RPJMD	184
2.4.4. Masalah Sosial Budaya	189
2.4.5. Masalah Tata Pemerintahan dan Politik.....	192

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah.....	197
3.1.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2012-2016.....	198
3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Wilayah Tahun 2017 dan 2018	213
3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2018.....	227
3.2. Kerangka Pendanaan	230
3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	231
3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	239
3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	249
3.2.4. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	251

BAB IV TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Rumusan Dan Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua.....	257
4.1.1. Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua	258
4.1.2. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua	268
4.2. Tema Pembangunan	291
4.2.1. Dasar Penentuan Tema RKPD Tahun 2018.....	291
4.2.2. RKPD Tahun 2018 sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.....	293
4.3. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan	299
4.3.1. Dasar Penetapan Prioritas Pembangunan Tahun 2018.....	299
4.3.2. Prioritas RPJMN Pada Tahun 2018	299
4.3.3. Prioritas RPJMD Provinsi Papua Pada Tahun 2018.....	301
4.3.4. Prioritas RKPD Tahun 2018.....	302

4.4. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah	307
4.5. Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2018 ...	310
4.6. Arah Pembangunan Wilayah	375
4.6.1. Arah Pengembangan Wilayah Adat Mamta/Tabi.....	377
4.6.2. Arah Pengembangan Wilayah Adat Saereri	379
4.6.3. Arah Pengembangan Wilayah Adat Meepago	381
4.6.4. Arah Pengembangan Wilayah Adat Lapago	383
4.6.5. Arah Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha	385
4.6.6. Arah Pengembangan Gerbangmas Hasrat Papua.....	387
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH	
5.1. Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Anggaranannya	392
5.2. Program Proiritas Beserta Pagu Anggaranannya	396
5.3. Kegiatan Prioritas Beserta Pagu Anggaranannya.....	403
BAB VI PENUTUP	433
LAMPIRAN	436

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung Di Provinsi Papua.....	13
Tabel 2.2.	Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai Di Provinsi Papua	15
Tabel 2.3.	Kelerengan Provinsi Papua	16
Tabel 2.4.	Ketinggian Tempat Provinsi Papua	16
Tabel 2.5.	Potensi Mineral Logam dan Non Logam di Provinsi Papua.....	19
Tabel 2.6.	Luas Hutan Lindung Di Provinsi Papua	30
Tabel 2.7.	Pulau-pulau Kecil pada Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.....	33
Tabel 2.8.	Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar di Provinsi Papua.....	34
Tabel 2.9.	Hasil Identifikasi Bahaya Menurut Pembagian Wilayah Di Provinsi Papua	35
Tabel 2.10.	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016.....	38
Tabel 2.11.	Indikator-Indikator Tenaga Kerja Di Provinsi Papua Tahun 2012-2016	43
Tabel 2.12.	Ketimpangan Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota Dan Rata-rata Menurut Kawasan Di Provinsi Papua Tahun 2011-2015	52
Tabel 2.13.	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2010-2016	54
Tabel 2.14.	IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2012-2016	56
Tabel 2.15.	Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015.....	57
Tabel 2.16.	Jumlah Guru Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015 ..	58
Tabel 2.17.	Jumlah Murid Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015 .	58
Tabel 2.18.	Angka Partisipasi Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016	61

Tabel 2.19.	Angka Partisipasi Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2016	62
Tabel 2.20.	Perkembangan HIV/AIDS Di Indonesia dan 10 Provinsi Yang Terbanyak Melaporkan HIV/AIDS Sampai Dengan Tahun 2014.....	66
Tabel 2.21.	Kunjungan Neonatus Dan Pelayanan Kesehatan Bayi Di Provinsi Papua Dan Perbandingannya Dengan Indonesia Tahun 2010-2014	70
Tabel 2.22.	Perkembangan Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Di Provinsi Papua Tahun 2010-2014	72
Tabel 2.23.	Perkembangan Penduduk Menurut Agama Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015.....	73
Tabel 2.24.	Perkembangan Tempat Beribadah Dirinci Menurut Agama Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015.....	75
Tabel 2.25	Jumlah Penduduk Papua Menurut Kelompok Generasi Tahun 2016.....	80
Tabel 2.26	Pembangunan Olahraga Di Provinsi Papua Tahun 2013-2015	82
Tabel 2.27.	Peringkat Provinsi Papua Dalam Pekan Olah Raga Nasional Periode1973-2016	83
Tabel 2.28.	Perolehan Medali Kontingen Provinsi Papua Pada PON XIX Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016.....	84
Tabel 2.29.	Produksi Perikanan menurut Sub Sektor Perikanan Provinsi Papua 2011-2014	85
Tabel 2.30.	Gambaran Keadaan Pertanian di Provinsi Papua 2010-2014	86
Tabel 2.31.	Kawasan Hutan sesuai Fungsinya di Provinsi Papua	88
Tabel 2.32.	Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Papua 2009 – 2015.....	88
Tabel 2.33.	Gambaran Keadaan Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Papua 2014	89
Tabel 2.34.	Panjang Jalan Di Provinsi Papua Menurut Permukaan dan Kondisi Jalan Tahun 2014-2016.....	91

Tabel 2.35.	Panjang Jalan Dan Jembatan Trans Papua Tahun 2015	94
Tabel 2.36.	Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang	95
Tabel 2.37.	Kawasan Budidaya	99
Tabel 2.38.	Kawasan Lindung	101
Tabel 2.39.	Persentase peningkatan nilai Investasi PMA Provinsi Papua Tahun 2014-2016	104
Tabel 2.40.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Tahun 2015	107
Tabel 2.41.	Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Provinsi Papua Tahun 2011 - 2015	108
Tabel 2.42.	Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016.....	110
Tabel 2.43.	Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja	112
Tabel 2.44.	Rasio Pencapaian Kinerja Program Dan Penyerapan Anggaran Dirinci Menurut Urusan Pembangunan Tahun 2016.....	113
Tabel 2.45.	Rasio Pencapaian Kinerja Program Dan Penyerapan Anggaran Dirinci Menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016	115
Tabel 2.46.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2016	118
Tabel 2.47.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kesehatan Tahun Anggaran 2016	119
Tabel 2.48.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum.....	121
Tabel 2.49.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2016	122
Tabel 2.50.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2016	123

Tabel 2.51.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2016.....	124
Tabel 2.52.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan(Capaian s/d TW II)	125
Tabel 2.53.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	126
Tabel 2.54.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pangan tahun 2016	127
Tabel 2.55.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2016.....	128
Tabel 2.56.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan DUKCAPIL Tahun 2016.....	128
Tabel 2.57.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kampung Tahun 2016	129
Tabel 2.58.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan KB dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016	130
Tabel 2.59.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perhubungan(Capaian s/d TW II)	131
Tabel 2.60.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Komunikasi dan Informasi(Capaian s/d TW II)	132
Tabel 2.61.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Capaian s/d TW II)	133
Tabel 2.62.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Penanaman Modal (Capaian s/d TW II).....	134
Tabel 2.63.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga(Tahun 2016).....	135
Tabel 2.64.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Statistik Tahun 2016.....	136
Tabel 2.65.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Kebudayaan Tahun 2016	136
Tabel 2.66.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2016	137

Tabel 2.67.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perpustakaan (Capaian s/d TW II)	138
Tabel 2.68.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan Capaian s/d TW II.....	139
Tabel 2.69.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pariwisata Tahun 2016.....	141
Tabel 2.70.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pertanian Tahun 2016	142
Tabel 2.71.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kehutanan Tahun 2016	143
Tabel 2.72.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2016	144
Tabel 2.73.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2016.....	145
Tabel 2.74.	Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Industri Tahun 2016.....	146
Tabel 2.75.	Evaluasi Capaian Misi Pertama RPJMD Tahun 2015	147
Tabel 2.76.	Evaluasi Capaian Misi Kedua RPJMD Tahun 2015.	149
Tabel 2.77.	Evaluasi Capaian Misi Ketiga RPJMD Tahun 2015.	152
Tabel 2.78.	Evaluasi Capaian Misi Keempat RPJMD Tahun 2015	155
Tabel 2.79.	Evaluasi Capaian Misi Kelima RPJMD Tahun 2015.	158
Tabel 2.80.	Realisasi Pencapaian Sasaran Program Yang Terindikasi Di Bawah 75%.....	162
Tabel 2.81.	Permasalahan Dan Tindak Lanjut Dalam Pencapaian Sasaran Program Untuk Misi Mewujudkan Suasana Aman, Tenang dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam Kedaulatan NKRI	164
Tabel 2.82.	Permasalahan Dan Tindak Lanjut Dalam Pencapaian Sasaran Program Untuk Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus	165
Tabel 2.83.	Permasalahan Dan Tindak Lanjut Dalam Pencapaian Sasaran Program Untuk Misi Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia.....	167

Tabel 2.84.	Permasalahan Dan Tindak Lanjut Dalam Pencapaian Sasaran Program Untuk Misi Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal	169
Tabel 2.85.	Permasalahan Dan Tindak Lanjut Dalam Pencapaian Sasaran Program Untuk Misi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.....	171
Tabel 3.1.	Target Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2016-2018	198
Tabel 3.2.	Pertumbuhan Ekonomi Sektoral Di Provinsi Papua Periode 2012 - 2016	199
Tabel 3.3.	Struktur Ekonomi Provinsi Papua Menurut Sektoral Periode 2011-2016	200
Tabel 3.4.	Daya Saing Sektoral Berdasarkan Indeks LQ Rata-Rata 2011-2016	202
Tabel 3.5.	PDRB Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016	203
Tabel 3.6.	Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016.....	203
Tabel 3.7.	Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan Tahun 2013 - 2016	208
Tabel 3.8.	Target Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2018	226
Tabel 3.9.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2016	232
Tabel 3.10.	Kinerja Pencapaian Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2016	235
Tabel 3.11.	Target Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 - 2019	236
Tabel 3.12.	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2016	241
Tabel 3.13.	Daya Serap Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2013-2016	243

Tabel 3.14.	Target Dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 - 2019	245
Tabel 3.15.	Proyeksi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2018	246
Tabel 3.16.	Proyeksi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2018	246
Tabel 3.17.	Target Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua Tahun 2017 - 2018	250
Tabel 3.18.	Dana APBN Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Untuk Provinsi Papua Dirinci Menurut Kementerian Tahun 2013 - 2015.....	252
Tabel 3.19.	Dana Lembaga Mitra Pembangunan Di Provinsi Papua Tahun 2013 - 2016.....	255
Tabel 4.1.	Prioritas Dan Fokus Pembangunan Tahun 2018.....	305
Tabel 4.2.	Hubungan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan	307
Tabel 4.3.	Indikator Dan Target Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	313
Tabel 5.1.	Rencana Pembiayaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018.....	391
Tabel 5.2.	Rencana Pembiayaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018 Dirinci Menurut Urusan Dan Bidang	392
Tabel 5.3.	Rencana Pembiayaan Program-Program Prioritas Tahun 2018 Dirinci Menurut OPD.....	394
Tabel 5.4.	Rencana Pembiayaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas Tahun 2018 Dirinci Menurut Urusan Dan Program Prioritas.....	395
Tabel 5.5.	Rencana Pembiayaan Program-Program Prioritas Tahun 2018 Dirinci Menurut OPD.....	397
Tabel 5.6.	Rencana Pembiayaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas Tahun 2018 Dirinci Menurut Urusan dan Program Prioritas.....	403

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2018	6
Gambar 1.2.	Proses Penyusunan dan Keterkaitan RKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	9
Gambar 2.1.	Stratigrafi Regional Pulau Papua.....	18
Gambar 2.2.	Peta Angkutan Sungai.....	24
Gambar 2.3.	Peta Angkutan Danau	25
Gambar 2.4.	Peta Intensitas Curah Hujan.....	27
Gambar 2.5.	Persentase Penggunaan Lahan di Provinsi Papua ..	28
Gambar 2.6.	Peta Kawasan Hutan.....	29
Gambar 2.7.	Peta Kawasan Konservasi.....	30
Gambar 2.8.	Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2016	36
Gambar 2.9.	Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2011 – 2016.....	37
Gambar 2.10.	Proyeksi Bonus Demografi Di Provinsi Papua.....	39
Gambar 2.11.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Sex Di Provinsi Papua	40
Gambar 2.12.	Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2016.....	41
Gambar 2.13.	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2016	42
Gambar 2.14.	Struktur Tenaga Kerja Menurut Sektor Di Provinsi Papua Tahun 2010-2015.....	44
Gambar 2.15.	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2012– 2016	46
Gambar 2.16.	Pendapatan Perkapita Provinsi Papua Menurut Harga Konstan 2010 Dengan Tambang dan Tanpa Tambang Tahun 2012-2016.....	47
Gambar 2.17.	Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I – 2017.....	49

Gambar 2.18.	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2011-2016	50
Gambar 2.19.	Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 Dan Rata-rata Menurut Kawasan Di Provinsi Papua Tahun 2011-2015.....	51
Gambar 2.20.	Rasio Sekolah Dan Guru Terhadap Murid Menurut Jenjang Sekolah Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015	59
Gambar 2.21.	Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Tahun 2010-2016	60
Gambar 2.22.	Angka Kematian Ibu Dan Faktor-Faktor Penyebabnya Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016 .	64
Gambar 2.23.	Angka Kematian Bayi Di Provinsi Papua Tahun 2007 – 2014	65
Gambar 2.24.	Prevalensi HIV/AIDS Menurut Provinsi Di Indonesia Sampai Tahun 2014	67
Gambar 2.25.	Angka Harapan Hidup Di Provinsi Papua Tahun 2012 – 2016	68
Gambar 2.26.	Cakupan Persalinan Di Tolong Tenaga Kesehatan Di Provinsi Papua Dan Indonesia Tahun 2011-2014	69
Gambar 2.27.	Jumlah Puskesmas Dan Rasio Puskesmas Terhadap Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2012-2014	71
Gambar 2.28.	Rasio Dokter Dan Perawat Terhadap Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2010-2014.....	73
Gambar 2.29.	Kunjungan Wisatawan Dan Lama Tinggal Wisatawan Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2014	76
Gambar 2.30.	Jumlah Hotel Dan Tingkat Okupansi Hotel Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2014	77
Gambar 2.31.	Kualitas Pendidikan Perempuan Dan Laki-Laki Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2014	78
Gambar 2.32.	Indeks Pembangunan Gender Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2015	79

Gambar 2.33.	Jumlah Kasus KDRT Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015	79
Gambar 2.34.	Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Subsektor Provinsi Papua Tahun 2016	90
Gambar 2.35.	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016	93
Gambar 2.36.	Peta Akses Air Minum Layak dan Sanitasi Layak Di Provinsi Papua Tahun 2016	97
Gambar 2.37.	Rencana Pola Ruang Provinsi Papua	98
Gambar 2.38.	Peta Struktur Ruang	103
Gambar 2.39.	Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Tahun 2011-2015	109
Gambar 3.1.	Sumber-Sumber Pertumbuhan Di Provinsi Papua Rata-Rata Dari Tahun 2012-2016	200
Gambar 3.2.	Struktur PDRB Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016	204
Gambar 3.3.	Pertumbuhan Investasi, COR Dan ICOR Provinsi Papua Tahun 2012-2016	205
Gambar 3.4.	Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Papua Tahun 2011-2016	206
Gambar 3.5.	Perbandingan Neraca Perdagangan Luar Negeri Dan Antar Daerah Provinsi Papua Tahun 2011-2016	207
Gambar 3.6.	Produktifitas Dan Elastisitas Tenaga Kerja Di Provinsi Papua Tahun 2011-2016	210
Gambar 3.7.	Tingkat Inflasi Bulanan Kota Jayapura dan Indonesia Periode Januari 2014 - Desember 2016 ..	211
Gambar 3.8.	Tingkat Inflasi Tahunan Kota Jayapura dan Indonesia Tahun 2014 – 2016	211
Gambar 3.9.	Indeks Kemahalan Kontruksi Di Provinsi Papua Tahun 2012 – 2016	213
Gambar 3.10.	Highlight Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah Percepatan Pembangunan Papua	222
Gambar 3.11.	Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua Rata-Rata Selama Tahun 2013-2016	233

Gambar 3.12.	Struktur Belanja Daerah Provinsi Papua Rata-Rata Selama Tahun 2013-2016	242
Gambar 3.13.	Dana APBN Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Di Provinsi Papua Tahun 2013 – 2016	251
Gambar 4.1	Fokus Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2013-2018	292
Gambar 4.2.	Fokus Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Di Provinsi Papua Tahun 2018	376

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran Tabel 1. Rencana Program, Target Kerja dan Pagu
Indikatif Program Dirinci Menurut OPD
Pada Tahun 2018.....
- Lampiran Tabel 2. Alokasi Dan Sumber Dana Belanja Program
Dirinci Menurut SKPD Pada Tahun 2018

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat ditentukan oleh baik tidaknya manajemen pemerintahan, termasuk kualitas perencanaan sebagai salah satu fungsi di dalam manajemen. Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan, dimana salah satu indikator kualitas yang harus diwujudkan adalah konsistensi/keselarasan/integrasi.

Agar perencanaan pembangunan daerah konsisten, sejalan dan selaras dengan kebijakan perencanaan pembangunan nasional, maka perencanaan pembangunan daerah harus merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan perencanaan pembangunan daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Berdasarkan *time horizon*, perencanaan pembangunan daerah tersebut terbagi atas 3 bagian, sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk perencanaan dengan jangka waktu 25 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk 1 tahun.

RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah, yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Dokumen RKPD mengoperasionalkan Rencana Strategis lima tahunan menjadi Rencana Kerja tahunan dan merupakan aksi nyata bagaimana Visi dan Misi Kepala

Daerah dan indikator kinerja daerah dicapai dari tahun ke tahun. Secara umum, RKPD tersebut merupakan acuan bagi daerah dalam menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum APBD (KUA), serta penentuan Prioritas dan Pagu Anggaran. Lebih lanjut, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. RKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan penerjemahan dan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
2. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
3. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran sementara yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
4. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 kali ini adalah RKPD yang sangat strategis karena merupakan RKPD tahap kelima, masa dimana tahun berakhirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Periode 2013-2018, serta menjadi masa transisi untuk RPJMD periode berikutnya (2019-2024). Untuk itu penyusunan RKPD tahun ini menjadi *moment* yang sangat penting yang dapat mengakumulasi seluruh penilaian capaian kinerja pembangunan daerah

tahunan sebelumnya, dan sebagai tolok ukur dari keberhasilan RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu dengan memastikan tercapainya sasaran-sasaran utama dalam proses mewujudkan visi pembangunan “*Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera*”.

Berkenaan dengan hal di atas, maka pendekatan penyusunan RKPD 2018 dilakukan dengan penguatan pelaksanaan kebijakan *Money Follow Program*. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada beberapa hal yaitu :

1. Pengendalian perencanaan;
2. Penguatan konsistensi perencanaan dan penganggaran untuk RKP dan RKPD 2018;
3. Penguatan perencanaan berbasis kewilayahan;
4. Penguatan integrasi sumber pendanaan.

Dalam konteks di atas, maka RKPD 2018 harus didukung hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan Renstra SKPD Tahun 2014-2016 serta target 2017 sehingga alokasi anggaran 2018 diarahkan untuk menyelesaikan target RPJMD yang harus dituntaskan.

Secara umum ada beberapa masalah internal dan eksternal yang terindikasi akan mempengaruhi kinerja pencapaian RKPD 2018. Untuk permasalahan internal antara lain : (1) belum berjalannya secara optimal perencanaan penganggaran dengan paradigma *money follow program* sebagai perubahan dari paradigma *money follow function*, (2) perencanaan penganggaran belum sepenuhnya menggunakan konsep *planning by evidence* atau perencanaan berbasis bukti, sehingga isu-isu strategi yang disampaikan kurang berkualitas yaitu belum realistis dan relevan, (3) perencanaan penganggaran program/kegiatan masih mengedepankan pencapaian kinerja SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi (Tusi), sehingga kurang memperhatikan target pencapaian prioritas-prioritas pembangunan yang ditetapkan, (4) masih adanya pemahaman bagi rata dalam perencanaan penganggaran diantara berbagai tugas dan fungsi SKPD, (5) kurangnya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan

SKPD dalam merumuskan dan menetapkan indikator kinerja program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan, (6) adanya inefisiensi akibat terjadinya duplikasi kegiatan untuk kapasitas dan tanggung jawab SKPD yang berbeda, dan (7) tindak lanjut dari hasil evaluasi RPKD sebelumnya belum diakomodir sepenuhnya dalam penyusunan perencanaan penganggaran untuk RKPD berikutnya.

Sementara faktor-faktor eksternal berupa tantangan yang sangat krusial dan perlu segera diatasi agar target pencapaian kinerja pembangunan daerah di tahun 2018 dapat diwujudkan antara lain : (1) pada aspek sosial seperti rendahnya derajat kesehatan dan upaya kesehatan masyarakat, rata-rata lama sekolah yang belum dapat memenuhi target wajib belajar sembilan tahun, masih tingginya tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap perempuan dan anak, dinamika kemajuan IT (Informasi dan Teknologi) yang sangat pesat yang dapat merusak akhlak dan moral anak bangsa, (2) pada aspek ekonomi misalkan pondasi perekonomian yang masih bertumpu pada satu sektor (pertambangan nonmigas) oleh karena belum optimalnya keberpihakan terhadap pengembangan dan pembangunan sektor pertanian, disparitas perekonomian wilayah yang masih tinggi, daya saing perekonomian wilayah yang rendah, upaya mengubah orientasi ekonomi dari *subsistence* menjadi lebih produktif melalui konsep *tanam, petik, olah dan jual* belum terlaksanadengan baik, arus globalisasi ekonomi yang sulit dibendung.

Guna mengatasi berbagai masalah di atas, salah satu upaya yang dilakukan untuk mewujudkan pencapaian target RKPD 2018 secara maksimal adalah melalui penerapan perencanaan dan penganggaran yang berbasis IT (Informasi dan Teknologi) pertama kalinya dengan menggunakan aplikasi online *e-government* yang terdiri atas *e-planning, e-budgeting* dan *e-musrenbang*. Dengan aplikasi *e-government* tersebut, diharapkan RKPD yang dihasilkan lebih berkualitas sebagai dokumen yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan provinsi di tahun 2018. Berkualitas dalam hal ini berarti dapat memberikan acuan yang efektif bagi pembangunan serta memenuhi kriteria sebagaimana

ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Karakter RKPD yang berkualitas dimaknai dengan RKPD yang memenuhi kriteria antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya.
2. Program prioritas dalam RKPD harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus konsisten dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan prioritas dalam RKPD harus dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*) untuk program dan indikator kinerja keluaran (*output*) untuk kegiatan, yang bersifat realistis dan terukur.
5. Program dan kegiatan dalam RKPD harus dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Untuk menghasilkan dokumen RKPD yang berkualitas, maka proses penyusunan RKPD 2018 dilaksanakan dalam beberapa tahap, yang dapat dijabarkan dengan singkat sebagai berikut (perhatikan Gambar 1.1).

a. Persiapan Penyusunan RKPD

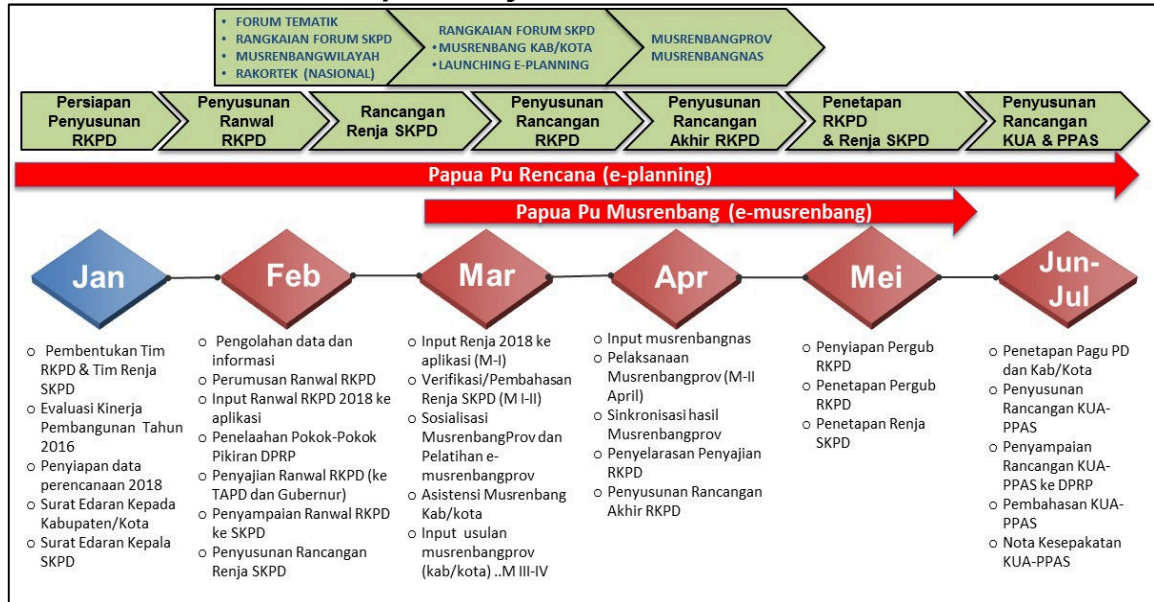
- Pembentukan Tim RKPD & Tim Renja SKPD
- Evaluasi Kinerja Pembangunan Tahun 2016
- Penyiapan data perencanaan 2018
- Surat Edaran Kepada Kabupaten/Kota
- Surat Edaran Kepala SKPD

b. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal) RKPD

- Pengolahan data dan informasi
- Perumusan Ranwal RKPD
- Input Ranwal RKPD 2018 ke aplikasi
- Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRP
- Penyajian Ranwal RKPD (ke TAPD dan Gubernur)

- Penyampaian Ranwal RKPD ke SKPD
- Penyusunan Rancangan Renja SKPD

Gambar 1.1.
Jadwal Dan Tahapan Penyusunan RKPD Dan KUA-PPAS 2018



c. Penyusunan Rancangan Renja SKPD dan RKPD

- Input Renja 2018 ke aplikasi
- Verifikasi/Pembahasan Renja SKPD
- Sosialisasi MusrenbangProv dan Pelatihan *e-musrenbangprov*
- Asistensi Musrenbang Kabupaten/kota
- Input usulan Musrenbangprov (kabupaten/kota)
- Input Musrenbangnas
- Pelaksanaan Musrenbangprov
- Sinkronisasi hasil Musrenbangprov
- Penyelarasan Penyajian RKPD
- Penyusunan Rancangan Akhir RKPD

d. Penetapan RKPD dan Renja SKPD

- Penyiapan Pergub RKPD
- Penetapan Pergub RKPD
- Penetapan Renja SKPD

Terkait dengan berbagai isu strategis (internal dan eksternal) yang diungkapkan di atas, serta berpedoman pada Rancangan Tema dan Prioritas Nasional Tahun 2018 yaitu *“Memacu Investasi Dan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”*, maka tema pembangunan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 ini adalah : *“Perluasan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Pemanfaatan Kemandirian Daerah Yang Berdaya Saing, Merata Dan Berkelanjutan”*, yang memuat 8 (delapan) prioritas pembangunan sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar;
2. Peningkatan kualitas SDM;
3. Pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas unggulan dan pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan investasi;
4. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah;
5. Pengembangan kawasan khusus berbasis perkampungan;
6. Percepatan kesiapan pelaksanaan PON XX;
7. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
8. Pengendalian Pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana.

1.2. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018. Dalam penyusunannya juga berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan lainnya, seperti rencana tata ruang, rencana pembangunan jangka panjang provinsi serta memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional. Di samping itu, RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 ini disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, faktor-faktor keberhasilan, evaluasi kinerja pembangunan 2 (dua) tahun sebelumnya serta isu-isu strategis yang berkembang.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun dari proses penjabaran atas visi, misi dan program Kepala Daerah. RPJMD berperan sebagai acuan dasar dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang pada intinya memuat mengenai arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Sebagai suatu produk perencanaan, RPJMD tetap tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya. RPJMD ini terintegrasi dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen perencanaan lainnya baik di tingkat nasional maupun daerah, terutama dengan dokumen perencanaan dan penganggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Adapun dokumen perencanaan dan penganggaran tersebut meliputi (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (2) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD), (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Semua dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud di atas, dari sisi waktu mencakup 3 kerangka waktu, yaitu rencana jangka panjang (20 tahun), rencana jangka menengah (5 tahun) dan rencana jangka pendek (1 tahun). Secara substansi, keberadaan RPJMD ini dengan dokumen perencanaan tersebut membentuk keterkaitan yang bersifat hierarkis, yaitu dokumen dengan jangka waktu yang lebih panjang menjadi rujukan bagi dokumen dengan jangka waktu yang lebih pendek. Secara diagramatis keterkaitan hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.2.

tertuang dalam RKPD tahun 2018, menjadi acuan dalam penyusunan KUA-PPAS APBD Provinsi Papua tahun 2018 dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD tahun 2018.

Memperhatikan hubungan keterkaitan sebagaimana dijelaskan di atas, maka penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota di Provinsi Papua sehingga terjadi sinergisitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

1.3. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri No.54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka sistematika penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2018 meliputi :

BAB I Pendahuluan, yang memuat : Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Sistematika Dokumen RKPD serta Maksud dan tujuan;

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan, yang berisikan tentang : Gambaran Umum Kondisi Daerah, Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, Evaluasi Pengelolaan Dana Otsus, dan Permasalahan Pembangunan Daerah;

- BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah Beserta Kerangka Pendanaan**, yang terdiri atas dua sub bab yaitu : Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
- BAB IV Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah**; yang memuat: Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2018;
- BAB V Rencana Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah**, yang merupakan penjabaran dari rencana dan pagu indikatif untuk pelaksanaan program dan kegiatan;
- BAB VI Penutup**. merupakan bab terakhir, yang pada dasarnya memuat tentang rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD 2018 yang menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* baik yang langsung menjadi pelaksana program kegiatan maupun pihak lain yang ikut berperan dalam pembangunan daerah Provinsi Papua.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud : (1). Menentukan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018, (2). Mewujudkan sinergi rancangan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2018.

Sedangkan tujuannya sebagai berikut: (1). Sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahun 2018, (2). Menjadi landasan bagi tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) dalam menyusun kebijakan umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS), sebagai dasar penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018, (3). Menjadi acuan penyusunan RKPD

tahun 2018 bagi kabupaten/kota di Provinsi Papua, (4). Menjadi alat untuk menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pembangunan.

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2016

2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi dilakukan dalam rangka memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi merupakan gambaran kondisi yang mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

(a). Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Luas Provinsi Papua 31.587.680 ha. Secara administratif Provinsi Papua berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Samudra Pasifik
- Sebelah Selatan : Laut Arafuru
- Sebelah Barat : Papua Barat
- Sebelah Timur : Papua New Guinea

Wilayah administrasi Provinsi Papua terdiri dari 28 kabupaten dan 1 kota yang masing-masing terbagi menjadi 470 distrik dan 4.378 kampung. Adapun rincian pembagian wilayah seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.1.
**Nama Kabupaten, Ibu Kota, Jumlah Distrik dan Kampung
Di Provinsi Papua**

Wilayah Pembangunan	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Jumlah Distrik	Jumlah Kampung	Keterangan
Haanim	Merauke	Merauke	20	168	Dataran Mudah Akses
	Asmat	Agats	19	211	Dataran Sulit Akses
	Boven Digoel	Tanah Merah	20	112	
	Mappi	Keppi	15	162	
Laapago	Jayawijaya	Wamena	37	312	Pegunungan Tengah
	Lanny Jaya	Tiom	10	143	

Wilayah Pembangunan	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	JumlahDistrik	JumlahKampung	Keterangan
	Mamberamo Tengah	Kobakma	5	59	
	Nduga	Kenyam	8	32	
	Pegunungan Bintang	Oksibil	34	277	
	Puncak	Ilaga	8	80	
	Puncak Jaya	Mulia	26	302	
	Tolikara	Karubaga	48	549	
	Yahukimo	Dekai	51	518	
	Yalimo	Elelim	5	27	
Meepago	Nabire	Nabira	15	85	Dataran Mudah Akses
	Mimika	Timika	12	86	Dataran Sulit Akses
	Deiyai	Waghete	5	67	Pegunungan Tengah
	Dogiyai	Kigamani	10	79	
	Intan Jaya	Sugapa	6	78	
	Paniai	Enarotali	10	70	
Saireri	Biak Numfor	Biak	19	265	Dataran Mudah Akses
	Kepulauan Yapen	Serui	14	145	
	Supiori	Sorendiwari	5	38	
	Waropen	Waren	10	108	Dataran Sulit Akses
Mamta	Jayapura	Sentani	19	144	Dataran Mudah Akses
	Keerom	Arso	7	61	
	Sarmi	Sarmi	18	102	
	Kota Jayapura	Jayapura	5	39	
	Mamberamo Raya	Burmeso	9	59	Dataran Sulit Akses
	29 Kab/Kota		254	2534	

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Papua, 2015 (diolah)

(b). Letak dan Kondisi Geografi

Posisi astronomis Provinsi Papua terletak antara garis koordinat 01⁰⁰' LU - 09¹⁰' LS dan 134⁰⁰' BT - 141⁰⁵' BT. Sedangkan secara geografis Wilayah Provinsi Papua dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) dataran yaitu Dataran Mudah Akses, Dataran Sulit Akses dan Dataran Pegunungan. Wilayah Provinsi Papua juga merupakan kawasan strategis nasional karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea dan Australia yang berpotensi sebagai jalur pengembangan perekonomian Asia Pasifik.

Selain berupa daratan, Provinsi Papua juga merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan lautan yaitu Laut Arafuru dan Samudera Pasifik. Keadaan ini membuat Papua sangat kaya akan potensi di bidang perikanan laut tangkap. Adapun luas wilayah laut sebesar 12.151,61 Km² dan panjang garis pantai sebesar 5.878,11 Km dan. Rincian luas wilayah laut dan panjang garis pantai di Provinsi Papua adalah pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Luas Wilayah Laut dan Panjang Garis Pantai Di Provinsi Papua

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Luas Wilayah Laut	Satuan	Panjang Garis Pantai
1	Merauke	km ²	3.179,51	km	1.497,01
2	Jayapura	km ²	1,35	km	148,33
3	Nabire	km ²	234,97	km	641,16
4	Kepulauan Yapen	km ²	40,03	km	897,72
5	Biak Numfor	km ²	47,85	km	537,17
6	Mimika	km ²	2.832,30	km	464,80
7	Mappi	km ²	582,14	km	151,47
8	Asmat	km ²	2.845,91	km	275,97
9	Sarmi	km ²	31,85	km	302,20
10	Waropen	km ²	666,69	km	222,58
11	Supiori	km ²	35,83	km	340,80
12	Mamberamo Raya	km ²	1.650,37	km	291,45
Provinsi Papua		km²	12.151,61	km	5.878,11

Sumber: BPS, Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2008, Bakorsutanal, dan hasil pengukuran GIS Tahun 2009, Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013-2033

(c).Topografi

Kelerengan yang mendominasi wilayah provinsi papua adalah lereng landai (0 – 8)% menempati 45,9% dan lereng sangat terjal (>40%) menempati 43,3%, yang tersebar pada wilayah Haanim, Meepago, Mamta

dan Laapago. Kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.3.
Kelerengan Provinsi Papua

Lereng %	Kategori	Luas		Kabupaten
		Km ²	%	
0-8	Landai	14.518.478,84	45,9	Merauke, Asmat, Mappi, Mamberamo Raya, Mimika
8-15	Agak Curam	3.015.352,51	9,5	Boven Digoel, Merauke, Mappi, Mamberamo Raya, Sarmi
15-40	Terjal	406.596,40	1,3	Sarmi, Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Nabire
40>	Sangat Terjal	13.708.119,14	43,3	Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Yahukimo, Puncak Jaya, Nabire

Sumber: Hasil analisis GIS RTRW Prov. Papua, 2010

Topografi dipengaruhi oleh faktor morfologi, ketinggian, dan kelerengan. Sebagian besar morfologi wilayah Provinsi Papua berupa daratan (43,4%) dan Daratan terdapat dibagian pesisir selatan, merupakan bagian yang luas, dan pesisir utara yang tersebar pada wilayah Haanim, Mamta, Saireri, Meepago dan Laapago. Gambaran kondisi selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Ketinggian Tempat Provinsi Papua

Ketinggian (m dpl)	Kategori	Luas		Kabupaten
		Km ²	%	
< 100	Sangat rendah	16.897.806,02	53,3	Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel, Mamberamo Raya, sarmi, Biak numfor, Kepulauan yapen
100 - 300	Rendah	4.346.846,28	13,7	Mamberamo Raya, Jayapura, Sarmi, Keerom, Pegunungan Bintang, Mimika, Nabire, Waropen
300 - 500	Menengah	2.519.273,54	7,9	Sarmi, Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Nabire, Waropen

Ketinggian (m dpa)	Kategori	Luas		Kabupaten
		Km ²	%	
500- 1000	Tinggi	2.420.926,93	7,6	Pegunungan Bintang, Mamberamo Raya, Yahukimo, Tolikara, Nabire, Jayapura
1000 - 3000	Sangat Tinggi	4.487.757,08	14,2	Yahukimo, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, Intan jaya, Mimika, paniai, Puncak
3000>	Ekstrim	1.029.618,93	3,2	Lanny Jaya, Yahukimo, Puncak, Puncak Jaya, Paniai, Pegunungan Bintang

Sumber: Hasil analisis GIS RTRW Prov. Papua, 2009

(d). Geologi

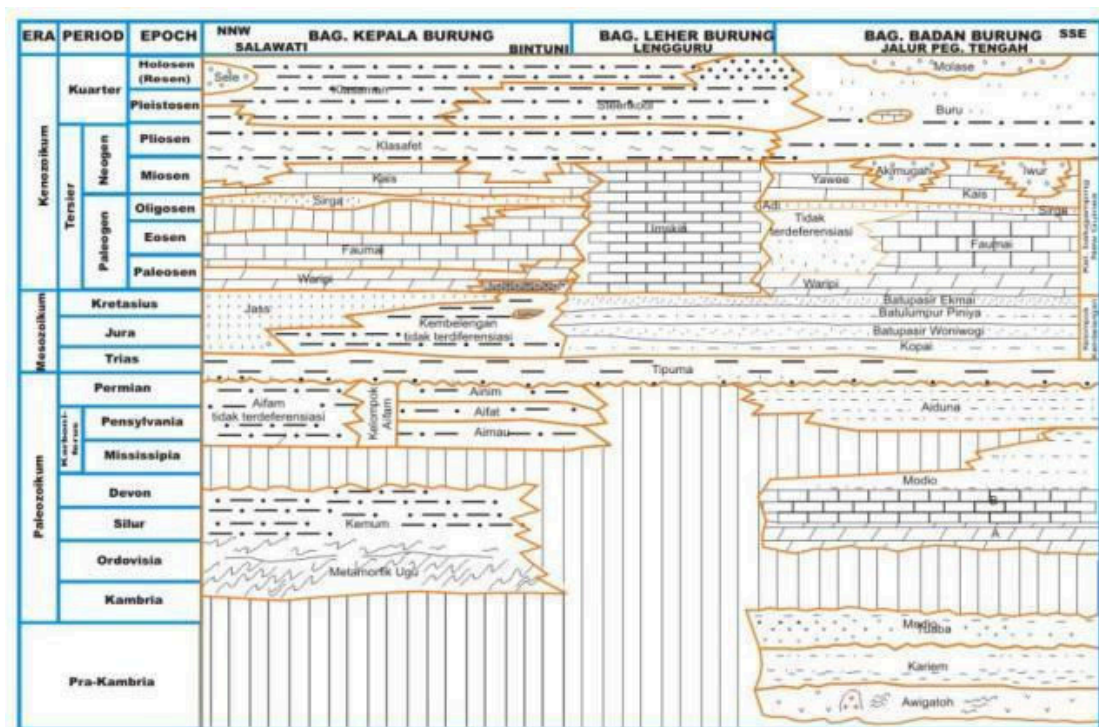
Dalam rencana spasial dan rencana pembangunan, komponen geologi merupakan komponen lingkungan fisik yang dapat bersifat sebagai faktor pendukung (potensi) pengembangan wilayah, berupa sumber daya geologi yang terkandung di dalam tanah, serta berbagai faktor penghambat (kendala) pengembangan wilayah, berupa kebencanaan.

Struktur dan karakteristik geologi Papua, terkondisi dalam 3 bagian, yaitu : **Kondisi Tektonik Regional**, berdasarkan bentuk pula yang menyerupai burung, maka Papua memiliki kondisi geologi yang unik. Hal ini terjadi akibat interaksi dua (2) lempeng, yaitu lempeng benua Australia dan lempeng samudera pasifik. **Kondisi Litotektonik**, kondisi pada bagian badan burung (wilayah Provinsi Papua) dapat dibedakan menjadi empat (4) litotektonik, yaitu : (1). New Guinea Foreland/Foreland Basin (Arafuru Platform) terdiri dari laut arafuru dan daratan pantai selatan Papua (Ha Anim) yang tersusun oleh sebagian besar batuan laut dan batuan sedimen, (2). Central Range Fold and Thrust Belt terdiri dari bentuk luar (morfologi) lipatan dan patahan pegunungan tengah (Lapago dan Meepago) yang tersusun oleh batuan dari evolusi makhluk hidup yang berlangsung jutaan tahun, (3). Metamorphic (Ruffaer Matemorphic belt) dan Ophiolite Belt terdiri dari batuan sebagai akibat dari perubahan struktur

batuan oleh pengaruh luar, seperti panas, dingin, basah, kering (Metamorfik) dengan suhu rendah (<300°C) yang terbatas dijumpai pada bagian sebelah utara (Mamta) dan disebelah selatan telah terdeformasi (Ha Anim), (4). Kompleks Busur Kepulauan Melanesia terdiri dari batuan oceanik yang berasal dari benturan (kolisi) busur kepulauan Melanesia dengan lempeng pasifik yang memiliki cekungan (dataran danau) sabuk patahan-lipatan Mamberamo yang dijumpai pada sebelah utara Papua (Mamta). **Kondisi Stratigrafi Regional**, merupakan tatanan urutan batuan di wilayah Papua yang secara umum didasarkan pada pembagian mandala geologi, yaitu benua, samudera dan transisi.

Sesuai dengan stratigrafi, maka struktur dan karakteristik geologi Papua dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Stratigrafi Regional Pulau Papua



Sumber : Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013-2033

Pulau Papua terbentuk sejak jutaan tahun sebagai hasil benturan lempeng benua Australia dengan lempeng pasifik. Akibat benturan antara lempeng menimbulkan potensi yang menguntungkan dan merugikan, antara lain potensi menguntungkan seperti terjadinya

penerobosan batuan beku dengan komposisi sedang kedalam batuan sedimen di atasnya, sehingga memungkinkan terbentuknya mineralisasi logam yang beraosiasi dengan perak dan emas. Konsentrasi mineral-mineral logam diperkirakan terdapat pada lajur pegunungan tengah Papua (Laapago dan Meepago).

Posisi tektonik Papua berada di lingkaran pasifik, yang berupa cincin gunung api memberikan potensi endapan mineral yang besar, sehingga menguntungkan bagi Provinsi Papua dan kemungkinan terdapat endapan logam selain Grasberg dan ertsberg yang telah ditemukan. Akibat tektonik lain juga memungkinkan terbentuk cekungan dengan sedimen-sedimen yang cukup tebal dalam kondisi lingkungan laut, yang cukup banyak kehidupan mikro organik yang terakumulasi menjadi cadangan hidrokarbon. Ada pun potensi mineral dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5.
Potensi Mineral Logam dan Non Logam di Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Lokasi	Bahan Galian Mineral	Keterangan
1	Kota Jayapura	S. Numbai, Kodam	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
		S. Yapis, Kel. Imbi	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
		S. APO	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
		S. Entrop	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
		S. Perumnas IV	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
		S. Borgonjie	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
		S. Kujabu, Waena	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
2	Kab. Jayapura	Sentani	Kobal	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
			Tungsten	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
			Nikel	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
			Asbes	Belum Diteliti Secara Detail (Indikasi)
		S. Kemiri	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
		Senatani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
		S. Deyau, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
		S. Sawe, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Indikasi)
		S. Ayapo, Sentani	Emas	Peninjauan Kanwil DPE (Positif)
		S. Tami	Krom	Kadar 3.45-42.52%
				(Data Kanwil DPE)
	Tg-Tanahmerah	Talk	Sebagai Lapisan Atau Lensa	

No	Kabupaten/Kota	Lokasi	Bahan Galian Mineral	Keterangan
				Dengan Tebal 1 Meter,
				Dijumpai Pada Batas Serpentininit Dan Sekis Kristalin
		Waris	Emas	Data Kanwil DPE
			Tembaga	Cul284 Ppm
			Timah Hitam	Pb 3312 Ppm
		Web	Emas	Anomali Geokimia
			Perak	
		Arso	Krom	Indikasi
			Batubara	Indikasi
		Depapre	Marmar	Data Kanwil DPE
		Bonggo	Batubara	Indikasi
		Genyem,	Batubara	Kadar 4470 Kal/Gram, Belerang 5.6%,
		Nimboran		Abu 12.5%, Kelembaban 18.2%
p*				Karbon Tertambat 27.3%, Zat Terbang 42.1%
		Siduarsi	Nikel Laterit	Indikasi
		S. Pis Dan S. Pas	Emas	Indikasi
		Senggi	Tembaga	Anomali 669 Ppm
			Timah Hitam	Anomali 2482 Ppm
3	Jayawijaya	Kurulu	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 387 Juta Metrik Ton, Kadar Sio 292.2-99.6%
			Batu Gamping	Kadar Cao 39.05-50.75% Dan Mgo 0.35-3.76%
		Assolokobal	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 21.594.200 Ton
			Batu Gamping	Cadangan 3.391.300 Ton
		Asologaima	Batubara	Data Kanwil DPE (Indikasi)
		Borme Utara	Emas	Anomali Geokimika (Indikasi)
		Okbibab	Tungsten	Indikasi
		Soba	Pb-Zn	Indikasi
			(Timbal-Seng)	Indikasi
		Holuwon	Pb-Zn	Indikasi
			(Timbal-Seng)	Indikasi
		Bokondini	Tembaga	Indikasi
			Emas	Indikasi
		Tiom	Emas, Batugaram	Indikasi
		Mbua	Batubara	Indikasi
		Nalca	Emas	Anomali Geokimia (Indikasi)
		Dabera	Emas	Data PT Freeport Ind
			Tembaga	Indikasi
		Aboyi	Emas	Indikasi
			Molibdenum	Indikasi
4	Nabire	Yaur (Kwatisore)	Pasir Kuarsa	Sumberdaya 4.095 Juta Ton
			Granit	Sumberdaya 125 Juta Ton
			Marmar	Penyebaran 16.25 Km ²

No	Kabupaten/Kota	Lokasi	Bahan Galian Mineral	Keterangan
				Sumberdaya 163 Juta Ton
				Berwarna Abu-Abu Kehitaman, Kuat Tekan 942-100 Kg/Cm ²
				Penyerapan Air 0.09-10, Berat Jenis 2.76-2.78
		Logari	Emas	Anomali Geokimia, Data PT IEMC
		S. Sanoba, Nabire	Emas	Data Kanwil DPE (Positif)
		S. Nabaruwa, Nabire	Emas	Data Kanwil DPE (Positif)
		Nabaruwa, Nabire	Marmar	Sumberdaya 150 Juta Ton
		Uwapa	Seng	Indikasi
			Kaolin	Sumberdaya 12 Juta Ton
		S. Bumi, Topo	Emas	Data Kanwil DPE
		S. Cemara, Topo	Emas	Data Kanwil DPE
		Haiura	Emas	Anomali Geokimia
			Tembaga	Data PT IEMC
		Wapoga	Emas	Anomali Geokimia
				Data PT IEMC
5	Biak Numfor	Supiori	Emas	Data Kanwil DPE
			Batupapur	Indikasi
		Korido	Kalsit	Berupa Bongkah Berukuran 15- 20 Cm
		Biak	Phosphat	Indikasi
			Pasir Besi	Indikasi
6	Kepulauan Yapen,	Waropen Bawah	Emas	Data Kanwil DPE
	Waropen	Waropen Atas	Batubara	Indikasi
		Yapen	Pasir Besi	Indikasi
		P. Num	Nikel	Indikasi
7	Merauke	Jair	Emas	Indikasi
			Perak	Indikasi
		Mediptana	Tembaga	Kadar Cu 50.90 Ppm
			Timah Hitam	Kadar Pb 55.80 Ppm
			Seng	Kadar Zn 7.87 Ppm
		Kuoh	Emas	Indikasi
8	Puncak Jaya	Obaa	Emas	Indikasi
			Perak	Indikasi
		Ilu	Arsenit	Indikasi
			Tembaga	Nilai Anomali, Cu 1 6-60.6 Ppm, Pb 11.1-37.1 Ppm
		Ilaga	Arsenit	Anomali Geokimia
			Tembaga	Data PT Freeport Ind
			Emas	PT NBM
			Perak	
9	Paniai	Enarotali	Pasir Kuarsa	
		Bilogai (Wabu)	Emas	Cadangan Terindikasi
			Garnet	Data PT Freeport Ind

No	Kabupaten/Kota	Lokasi	Bahan Galian Mineral	Keterangan
		Mapia	Emas	Cadangan Terindikasi
			Tembaga	PT NBM
		Kemabu	Tembaga	Anomali Geokimia
			Emas	Data PT Freeport Ind
		Uwagimamo	Emas	Anomali Geokimia
			Tembaga	Data PT Freeport Ind
			Bismuth	
		Mandoga	Tembaga	Anomali Geokimia
			Emas	Data PT Freeport Ind
		Komopa	Tembaga	Cadangan Terindikasi
			Emas	PT NBM
10	Mimika	Tembagapura	Tembaga	Telah Diusahakan PT FI
			Perak	Kadar Cu 1.59%,Au 1.78 Ppm
			Emas	

Sumber : Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013-2033

(e).Hidrologi

Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat dalam segala bidang kehidupan, maka pengelolaan sumber daya air disusun berdasarkan wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah. Pengelolaan air permukaan didasarkan pada wilayah sungai, sedangkan pengelolaan air tanah didasarkan pada cekungan air tanah.

Pada pengelolaan air permukaan seperti, (1). wilayah sungai lintas negara (Provinsi Papua-Indonesia – PNG), sungai Mamberamo – Tami – Apauvar, sungai Einlanden – Digoel – Bikuma, (2). wilayah sungai lintas provinsi (Provinsi Papua – Provinsi Papua Barat) sungai Omba, (3). wilayah sungai lintas kabupaten/kota, sungai Wapoga – Mimika. Sedangkan pengelolaan air tanah atau lapisan air dibawah tanah (hidrogeologis) seperti, (1). Cekungan air tanah lintas negara (Provinsi Papua – Indonesia – PNG) yang terdiri dari CAT Jayapura, pada Kabupaten Jayapura dan Keerom, CAT Timika – Merauke pada Kabupaten Mimika, Asmat, Mappi, Merauke, Boven Digoel, Yahukimo, Pegunungan Bintang, (2). Cekungan air tanah lintas provinsi (Provinsi Papua – Provinsi Papua Barat) yang terdiri dari CAT Kaimana pada Kabupaten Nabire, CAT Agamanan pada Kabupaten Mimika dan Nabire,

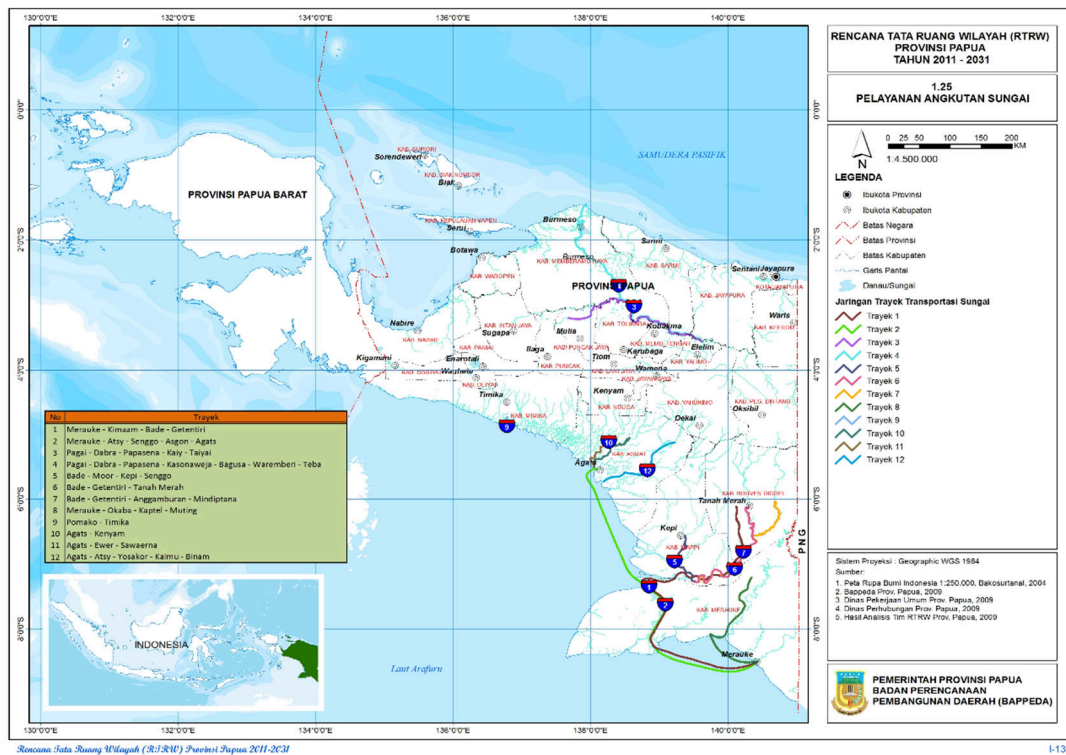
(3). Cekungan air tanah lintas Kabupaten/Kota yang terdiri dari CAT Warem Demta pada Kabupaten Nabire, Waropen, Sarmi dan Kabupaten Jayapura, CAT Taritatu pada Kabupaten Waropen, Sarmi, Kabupaten Jayapura, Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, Keerom, Pegunungan Bintang, CAT Enarotali pada Kabupaten Paniai, Puncak Jaya, Nabire, Mimika, Jayawijaya dan Yahukimo, CAT Wamena pada Kabupaten Jayawijaya dan Yahukimo, CAT Lereh Leweh pada Kabupaten Keerom dan Kabupaten Jayapura, CAT Ubrub pada Kabupaten Keerom dan Pegunungan Bintang, CAT Mandal pada Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yahukimo, CAT Nalco Bime pada Kabupaten Pegunungan Bintang dan Yahukimo, (4). Cekungan air tanah dalam satu Kabupaten/Kota terdiri dari CAT Numfor, CAT Warsa pada Kabupaten Biak Numfor, CAT Urema, CAT Nabire, CAT Legare, Cat Ulawa pada Kabupaten Nabire, CAT Pom, CAT Ansus, CAT Serui, CAT Timur Semberbada pada Kabupaten Kepulauan Yapen, CAT Parekebo pada Kabupaten Mimika, CAT Hulu sungai Sengi, CAT timur Arso pada Kabupaten Keerom.

Daerah aliran sungai pada wilayah-wilayah pembangunan Papua, terbagi pada wilayah Mamta terdiri dari : Das Mamberamo, Gesa, Bigabu, Sobger, Tariku, Nawa, Taritatu, Van Dalen, Tami, Sermo, Grimer, Sentani, pada Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Mamberamo Raya. Wilayah Haanim terdiri dari : Das Einlanden, Digoel, Maro, Kumber, Bulaka, Bian, Dolak, Cemara, pada Kabupaten Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat. Wilayah Saireri terdiri dari : Das Omba, Lengguru pada Kabupaten Dogiay dan Nabire. Wilayah Meepago dan Saireri terdiri dari : Das Wapoga, Aikumuga, Otakwa, Minarjerwi, Kamura, Mimika, Yawe, Parongga, Aidoma, Wanggar, Siriwo, Rombak, Nadubuai, Yapen, Biak, Supiori, Kemabu, pada Kabupaten Mimika, Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori, Nabire.

Sungai, pada wilayah-wilayah pembangunan Papua, yang merupakan jalur utama dan jalur alternatif untuk menghubungkan antar wilayah atau antar kabupate/kota dalam satu wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut : jalur sungai yang menghubungkan, (1). Merauke –

Kimaam – Bade – Getentiri, (2). Merauke – Atsy – senggo – Asgon – Agast, (3). Pagai – Dabra – Papasena – Kaiy – Taiyai, (4). Pagai – Dabra – Papasena – Kasonaweja – Bagusa – waremberi – Teba, (5). Bade – Moor – Kepi – Senggo, (6). Bade – Getentiri – Tanah Merah, (7). Bade – Getentiri – Anggamburan – Mindiptana, (8). Merauke – Okaba – Kaptel – Muting, (9). Pomako – Timika, (10). Agast – Kenyam, (11). Agast – Ewer – Sawaerna, (12). Agast – Asty – Yosakor – Kaimu – Binam. Adapun jalur sungai dapat dilihat pada Gambar 2.2.

Gambar 2.2.
Peta Angkutan Sungai

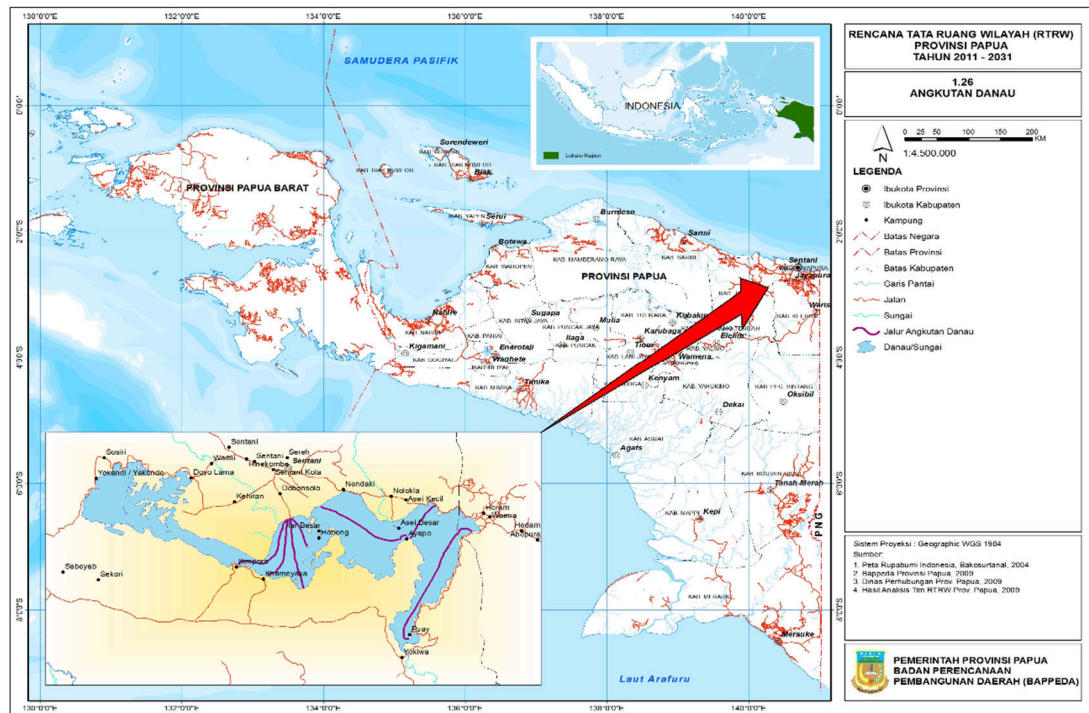


Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Danau, pada wilayah-wilayah pembangunan Papua, yang merupakan jalur utama dan jalur alternatif untuk menghubungkan antar wilayah atau antar kabupate/kota dalam satu wilayah dapat dijelaskan sebagai berikut, bahwa pada wilayah pembangunan papua terdapat danau sentani, pada wilayah lain juga terdapat beberapa kumpulan air dalam wadah terbatas yang dikategorikan sebagai telaga atau penyembutan lain yang sama. Artinya dari segi luar lebih kecil dari luasan

danau, namun juga memiliki fungsi penghubung dalam pembangunan. Adapun danau dapat dilihat pada peta sebagai berikut.

Gambar 2.3.
Peta Angkutan Danau



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Rawa, pada wilayah-wilayah pembangunan Papua, merupakan kawasan berfungsi sebagai kawasan lindung, dengan persebaran kawasan rawa pada wilayah Mamta (Mamberamo Raya, Jayapura, Keerom, Sarmi, Kota Jayapura), wilayah Saireri (Biak Numfor, Supiori, Waropen), wilayah Laapago (Puncak), wilayah Meepago (Intan Jaya, Mimika, Nabire), wilayah Haanim (Boven Digoel, Mappi, Merauke).

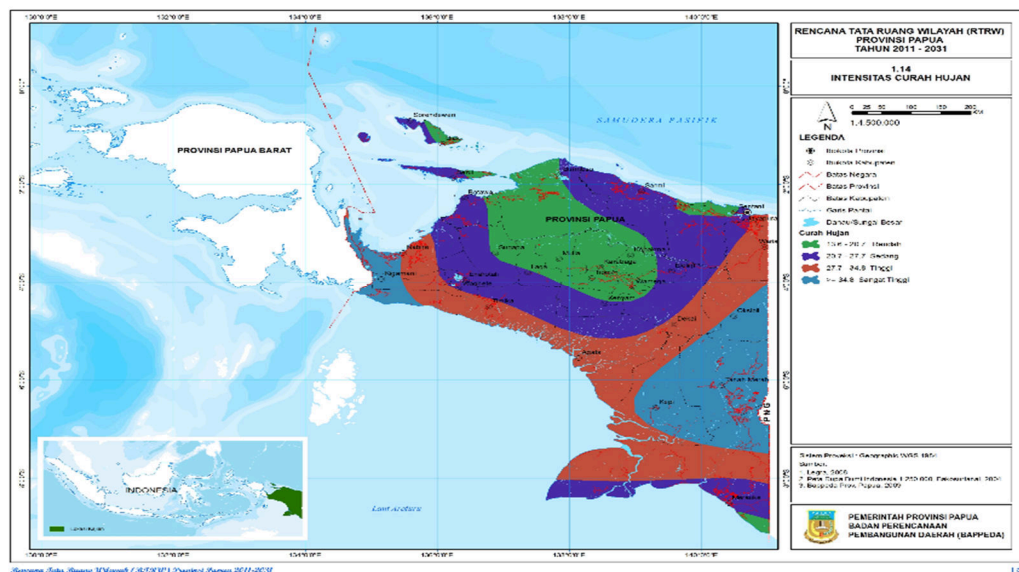
(f).Klimatologi

Keadaan iklim Papua termasuk iklim tropis. Papua terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa, namun dikarenakan daerahnya yang bergunung-gunung maka iklim di Papua sangat bervariasi melebihi daerah Indonesia lainnya. Di pesisir barat dan utara beriklim tropis basah. Pada saat musim panas di dataran Asia (bulan Maret dan Oktober) Australia mengalami musim dingin, sehingga terjadi tekanan udara dari daerah

yang tinggi (Australia) ke daerah yang rendah (Asia) melintasi pulau Papua sehingga terjadi musim kering terutama Papua bagian selatan (Merauke). Sedikitnya pada saat angin berhembus dari Asia ke Australia (bulan Oktober dan Maret) membawa uap air yang menyebabkan musim hujan, terutama Papua bagian utara, dibagian selatan tidak mendapat banyak hujan karena banyak tertampung di bagian utara.

Curah hujan di Provinsi Papua cukup tinggi. Data curah hujan dan hari hujan dari berbagai stasiun lima tahun terakhir menunjukkan angka merata di hampir seluruh wilayah di provinsi Papua. Terdapat kecenderungan jumlah curah hujan meningkat sejalan dengan peningkatan ketinggian tempat. Pola penyebaran curah hujan menunjukkan adanya variasi antar wilayah, dari curah hujan sedang (1750 mm), tinggi (2500-4000 mm), hingga sangat tinggi (>4000 mm), secara umum dapat dikatakan tinggi. Penyebaran curah hujan Penyebaran curah hujan sedang, hanya dijumpai di kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Keerom, Kabupaten paniai, kabupaten Puncak Jaya, kabupaten Sarmi, Kabupaten Supiori, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yahukimo. Sedangkan kabupaten-kabupaten lainnya memiliki curah hujan tinggi hingga sangat tinggi, seperti pada peta sebagai berikut :

Gambar 2.4.
Peta Intensitas Curah Hujan



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Suhu udara di Provinsi Papua, terklasifikasi dalam persebaran wilayah. Suhu udara pada daerah pengunungan dengan variasi ketinggian wilayah yang beragam memiliki suhu udara minimum 15°C dan daerah pesisir dan landai suhu maksimal mencapai 33°C.

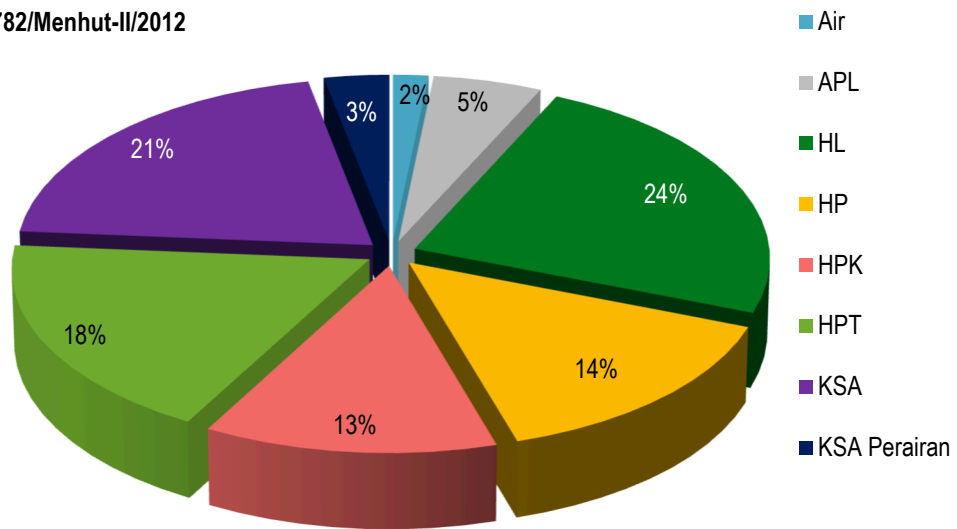
Kelembaban udara rata-rata yaitu 78-85% dan dalam periode tahun 2002-2004 durasi penyinaran matahari di Provinsi Papua berada pada level 35-68% dengan tekanan udara rata-rata 1.008 mbs.

(g).Penggunaan Lahan

Sesuai dengan lingkup penyusunan RTRW Provinsi Papua digunakan data penutupan lahan. secara garis besar penutupan lahan di Provinsi Papua didominasi hutan primer, baik hutan lahan kering, hutan magrove, maupun hutan rawa. Hutan primer merupakan jenis tutupan lahan paling dominan, keseluruhan mencapai 61,85% dari luas wilayah Papua, yang terdiri dari hutan lahan kering primer 45,71%, hutan magrove primer 2, 36% dan hutan rawa primer 13,78%. Selain hutan primer, terdapat hutan lahan kering sekunder, hutan magrove sekunder dan hutan rawa sekunder yang luas seluruhnya mencapai 17,78%, seperti pada gambar sebagai berikut :

Gambar 2.5.
Persentase Penggunaan Lahan di Provinsi Papua

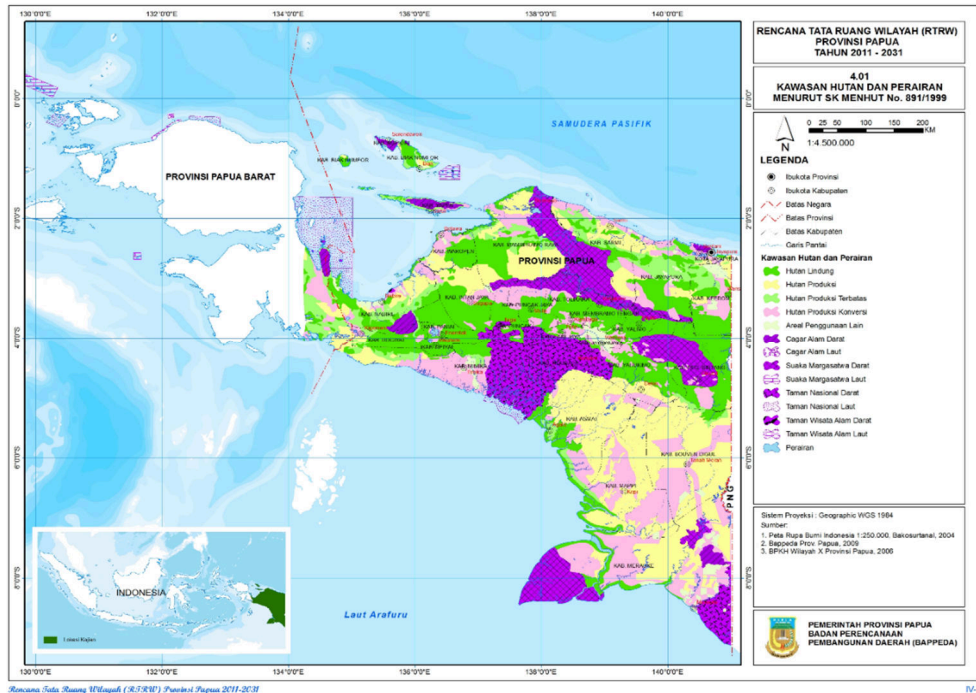
SK.782/Menhut-II/2012



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Kawasan budidaya pada dasarnya merupakan kawasan di luar kawasan lindung yang kondisi fisik dan potensi sumber daya alamnya dianggap dapat dan perlu dimanfaatkan baik bagi kepentingan produksi maupun pemenuhan kebutuhan ruang untuk permukiman. Keseluruhan kawasan budidaya mencapai 13.192.477,96 Ha atau 40,27% dari luas wilayah Papua, seperti pada Gambar 2.6.

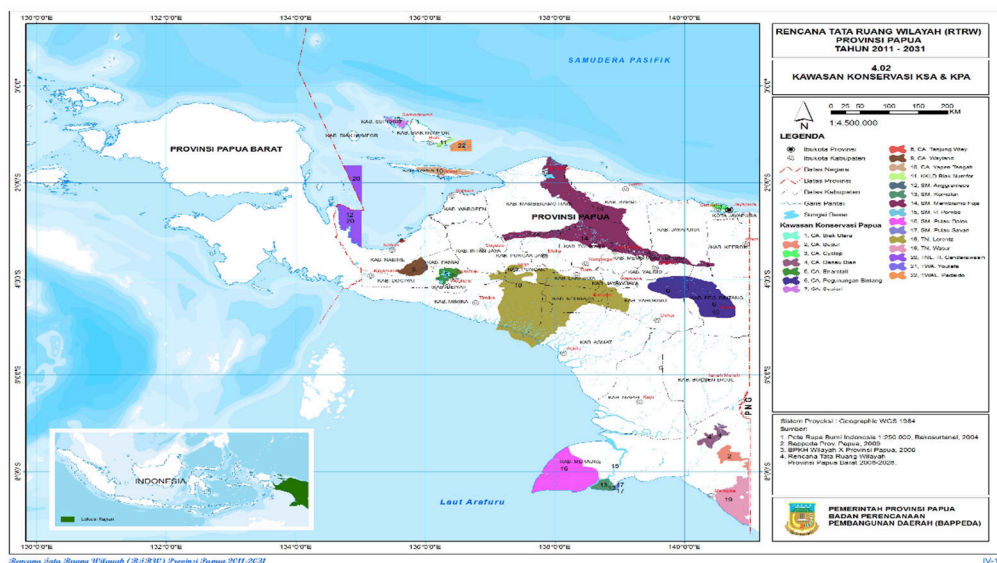
Gambar 2.6.
Peta Kawasan Hutan



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Kawasan lindung di Povinsi Papua terdiri dari hutan lindung, kawasan suaka alam, pelestarian alam, cagar budaya, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana alam, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung lainnya seperti pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7.
Peta Kawasan Konservasi



Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

Hutan lindung di Provinsi Papua ditentukan seluas kurang lebih 7.839.51,98 Ha, tersebar pada masing-masing wilayah pembangunan seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6.
Luas Hutan Lindung di Provinsi Papua

No	Kabupaten	Kawasan Hutan Lindung
Wilayah Ha Anim		
1	Kabupaten Merauke	272.694,95
2	Kabupaten Boven Digul	102.498,26
3	Kabupaten Mappi	198.368,05
4	Kabupaten Asmat	1.091.345,87
Wilayah Laa Pago		
1	Kabupaten Jayawijaya	17.886,29
2	Kabupaten Puncak Jaya	227.185,80
3	Kabupaten Yahukimo	591.571,23
4	Kabupaten Pegunungan Bintang	490.985,94
5	Kabupaten Tolikara	280.448,14
6	Kabupaten Nduga	151,40
7	Kabupaten Lanny Jaya	55.449,08
8	Kabupaten Mamberamo Tengah	215.413,81

No	Kabupaten	Kawasan Hutan Lindung
9	Kabupaten Yalimo	255.495,96
10	Kabupaten Puncak	243.450,10
Wilayah Mee Pago		
1	Kabupaten Nabire	324.662,16
2	Kabupaten Pania	275.552,27
3	Kabupaten Mimika	292.233,03
4	Kabupaten Dogiyai	238.632,83
5	Kabupaten Intan Jaya	558.596,42
6	Kabupaten Deiyai	214.506,15
Wilayah Saireri		
1	Kabupaten Kepulauan Yapen	18.777,95
2	Kabupaten Biak Numfor	120.603,95
3	Kabupaten Waropen	294.913,40
4	Kabupaten Supiori	7.763,14
Wilayah Mamta		
1	Kabupaten Jayapura	538.480,82
2	Kabupaten Sarmi	196.914,17
3	Kabupaten Keerom	335.851,86
4	Kabupaten Mamberamo Raya	372.614,68
5	Kota Jayapura	6.586,27
Provinsi Papua		7.839.651,98

Sumber : Buku Rencana RTRW Provinsi Papua 2013 - 2033

2.1.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Provinsi Papua, terbagi menjadi 5 (lima) wilayah pembangunan, yang terdiri dari: wilayah Laa Pago, wilayah Mee Pago, wilayah Ha Anim, wilayah Saireri, wilayah Mamta. Pendekatan wilayah dijadikan sebagai asumsi mendasar terhadap perencanaan pembangunan dan perencanaan spasial. Pilihan terhadap pendekatan pembangunan berbasis wilayah dikelompokkan dalam indikator pembangunan, (1). Adanya kesamaan kultur, (2). Ada kesamaan teritori, (3). Adanya kesamaan indikator pembangunan. Berdasarkan indikator dimaksud, maka pola pendekatan wilayah pembangunan Papua akan memberi arah terhadap

pembangunan, memiliki keterhubungan pembangunan serta memberi peluang terhadap pertumbuhan dan pemetaan pembangunan antar wilayah atau pula antar kabupaten/kota dalam satu wilayah.

Dengan pola pendekatan pembangunan tersebut, akan lebih mudah memberi gambaran atau penjelasan tentang kondisi atau kawasan dengan karakteristik tertentu, yang dapat dijadikan sebagai sumber daya pembangunan atau pula menjadi tantangan terhadap pembangunan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa kondisi atau kawasan sesuai karakteristik pada masing-masing wilayah pembangunan, antara lain :

- a. Kondisi atau kawasan pedalaman Papua, terbesar pada wilayah pembangunan Laapago, Meepago dan Haanim yang belum memiliki atau belum memadainya akses terhadap keberlangsungan pembangunan. Akses sebagaimana disebutkan merupakan akses melalui jalur darat, laut/sungai, dan udara. Sebagai akibatnya, daerah-daerah pada wilayah tersebut memiliki permasalahan tersendiri terhadap pembangunan.
- b. Kondisi atau kawasan terpencil Papua, terbesar pada wilayah pembangunan Haanim, Mamta dan Saireri. Pada daerah terpencil ini, terdapat beberapa suku terasing yang sangat homogen, dengan pola kehidupan cenderung nomaden. Interaksi sosial yang terjadi, adalah interaksi sosial antar komunitas homogen tersebut atau pula berinteraksi dengan alam sekitar. Pengetahuan tentang interaksi sosial dengan yang lain dipandang sebagai ancaman baru yang mengganggu keberadaan suku terasing tersebut.
- c. Kondisi atau kawasan Pesisir Papua, terbesar pada wilayah pembangunan Mamta, Saireri, Haanim dan Meepago. Kecenderungan daerah-daerah pesisir memiliki akses yang dapat menghubungkan antar daerah dalam satu wilayah atau antar wilayah dengan wilayah. Akses terhadap daerah pesisir menggunakan jalur laut/sungai, sehingga memudahkan pergerakan arus barang dan manusia. Namun akses pada kawasan pesisir Papua, belum sepenuhnya memadai, sehingga berdampak terhadap keseluruhan pembangunan.

d. Kondisi atau kawasan pegunungan Papua tersebar pada wilayah Laapago dan Meepago yang memiliki daerah pegunungan sebesar 38,9%. Bagian morfologi daratan dengan ketinggian kurang dari 100 m menjadi terluas di wilayah Provinsi Papua, yaitu 16.897.806.02 km² (53,3%), serta pegunungan yang sangat tinggi, dengan ketinggian lebih dari 3000m dari permukaan laut menjadi bagian tersempit, yaitu 1.029.618,93 km² (3,2%).

Pada bagian wilayah Laa Pago dan Mee Pago, berjejer rangkaian pegunungan tinggi sepanjang 650 km. Pegunungan tersebut adalah pegunungan Jayawijaya yang terkenal karena terdapat 3 puncak tertinggi yang walaupun terletak di dekat katulistiwa namun selalu diselimuti oleh salju abadi. Adapun puncak pegunungan tertinggi tersebut adalah, puncak Jayawijaya dengan ketinggian 5,030 m (15.090 ft), puncak Trikora 5,160 m (15.480 ft), puncak Yamin 5,100 m (15.300 ft). Pada kawasan pegunungan, menjadi kawasan dengan kesulitan akses, sehingga memberi dampak langsung terhadap keseluruhan pembangunan.

Kondisi atau kawasan kepulauan Papua tersebar pada wilayah Mamta, Saireri, Haanim dan Meepago. Terdapat beberapa wilayah yang memiliki pulau, seperti pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.7.
Pulau-pulau Kecil pada Kabupaten/Kotadi Provinsi Papua

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Pulau bernama	Jumlah Pulau yang belum Bernama
1	Kota Jayapura	8	8	
2	Jayapura	16	16	
3	Sarmi	15	15	
4	Waropen	3	3	
5	Supiori	168	168	
6	Nabire	38	29	9
7	Kep. Yapen	35	35	
8	Biak Numfor	31	31	

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Pulau	Jumlah Pulau bernama	Jumlah Pulau yang belum Bernama
9	Mimika	6	6	
10	Merauke	4	3	1
11	Asmat	1	1	
Jumlah keseluruhan		325	315	10

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Papua Biro Tata Pemerintahan, 2008.

Sedangkan untuk beberapa wilayah, terdapat beberapa pulau yang letaknya berdekatan dengan negara-negara perbatasan dan keberadaannya terluar dari Provinsi Papua, seperti yang dijelaskan pada Tabel 2.8 berikut.

Tabel 2.8.
Kawasan Perbatasan dan Pulau-pulau Terluar di Provinsi Papua

No	Nama Pulau	Kabupaten/ Kota	Negara yang berbatasan	Keterangan
1	P. Fanildo	Supiori	Palau	Tidak berpenduduk
2	P. Brass	Supiori	Palau	Berpenduduk
3	P. Bepondi	Supiori	Palau	Berpenduduk
4	P. Liki	Sarmi	Palau	Berpenduduk
5	P. Kolepon/P. Dolok	Merauke	Australia	Berpenduduk
6	P. Lagg	Asmat	Australia	Tidak berpenduduk

Sumber: Biro Tata Pemerintahan, Sekretariat Daerah Provinsi Papua, 2008

Daerah kepulauan, merupakan daerah dengan akses yang memadai. Keterhubungan antar daerah dan antar wilayah memungkinkan kontinuitas terjadi, sehingga arus barang dan manusia mengalami pergeseran yang begitu relatif cepat. Untuk pulau dengan kedudukan berbatasan langsung dengan negara lain atau sebagai pulau terluar, acapkali memiliki permasalahan tersendiri terhadap pembangunan, seperti kesulitan akses, menjadi perebutan antar Negara.

2.1.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Beberapa wilayah di Provinsi Papua rentan terhadap bencana dan telah diidentifikasi seperti tampak pada 0 Berdasarkan hasil identifikasi tampak bahwa bahaya geologi sering terjadi di wilayah Pesisir Selatan Papua dan Pesisir Utara dan Kepulauan Papua, sedangkan bahaya tanah longsor juga teridentifikasi sering terjadi dikedua wilayah tersebut ditambah sebagian wilayah Pegunungan Tengah. Untuk bahaya Tsunami pernah terjadi di wilayah Pesisir Utara dan Kepulauan. Sedangkan bahaya iklim seperti banjir terjadi di wilayah Papua Selatan dan Utara, sedangkan kekeringan terjadi di wilayah Pegunungan Tengah meskipun seluruh wilayah Papua juga berpotensi untuk mengalami kekeringan.

Tabel 2.9.
Hasil Identifikasi Bahaya Menurut Pembagian Wilayah Di Provinsi Papua

Pembagian Wilayah	Kabupaten/Kota	Bahaya Geologi				Bahaya Iklim		
		Gempa Bumi	Tsunami	Gunung Api	Tanah Longsor	Badai Tropis	Banjir	Kekeringan
Pesisir Selatan Papua	Asmat	o	x	x	v	o	v	o
	Boven Digoel	o	x	x	v	x	o	o
	Mappi	o	x	x	o	v	v	o
	Merauke	o	x	x	o	v	v	v
	Mimika	o	x	x	v	o	vv	o
Pesisir Utara Papua dan Kepulauan	Biak	vv	v	x	o	v	v	o
	Dogiyai	v	o	x	o	o	o	o
	Jayapura	vv	o	x	vv	o	vv	o
	Keerom	vv	o	x	vv	o	vv	o
	Kota Jayapura	vv	o	x	vv	v	vv	o
	Mamberamo Raya	v	o	x	v	o	v	o
	Nabire	vv	o	x	v	o	o	o
	Sarmi	vv	o	x	v	v	o	o
	Supiori	vv	v	x	o	v	o	o
	Waropen	v	v	x	v	o	o	o
Yapen	v	v	x	v	v	o	o	
Pegunungan Tengah Papua	Jayawijaya	v	x	x	vv	x	v	vv
	Lanny Jaya	v	x	x	o	x	o	v
	Mamberamo Tengah	v	x	x	o	x	v	o
	Nduga	v	x	x	o	x	o	o
	Paniai	v	x	x	v	x	v	o
	Peg. Bintang	v	x	x	vv	x	o	o
	Puncak	v	x	x	o	x	o	v
	Puncak Jaya	v	x	x	v	x	o	v
	Tolikara	v	x	x	o	x	o	vv
	Yahukimo	v	x	x	vv	x	v	vv
Yalimo	v	x	x	o	x	o	o	

Keterangan:
x = Tidak terjadi
o = Mungkin terjadi
v = Telah terjadi
vv = Sering terjadi

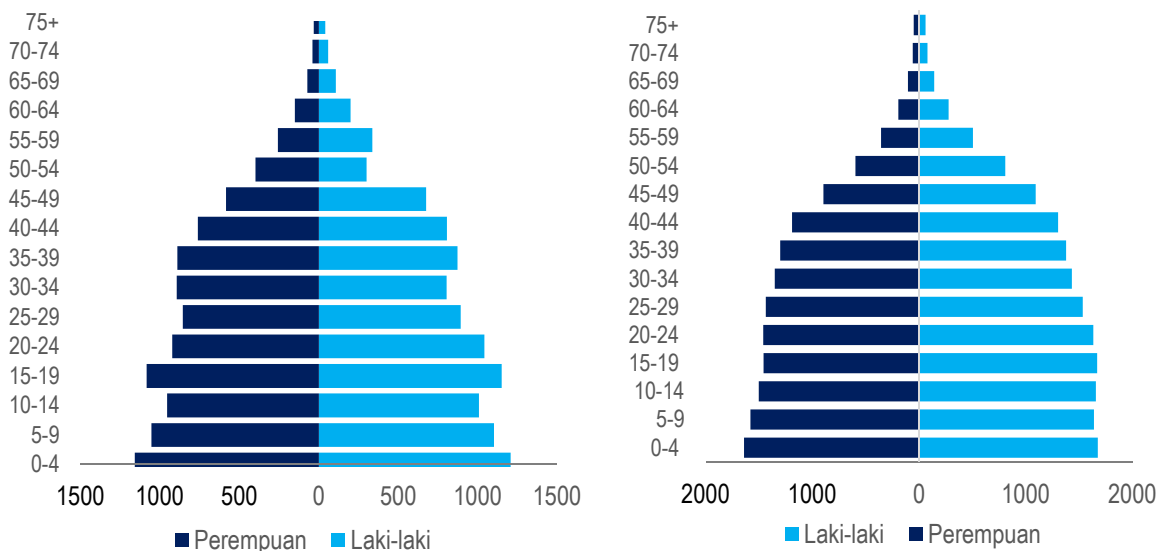
Sumber:
1. Katalog gempa bumi merusak, BADAN GEOLOGI (2006)
2. Atlas Nasional Indonesia, BAKOSURTANAL (2008)
3. Badan Kesatuan Bangsa Prov. Papua (2009)

Sumber: RPJPD Provinsi Papua 2005-2025, Bappeda Provinsi Papua 2012

2.1.1.4. Demografi

Dilihat berdasarkan bentuk piramida penduduk yang ekspansif mencirikan struktur penduduk di Provinsi Papua selama ini adalah struktur penduduk muda. Baik itu di tahun 2010 maupun 2014 bentuk piramida penduduk Provinsi Papua tidak signifikan mengalami perubahan, penduduk usia muda (0-14 tahun) masih dominan, namun dengan kecenderungan tingkat kelahiran bayi semakin menurun di tahun 2014. Selain itu, bentuk piramida yang gemuk, terutama di antara usia 15-44 tahun mengindikasikan bahwa penduduk usia yang sangat produktif lebih dominan dibandingkan yang non produktif. Adapun bentuk kerucut piramida yang tajam diantara tahun 2010 dan tahun 2016 memvisualisasikan bahwa usia harapan hidup di Provinsi Papua masih berkisar diantara 65-69 tahun, dan ada kecenderungan usia harapan hidup untuk jenis kelamin perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan di tahun 2016.

Gambar 2.8.
Piramida Penduduk Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2016



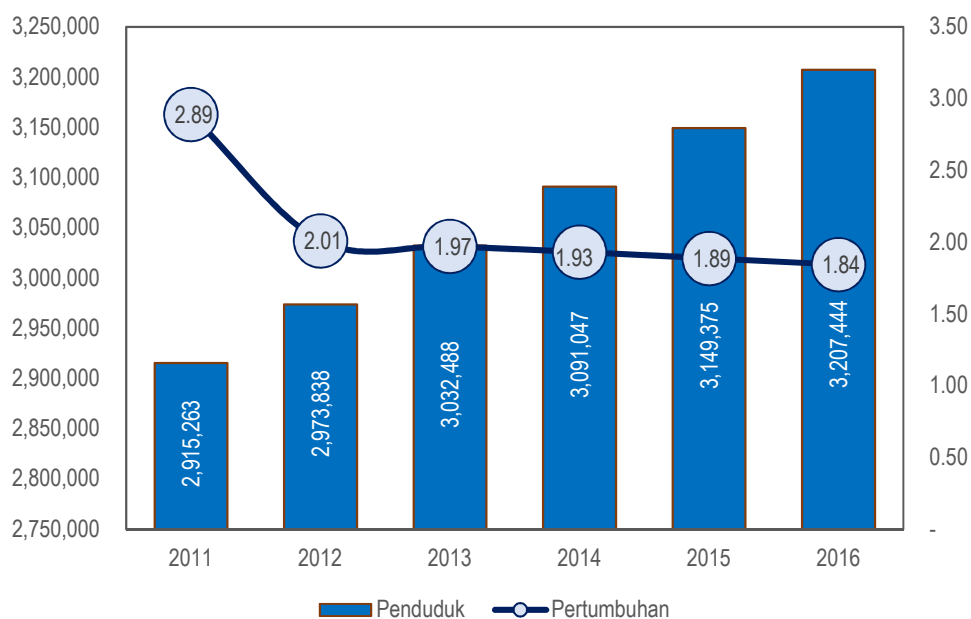
[a]. Piramida Penduduk Tahun 2010

[b]. Piramida Penduduk Tahun 2016

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Jumlah penduduk Papua selama periode 2011-2016 berkembang pada tingkat pertumbuhan yang cukup terkendali dan berfluktuatif. Tahun 2011, jumlah penduduk Papua tercatat sebesar 2,92 juta jiwa dengan tingkat pertumbuhannya sebesar 2,89%. Selanjutnya di tahun 2012 pertumbuhan penduduk Papua mengalami pelambatan, lebih rendah dibandingkan tahun 2011 yaitu sebesar 2,01%. Kondisi ini terus berlanjut sepanjang periode 2013 – 2016, dimana pada tahun 2016 pertumbuhan penduduk dapat ditekan menjadi 1,84%, yang terlihat jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2011. Adapun jumlah penduduk yang tercatat di tahun 2016 tersebut adalah sebanyak 3,21 juta jiwa. Selengkapnya perhatikan Gambar 2.9.

Gambar 2.9.
Jumlah Penduduk Dan Laju Pertumbuhan Penduduk DI Provinsi Papua Tahun 2011 – 2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Terdapat kecenderungan pertumbuhan penduduk usia produktif di Provinsi Papua lebih cepat dibandingkan penduduk usia non produktif. Jika diamati berdasarkan kelompok usia produktif 15-64 tahun, terlihat bahwa jumlah penduduk kelompok usia ini proporsinya cenderung meningkat. Tahun 2013 penduduk usia produktif mencapai 66,83% dan tahun 2016 meningkat menjadi 68,23% dari total penduduk Papua, hal ini

berarti jumlah penduduk usia produktif jauh lebih besar dari jumlah penduduk usia non produktif.

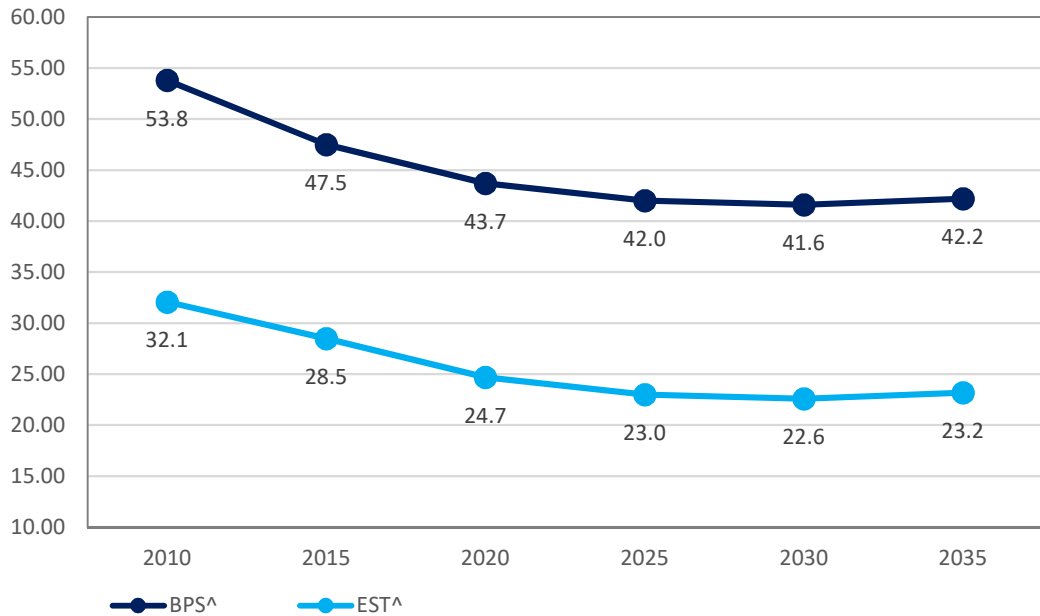
Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Usia Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2016

Kelompok Umur	2013 (ribu orang)	2014 (ribu orang)	2015 (ribu orang)	2016 (ribu orang)	Rata ² Pertumbuhan (% per thn)
0 – 4	328,5	329,3	330,0	331,6	0,31
5 – 9	318,6	319,8	321,3	321,8	0,33
10 – 14	315,1	315,4	316,0	316,1	0,11
15 – 19	309,6	310,9	311,6	312,7	0,33
20 – 24	300,1	303,9	306,9	309,3	1,02
25 – 29	282,5	286,9	292,0	297,1	1,72
30 – 34	271,7	273,6	275,5	278,6	0,85
35 – 39	261,9	264,8	267,3	268,2	0,80
40 – 44	224,1	233,6	241,8	249,3	3,75
45 – 49	167,1	177,9	188,6	199,1	6,38
50 – 54	110,4	120,3	130,6	140,6	9,12
55 – 59	64,1	70,9	78,1	86,3	11,54
60 – 64	35,0	38,4	42,5	47,1	11,52
65 – 69	19,9	21,0	22,5	24,7	8,04
70 – 74	13,0	13,4	13,7	13,8	2,05
75 +	10,9	10,9	11,0	11,1	0,61
Total	3.032,5	3.091,0	3.149,4	3.207,4	0,31

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Dampak dari semakin meningkatnya jumlah penduduk usia produktif, menyebabkan rasio ketergantungan terlihat mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Jika menggunakan data proyeksi yang bersumber dari BPS, terlihat bahwa rasio ketergantungan yang cenderung menurun dari 53,8% tahun 2010 turun menjadi 42,2% pada tahun 2035, sedangkan berdasarkan estimasi terlihat gap yang cukup besar, yaitu tahun 2010 rasio ketergantungan mencapai 32,1% turun menjadi 23,2% tahun 2035.

Gambar 2.10.
Proyeksi Bonus Demografi Di Provinsi Papua

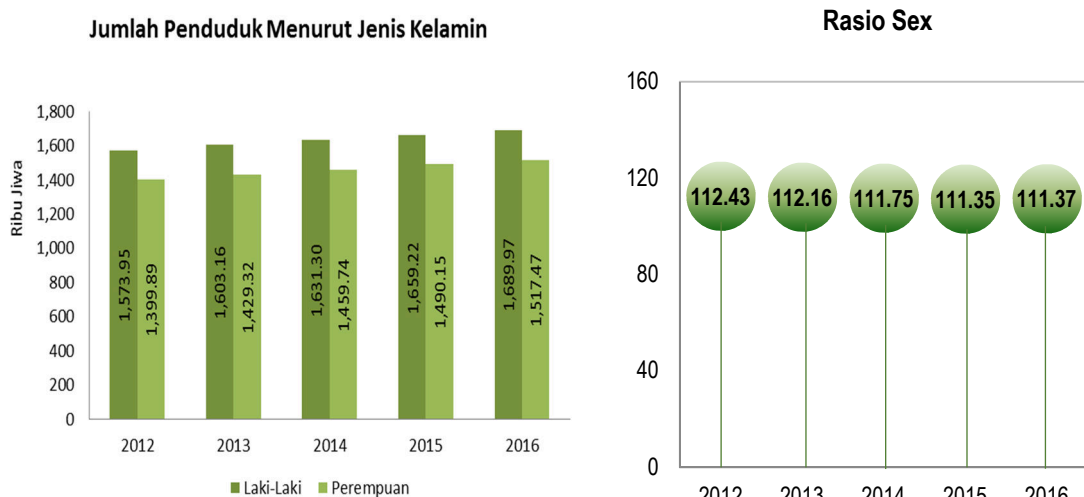


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Bonus demografi yang akan terjadi di Provinsi Papua pada tahun 2020-2030 harus dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkualitas. Adanya bonus demografi menandakan bahwa penduduk usia produktif (15-64) lebih banyak dibandingkan penduduk yang nonproduktif (0-14 dan lebih dari 64 tahun), sehingga merupakan modal yang sangat besar bagi pemerintah Papua untuk menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik dan berkualitas. Akan tetapi mereka ini merupakan penduduk yang produktif untuk bekerja, membutuhkan pendidikan dan kesehatan yang lebih baik, dan pangan lebih banyak, karenanya perluasan lapangan kerja, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih tinggi, serta pemenuhan kebutuhan pangan yang lebih banyak harus diwujudkan oleh pemerintah pada saat itu. Dan semestinya mulai dijalankan sekarang, sehingga manfaat bonus demografi dapat dirasakan seoptimal mungkin pada saat terjadi selama periode 2020-2030 tersebut.

Dari sisi jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki di provinsi Papua lebih besar dibanding jumlah penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki tahun 2012 tercatat 1,573 juta jiwa, angka ini meningkat menjadi 1,689 juta jiwa tahun 2016. Jumlah penduduk perempuan di provinsi Papua, tahun 2012 tercatat 1,399 juta jiwa, meningkat menjadi 1,517 juta jiwa tahun 2016. Hal ini menyebabkan angka sex ratio menjadi lebih besar dari 100, namun mempunyai kecenderungan angka yang menurun. Tahun 2012 angka sex ratio mencapai 112,43 menurun menjadi 111,37 di tahun 2016.

Gambar 2.11.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Dan Rasio Sex Di Provinsi Papua Tahun 2012 - 2016

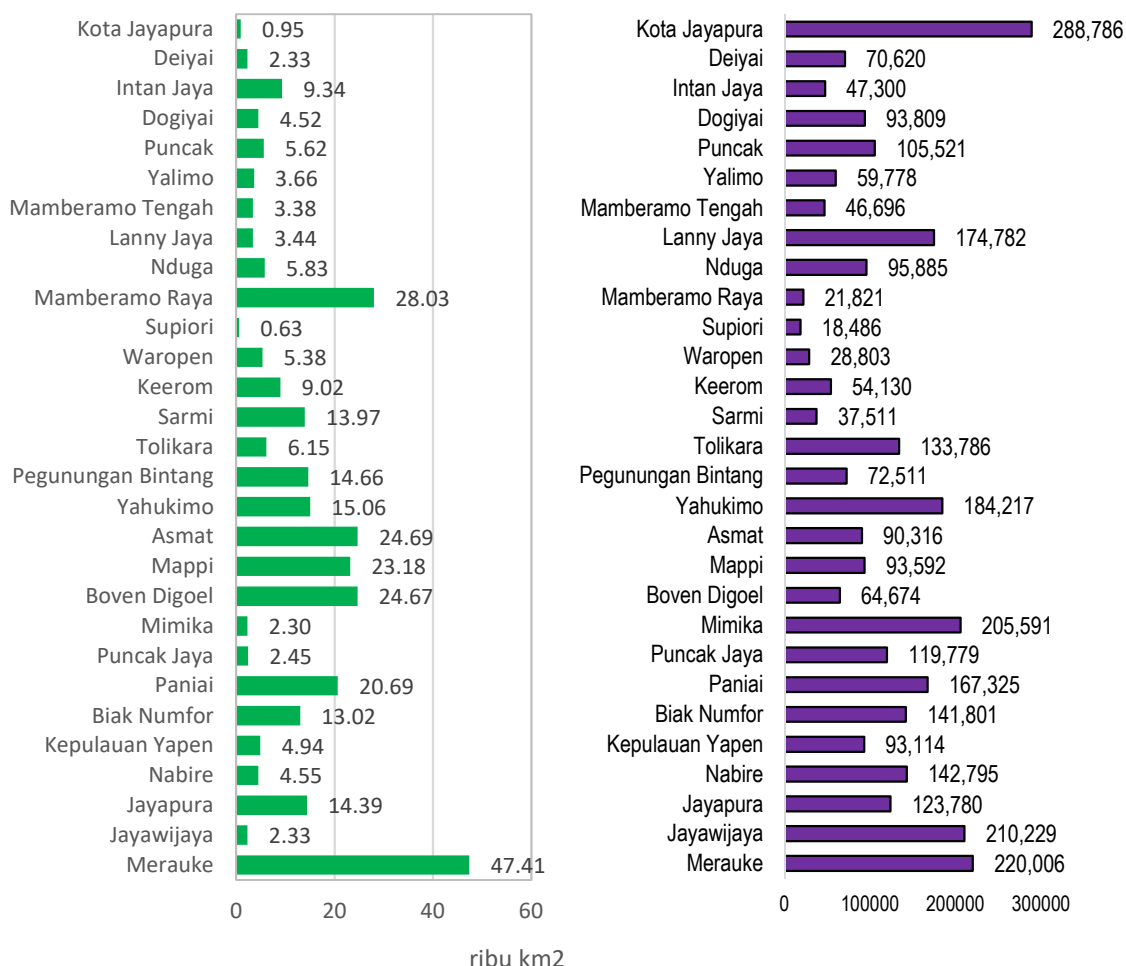


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Kemudian dari persebaran penduduk di setiap kabupaten/kota di Provinsi Papua terlihat tidak merata. Terdapat kabupaten/kota yang memiliki luas wilayah yang sangat luas namun jumlah penduduk yang berada di kabupaten/kota tersebut sedikit, sebaliknya ada kabupaten /kota dengan luas wilayah yang kecil tetapi memiliki jumlah penduduk yang besar. Daerah dengan penduduk terbesar, terlihat di kota Jayapura, dengan luas yang dimiliki 0,95 ribu km² memiliki jumlah penduduk 288,786 ribu jiwa, sehingga kondisi ini menyebabkan tingkat kepadatannya

tertinggi di Provinsi Papua yaituper km² luas wilayah di kota Jayapura ditempati oleh 303 jiwa. Lihat Gambar 2.12 berikut.

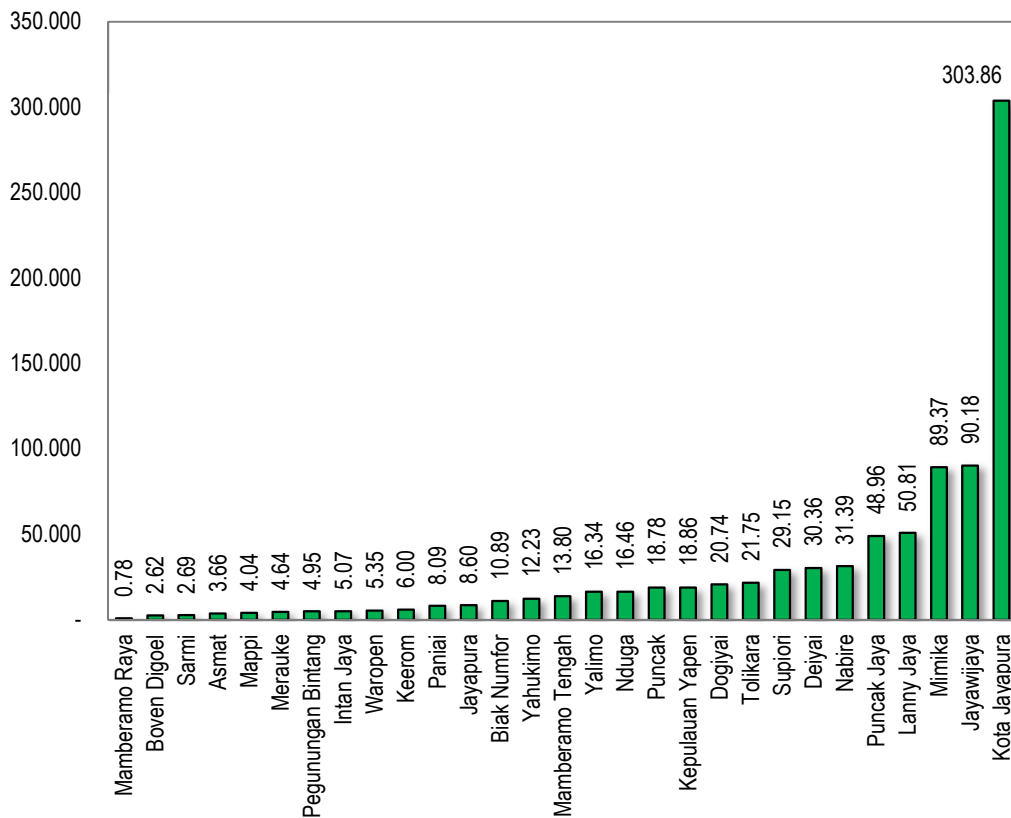
Gambar 2.12.
Luas Wilayah Dan Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Tahun 2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Posisi kedua tingkat kepadatan terbesar di provinsi Papua, diduduki oleh kabupaten Jayawijaya dengan luas wilayah 2,33 ribu km², mempunyai jumlah penduduk sebesar 210,22 ribu jiwa dengan tingkat kepadatan rata-rata 90 jiwa per km². Sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terendah terdapat di kabupaten Supiori dengan jumlah jiwa 18,48 ribu, yang menempati luas wilayah 0,63 ribu km² terkecil di Papua, namun dari tingkat kepadatannya menempati posisi ke 8 terbesar di provinsi Papua dengan tingkat kepadatan rata-rata 29 jiwa per km², perhatikan Gambar 2.13.

Gambar 2.13.
Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2016
(jiwa/km²)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Kabupaten Merauke menempati posisi ke dua dari sisi jumlah penduduknya yaitu 213,48 ribu jiwa, tetapi dengan luas wilayah yang dimiliki terbesar di provinsi Papua yaitu 47,41 km², menyebabkan tingkat kepadatan penduduknya menempati posisi ke 6 terendah bersama-sama dengan Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Waropen. Kabupaten dengan tingkat kepadatan terendah diduduki oleh kabupaten Mamberamo raya yaitu 1 jiwa per km², hal ini dikarenakan dengan luas wilayah yang merupakan kedua terbesar di provinsi Papua yaitu 28,03 km², jumlah penduduk yang berdiam di wilayah ini tercatat hanya 21,82 ribu jiwa yang merupakan jumlah penduduk terendah ke dua di provinsi Papua.

2.1.1.5. Ketenagakerjaan

Apabila dilihat dari angkatan kerja sampai dengan tahun 2012-2016, jumlah angkatan kerja dan jumlah orang yang bekerja di provinsi Papua terlihat meningkat, kecuali tahun 2014 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, sedangkan untuk jumlah orang yang menganggur, dari tahun 2012-2016 jumlahnya mengalami fluktuasi. Tercatat jumlah angkatan kerja 1.585.434 jiwa pada tahun 2012 dan orang yang bekerja berjumlah 1.527.933 jiwa, sedangkan pengangguran berjumlah 57.501.

Perkembangan jumlah penduduk yang bekerja cenderung meningkat sejak tahun 2012-2016, tetapi laju pertumbuhan penduduk yang bekerja berfluktuasi dengan pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 1,91%,. Tercatat tahun 2013 laju pertumbuhan penduduk yang bekerja mencapai 6,96%, angka ini tidak bertahan karena mengalami penurunan di tahun berikutnya, dan kemudian meningkat kembali sehingga di tahun 2015 mencapai 3,40% dan di tahun 2016 laju pertumbuhan penduduk yang bekerja mengalami penurunan drastis, dengan capaian -1,67%.

Tabel. 2.11.
Indikator-Indikator Tenaga Kerja Di Provinsi Papua Tahun 2012-2016

Indikator	2012	2013	2014	2015	2016
Angkatan Kerja	1.585.434	1.688.876	1.675.113	1.741.945	1.722.162
1. Bekerja	1.527.933	1.634.332	1.617.437	1.672.480	1.644.485
2. Penganggur	57.501	54.544	57.676	69.465	57.677
Bukan Angkatan Kerja	423.711	476.194	454.291	447.285	523.300
Jumlah	2.009.145	2.165.070	2.129.404	2.189.230	2.245.462
Laju Pertumbuhan Yang Bekerja (%)	3,50	6,96	-1,03	3,40	-1,67
Daya Serap Tenaga Kerja (%)	96,37	96,77	96,56	96,01	95,49
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	78,91	78,01	78,67	79,57	74,13
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT (%))	3,63	3,23	3,44	3,99	3,35

Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

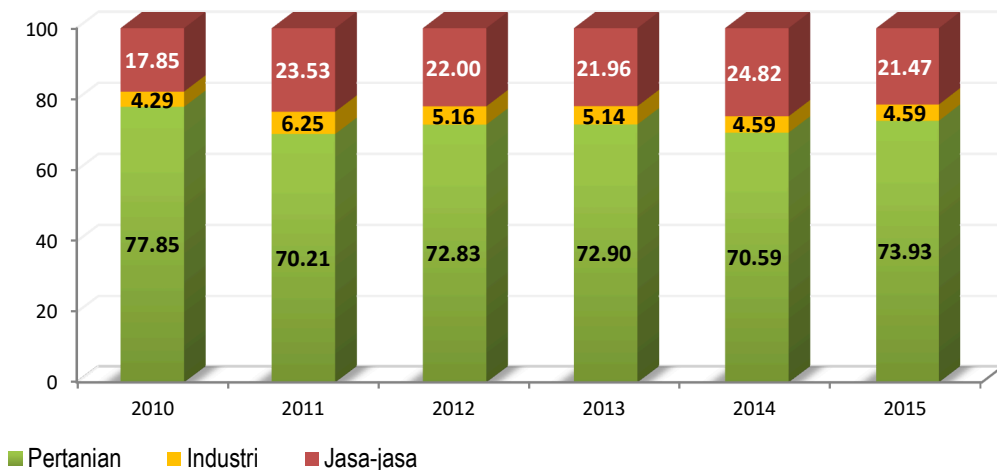
TPAK dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir (2012-2016) sedikit berfluktuatif dan cenderung berkembang stabil yang secara rata-rata mencapai 77,85%. Tahun 2012, TPAK provinsi Papua tercatat sebesar 78,91%, yang

kemudian turun di tahun 2013 kemudian meningkat di tahun 2014 dan 2015, kemudian turun kembali di tahun 2014 menjadi 74,13%.

Dari sisi pengangguran, terlihat bahwa jumlah orang yang menganggur di provinsi Papua dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir (2012-2016) terlihat berfluktuatif, dengan rata-rata mencapai 59.372 setiap tahun. Demikian pula dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mengalami fluktuasi, dengan rata-rata mencapai 3,53 % pertahun selama dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir (2012-2016).

Jika mengamati struktur tenaga kerja menurut sektor di provinsi Papua, jumlah orang yang bekerja pada sektor pertanian mendominasi struktur tenaga kerja dengan proporsi yang cenderung menurun sepanjang tahun 2010-2015, yaitu rata-rata pertahun mencapai 73,05. Di sektor industri secara rata-rata mencapai 21,94, sedangkan sektor jasa-jasa rata-rata mencapai 5,00. Dari ketiga sektor ini, sektor pertanian memberikan kontribusi yang sangat tinggi dalam penyerapan tenaga kerja yang tercatat mencapai 73,05 sedangkan terkecil ditempati sektor jasa-jasa yang tercatat hanya 5,00.

Gambar 2.14.
Struktur Tenaga Kerja Menurut Sektor Di Provinsi Papua
Tahun 2010-2015



Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Walaupun sektor pertanian mendominasi struktur tenaga kerja, tidak serta merta mendominasi struktur PDRB di provinsi Papua. Perekonomian Papua dapat dikatakan merupakan perekonomian yang dualistis. Di satu sisi struktur PDRB didominasi oleh sektor pertambangan (36,61% per tahun), tetapi disisi lain struktur tenaga kerja dikuasai oleh sektor pertanian (73,05% per tahun). Kondisi perekonomian seperti inilah yang dapat dikatakan sebagai salah satu penyebab mengapa perekonomian di wilayah Papua berjalan timpang karena mekanisme pasar tidak berjalan seperti seharusnya. Apabila hal ini dibiarkan terus berlarut, suatu saat Papua akan mengalami krisis ekonomi yang besar yang dapat mengarah pada krisis multidimensional.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Pembangunan di berbagai bidang ditujukan untuk menjawab berbagai permasalahan dan tantangan dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat, maka diperlukan terciptanya kondisi dasar, antara lain: pembangunan kualitas manusia, pertumbuhan ekonomi yang positif dan berkelanjutan, penciptaan kesempatan kerja, kestabilan harga-harga barang dan jasa (tingkat inflasi yang rendah), serta peningkatan pendapatan perkapita masyarakat.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi

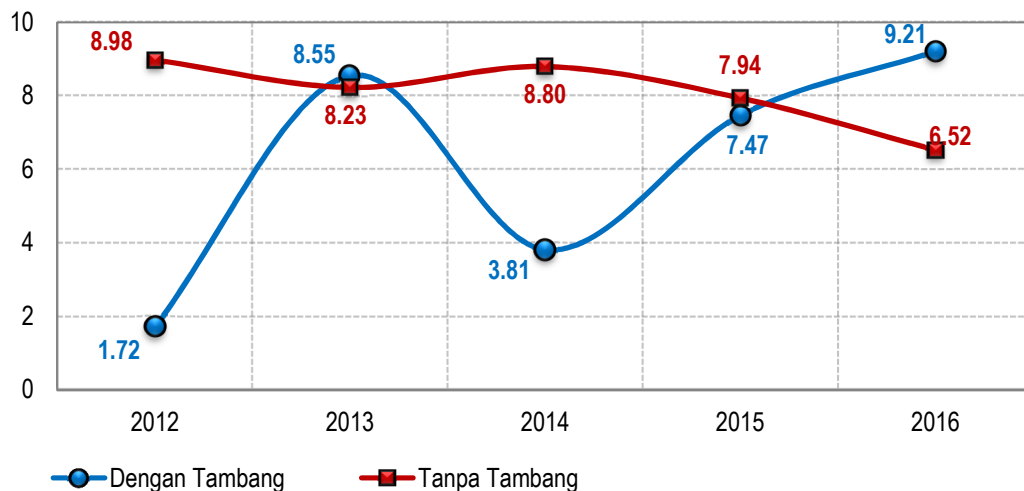
(a).Pertumbuhan Ekonomi

Kondisi perekonomian Provinsi Papua mengalami pluktuasi dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir (2012-2016). Hal ini terjadi ketika produksi pertambangan tembaga mengalami gangguan akibat permasalahan internal perusahaan PT Freeport Indonesia, dimana pada tahun 2012 dan 2014 pertumbuhan ekonomi yang dihitung dengan tambang mengalami kontraksi cukup dalam, yang tercatat mencapai 1,72% dan 3,81%. Sementara pada tahun 2013 mengalami peningkatan yang signifikan mencapai angka 8,55%. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi kembali melemah yang mencapai 7,47% dan pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi kembali menguat hingga mencapai 9,21%,

merupakan pertumbuhan ekonomi tertinggi dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekononomi nasional yang hanya mencapai 5,02% pada tahun 2016.

Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi papua dalam kurun waktu 5(lima) tahun terakhir (2012-2016) mencapai 6,15 %, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional pada periode yang sama yang hanya mencapai 5,33%. Hal ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Papua lebih baik jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dalam kurun waktu yang sama (2012-2016).

Gambar 2.15.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua
Tahun 2012– 2016



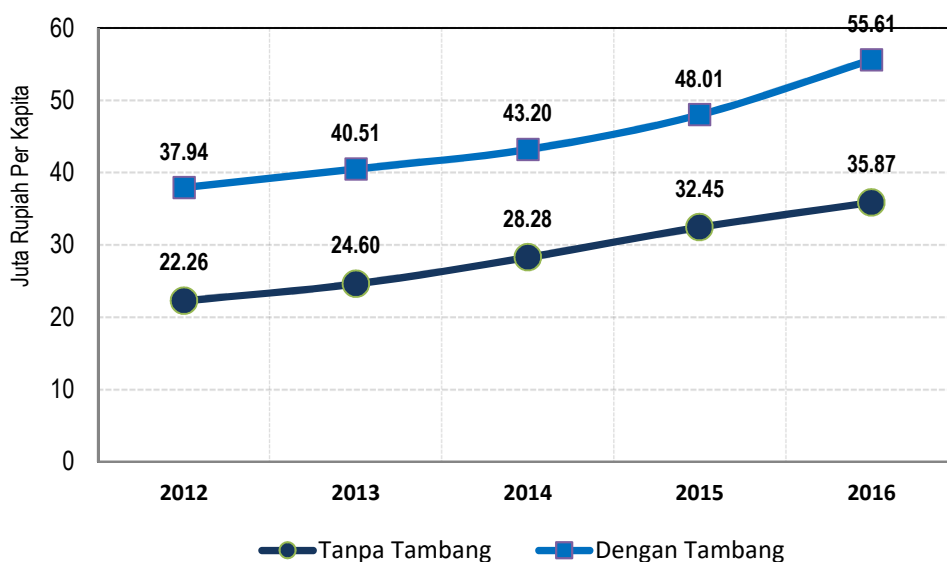
Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Sementara pertumbuhan ekonomi provinsi Papua tanpa tambang, secara umum mengalami perlambatan dalam kurun waktu 2012-2016 yang tercatat pada tahun 2012 mencapai 8,98% menjadi 6,52% pada tahun 2016. Secara rata-rata pertumbuhan ekonomi tanpa tambang mencapai 8,09% lebih tinggi dari pada pertumbuhan ekonomi dengan tambang dalam periode yang sama, seperti yang diperlihatkan dalam Gambar 2.15 di atas.

(b).Pendapatan Per Kapita

Secara makro kinerja ekonomi provinsi Papua melalui upaya menaikkan pendapatan per kapita menunjukkan kecenderungan yang cukup baik. Terlihat bahwa capaian PDRB perkapita provinsi Papua secara umum mengalami peningkatan positif. Tercatat PDRB perkapita dengan tambang perkembangannya menunjukkan tren positif dari tahun 2012-2016. Secara keseluruhan pertumbuhannya rata-rata mencapai 10,10% per tahun, dimana PDRB per kapita dengan tambang pada tahun 2012 tercatat sebesar 37,94 juta rupiah menjadi 55,61 juta pada tahun 2016. (Gambar 2.16).

Gambar 2.16.
Pendapatan Perkapita Provinsi Papua Menurut Harga Konstan 2010
Dengan Tambang dan Tanpa Tambang
Tahun 2012-2016



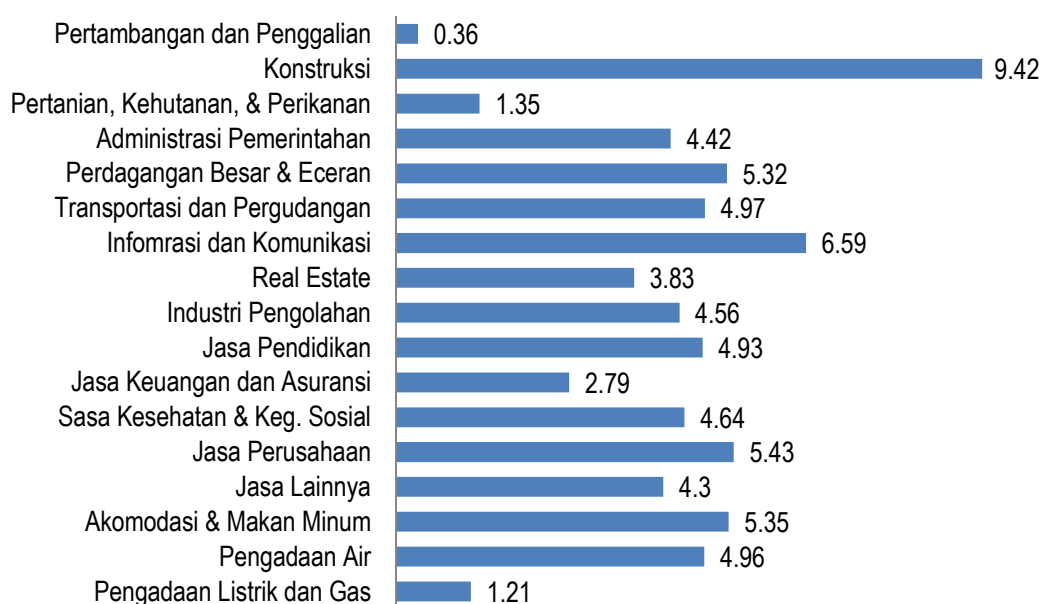
Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Menghitung pendapatan per kapita di Provinsi Papua dengan menyertakan sektor pertambangan dinilai kurang realistis. Hal ini karena sektor pertambangan di Papua, khususnya tambang tembaga dan emas, bersifat enclave dan exclusive, yang mana kurang terkait dengan sektor-sektor lainnya, hanya ada di satu wilayah (Kabupaten Mimika), sedikit menyerap tenaga kerja unskilled. Semuanya ini menyebabkan menjadi tidak fair jika nilai tambah sektor pertambangan di Papua dibagi rata untuk seluruh penduduk. Oleh sebab itu sering kali pembahasan pendapatan

per kapita di Provinsi Papua juga menyertakan perhitungan pendapatan per kapita tanpa sektor pertambangan. Dimana apabila diamati tanpa sektor pertambangan, tampak jelas PDRB per kapita Provinsi Papua menjadi lebih rendah. Dengan sektor pertambangan rata-rata PDRB per kapita mencapai Rp. 46,83 juta per tahun selama periode 2012-2016, sedangkan tanpa sektor pertambangan hanya sekitar Rp. 30,29 juta per tahun. Meskipun demikian ada kecenderungan pertumbuhan PDRB per kapita tanpa sektor pertambangan jauh lebih cepat yaitu sekitar 12,69% per tahun. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memperkirakan pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2017 mencapai kisaran 5,1 hingga 5,3 persen.

Perekonomian Papua triwulan I-2017 (y-on-y) tumbuh 3,36 persen. Pertumbuhan tersebut lebih cepat dibandingkan dengan Pertumbuhan pada triwulan I-2016 yang mengalami kontraksi tumbuh -0,72 persen. Pertumbuhan yang terjadi pada triwulan ini masih tergolong cukup rendah, hal ini dikarenakan rendahnya pertumbuhan pada kontributor terbesar yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian (28,59 persen) dan kontributor ketiga yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (13,25 persen) yang masing-masing hanya tumbuh 0,36 persen dan 1,35 persen, perhatikan Gambar 2.18 berikut.

Gambar 2.17.
Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I - 2017



Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

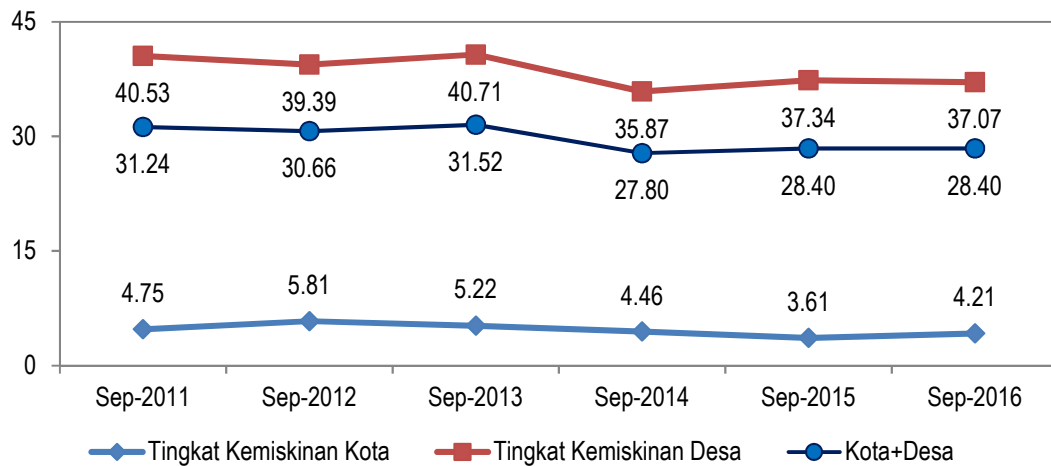
Lapangan usaha Pertambangan mempunyai pertumbuhan yang rendah karena kecilnya pertumbuhan produksi PT. Freeport Indonesia sebagai imbas dari berhentinya ekspor di bulan Februari dan Maret, sedangkan untuk lapangan usaha Pertanian dikarenakan turunnya beberapa komoditas tanaman pangan unggulan seperti Ubi Jalar dan Ubi Kayu. Lapangan usaha Konstruksi yang merupakan kontributor kedua (14,34 Persen) mempunyai pertumbuhan tertinggi dibandingkan lapangan usaha lain yaitu sebesar 9,42 persen.

(c). Kemiskinan Dan Ketimpangan Pendapatan

Sepanjang tahun 2011-2016, terlihat perkembangan tingkat kemiskinan di provinsi Papua mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Jika dipilah berdasarkan desa-kota, kemiskinan di desa selalu tampak lebih tinggi dibandingkan kota. Tingkat kemiskinan tertinggi di desa terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 40,71%, sedangkan di kota yang tertinggi pada tahun 2012 sebesar 5,22%. Adapun secara keseluruhan (desa+kota) tingkat kemiskinan paling tinggi terdapat pada tahun 2013 yakni sebesar 31,52%. Apabila dibandingkan tahun 2011,

kelihatan jelas Provinsi Papua di tahun 2016 berhasil mereduksi kemiskinan hingga mencapai 28,40%. Dengan kata lain Provinsi Papua mampu menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya sebesar -0,74%. Lihat Gambar 2.19.

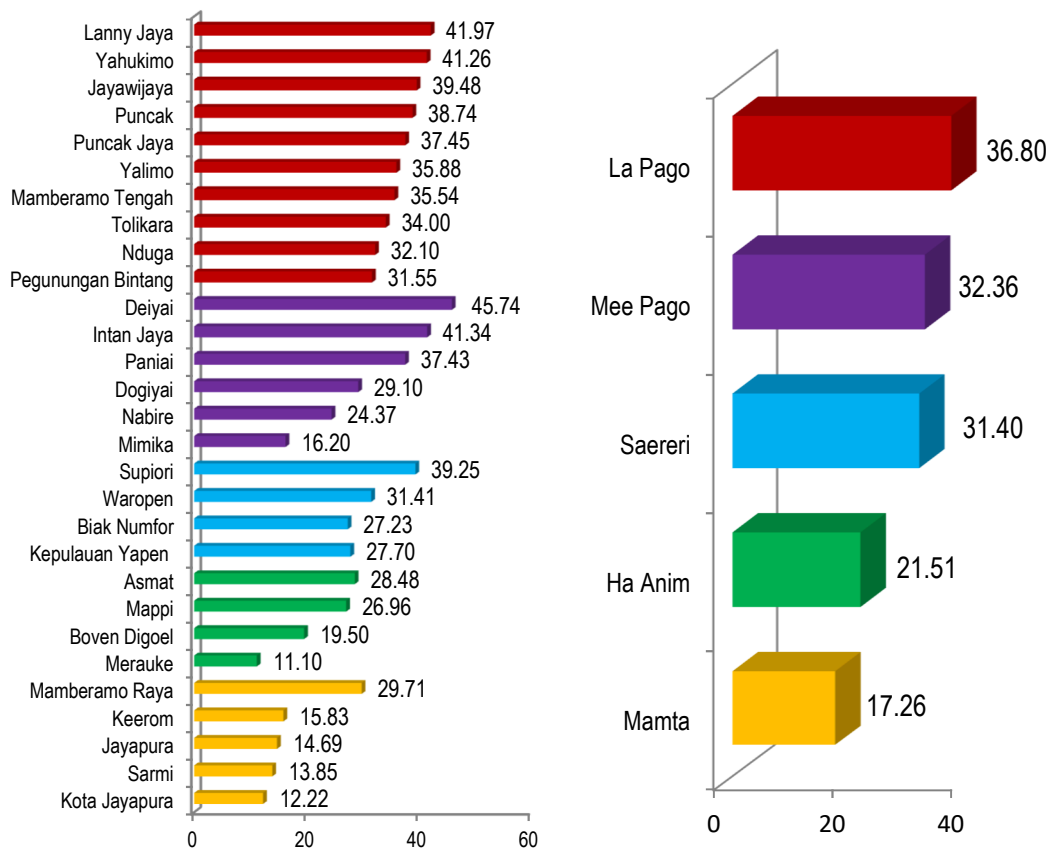
Gambar 2.18.
Tingkat Kemiskinan di Provinsi Papua Tahun 2011-2016



Sumber: Beritas Resmi Statistik, BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Secara kumulatif tahun 2011-2016, jika dipilah berdasarkan kabupaten/kota, terlihat kabupaten Deiyai sebagai penyumbang terbesar kemiskinan di provinsi Papua. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Deiyai adalah 47,44% yang masuk kawasan pembangunan Me Pago, lihat Gambar 2.19 berikut ini.

Gambar 2.19.
Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
Dan Rata-rata Menurut Kawasan Di Provinsi Papua Tahun 2011-2015



[a] Menurut Kabupaten/Kota

[b] Menurut Kawasan Pembangunan

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Posisi kedua terbesar oleh kabupaten Lanny Jaya dengan angka 41,97% dan kabupaten Intan Jaya dengan angka 41,34% yang keduanya masuk kawasan pembangunan La Pago. Sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah, diduduki oleh kabupaten Merauke dengan angka 11,10% yang masuk kawasan pembangunan Mamta, yang diikuti oleh kota Jayapura dengan angka 12,22% dan kabupaten Sarmi dengan angka 13,85% yang keduanya masuk kawasan pembangunan Mamta.

Untuk ketimpangan pendapatan yang direpresentasikan dengan angka gini ratio menunjukkan bahwa secara keseluruhan ketimpangan distribusi pendapatan mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5(lima) tahun (2011-2015). Kabupaten di kawasan pembangunan Ha Anim, jika

dilihat sepanjang tahun 2011-2015 memiliki ketimpangan pendapatan sedang dengan angka berkisar 0,36-0,40 dan dibawah rata-rata Papua kecuali untuk tahun 2011 angkanya 0,40 dan posisinya di atas rata-rata Papua yang tercatat 0,39.

Tabel. 2.12.
Ketimpangan Distribusi Pendapatan Menurut Kabupaten/Kota dan Rata-rata Menurut Kawasan Di Provinsi Papua Tahun 2011-2015

Kabupaten/Kota/Kawasan	2011	2012	2013	2014	2015
Kawasan Ha'Anim	0.401	0.398	0.362	0.371	0.361
Merauke	0.390	0.412	0.466	0.451	0.411
Boven Digoel	0.399	0.350	0.299	0.347	0.357
Mappi	0.377	0.410	0.295	0.301	0.338
Asmat	0.440	0.422	0.389	0.387	0.339
Kawasan Mamta	0.312	0.346	0.313	0.335	0.336
Jayapura	0.289	0.279	0.268	0.323	0.386
Sarmi	0.333	0.385	0.328	0.429	0.352
Keerom	0.360	0.333	0.283	0.311	0.361
Kota Jayapura	0.274	0.366	0.375	0.348	0.347
Mamberamo Raya	0.305	0.363	0.309	0.265	0.234
Kawasan Saereri	0.270	0.321	0.310	0.317	0.342
Biak Numfor	0.296	0.458	0.416	0.389	0.392
Kepulauan Yapen	0.317	0.355	0.322	0.360	0.369
Supiori	0.234	0.293	0.280	0.240	0.280
Waropen	0.234	0.180	0.221	0.281	0.329
Kawasan La Pago	0.267	0.249	0.225	0.251	0.296
Jayawijaya	0.419	0.399	0.367	0.336	0.397
Yahukimo	0.305	0.337	0.271	0.299	0.257
Pengunungan Bintang	0.213	0.177	0.146	0.220	0.268
Tolikara	0.318	0.173	0.198	0.218	0.365
Puncak Jaya	0.242	0.254	0.216	0.266	0.341

Kabupaten/Kota/Kawasan	2011	2012	2013	2014	2015
LannyJaya	0.196	0.206	0.181	0.224	0.299
Mamberamo Tengah	0.292	0.241	0.234	0.257	0.274
Yalimo	0.270	0.275	0.259	0.212	0.135
Puncak	0.156	0.218	0.183	0.253	0.333
Nduga	0.260	0.206	0.199	0.222	n.a.
Kawasan Me Pago	0.294	0.295	0.280	0.306	0.301
Nabire	0.341	0.366	0.326	0.354	0.389
Paniai	0.298	0.245	0.319	0.249	0.320
Mimika	0.334	0.344	0.299	0.340	0.333
Dogiyai	0.244	0.196	0.192	0.248	0.204
Intan Jaya	0.226	0.289	0.225	0.382	0.274
Deiyai	0.318	0.328	0.319	0.262	0.284
Papua	0.390	0.440	0.411	0.410	0.422

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Jika memperhatikan Tabel 2.12 di atas, Kabupaten Asmat yang masuk dalam kawasan pembangunan Ha Anim, terlihat memiliki angka ketimpangan distribusi pendapatan yang diatas rata-rata kawasan, pada tahun 2011 angka gini rasionya mencapai 0,44 atau masuk kategori ketimpangan yang relative tinggi, namun demikian, gini rasio kabupaten Asmat terus mengamali penurunan hingga tahun 2015 tercatat 0,39 atau turun (-0,10).

Kabupaten di kawasan La Pago, Me pago, Saereri dan Mamta jika diamati sepanjang tahun 2011-2015 termasuk dalam ketimpangan yang relatif rendah dengan angka ketimpangan berkisar 0,23-0,35. Angka gini ratio yang berada di bawah 0,35 mengindikasikan bahwa distribusi pendapatan penduduk pada kabupaten yang berada pada kawasan ini, cenderung merata dan sedang. Ketimpangan pendapatan pada kawasan La Pago berkisar antara 0,22-0,29.

Kondisi tingkat ketimpangan pendapatan yang rendah ini terutama terjadi pada kabupaten yang memiliki angka indeks yang mendekati 0

(nol) yaitu kabupaten Tolikara, Pegunungan Bintang, Nduga dan Lanny Jaya. Untuk kabupaten Jayawijaya, walaupun angkanya mendekati provinsi Papua, namun bisa di kategorikan masuk ketimpangan sedang. Angka ketimpangan pendapatan terendah terlihat pada kabupaten Mamberamo Tengah dengan angka 0,11 pada tahun 2010, dan tertinggi di kabupaten Jayawijaya pada tahun 2012 dengan angka 0,42.

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Angka Harapan Hidup (AHH), merupakan salah satu komponen dalam perhitungan IPM yang merefleksikan derajat kesehatan suatu masyarakat. Perkembangan AHH di provinsi Papua menunjukkan adanya peningkatan, namun berjalan lambat dan masih dibawah angka maksimum. Tahun 2010, angka harapan hidup 64,31 meningkat 0,81 poin menjadi 65,12 pada tahun 2016 dan masih belum mencapai angka maksimum 85 tahun.

Tabel. 2.13.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Papua Tahun 2010-2016

Indikator	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Angka Harapan Hidup (thn)	64.31	64.46	64.6	64.76	64.84	65.09	65.12
Harapan Lama Sekolah (thn)	8.57	8.92	9.11	9.58	9.94	9.95	10.23
Rata-Rata Lama Sekolah (thn)	5.59	5.6	5.73	5.74	5.76	5.99	6.15
Pengeluaran (Rp. ribu)	6,251	6,303	6,349	6,394	6,416	6,469	6,637
IPM	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05
Rank IPM Papua Di Indonesia	33	33	33	34	34	34	34

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Berdasarkan data capaian yang ada terlihat bahwa angka harapan lama sekolah maupun angka rata-rata lama sekolah masih jauh di bawah angka ideal dan bergerak sangat lambat. Terlihat bahwa selama tahun 2010-2016, pergerakan angka harapan lama sekolah hanya meningkat 1,66 poin, sedangkan angka rata-rata lama sekolah hanya meningkat 0,56 poin.

Jika menggunakan daya beli minimum yang merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu

kabupaten Tolikara Rp1.007.436, maka terlihat bahwa secara rata-rata pengeluaran riil perkapita, berada diatas batas garis kemiskinan. Walaupun selama kurun waktu 2010-2016 terjadi peningkatan, namun peningkatannya hanya Rp 165,58. Dengan memperhatikan capaian dimensi kesehatan, pendidikan dan pengeluaran tersebut terlihat bahwa IPM di provinsi Papua tahun 2010-2016, masih dapat dikategorikan IPM rendah dengan pergerakan 3,60 poin dengan capaian 58,05 pada tahun 2016 dan menduduki ranking 34 di Indonesia.

IPM kabupaten/kota di provinsi Papua tahun 2012-2016, sebagian besar masuk dalam kategori IPM rendah. Kabupaten dengan IPM tinggi tahun 2016 terlihat di kota Jayapura dengan capaian 78,56, namun untuk tahun 2016 bertambah 2 kabupaten yang masuk kategori IPM tinggi yaitu kabupaten Mimika dengan capaian 71,64 dan kabupaten Biak Numfor dengan capaian 71,13. Kabupaten dengan IPM masuk kategori sedang tahun 2012, terlihat dicapai oleh kabupaten Mimika, kabupaten Biak Numfor, kabupaten Jayapura, kabupaten Nabire, kabupaten Merauke, kabupaten Yapen Waropen, kabupaten Keerom. Sedangkan tahun 2016, terjadi perubahan bertambah 2 kabupaten masuk kategori IPM sedang, yaitu kabupaten Sarmi dan kabupaten Waropen, sedangkan kabupaten Biak Numfor dan kabupaten Mimika sudah bergeser kekategori IPM tinggi, sehingga secara total tetap 7 kabupaten yang masuk kategori IPM sedang. 19 kabupaten lainnya di provinsi Papua masih masuk kategori IPM rendah. 3 Kabupaten dengan IPM terendah tahun 2016 yaitu kabupaten Nduga dengan capaian 26,56, kabupaten Puncak dengan capaian 39,96 dan kabupaten Pegunungan Bintang dengan capaian 41,90. Jika dilihat rata-rata pertumbuhannya, maka kabupaten dengan tingkat pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh kabupaten Nduga sebesar 4,73% diikuti oleh kabupaten Puncak sebesar 2,65 dan posisi ketiga terbesar yaitu diduduki oleh kabupaten Puncak Jaya sebesar 2,43%. Lihat Tabel 2.14.

Tabel. 2.14.
IPM Kabupaten/Kota Di Provinsi Papua Tahun 2012-2016

Wilayah	2012	2013	2014	2015	2016	Rata ² growth
Kota Jayapura	77.25	77.46	77.86	78.05	78.56	0.41
Biak Numfor	69.05	69.35	70.32	70.85	71.13	0.67
Mimika	68.95	69.50	70.40	70.89	71.64	0.83
Jayapura	68.85	69.21	69.55	70.04	70.50	0.71
Merauke	66.28	66.88	67.33	67.75	68.09	0.62
Nabire	65.28	65.45	66.25	66.49	66.64	0.51
Kepulauan Yapen	64.11	64.34	64.89	65.28	65.55	0.54
Keerom	61.13	62.49	62.73	63.43	64.10	1.11
Waropen	61.32	61.68	61.97	62.35	63.10	0.70
Supiori	58.86	59.40	59.70	60.09	60.59	0.77
Sarmi	59.03	59.51	60.48	60.99	61.27	1.12
Boven Digoel	57.45	57.96	58.21	59.02	59.35	0.85
Mappi	55.09	55.51	55.74	56.11	56.54	0.70
Paniai	53.34	53.70	53.93	54.20	54.34	0.49
Jayawijaya	52.27	52.94	53.37	54.18	54.96	1.25
Dogiyai	50.59	51.46	52.25	52.78	53.32	1.93
Mamberamo Raya	46.62	47.28	47.88	48.29	49.00	1.35
Asmat	45.08	45.54	45.91	46.62	47.31	1.20
Tolikara	44.86	45.68	46.16	46.38	47.11	1.19
Lanny Jaya	42.53	43.05	43.28	44.18	45.16	1.51
Yahukimo	43.82	45.63	46.36	46.63	47.13	2.48
Mamberamo Tengah	41.39	42.43	43.19	43.55	44.15	1.91
Puncak Jaya	41.85	43.36	44.32	44.87	45.49	2.43
Yalimo	41.84	43.33	44.21	44.32	44.95	2.14
Pegunungan Bintang	37.82	38.94	39.68	40.91	41.90	2.74
Puncak	36.85	37.73	38.05	39.41	39.96	2.65
Nduga	23.07	24.42	25.38	25.47	26.56	4.73
Intan Jaya	41.89	42.69	43.51	44.35	44.82	2.27
Deiyai	46.94	47.74	48.12	48.28	48.50	1.01
Papua	55.55	56.25	56.75	57.25	58.05	1.08

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Pendidikan

Salah satu upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu melalui bidang pendidikan, yang mana penilaian tentang peningkatan pembangunan bidang pendidikan dapat dilihat berdasarkan perkembangan sarana dan prasarana yang tersedia.

Sarana dan prasarana pendidikan di provinsi Papua, cenderung mengalami perkembangan yang bervariasi. Untuk gedung sekolah selama tahun 2012-2015 terlihat terus mengalami peningkatan. Gedung SMA terlihat mengalami perkembangan pesat dibandingkan gedung sekolah lainnya. Rata-rata pertumbuhan pembangunan SMA mencapai 9,70% pertahun. Sedangkan SMK terlihat perkembangannya agak lambat dengan rata-rata pertumbuhan 8,51%.

Tabel. 2.15.
Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	Rata ² growth
Sekolah Dasar	2.179	2.289	2.400	2.369	2,91
Sekolah Menengah Pertama	495	540	582	582	5,86
Sekolah Menengah Atas	162	197	202	212	10,29
Sekolah Menengah Kejuruan	93	93	94	94	0,36
Jumlah	2.929	3.119	3.278	3.257	3,73

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016

Untuk tenaga guru di provinsi Papua, terlihat mengalami perkembangan yang pesat dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 13,57% pertahun. Rata-rata pertumbuhan tertinggi dicapai oleh tenaga guru SMK yaitu sebesar 25,33% yang diikuti oleh tenaga guru SMP sebesar 18,51%.

Tabel. 2.16.
Jumlah GuruDi Provinsi Papua Tahun 2012-2015

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	Rata ² growth
Sekolah Dasar	12.424	12.348	13.176	16.825	11.,26
Sekolah Menengah Pertama	4.517	5.060	7.089	7.331	18.,51
Sekolah Menengah Atas	2.651	2.586	3.671	3.971	15.,89
Sekolah Menengah Kejuruan	1.422	2.214	3.077	2.502	25.,33
Jumlah	21.014	22.208	27.013	30.629	13.,57

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016

Perkembangan murid tahun 2012-2015 secara rata-rata mengalami pertumbuhan 2,49%, lebih lambat jika dibandingkan dengan pertumbuhan guru yang mencapai 13,57%. Jika dilihat dari jenjang pendidikan pertumbuhan murid tingkat SMP menempati urutan pertama yang mencapai 5,31%, disusul dengan SMA yang mencapai 5,01 dan tingkat SD mencapai 1,65%, sedangkan SMK terlihat mengalami penurunan yang tercatat -0,38%.

Tabel. 2.17.
Jumlah MuridDi Provinsi Papua Tahun 2012-2015

Jenjang Pendidikan	2012	2013	2014	2015	Rata ² growth
Sekolah Dasar	393,794	399,444	382,292	412,187	1.65
Sekolah Menengah Pertama	99,529	106,482	101,392	115,296	5.31
Sekolah Menengah Atas	46,673	49,252	48,514	53,851	5.01
Sekolah Menengah Kejuruan	25,892	25,892	26,174	25,588	-0.38
Jumlah	565,888	581,070	558,372	606,922	2.49

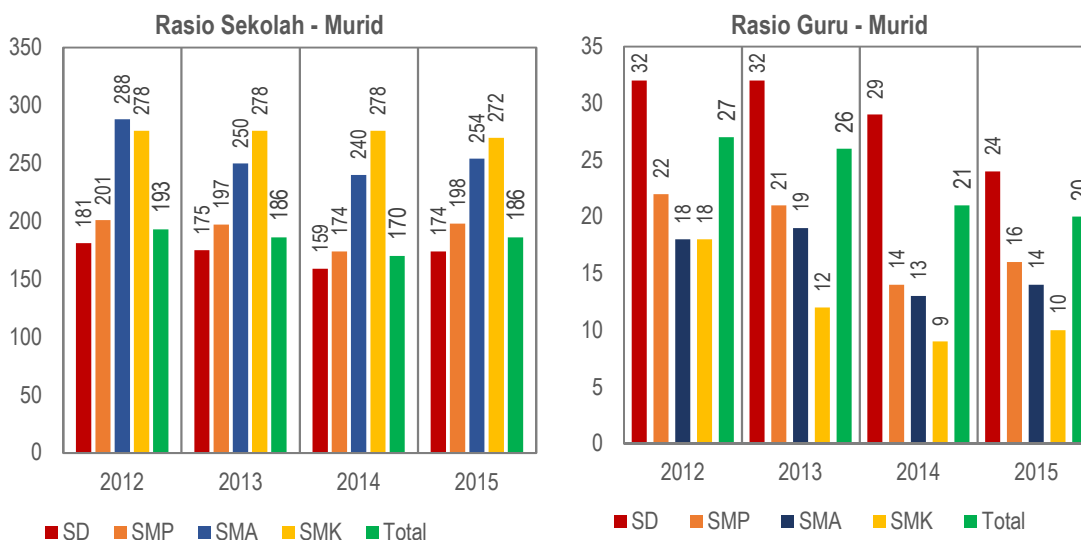
Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Pesatnya pertumbuhan pembangunan gedung sekolah dibanding perkembangan murid berdampak pada rasio sekolah murid. Rasio sekolah murid di tingkat SD tahun 2012-2014 terlihat bergerak turun dari 181 murid per sekolah menjadi 159 murid per sekolah. Rasio murid SMP dan SMA dengan sekolah terlihat mengalami hal yang sama sedangkan rasio sekolah murid SMK terlihat tidak terjadi perubahan sejak tahun 2012-2014. Jumlah murid SD tahun 2012 turun dari 393.794 orang menjadi

382.292 orang tahun 2014, sehingga rata-rata pertumbuhan dari menjadi - 1,43%.

Rasio guru murid untuk setiap jenjang pendidikan di provinsi Papua terlihat mengalami penurunan dalam kurun waktu 2013-2015. Rasio guru murid untuk jenjang SD tahun 2013 sebesar 32 murid per guru, turun menjadi 24 murid per guru tahun 2015. Demikian pula untuk tingkat SMP, SMA dan SMK juga mengalami hal yang sama, sebagaimana yang digambarkan pada gambar 2.19. Berdasarkan data sarana dan prasarana di tabel sebelumnya terlihat bahwa turunnya rasio guru sekolah untuk semua jenjang pendidikan disebabkan karena adanya ketidak seimbangan perkembangan sekolah dan guru, dengan kata lain perkembangan sarana lebih cepat dibandingkan perkembangan guru.

Gambar 2.20.
Rasio Sekolah Dan Guru Terhadap Murid Menurut
Jenjang Sekolah Di Provinsi Papua
Tahun 2012-2015

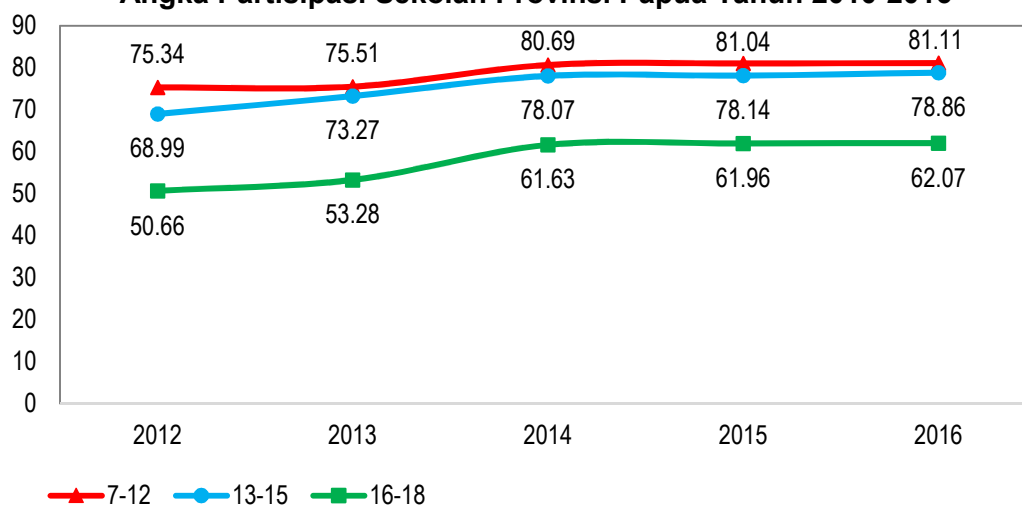


Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Angka partisipasi sekolah di provinsi Papua terlihat mengalami perkembangan yang cukup berarti sepanjang tahun 2010-2016, walaupun dalam perjalanannya sempat turun. Angka partisipasi sekolah provinsi Papua, memang belum mencapai angka yang ideal, terlihat dari akses penduduk terhadap fasilitas pendidikan 2010 untuk usia 7-12 tahun tercatat 75,34% artinya masih terdapat

24,66% penduduk usia 7-12 yang tidak bersekolah. Tahun 2016, terlihat ada perkembangan positif untuk usia 7-12 tahun angka partisipasi sekolah meningkat menjadi 81,11%. Demikian juga untuk usia 13-15 tahun dan 16-18 tahun terlihat ada perkembangan angka partisipasi sekolah namun angkanya lebih rendah dari penduduk usia 7-12 tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat penduduk usia sekolah yang tidak melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Perkembangan angka partisipasi sekolah dapat dilihat pada gambar 2.16.

Gambar 2.21.
Angka Partisipasi Sekolah Provinsi Papua Tahun 2010-2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Angka Partisipasi Kasar provinsi Papua pada setiap jenjang pendidikan terlihat bervariasi. Angka partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya untuk jenjang SD capaiannya terlihat menurun, sedangkan untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat meningkat. Rata-rata angka partisipasi kasar untuk jenjang pendidikan SD mencapai 89,28%, namun untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK terlihat jauh lebih rendah yaitu 63,71% dan 49,70%. Kondisi ini merefleksikan bahwa daya serap penduduk usia sekolah memanfaatkan fasilitas pendidikan di setiap jenjang pendidikan tanpa melihat batas usia di provinsi Papua masih rendahnya.

Tabel. 2.18.
Angka Partisipasi Pendidikan Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016

Angka Partisipasi	Tahun	SD	SMP	SMA/SMK
Angka Partisipasi Kasar	2013	86.39	64.95	53.47
	2014	90.67	71.02	61.53
	2015	95.15	73.59	66.97
	2016	94.74	72.07	66.85
	Rata-Rata	91.74	70.41	62.21
Angka Partisipasi Murni	2013	72.90	45.88	36.53
	2014	78.36	53.68	43.11
	2015	78.56	54.21	43.22
	2016	78.66	54.26	43.27
	Rata-Rata	77.12	52.01	41.53

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Angka partisipasi murni (APM) yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah tepat pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya di provinsi Papua terlihat semakin meningkat angkanya tetapi belum mencapai hasil yang memuaskan. Bisa jadi disebabkan karena ada yang drop out atau masih berada di jenjang SMP. Terlihat angka partisipasi murni untuk jenjang pendidikan SD sebesar 76,22% tahun 2010, meningkat 2,14 poin menjadi 78,36% pada tahun 2014. Angka partisipasi murni di tingkat SMP dan SMA/SMK juga meningkat masing-masing sebesar 4,06 poin dan 7,05 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa masih rendahnya proporsi penduduk usia sekolah di provinsi Papua yang sekolah tepat waktu atau sesuai dengan jenjang pendidikan ideal. Masih ada ketimpangan penduduk yang cukup tinggi terhadap akses pendidikan.

Jika dilihat antar kabupaten/kota terlihat masih terdapat kesenjangan angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan. APK dan APM tertinggi untuk jenjang pendidikan SD/MI, diduduki oleh kabupaten Waropen dengan angka 96,19% dan 115,27%, sedangkan kabupaten Puncak memiliki APK dan APM terendah dengan angka 30,87% dan 34,56%.

Terlihat selisih antara APK dan APM pada masing-masing kabupaten. karena angka partisipasi sekolah (APM) menunjukkan anak usia sekolah yang bersekolah tepat waktu maka bila semuanya bersekolah tepat waktu maka nilainya mencapai 100. Biasanya angka APM akan lebih rendah dari APK dikarenakan nilai APK mencakup anak diluar usia sekolah pada jenjang yang bersangkutan. Jadi selisih antara APK dan APM menggambarkan proporsi murid yang terlambat sekolah atau terlalu cepat sekolah.

Tabel. 2.19.
Angka Partisipasi Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Papua Tahun 2016

Kabupaten/Kota	SD / MI		SMP / MTS		SMA / SMK / MA	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
Merauke	113.3	97.34	87.14	73.16	115.32	72.89
Jayawijaya	95.9	87.28	94.23	78.82	87.01	66.9
Jayapura	120.35	94.3	91.3	68.65	109.28	73.22
Nabire	103.77	89.44	99.21	70.36	116.88	65.05
Kep. Yapen	111.1	93.88	85.87	64.13	89.5	56.75
Biak Numfor	107.08	88.76	112.7	74.86	111.89	64.19
Paniai	87.51	69.97	78.23	55.81	35.75	17.99
Puncak Jaya	92.28	68.83	31.94	23.13	10.82	6.6
Mimika	109.57	92.39	98.64	74.82	154	70.92
Boven Digoel	96.48	80.44	87.31	64.96	38.38	23.94
Mappi	113.43	89.33	53.76	35.26	25.42	15.91
Asmat	108.62	79.91	55.25	38.5	21.34	21.34
Yahukimo	99.53	64.78	26.57	18.36	13.43	10.67
Pegunungan Bintang	82.87	62.1	29.16	23.01	28	23.68
Tolikara	65.53	59.5	65.19	47.22	46.49	28.77
Sarmi	113.97	97.34	100.56	79.44	70.71	47.15
Keerom	102.96	87.16	98.48	65.99	86.94	63.37
Waropen	104.65	91.39	99.27	69.99	127.66	64.94
Supiori	112.99	91.61	134.97	71.26	57.21	33.08
Mamberamo Raya	124	97.07	48.11	40.34	71.27	57.01
Nduga	65.8	55.06	42.98	24.84	1.13	1.13
Lanny Jaya	68.16	64.81	75.35	69.38	48.59	44.71
Mamberamo Tengah	92.11	87.3	71.98	66.16	66.14	65.2
Yalimo	87.8	81.33	55.18	48.71	25.61	22.75

Kabupaten/Kota	SD / MI		SMP / MTS		SMA / SMK / MA	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
Puncak	53.55	43.14	14.54	13.96	19.17	13.82
Dogiyai	98.73	86.02	94.72	61.89	66.55	42.86
Intan Jaya	79.85	63.16	55.02	12.08	9.84	9.84
Deiyai	78.82	54.29	43.65	20.93	33.31	33.31
Kota Jayapura	106.16	92.79	105.41	82.96	106.29	61.82
Papua	94.74	78.66	72.07	54.26	66.85	43.27

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

APM dan APK untuk jenjang SMP/MTS yang tertinggi di Kota Jayapura, yang terlihat mencolok dibandingkan daerah kabupaten lainnya di Provinsi Papua. APM dan APK kota Jayapura nilai masing-masing 76.72% dan 108.97% sedangkan kabupaten Puncak memiliki APM dan APK terendah dengan nilai masing-masing 15.92% dan 18.66%. pada jenjang SMA/SMK/MA angka partisipasi mumi tertinggi diduduki oleh kabupaten Nabire dengan angka 67,11% dan angka partisipasi kasar tertinggi diduduki oleh kabupaten Supiori dengan nilai 132,36%. Sedangkan kabupaten dengan APM dan APK terendah yaitu kabupaten Nduga dengan nilai 1,40%.

Berdasarkan APM dan APK per wilayah kabupaten/kota di atas, terlihat jelas bahwa Provinsi Papua selama ini mengalami ketimpangan with in dan with out dalam pembangunan pendidikan. Dikatakan ketimpangan with in karena sebagian besar daerah di Papua mempunyai angka APM yang rendah, bahkan diantaranya ada yang dibawah 50, terutama untuk jenjang pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA, seperti Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Mamberamo Raya. Sedangkan dikatakan with out karena ketimpangan pembangunan pendidikan juga terjadi antarwilayah. Untuk itu perlu dipikirkan suatu kebijakan pembangunan pendidikan yang inovatif dan efektif untuk mengatasi kedua ketimpangan tersebut dalam pembangunan pendidikan di masa mendatang.

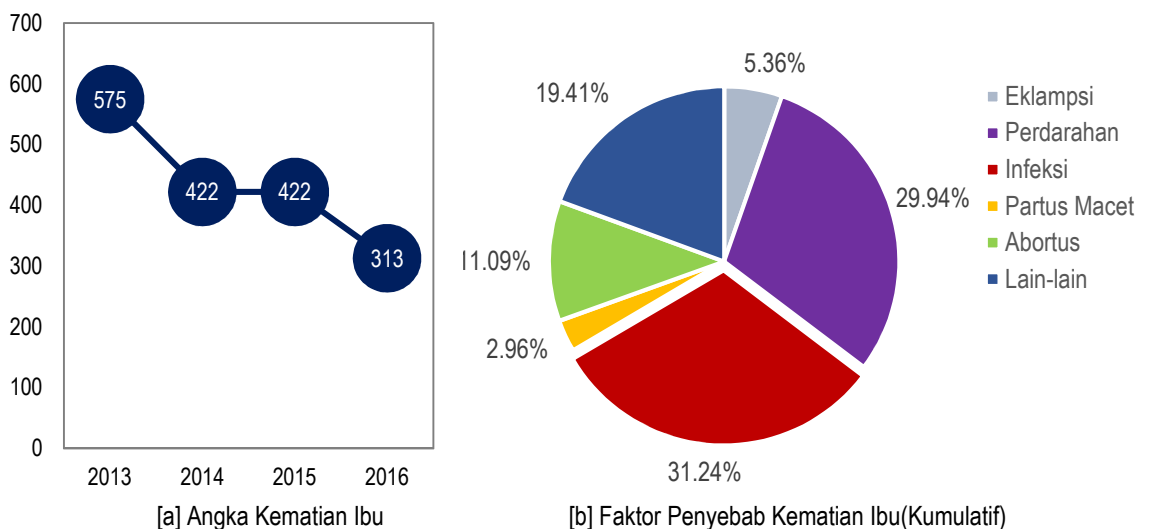
2.1.3.2. Kesehatan

a. Angka kematian ibu

Kondisi pembangunan kesehatan secara umum dapat dilihat dari status kesehatan dan gizi masyarakat yaitu, kematian ibu melahirkan, angka kematian bayi, prevalensi gizi kurang dan umur angka harapan hidup.

Derajat kesehatan di provinsi Papua cenderung mengalami peningkatan positif yang tergambar dalam perkembangannya dari tahun 2013-2016. Dari data yang ada terlihat angka kematian ibu perkuliahiran tercatat mencapai 575 di tahun 2013, kemudian dapat ditekan menjadi 313 per 100.000 kelahiran tahun 2016. Faktor penyebab kematian ibu saat kelahiran, pemicu terbesarnya disebabkan karena infeksi yaitu mencapai 31,24% dan pendarahan mencapai 29,94%.

Gambar 2.22.
Angka Kematian Ibu Dan Faktor-Faktor Penyebabnya Di Provinsi Papua Tahun 2013-2016

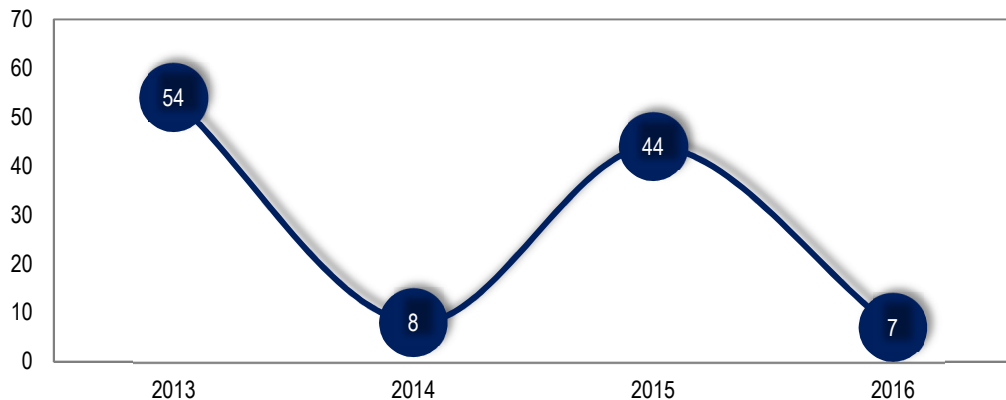


b. Angka kematian Bayi

Jika melihat angka kematian bayi (AKB) di Papua perkembangannya mengalami fluktuasi, yang tercatat 54 kematian bayi lahir pada tahun 2013 turun menjadi 8 pada tahun 2014, kemudian naik menjadi 44 pada tahun 2015 dan kemudian turun menjadi 7 pada tahun 2016. Secara rata-rata angka kematian bayi dalam kurun waktu 2013-

2016 mencapai 28,25 per 1.000 bayi yang lahir. Artinya, ada sekitar 28,25 kematian setiap 1.000 bayi yang lahir. Angka ini masih lebih tinggi dari angka kematian bayi secara nasional yang dicatat BPS pada tahun 2016 yang mencapai 25,5 kematian setiap 1.000 bayi lahir.

Gambar 2.23.
Angka Kematian Bayi Di Provinsi Papua Tahun 2007 - 2014



c. Perkembangan HIV/AIDS

Sampai dengan tahun 2016, secara kumulatif jumlah kasus HIV/AIDS yang dilaporkan mencapai 319.103 kasus, dimana Papua penyumbang nomor 3 terbesar setelah DKI Jakarta dan Jawa Timur. Sejak tahun 1987-2013 kasus HIV/AIDS di Papua yang dilaporkan mencapai 25.851 kasus. Sedangkan sepanjang tahun 2011-2014, kasus HIV/AIDS yang dilaporkan cenderung menurun. Sampai dengan tahun 2016, kasus HIV/AIDS yang dilaporkan naik jika dibandingkan tahun 2015 menjadi 3.936 kasus, serta menempati posisi ke 5 terbesar di Indonesia.

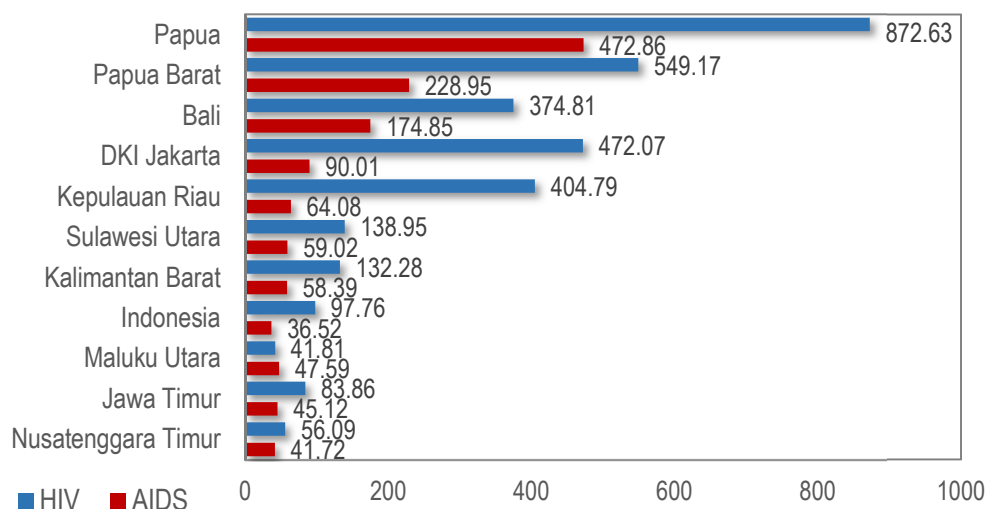
Tabel. 2.20.
Perkembangan HIV/AIDS Di Indonesia dan 10 Provinsi Yang Terbanyak
Melaporkan HIV/AIDS Sampai Dengan Tahun 2014

Provinsi	1987-2013	2014	2015	2016	Total
1. DKI Jakarta	36.623	5.981	4.825	6.574	54.003
2. Jawa Timur	28.788	6.131	5.798	7.623	48.340
3. Papua	25.851	4.616	3.720	3.936	38.123
4. Jawa Barat	14.349	3.801	4.398	5.848	28.396
5. Jawa Tengah	10.302	3.607	3.968	5.434	23.311
6. Bali	12.143	3.009	2.985	3.249	21.386
7. Sumatera Utara	11.444	1.859	1.544	2.009	16.856
8. Sulawesi Selatan	5.555	1.048	941	1.564	9.108
9. Kalimantan Barat	6.245	867	635	635	8.382
10. Kepulauan Riau	4.498	1.017	1.097	1.261	7.873
Total 10 Provinsi	155.798	31.936	29.911	38.133	255.778
Total Indonesia	191.568	40.674	38.120	48.741	319.103

Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI (2016)

Prevalensi HIV/AIDS pada penduduk Papua tahun 2014 tertinggi di Indonesia. Diperkirakan dari 100.000 penduduk yang terjangkit HIV mencapai 873 orang dan AIDS sebanyak 473 orang. Angka prevalensi Papua ini jauh diatas DKI Jakarta dan Bali yang pada umumnya lebih banyak menyebar kaum expatriat. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan, karena mayoritas yang terkena HIV/AIDS adalah usia produktif yang penularannya kurang lebih 90 persen disebabkan karena hubungan seks. Sementara untuk rata-rata Indonesia angka prevalensi HIV adalah 98 orang dan AIDS sebanyak 37 orang.

Gambar 2.24.
Angka Prevalensi HIV/AIDS Di Provinsi Papua
Tahun 1987 – 2016 (per 100.000 penduduk)



Sumber : Ditjen PP & PL Kemenkes RI (2016)

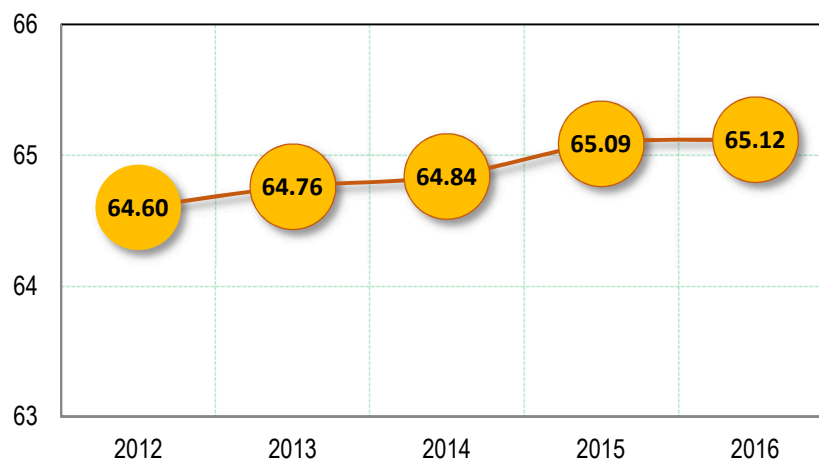
Secara kumulatif berdasarkan penyebarannya per kabupaten di Papua tahun 2014, tercatat bahwa pengidap HIV/AIDS tertinggi terdapat di kabupaten Mimika yaitu mencapai 3.921 orang, kemudian di kabupaten Nabire yaitu mencapai 3.760 orang dan di kota Jayapura mencapai 2.210 orang. Kabupaten Intan Jaya, kabupaten Puncak jaya dan kabupaten Yahukimo, terlihat pengidap HIV/AIDS terendah di Papua dengan besaran masing-masing 2 orang, 19 orang dan 22 orang (Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Papua, 2016). Tentunya tindakan preventif untuk penyebaran dan penularan HIV/AIDS perlu lebih digiatkan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

d. Angka Harapan Hidup

Salahsatu indikator derajat kesehatan adalah angka harapan hidup. Angka harapan hidup di Papua menunjukkan perbaikan namun pergerakannya cenderung melambat dan masih dibawah rata-rata harapan hidup ideal. Tahun 2010, angka harapan hidup rata-rata Papua 64,31 meningkat 0,15 tahun menjadi 64,46 di tahun 2012. Tahun 2013 capaian angka harapan hidup naik 0,14 tahun menjadi 64, 60 tahun. Tahun 2014, angka harapan hidup bergerak naik menjadi 64,84 tahun atau hanya naik sebesar 0,08 tahun dibanding tahun sebelumnya.

Kemudian pada tahun 2015 naik menjadi 65,09 tahun dan pada tahun 2016 naik 0,03 menjadi 65,12 tahun. Angka harapan hidup masih dibawa dari angka harapan hidup nasional yang tercatat mencapai 70,8 tahun pada tahun 2016 atau masih minus (- 4,88) tahun dari angka harapan hidup di Indonesia.

Gambar 2.25.
Angka Harapan Hidup Di Provinsi Papua Tahun 2012 – 2016

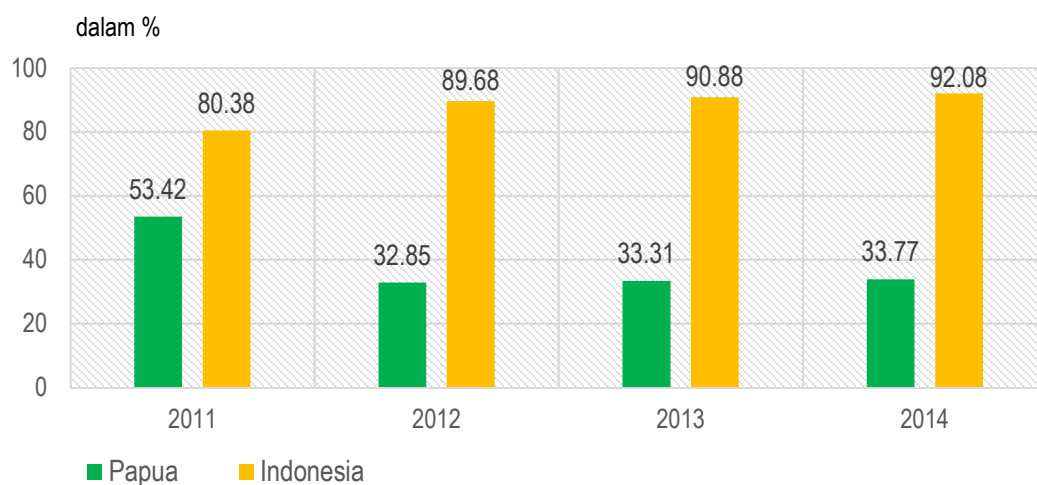


e. Cakupan Persalinan Yang Ditolong Tenaga Medis

Kesehatan ibu merupakan prioritas pembangunan kesehatan baik secara nasional maupun internasional. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pencapaian pembangunan kesehatan, salah satunya adalah pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan.

Cakupan persalinan di Papua yang ditolong tenaga kesehatan cenderung menurun persentasenya dari 53,42% di tahun 2011 menjadi 32,85% di tahun 2012. Tahun berikutnya menunjukkan peningkatan menjadi 33,31% pada tahun 2013 dan 33,77% di tahun 2014, masih jauh di bawahangka nasional yang mencapai 92,08 pada tahun 2014.

Gambar 2.26.
Cakupan Persalinan Di Tolong Tenaga Kesehatan Di Provinsi Papua Dan
Indonesia Tahun 2011-2014



Kejadian kematian tertinggi pada bayi dan balita terjadi pada masa neonatus. Hasil Riskesdas 2007 menunjukkan bahwa 78,5% dari kematian neonatal terjadi pada umur 0-6 hari. Dengan melihat adanya risiko kematian yang tinggi dan berbagai serangan komplikasi pada minggu pertama kelahiran, maka setiap bayi baru lahir harus mendapatkan pemeriksaan sesuai standar lebih sering, minimal dua kali dalam minggu pertama. Langkah ini dilakukan untuk menemukan secara dini jika terdapat penyakit atau tanda bahaya pada neonatus sehingga pertolongan dapat segera diberikan untuk mencegah penyakit bertambah berat yang dapat menyebabkan kematian. Kunjungan neonatus merupakan salah satu intervensi untuk menurunkan kematian bayi baru lahir.

Jumlah kelahiran bayi di Papua cenderung menurun, walaupun terlihat sempat melonjak tinggi di tahun 2012 yang kemudian menurun kembali menjadi hampir setengahnya di tahun 2014. Dari jumlah bayi yang ada di Papua, angka kunjungan neonatal pertama persentasenya cenderung meningkat. Tahun 2010 tercatat jumlah kunjungan neonatal pertama (KN1) mencapai 10.562 bayi atau hanya 24,54% dari total bayi yang dilahirkan, dan persentase ini masih jauh dibawah rata-rata Indonesia yang mencapai 86,65%. Kunjungan neonatal pertama terendah

terjadi tahun 2012, yaitu sebesar 17.905 bayi atau sebesar 17,91% dari total bayi yang dilahirkan. Tahun 2014, kunjungan neonatal pertama terlihat jumlahnya meningkat yaitu sebesar 19.823 bayi atau mencapai 76,04% dari total bayi yang dilahirkan.

Tabel. 2.21.
Kunjungan Neonatus Dan Pelayanan Kesehatan Bayi Di Provinsi Papua Dan Perbandingannya Dengan Indonesia Tahun 2010-2014

Thn	Jumlah Bayi	KN1			KN Lengkap			Yankes Bayi		
		Papua Jumlah KN1 (bayi)	Papua (%)	Indonesia (%)	PapuaJuml KN Lengkap (bayi)	Papua %	Indonesia (%)	Papua Jumlah Yankes (bayi)	Papua (%)	Indonesia (%)
2010	43.048	10.562	24,54	86.65	9.000	20,91	80.86	6.109	14,19	81.23
2011	57.326	11.969	20,88	91.31	10.792	18,83	84.95	15.041	26,24	86.06
2012	99.980	17.905	17,91	85.49	14.689	14,69	81.15	20.899	20,90	79.88
2013	42.886	21.098	49,20	95.91	14.036	32,73	92.00	17.966	41,89	91.69
2014	26.068	19.823	76,04	91.56	12.680	48,64	88.68	7.046	27,03	87.27

Sumber : Ditjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, 2015 (data diolah)

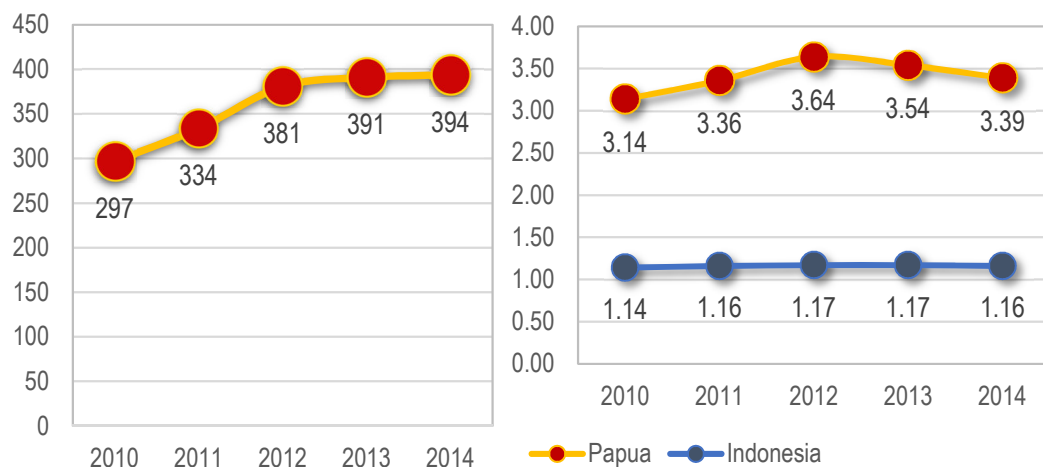
Untuk kunjungan neonatal lengkap persentasenya terlihat semakin rendah dibanding kunjungan neonatal pertama. Kunjungan neonatal lengkap tahun 2010 tercatat hanya 9000 bayi atau 20,91% dari total bayi yang dilahirkan, demikian juga tahun 2012, walaupun jumlah bayi meningkat namun persentase yang melakukan kunjungan neonatal lengkap hanya 14,69% dari total bayi yang dilahirkan. Kunjungan neonatal lengkap tertinggi terlihat di tahun 2014, yaitu sebesar 12.680 bayi atau mencapai 48,64% dari total bayi yang dilahirkan.

Kondisi yang sama terjadi juga untuk pelayanan kesehatan bayi yang jumlah dan persentasenya terlihat semakin mengecil. Tahun 2010, pelayanan kesehatan bayi hanya 6.109 bayi atau 14,19% dari jumlah bayi yang dilahirkan, dan kondisi ini jauh dibawah rata-rata Indonesia yang mencapai 81,23%. Pelayanan kesehatan bayi tertinggi terlihat di tahun 2012, yaitu mencapai 20.889 bayi, namun dari persentase perlayanan bayi tertinggi terjadi di tahun 2013 yaitu sebesar 41,89% dari total bayi yang dilahirkan.

f. Jumlah Puskesmas

Jumlah puskesmas di provinsi Papua sepanjang tahun 2010-2014 bertambah sebanyak 97 puskesmas. Perkembangan terbesar terlihat di tahun 2011-2013, yang meningkat sebanyak 47 puskesmas yaitu dari 334 puskesmas menjadi 381 puskesmas. Pertambahan terendah terjadi pada tahun 2013-2014 yang hanya bertambah 3 unit.

Gambar 2.27.
Jumlah Puskesmas Dan Rasio Puskesmas Terhadap Penduduk Di Provinsi Papua Tahun 2012-2014



[a] Perkembangan Jumlah Puskesmas (unit)

[b] Rasio Puskesmas Per 30.000 Penduduk

Jika dilihat dari rasio puskesmas per 30 ribu penduduk, rasio di provinsi Papua nampak lebih baik dibanding rata-rata Indonesia. Rasio puskesmas per 30 ribu penduduk tahun 2010 mencapai 3,14 puskesmas angka ini jauh di atas rata-rata Indonesia yaitu 1,14 puskesmas melayani 30 ribu penduduk. Jika diperhatikan rasio puskesmas per penduduk di Papua, perkembangannya berfluktuasi dengan kecenderungan yang semakin besar. Rasio puskesmas per penduduk tertinggi terjadi di tahun 2012 yaitu 3,64 puskesmas melayani 30 ribu penduduk. Sampai dengan tahun 2014, rasio puskesmas per penduduk kembali menurun namun masih diatas kondisi tahun 2010.

g. Perkembangan Tenaga Kesehatan

Perkembangan tenaga kesehatan dan non kesehatan di provinsi Papua tahun 2010-2014, terlihat fluktuatif dengan rata-rata pertumbuhan 0,16% per tahun. Tenaga dokter spesialis di provinsi Papua, walaupun

jumlahnya sempat menurun dari tahun 2010 ke 2012, namun tahun 2014 jumlahnya meningkat hampir 5 kali lipat menjadi 244 orang dengan laju pertumbuhan 54,22% per tahun. Tenaga kesehatan dokter umum terlihat jumlahnya terus meningkat dari 460 orang di tahun 2010, menjadi 711 di tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan 12,90%. Tenaga farmasi, dan bidan terlihat juga meningkat dengan rata-rata pertumbuhan masing-masing sebesar 9,35% dan 1,63%. Selain yang disebutkan diatas, tenaga kesehatan lainnya cenderung menurun jumlahnya dengan rata-rata pertumbuhan mencapai (-5,87%) per tahun.

Tabel. 2.22.
Perkembangan Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Di Provinsi Papua Tahun 2010-2014

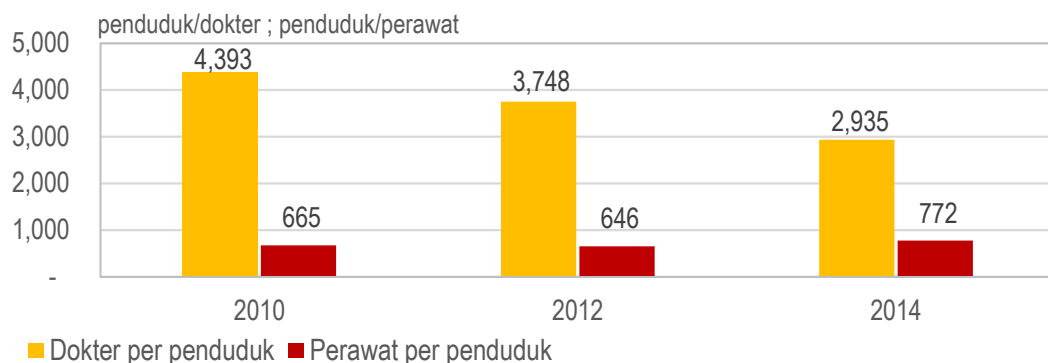
Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan		2010 (orang)	2012 (orang)	2014 (orang)	Rata ² Pertumb 2010-2014 (%)
Tenaga Kesehatan	Dokter Spesialis	77	59	244	54.22
	Dokter Umum	469	693	711	12.90
	Dokter Gigi	99	87	98	-0.25
	Perawat	4.261	4.870	4.006	-1.50
	Bidan	1.504	1.761	1.602	1.63
	Farmasi	238	387	327	9.35
	Lainnya	1.396	1.592	1.068	-5.87
	Jumlah	8.044	9.449	8.056	0.04
Tenaga Non Kesehatan		1.233	993	1.281	0.97
Total SDM Kesehatan		9.277	10.442	9.337	0.16

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016 (data diolah)

Perkembangan rasio dokter per penduduk, tahun 2010-2014 rasionya semakin menurun, sedangkan untuk rasio perawat per penduduk terlihat meningkat di provinsi Papua, namun keduanya masih masuk kategori ideal. Untuk jumlah penduduk 4.393 dilayani oleh 1 orang dokter di tahun 2010, dan tahun 2014, 2.935 penduduk dilayani oleh 1 orang dokter, sedangkan untuk rasio perawat per penduduk di tahun 2010, 1 perawat melayani 665 penduduk, dan tahun 2012 sempat turun rasionya

namun di tahun 2014 terlihat naik menjadi 1 perawat melayani 772 penduduk.

Gambar 2.28.
Rasio Dokter Dan Perawat Terhadap Penduduk Di Provinsi Papua
Tahun 2010-2014



2.1.3.3. Sosial Dan Budaya

Berdasarkan data yang dipublikasikan Kementerian Agama Kanwil Provinsi Papua, dari total penduduk di tahun 2015 sebanyak 3,48 juta tercatat 2,04 juta orang atau sebesar 58,46% bergama kristen protestan, disusul kemudian yang beragama katolik dengan jumlah 784,40 ribu atau 22,52% dan Islam dengan jumlah 651,995 ribu atau 16,89%.

Tabel. 2.23.
Perkembangan Penduduk Menurut Agama Di Provinsi Papua
Tahun 2012-2015

Tahun	KristenProtestan	Katolik	Islam	Hindu	Budha	Total
2012	1.855.204	500.545	450.096	2.420	1.452	2.809.717
2013	1.855.246	500.545	460.907	2.420	1.452	2.820.570
2014	2.020.150	762.461	551.057	5.513	3.898	3.343.079
2015	2.036.442	784.403	651.953	6.439	4.239	3.483.476

Sumber : Kementerian Agama KANWIL Provinsi Papua, 2016

Pendidikan karakter di Papua dapat dikembangkan melalui budaya lokal berbasis gerejadan masyarakat adat. Unsur budaya dan agama perlu diikutsertakan dalam kurikulum dan program pendidikan masyarakat Papua. Keberadaan tempat ibadah untuk pendidikan karaktermasyarakat menjadi penting untuk dikembangkan. Media gereja dan tempat ibadahlain

adalah komponen masyarakat Papua yang dapat dijadikan sebagai dasar pendidikan (Bappenas, 2015).

Sesuai dengan jumlah penganut Kristen Protestan yang terbesar di Papua, demikian juga sarana ibadahnya terbesar jumlahnya yaitu sampai dengan tahun 2015 tercatat terdapat 9.948 gereja, disusul berikutnya sarana ibadah agama Katholik dengan jumlah yang cenderung stagnan sejak tahun 2011 yaitu 1.054 gereja. Untuk sarana ibadah agama Islam, terlihat jumlahnya bertambah dari 625 mesjid di tahun 2012 menjadi 1.022 mesjid di tahun 2015. Sedangkan sarana ibadah agama Hindu, terlihat lambat mengalami pertambahan sepanjang tahun 2012-2015 dengan jumlahnya di tahun 2015 sebanyak 31 Pura, kemudian untuk sarana ibadah agama Budha di tahun 2015 sebanyak 16 vihara.

Tabel. 2.24.
Perkembangan Tempat Beribadah Dirinci Menurut Agama
Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015

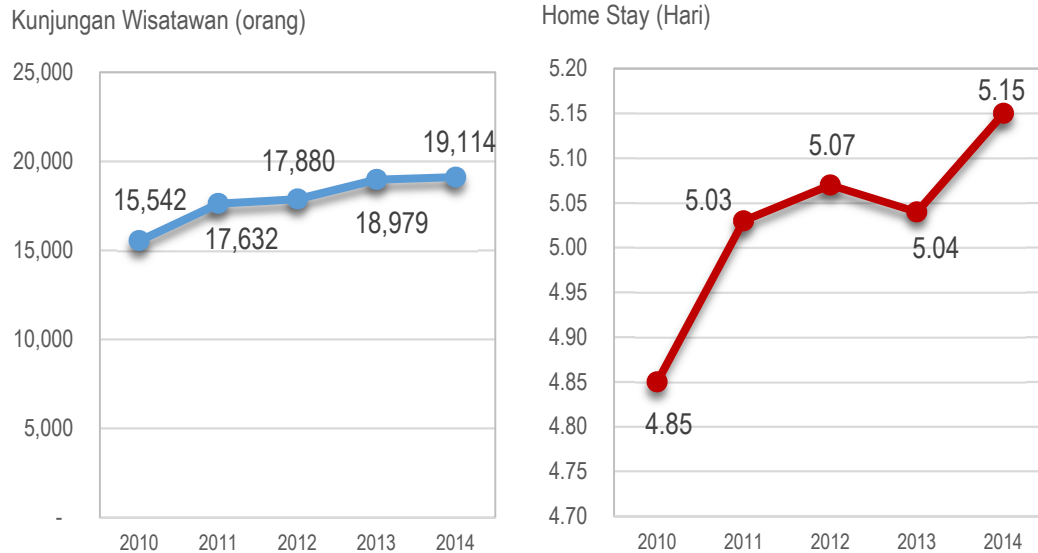
Tahun	Gereja Kristen Protestan	Gereja Katholik	Masjid	Pura	Vihara
2012	5.262	968	625	25	9
2013	5.948	988	835	27	13
2014	8.048	1.021	935	27	13
2015	9.948	1.054	1.022	31	16

Sumber : Kementrian Agama KANWIL Provinsi Papua, 2016

2.1.3.4. Pariwisata

Sektor pariwisata mampu mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan lapangan kerja dan menjadi multiplier effect untuk pengembangan sektor perekonomian yang lain. Objek wisata yang dimiliki Papua belum ditata dengan baik menjadi daya tarik wisata unggulan, padahal potensinya sangat besar karena alam yang dimiliki masih asli dan memiliki budaya khas dan unik Papua. Akibatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Provinsi Papua masih rendah dibandingkan dengan potensi pariwisata yang dimilikinya. Wisatawan asing maupun domestic yang berkunjung ke Papua belum begitu besar. Jumlah wisatawan yang berkunjung ke tempat wisata di Papua meningkat setiap tahunnya walaupun peningkatan jumlah kunjungan tersebut dianggap tidak signifikan. Hal ini juga terlihat dari jumlah tamu yang menginap di hotel dan akomodasi lainnya di Provinsi Papua. Salah satu penyebab peningkatan jumlah kunjungan yang tidak signifikan adalah terkendala biaya transportasi yang sulit untuk menjangkau lokasi wisata. Pertimbangan faktor biaya karena sulitnya transportasi menjadi salah satu kendala bagi wisatawan yang berkunjung ke Papua (Bappenas, 2015).

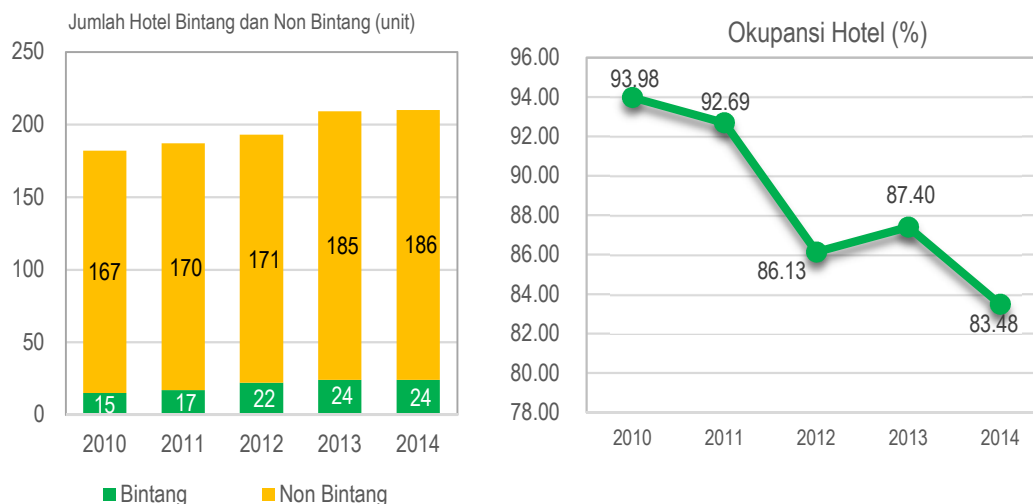
Gambar 2.29.
Kunjungan Wisatawan Dan Lama Tinggal Wisatawan Di Provinsi Papua
Tahun 2010 dan 2014



Sektor pariwisata terlihat meningkat kinerjanya, yang tergambarkan dari jumlah kunjungan dan home stay yang trendnya mengalami peningkatan. Tahun 2010 jumlah kunjungan wisata tercatat 15.542 orang, naik menjadi 19.114 orang di tahun 2014 atau meningkat dengan rata-rata 5,4% per tahun. Untuk rata-rata lama tinggal wisatawan perkembangannya terlihat fluktuatif karena sempat menurun di tahun 2013. Tahun 2010 home stay yaitu selama 4,85 hari, kemudian meningkat menjadi 5,15 hari di tahun 2014 dengan rata-rata pertumbuhan 1,5% per tahun.

Perkembangan hotel berbintang dan non berbintang terlihat meningkat namun disisi lain tingkat okupansi trendnya terlihat cenderung menurun. Sepanjang tahun 2010-2014 jumlah hotel berbintang bertambah 19 unit dan hotel non berbintang bertambah 9 unit dengan tingkat okupansi turun dari 93,98% di tahun 2010 menjadi 83,48% di tahun 2014.

Gambar 2.30.
Jumlah Hotel Dan Tingkat Okupansi Hotel Di Provinsi Papua
Tahun 2010 dan 2014



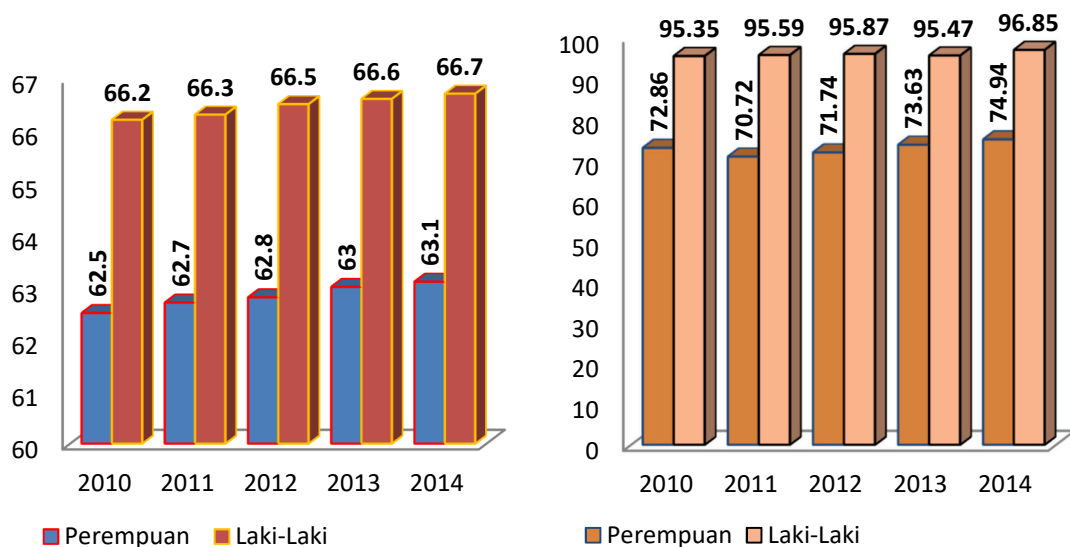
2.1.3.5. Pembangunan Gender

Dalam perspektif Pembangunan Manusia Provinsi Papua pada umumnya, kita masih dikategorikan rendah, dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 58.05. Selanjutnya Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi trennya terus naik.

Dari sisi kualitas pendidikan gender, terlihat penduduk usia 10 tahun ke atas yang belum/tidak sekolah proporsinya berfluktuasi dan lebih dominan penduduk perempuan dibanding laki-laki dengan trend yang meningkat. Proporsi perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah tahun 2010 sebesar 37,20% naik menjadi 38,24% di tahun 2013, sedangkan proporsi penduduk laki-laki usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum sekolah tahun 2010 sebesar 27,88% dan tahun 2013 turun menjadi 25,59% kondisi ini menyebabkan angka melek huruf penduduk perempuan proporsinya berfluktuasi dan juga lebih rendah dari penduduk laki-laki. Tahun 2010 angka melek huruf perempuan hanya mencapai 72,86% sementara Laki-laki mencapai 95,35%. Sampai dengan tahun 2014 angka melek huruf perempuan naik menjadi 74,94% dan laki-laki mencapai 96,85%.

Demikian pula dengan angka harapan hidup (AHH) perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Pada tahun 2010 AHH perempuan mencapai 62,5 tahun naik menjadi 63,1 pada tahun 2014, sementara AHH laki-laki pada tahun 2010 tercatat 66,2 naik menjadi 66,7 pada tahun 2014.

Gambar 2.31.
Kualitas Pendidikan Perempuan Dan Laki-Laki Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2014



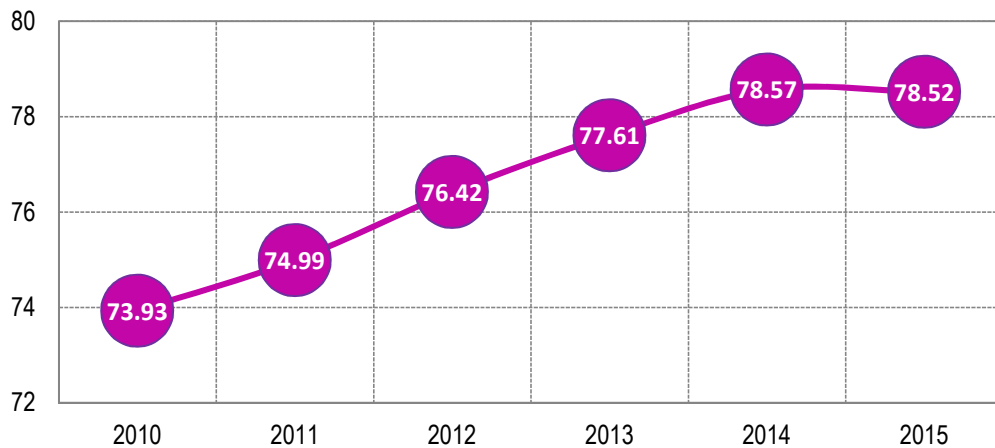
(a) Angka Melek Huruf (%)

(b) Angka Harapan Hidup (Tahun)

Indeks pembangunan gender di provinsi Papua digunakan untuk melihat bagaimana penduduk di Papua mempunyai kesempatan untuk dapat mengakses hasil pembangunan, dan memanfaatkan haknya untuk mendapatkan pendapatan, kesehatan, pendidikan dan lain-lain. Dari data yang ada terlihat bahwa IPG provinsi Papua mengalami perkembangan, yang mana pada tahun 2010 tercatat 73,93% meningkat 4,64 point menjadi 78,52% di tahun 2015. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran aktif perempuan dalam pelaksanaan pembangunan di provinsi Papua semakin besar, walaupun masih di bawah Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia yang berada di angka 92.74% (sambutan menteri negara pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak RI, Desember 2016). Kondisi ini mengindikasikan bahwa peran aktif Gender dalam

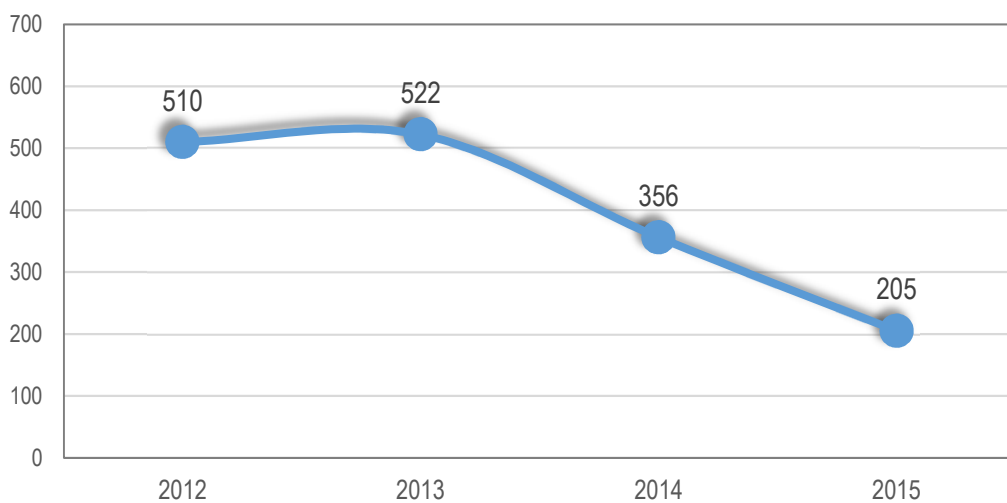
pembangunan di Provinsi Papua jika dibandingkan dengan peran aktif Gender dalam pembangunan secara Nasional masih rendah.

Gambar 2.32.
Indeks Pembangunan Gender Di Provinsi Papua Tahun 2010 dan 2015



Dalam 5 tahun terakhir terlihat kasus KDRT di provinsi Papua angkanya cenderung menurun. Tahun 2012 KDRT tercatat 510 kasus, kemudian naik menjadi 522 kasus di tahun 2013, dan selanjutnya di tahun 2014 terlihat terus menurun signifikan sehingga di tahun 2015 tercatat 205 kasus. Secara rata-rata KDRT di provinsi Papua tercatat sebanyak 398 pertahun dalam kurun waktu 2012-2015.

Gambar 2.33.
Jumlah Kasus KDRT Di Provinsi Papua Tahun 2012-2015



Sumber : Polda Papua

2.1.3.6. Kepemudaan dan Olah Raga

Pemerintah Daerah sangat memperhatikan peningkatan kapasitas para pemuda untuk mendapatkan pencapaian terbaik di segala bidang, baik itu dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, organisasimaupun bidang olahraga. Menurut UU Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan yang dimaksud pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun. Ini berarti generasi muda dapat dikatakan penduduk yang berusia antara 0 - 30 tahun.

Berdasarkan data BPS Provinsi Papua Tahun 2016, jumlah penduduk Provinsi Papua adalah sebanyak 3.207,40 ribu jiwa. Dimana jika dirinci menurut usia generasi muda kondisinya sebagai berikut :

Tabel. 2.25.
Jumlah Penduduk Papua Menurut Kelompok Generasi Tahun 2016

Usia	Jumlah (ribu)	Kelompok Generasi	Proporsi (%)
0 - 4	331.60	Balita	10.34
5 - 9	321.80	Usia Sekolah dan Remaja	19.89
10 - 14	316.10		
15 - 19	312.70	Pemuda	37.34
20 - 24	309.30		
25 - 29	297.10		
30 - 34	278.60		
35+	1,040.20	Lainnya (bukan pemuda)	32.43
Total	3,207.40		

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Terlihat bahwa pada Tabel 2.25 di atas jumlah penduduk yang tergolong generasi muda sangat mendominasi komposisi penduduk di Provinsi Papua tahun 2016. Kurang lebih mencapai 67,57% penduduk di Papua merupakan generasi muda, dimana sekitar 37,34% yang tergolong pemuda atau sebanyak 1.197,70 ribu jiwa. Penduduk dengan usia sebanyak inilah yang harus dibangun dan dibina oleh pemerintah provinsi untuk dikembangkan dan ditingkatkan segala potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda, sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang.

Dalam undang-undang juga telah ditegaskan bahwa pemberian layanan kepada pemuda harus diwujudkan dengan memberikan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda. Terkait dengan hal tersebut, Provinsi Papua selama ini telah memberikan fasilitas dan dukungan terhadap pemuda untuk pengembangan karir dan potensi mereka. Misalkan melalui Karang Taruna Papua sebagai wadah pengembangan generasi muda dalam bidang layanan sosial kepada masyarakat dan lingkungan. Kemudian HIPMI (Himpunan Pengusaha Muda Indonesia) Papua sebagai wadah untuk menjadikan pemuda Papua sebagai pengusaha muda yang handal dan mandiri, dengan cara melibatkan para pengusaha muda Papua untuk memanfaatkan berbagai peluang bisnis. Selain itu kelompok-kelompok pemuda yang berada dalam lingkungan pendidikan juga selalu dibina dan dibangun karakternya agar dapat menjadi calon pemimpin dan penerus bangsa dimasa mendatang, misalkan pembinaan terhadap Himpunan Pelajar dan Mahasiswa, BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Perguruan Tinggi, GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Papua, HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Papua, dan sebagainya. Adapun dibidang politik, pemerintah provinsi selama ini juga telah memberikan wadah yang dapat diakses oleh seluruh pemuda Papua misalkan KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia) Papua yang tersebar di seluruh DPD kabupaten/kota dan DPC distrik. Secara keseluruhan, total jumlah organisasi kepemudaan sampai dengan tahun 2015 adalah 44 organisasi (Disorda Provinsi Papua, 2017).

Pemuda selalu diidentikan dengan prestasinya di bidang olah raga, termasuk juga untuk pemuda Papua. Berbagai prestasi cabang olah raga telah dicetak oleh para pemuda Papua. Segudang prestasi di level nasional, regional dan internasional sudah diukir anak-anak Papua pada berbagai cabang olahraga. Indonesia pun turut bangga. Duta-duta olahraga asal Papua ini tak hanya mengharumkan nama Papua, tapi juga bangsa Indonesia di ajang internasional. Sebut saja Lisa Rumbewas yang sukses meraih medali perak pada Olimpiade tahun 2000 di Beijing,

Perlina Karoba dengan medali perunggu di Asian Games Doha Qatar, Ruli Nere dan Metu Duaramuri di cabang sepak bola. Pada level Asia Tenggara, ada Franklin Burumi yang sukses merebut medali emas pada Sea Games di cabang atletik untuk nomor bergengsi 100 meter. Di era sebelumnya, pada cabang atletik, para pendahulu Franklin Burumi juga mencatat prestasi yang sama (Enembe, 2017).

Semua fakta di atas tidak dapat dipisahkan dari peran pemerintah provinsi dalam memberi pembinaan dan pengembangan olah raga di tanah Papua selama ini. Berbagai bangunan gedung yang disediakan oleh pemerintah daerah menjadi tempat pengembangan kemampuan para pemuda Papua dalam bidang olahraga, seperti halnya stadion lapangan bola dan atletik, lapangan tenis, Futsal, Gedung Olah Raga dan lain-lainnya. Selain itu juga pemerintah provinsi melakukan pembinaan terhadap organisasi-organisasi olah raga dan klub-klub olahraga. Dimana semua ini memberi dampak terhadap peningkatan olahragawan yang berprestasi, yang dari tahun ketahunnya selalu mengalami kenaikan. Selengkapnya semua ini dapat dilihat pada Tabel 2.26 berikut.

Tabel. 2.26.
Pembangunan Olahraga Di Provinsi Papua
Tahun 2013-2015

Indikator Pembangunan Olahraga	2013	2014	2015
Gedung Olah Raga (unit)	8	8	10
Olahragawan Berprestasi (orang)	32	43	115
Organisasi Olahraga (organisasi)	43	43	44
Klub Olahraga (klub)	105	112	114

Sumber : Disorda Provinsi Papua, 2017

Papua sebagai gudang atlet tiada hentinya selalu mencetak prestasi di setiap event olah raga. Sebagai contoh di event bergengsi nasional yaitu PON (Pekan Olah Raga Nasional), Provinsi Papua selalu dapat

mempertahankan posisinya di peringkat 10 besar mulai tahun 1981, sebagaimana yang disajikan dalam Tabel 2.27 berikut ini.

Tabel. 2.27.
Peringkat Provinsi Papua Dalam Pekan Olah Raga Nasional
Periode 1973-2016

Tahun	Event	Prestasi				
		Emas	Perak	Perunggu	Jumlah	Peringkat
1973	PON VIII	1	4	7	12	15
1977	PON IX	7	14	7	28	10
1981	PON X	13	24	19	56	7
1985	PON XI	23	24	26	73	5
1989	PON XII	23	23	16	62	6
1993	PON XIII	17	14	16	47	6
1996	PON XIV	17	17	16	50	6
2000	PON XV	18	17	23	58	7
2004	PON XVI	23	13	18	54	7
2008	PON XVII	14	23	16	53	11
2012	PON XVIII	9	11	16	36	15
2016	PON XIX	19	18	32	69	7

Sumber : dihimpun dari berbagai sumber

Posisi yang gemilang sempat ditorehkan Provinsi Papua di PON XI Tahun 1985. Kala itu Provinsi Papua mampu berada di peringkat ke-5 dengan perolehan medali sebanyak 73 buah dari 27 Cabang (Cabang Olah Raga) yang diikuti. Meskipun terjadi penurunan peringkat namun sampai dengan tahun 2004 Provinsi Papua masih berada di posisi 10 besar di Indonesia. Akan tetapi di PON XVII – XVIII prestasi Provinsi Papua menurun tajam, karena sudah tidak ada lagi di posisi 10 besar. Kemudian di tahun 2016 pada PON XIX, kembali Provinsi Papua dapat mengoreksi peringkatnya naik ke posisi 10 besar berada di urutan ke-7, dengan total medali yang diperoleh hampir menyamai prestasi di PON XI sebelumnya yaitu sebanyak 69 buah medali.

Pada PON XIX yang diadakan di Provinsi Jawa Barat, Provinsi Papua menyertakan kontingennya untuk mengikuti 25 Cabang (Cabang Olah Raga), diantaranya atletik, dayung, sepak bola, basket, wushu, dan sebagainya. Cabang yang paling banyak menyumbangkan medali emas adalah Dayung, Selam, Bilyar dan Dansa. Total perolehan medali emas dari keempat Cabang tersebut sebanyak 10 buah medali. Sepak bola yang sangat dibanggakan oleh Papua, saat itu hanya mampu memberikan medali perunggu. Selengkapnya perolehan medali dari setiap Cabang pada PON XIX yang diperoleh kontingen Provinsi Papua sebagai berikut.

Tabel. 2.28.
Perolehan Medali Kontingen Provinsi Papua Pada PON XIX
Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016

No	Cabang Olah Raga	Emas	Perak	Perunggu	Total
1	Dayung	4	5	5	14
2	Selam	2	2	0	4
3	Bilyar	2	1	0	3
4	Dansa	2	0	3	5
5	Atletik	1	2	1	4
6	Terbang Layang	1	1	1	3
7	Tenis Lapangan	1	0	3	4
8	Pabsi	1	0	2	3
9	Karate	1	0	1	2
10	Berkuda	1	0	1	2
11	Hoki Field	1	0	1	2
12	Sepatu Roda	1	0	0	1
13	Tarung Derajat	1	0	0	1
14	Tinju	0	2	1	3
15	Layar & Selancar	0	1	4	5
16	Menembak	0	1	1	2
17	Hoki Indor	0	1	1	2
18	Kempo	0	1	0	1
19	Softball	0	1	0	1
20	Tenis Meja	0	0	2	2
21	Bola Basket	0	0	1	1
22	Sepakbola	0	0	1	1
23	Drumband	0	0	1	1

No	Cabang Olah Raga	Emas	Perak	Perunggu	Total
24	Voli Pasir	0	0	1	1
25	Wushu	0	0	1	1
Total		19	18	32	69

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwisata, industri dan lain sebagainya. Adapun potensi pengembangan wilayah sebagaimana dokumen spasial, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua tahun 2013-2033 maka potensi pengembangan wilayah dalam jangka panjang adalah sebagai berikut.

(a). Perikanan

Di sektor perikanan, produksi Perikanan darat dan perikanan laut cenderung meningkat, ini terlihat dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Dimana tahun 2014, Produksi perikanan tercatat 309.687 ton yang terdiri dari 290.439 ton perikanan laut, 8.705 ton dari perairan umum dan 7.096 ton dari perikanan budidaya. Adapun kondisi produksi perikanan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.29.
Produksi Perikanan menurut Sub Sektor Perikanan
Provinsi Papua 2011-2014

Sektor		2011	2012	2013	2014	Satuan
Perikanan Laut		269.257,80	281.479,10	286.340,10	290.439	Ton
Perikanan Darat :						
1	Perairan Umum	7.624,80	7.790,80	7.830,80	8.705	Ton
2	Budidaya	4.350,70	5.770,30	9.096,70	7.574	Ton
Jumlah		281.233,30	295.040,20	303.267,60	309.687	Ton

Sumber: Papua Dalam Angka, 2015

(b). Pertanian

Sejak terjadi pemekaran Provinsi Papua, luas areal panen tanaman padi Provinsi Papua terus meningkat. Tahun 2010 seluas 26.686 ha, kemudian meningkat menjadi 29.262 tahun 2011 dan meningkat lagi menjadi 37.149 tahun 2012, pada tahun 2013 areal tanam padi telah meningkat menjadi 41.111 ha, pada tahun 2014 areal tanam padi telah meningkat menjadi 44.493 ha. Luas areal tanam ini sejalan dengan jumlah produksi yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 jumlah produksi 196.015 ton, meningkat dari tahun sebelumnya 169.791 ton. Keadaan jumlah produksi kedelai cenderung stabil, sedangkan produksi tanaman jagung yang cenderung tidak stabil. Adapun kondisi pertanian dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.30.
Gambaran Keadaan Pertanian di Provinsi Papua 2010-2014

Pertanian		2010	2011	2012	2013	2014	Satuan	
a. Padi								
	1	Luas Areal Panen	26.686	29.262	37.149	41.111	45.493	ha
	2	Jumlah produksi	102.610	115.438	138.032	169.791	196.015	ton
	3	Rata-rata produksi	11,03	11,15	11,14	12,29	43,09	kw/ha
b. Jagung								
	1	Luas Areal Panen	3.903	3.825	3.553	3.005	3.076	Ha
	2	Jumlah produksi	6.834	6.885	6.393	7.034	7.283	Ton
	3	Rata-rata produksi	17,51	18,00	17,99	23,41	23,68	kw/ha
c. Kedelai								
	1	Luas Areal Panen	3.763	3.549	3.732	3.750	3.384	ha
	2	Jumlah produksi	4.152	3.958	4.156	4.609	3.983	ton
	3	Rata-rata produksi	11,03	11,15	11,14	12,29	11,77	kw/ha

Sumber : Papua Dalam Angka, 2015

(c). Kehutanan

Kawasan hutan dibagi menjadi beberapa kelompok sesuai dengan fungsinya yaitu :

1. Hutan Produksi, yaitu kawasan hutan yang diperuntukkan bagi produksi kayu, rotan, getah, dan hasil hutan lainnya. Hutan produksi ini terdiri dari hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas meliputi

35% dari luas kawasan hutan di Papua (kurang lebih 10.700.567 hektar);

2. Hutan Lindung, yaitu kawasan hutan yang memiliki sifat fisik yang khas yang harus dijaga keberadaannya sehingga fungsinya terutama sebagai pengatur tata air, dapat dipelihara dan dipertahankan. Luas hutan lindung adalah 7.815.283 hektar atau 26% dari luas seluruh kawasan hutan yang ada;
3. Hutan Suaka Alam dan Hutan Wisata, meliputi kawasan seluas kurang lebih 7.755.288 hektar atau 26% kawasan hutan di Papua dan kawasan hutan ini diperuntukan bagi perlindungan dan pelestarian sumber plasma nutfah dan sistem penyangga kehidupan, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan pariwisata;
4. Hutan Konversi yaitu kawasan hutan yang karena keadaan serta kemungkinan-kemungkinannya dapat dikonversi menjadi peruntukan lain seperti pertanian, perkebunan dan pemukiman. Luas hutan konversi saat ini kurang lebih 4.116.365 hektar atau 14% dari luas kawasan hutan yang ada di Papua.

Luas hutan mangrove di Provinsi Papua seluas 1.053.841,09 hektar. Kabupaten/kota yang memiliki wilayah kawasan hutan mangrove terluas adalah kabupaten Asmat, Mimika, Waropen, Kepulauan Yapen, dan Nabire. Potensi Kayu bakau terdiri dari diameter 7-9 cm kisaran potensi 190-307 batang/ha, diameter 10 cm Up kisaran 60- 80 batang/ha atau 50-70 m³/ha. Jenis hasil hutan bakau terdiri dari: Komersil ekspor (bakau dan tumuk) dan Komersil Lokal (Langadai, Tengar, Nyirih, Gedabu, Api-api). Potensi tegakan bakau hampir beragam pada diameter 10 cm Up yaitu 10 pohon per hektar atau 39,93 m³/ha. Adapun kondisi hutan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.31.
Kawasan Hutan sesuai Fungsinya di Provinsi Papua

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)	Persen
1.	Kawasan Konservasi (KSA/KPA)	7.755.288	25,52
2.	Hutan Lindung (HL)	7.815.283	25,72
3.	Hutan Produksi Terbatas (HPT)	5.961.240	19,62
4.	Hutan Produksi (HP)	4.739.327	15,60
5.	Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HPK)	4.116.365	13,55
	Jumlah	30.387.499	100

Sumber: RTRW Provinsi Papua Tahun 2013-2033

(d). Peternakan

Menurut jenisnya, populasi ternak di Provinsi Papua terbagi atas dua jenis, yaitu ternak besar (kuda, sapi, kerbau, dan sapi perah) dan ternak kecil (kambing, domba, dan babi). Gambaran tabel tersebut menunjukkan bahwa dari tahun 2009 sampai dengan 2015, pemeliharaan hewan kecil masih jauh lebih banyak dibandingkan hewan besar. Data terakhir Pada data tabel memperlihatkan tahun 2015 jumlah hewan kecil mencapai 772.635 ekor, sedangkan hewan besar berjumlah 102.557 ekor. Adapun kondisi peternakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.32.
Populasi Ternak Menurut Jenis Ternak di Provinsi Papua 2009 – 2015

Peternakan		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ternak Besar								
1	Kuda	1.548	1.595	1.599	1.421	1.559	1.611	1.635
2	Sapi	71.669	78.372	81.796	88.347	79.574	94.865	100.135
3	Kerbau	1.117	1.167	1.239	1.460	549	751	787
4	Sapi Perah	-	7	11	15	5	-	-
Jumlah		74.334	81.141	84.645	91.243	81.687	97.227	102.557
Peternakan		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Ternak Kecil								
1	Kambing	41.438	43.253	32.648	34.636	35.251	49.247	49.849
2	Domba	90	99	28	20	11	14	18
3	Babi	517.287	518.399	518.963	577.407	579.024	680.099	722.768
Jumlah		558.815	561.751	551.639	612.063	614.286	729.360	772.635

Sumber: Papua Dalam Angka, 2016

(e) Perkebunan

Pada tahun 2014, sebanyak 115.797 petani di Provinsi Papua terlibat dalam perkebunan rakyat. Luas areal tanaman perkebunan rakyat adalah sebesar 117.992 hektar dengan produksi tanaman perkebunan rakyat sebesar 87.282 ton. Luas tanaman yang terbesar pada perkebunan rakyat adalah coklat yaitu 33.590 ha dengan produktivitas 804,77 kg/ha dan jumlah petani 30.032. Sedangkan produksi terbanyak adalah Sagu yaitu sebesar 42.793 ton dengan rata-rata produksi 936,97 kg/ha dan jumlah petani 8.477. Adapun kondisi perkebunan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 2.33.
Gambaran Keadaan Perkebunan Rakyat Menurut Jenis Tanaman Di Provinsi Papua 2014

No	Perkebunan	Luas Tanaman	Produksi	Produktifitas (kg/ha)	Jumlah Petani
1	Karet	4.297	3.285	983,71	4.153
2	Kelapa Sawit	17.795	13.802	2.688,74	14.236
3	Kopi	7.965	1.771	310,69	8.993
4	Kelapa Dalam	31.416	14.175	936,97	41.284
5	Cokelat	33.590	9.639	804,77	30.032
6	Cengkeh	576	3	225,00	288
7	Jarak	658	278	1.195,74	263
8	Lada	45	6	407,41	23
9	Kapok Randu	799	35	129,71	370
10	Jambu Mente	4.831	574	442,40	3.790
11	Pisang	3.304	921	263,98	3.888
12	Sagu	12.716	42.793	1.404,80	8.477
	J u m l a h	117.992	87.282	9.793,92	115.797

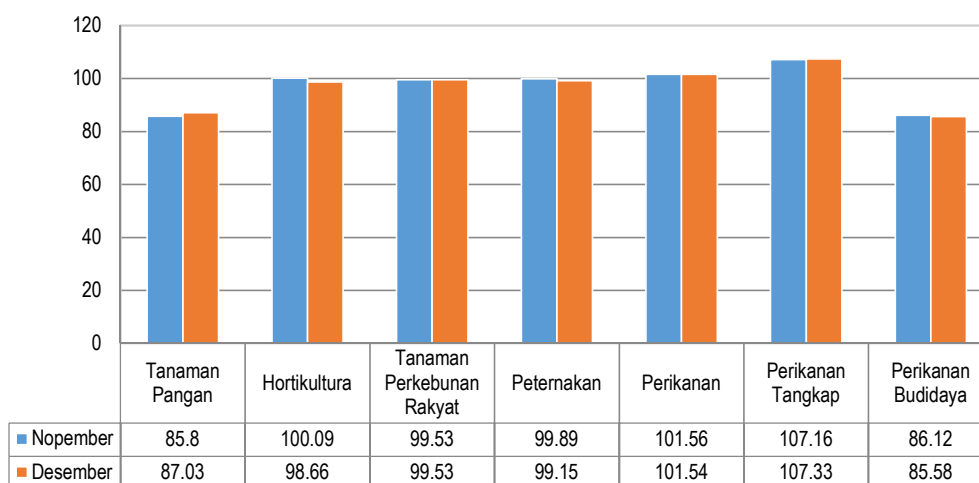
Sumber: Papua Dalam Angka, 2015

(f) Nilai Tukar Petani

Salah satu indikator untuk melihat kemampuan/daya beli petani di perdesaan adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yang diperoleh dari perbandingan indeks harga diterima petani terhadap harga dibayar petani (dalam persen). NTP juga menunjukkan daya tukar dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP, secara relatif, semakin kuat pula tingkat kemampuan daya beli petani.

NTP Papua pada Desember 2016 mengalami penurunan -0,11 persen menjadi 94,49 dibandingkan NTP November 2016. Berdasarkan pemantauan harga pedesaan di beberapa daerah di Papua, penurunan indeks NTP disebabkan oleh perubahan indeks harga diterima petani sebesar 0,67 persen lebih rendah dari perubahan indeks harga dibayar petani yang mengalami kenaikan sebesar 0,78 persen.

Gambar 2.34.
Nilai Tukar Petani (NTP) Menurut Subsektor
Provinsi Papua Tahun 2016



Sumber : BPS Provinsi Papua, Tahun 2016

Pada grafik di atas menunjukkan perkembangan NTP Papua bulan Desember 2016 dengan bulan sebelumnya dimana 1(satu) subsektor yang mengalami kenaikan indeks yaitu subsektor Tanaman Pangan naik 1,43%. Sedangkan subsektor Hortikultura turun -1,43%; subsektor Peternakan turun -0,75%; dan subsektor Perikanan turun -0,02%. Subsektor Tanaman Perkebunan Rakyat tidak mengalami perubahan angka indeks terendah sebesar 0,46%.

2.1.4.1. Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur mempunyai peran yang penting dan pemicu pembangunan suatu kawasan/wilayah untuk menunjang daya saing daerah dalam hubungannya dengan ketersediaannya (*availability*) dalam

mendukung aktivitas ekonomi daerah di berbagai sektor di daerah dan antar-wilayah.

Peran infrastruktur dalam pembangunan daerah dapat dilihat dari sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kontribusinya terhadap peningkatan kualitas hidup. Menurut Kirmanto (2005) ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula, dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas.

2.1.4.1.1. Panjang Jalan Dan Jembatan

Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Provinsi Papua tahun 2016 tercatat jalan yang telah dibangun adalah sepanjang 2.957,64 km. Kondisi ini tidak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2015, namun dengan tahun 2014 terlihat ada peningkatan pembangunan jalan yang sangat signifikan yaitu sebesar 1.505,51 km, karena pada tahun 2014 tercatat panjang jalan di Provinsi Papua baru mencapai 1.452,13 km. Lihat Tabel 2.34 berikut ini.

Tabel. 2.34.
Panjang Jalan Di Provinsi Papua Menurut Permukaan Dan Kondisi Jalan Tahun 2014 - 2016

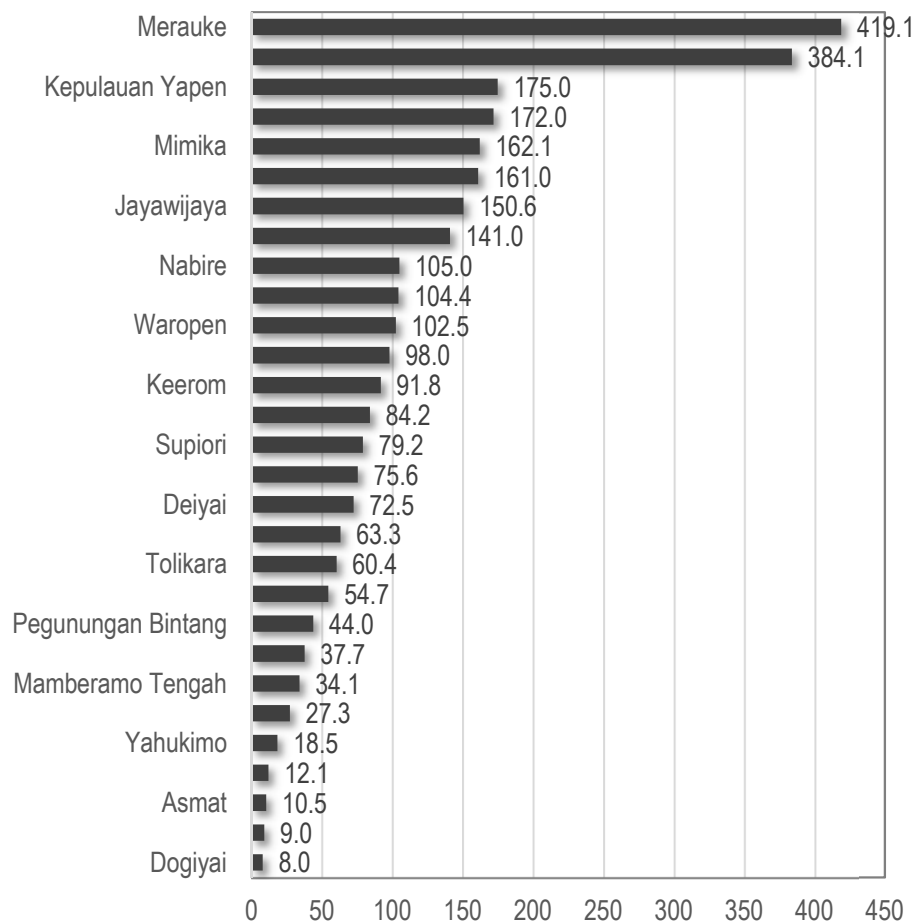
Tahun	Panjang Jalan Menurut Permukaan (km)			Panjang Jalan Menurut Kondisi Jalan (km)				
	Aspal	Lainnya	Jumlah	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Jumlah
2014	640,74	811,39	1 452,13	974,12	-	259,32	218,69	1 452,13
2015	999,40	1 958,16	2 957,56	972,50	828,91	312,70	843,45	2 957,56

2016	1 025,18	1 932,46	2 957,64	1 014,78	378,60	611,20	953,22	2 957,64
-------------	----------	----------	----------	----------	--------	--------	--------	----------

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Pada Tabel 2.34 di atas juga terlihat jelas bahwa sampai tahun 2016 panjang jalan yang telah diaspal sudah mencapai 1.025,18 km atau sekitar 34,66% dari total panjang jalan yang ada. Dimana jika dibandingkan dengan tahun 2014 tampak terjadi peningkatan permukaan jalan aspal sepanjang 384,44 km atau naik tinggi mencapai 60%. Hal ini tidaklah sama dengan kondisi jalan yang sudah terbangun, hingga tahun 2016 jalan dalam kondisi baik hanya dapat ditingkatkan 4,17% jika dibandingkan dengan tahun 2014. Sementara jalan dalam kondisi rusak (ringan dan berat), rata-rata setiap tahunnya mengalami kenaikan 88,59%. Fenomena ini mengindikasikan bahwa pembangunan jalan di Provinsi Papua selama itu tidak diiringi dengan peningkatan pemeliharaan jalan (reservasi) secara proporsional. Sehingga terlihat persentase kenaikan jalan yang rusak lebih cepat dibandingkan penambahan pembangunan jalan.

Gambar 2.35.
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016
(dalam Km)



Sumber : BPS Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Jalan provinsi terlihat lebih banyak dibangun di Kabupaten Merauke dan Jayapura, masing-masing sepanjang 419,1 km dan 384,1 km (lihat Gambar 2.35). Dengan kata lain sekitar 27,16% dari total panjang jalan provinsi berada di kedua kabupaten tersebut. Sedangkan yang terendah di Kabupaten Dogiyai dan Intan Jaya, kurang dari 10 km. Disini terlihat jelas ada ketimpangan pembangunan jalan yang cukup mencolok. Dimana dapat dikatakan konsentrasi pembangunan jalan di Provinsi Papua masih berada di pusat-pusat wilayah kabupaten induk, seperti di Kabupaten Jayapura, Merauke, Jayawijaya, Biak Numfor, Nabire dan Mimika. Situasi ini sudah barang tentu berdampak terhadap ketimpangan wilayah yang akan semakin melebar.

Untuk mengatasi hal tersebut, maka pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, ditargetkan seluruh wilayah Papua dan Papua Barat terhubung

dengan Jalan Nasional di tahun 2019. Jalan nasional yang kali ini diberi nama Trans Papua panjangnya 4.325 km terdiri atas 2.902 km di Provinsi Papua dan 1.423 km di Provinsi Papua Barat. Berdasarkan laporan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sampai dengan tahun 2015 tercatat kondisi panjang jalan Trans Papua yang dapat direalisasikan sebagai berikut.

Tabel. 2.35.
Panjang Jalan Dan Jembatan Trans Papua Tahun 2015

Nama Ruas Jalan Trans Papua	Target (km)	Realisasi (km)			Jembatan (m)
		Aspal	Tanah	Total	
Merauke-Tanah Merah-Waropko	534	479	55	534	638
Waropko-Oksibil	136	5	65	70	800
Dekai-Oksibil	225	12	185	197	2160
Kenyam-Dekai	180	-	10	10	1100
Wamena-Habema-Kenyam-Mamug	295	25	233	258	567
Wamena-Elelim-Jayapura	585	342	128	470	620
Wamena-Mulia-Ilaga-Enarotali	466	51	186	237	1440
Wagete-Timika	196	81	91	172	640
Enarotali-Wagete-Nabire	285	285	-	285	152
Total	2902	1280	953	2233	8117

Sumber : Kementerian PUPR,2015 (data diolah)

Ini berarti realisasi panjang jalan Trans Papua hingga tahun 2015 sudah mencapai 76,95 persen dengan sisa panjang jalan yang belum terealisasi 669 km. Ruas jalan Trans Papua yang sangat rendah pencapaian realisasinya adalah ruas Kenyam - Dekai, baru mencapai 5% dari target yang ditetapkan sepanjang 180 km, atau masih ada 170 km yang harus dibangun. Sedangkan ruas jalan yang sudah 100 persen direalisasikan adalah ruas Merauke-Tanah Merah-Waropko dan Enarotali-Wagete-Nabire.

Menurut Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) untuk membangun jalan Trans Papua sejauh 827 km dengan lebar rata-rata 9 meter di Provinsi Papua dan Papua Barat dibutuhkan anggaran Rp. 12,53 triliun. Sedangkan menurut Kepala Balai Jalan dan Jembatan X

Provinsi Papua, untuk membangun jalan sepanjang 827 km tersebut membutuhkan biaya kurang lebih Rp. 15 triliun (tabloidjubi.com). Jika diambil titik tengahnya maka dapat dikalkulasi kebutuhan biaya pembangunan jalan Trans Papua setiap satu kilometernya yaitu sebesar Rp. 16,79 milyar. Sehingga untuk merealisasi sisa pembangunan jalan Trans Papua sepanjang 669 km untuk 5 tahun mendatang paling tidak dibutuhkan anggaran sekitar Rp. 11,67 triliun atau perlu disiapkan anggaran pertahunnya sebesar Rp. 2,79 triliun.

2.1.4.1.2. Aksesibilitas daerah

Aksesibilitas daerah dapat diketahui dengan menghitung Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan yang dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan.

Tabel. 2.36.
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Dan Arus Penumpang

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015
1.	Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	Unit/Km	1:18	1:91	1:96
2.	Jumlah arus penumpang angkutan umum per tahun.	Orang	3.472.236	3.759.034	3.880.282

Dari Tabel 2.33, terlihat bahwa Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan provinsi Papua dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 tercatat 1:18 meningkat menjadi 1:91 pada tahun 2014 dan menjadi 1:96 pada tahun 2015. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan jumlah kendaraan di Provinsi Papua dari tahun 2013 sebanyak 52.183 menjadi 432.126 kendaraan pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 menjadi 456.377 unit . Sementara itu panjang jalan yang ada

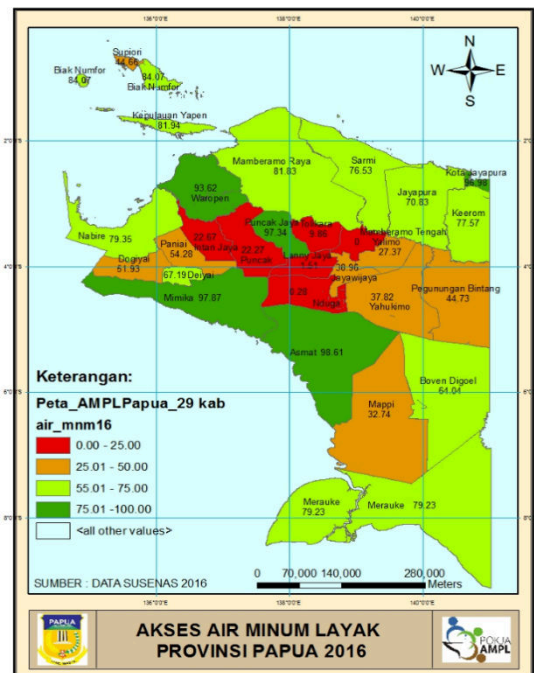
masih berada pada angka 4.748.31 Km, sehingga dapat dikatakan kondisi arus lalu lintas jalan semakin padat.

Pada indikator jumlah arus penumpang angkutan umum yang terangkut juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2013-2015, yang secara rata-rata mencapai 3.703.851 orang. Dimana berdasarkan Tabel 2.30 di atas dapat dilihat arus penumpang setiap tahunnya mengalami peningkatan rata-rata mencapai 5,74%. Dimana pada tahun 2013 tercatat sebanyak 3.472.236 orang meningkat menjadi 3.880.282 orang atau meningkat sebesar 408.046 orang(11,75%). Hal ini menunjukkan bahwa arus penumpang yang datang maupun yang meninggalkan Papua semakin banyak. Kondisi ini dapat menggambarkan bahwa konektivitas antara wilayah dari Papua ke luar wilayah Papua dan sebaliknya, juga semakin terbuka. Dengan semakin terbukanya konektivitas antar wilayah diharapkan akan meningkatkan akses pembangunan di Provinsi Papua sehingga dapat meningkatkan pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

2.1.4.1.3. Sanitasi

Air dan sanitasi merupakan satu kesatuan yang penting dalam kehidupan. Tanpa sanitasi yang baik maka keadaan lingkungan akan menjadi kotor, kuantitas dan kualitas air akan menurun. pembahasan mengenai air tidak hanya membahas tentang air yang kita minum, melainkan juga mengenai bagaimana menjaga hutan apabila rusak sehingga menyebabkan berkurangnya sumber daya air. Oleh karena itu Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Provinsi Papua terus mengkampanyekan pentingnya setiap daerah kabupaten/kota sadar sanitasi.

Gambar 2.36.
Peta Akses Air Minum Layak Dan Sanitasi Layak
Di Provinsi Papua Tahun 2016



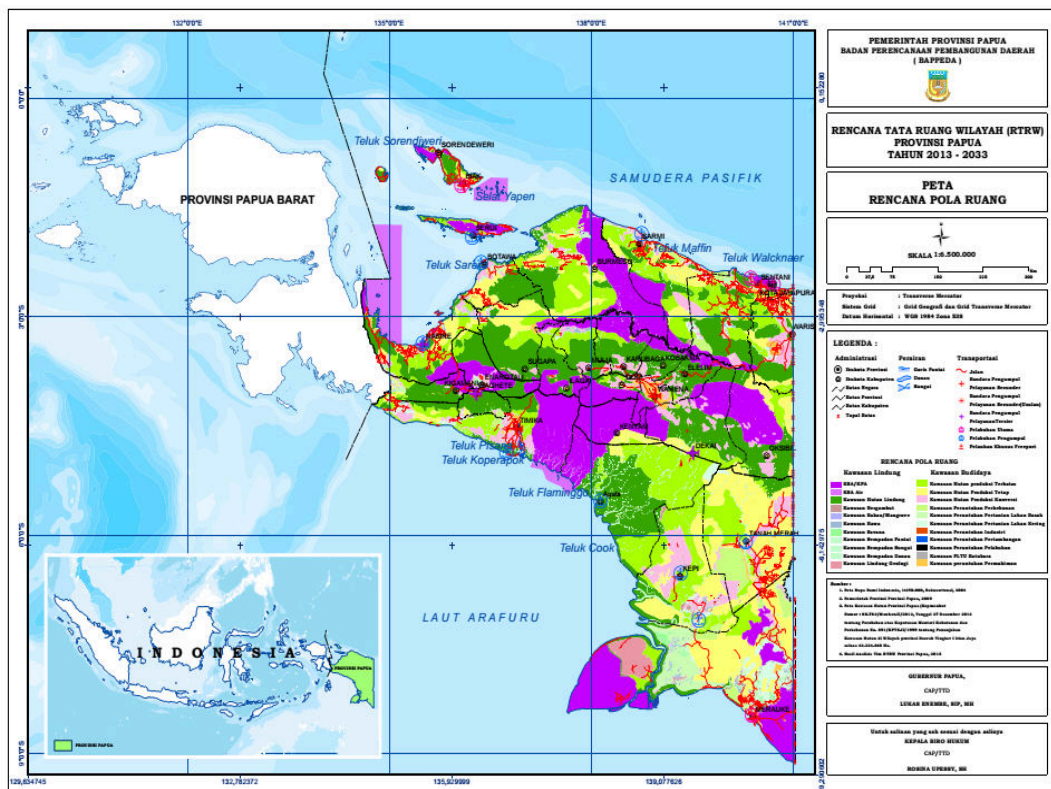
Sampai dengan tahun 2016 jumlah keluarga yang dapat mengakses air minum layak di Provinsi Papua baru mencapai 57,51%, dan yang memiliki sanitasi yang baik dan layak hanya 27,60%, lihat Gambar 2.35 di atas. Kondisinya sangat jauh dibawah data nasional, dimana menurut Kementerian Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menkon PMK) saat ini terdapat 63% untuk akses air minum layak, dan 53% yang menggunakan sanitasi layak.

Terkait dengan kondisi semacam itu, maka program akses air minum dan sanitasi harus dapat diperluas agar dapat menjangkau wilayah-wilayah padat penduduk, wilayah perdesaan, wilayah nelayan, dan daerah tertinggal lainnya. Upaya perluasan akses air minum dan sanitasi yang layak, selain melalui Program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat juga dilakukan melalui Pembangunan Berbasis Masyarakat menggunakan APB Kampung yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Kampung.

2.1.4.1.4. Tata Ruang

Tujuan penataan ruang wilayah di Provinsi Papua yaitu Provinsi Papua mewujudkan tata ruang lestari, aman, nyaman dan produktif untuk menjamin kualitas hidup masyarakat dengan memperhatikan kearifan lokal dan karakteristik ekosistem Papua. Penataan Ruang di Provinsi Papua telah diatur pengelolaan dan sanksinya oleh Peraturan Daerah Provinsi Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2013-2033. Pelestarian dan peningkatan fungsi daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, dan melestarikan keunikan bentang alam.

Gambar 2.37.
Rencana Pola Ruang Provinsi Papua



Sumber: Perda Nomor 23 Tahun 2013

Tabel 2.37.
Kawasan Budidaya

WILAYAH ADAT	KABUPATEN	Kawasan Budidaya											Total Budidaya
		HPK	HPT	HP	Industri	Pelembuan	Perkebunan	Permukiman	Pertambangan	PLB	PLK	PLTU Batubara	
HANIM	ASMAT	6.353,16	329.636,32	35.788,87				6.696,28		181,90	37.415,41		416.071,95
	MERAUKE	111.109,29	184.382,81	870.079,07				120.562,02		493.641,78	273.910,37		2.272.140,71
	MAPPI	438.655,04	291.157,50	426.073,81				11.703,98		15.207,38	34.931,86		1.239.940,85
SARENI	BOVEN DIGOEL	295.406,03	356.700,10	1.246.642,51				27.897,27		9.398,51	9.942,87		2.192.888,57
	BIAK NUMFOR	778,32	35.182,24	24.382,07				33.233,22					93.575,84
	KEP.YAPEN	15.853,54	74.775,53	2.418,77				14.456,64		713,73	2.612,61		110.830,83
MAMTA	SUPIORI			1.034,39				17.753,79					18.788,18
	WAROPEN	49.971,05	11.242,72	130.985,82				28.822,18		21.266,77	9.654,00		251.942,53
	JAYAPURA	139.700,89	327.679,54	73.625,75	12.133,51			64.795,44		17.429,47	30.969,10		749.207,83
MEPAGO	KEEROM	142.355,29	165.296,54	116.016,79				35.568,20		4.982,11	26.990,12		581.636,94
	MEMBERAMO RAYA	71.895,04	571.778,66	200.479,01				15.699,81		23.153,87	2.726,17		885.732,57
	SARMI	126.988,57	326.196,07	250.855,45				54.536,19	121,73	23.159,41	21.043,94		846.276,95
LAPAGO	KOTA JAYAPURA	6.670,61	15.239,59	15.349,55				18.905,63		1.382,11	2.226,33	20,42	59.795,37
	MIMIKA	229.840,55	287.173,95	49.670,69	5,14			37.358,38	39.450,46	2.229,46	63.014,83		730.417,75
	DEIYAI	18.105,02	5.324,90	9.241,92				3.924,13			5.514,88		59.024,78
LAPAGO	DOGIYAI	18.955,35	37.363,83	17.554,46				4.464,17		13.880,12	660,82		92.878,76
	INTAN JAYA	37.937,20	103.987,34	236.888,31				13.485,08		1.526,43	7.206,11		401.030,46
	NABIRE	97.085,30	242.070,57	112.604,26				55.552,37		17.517,14	4.380,24		555.132,17
LAPAGO	PANIAI	44.765,29	48.770,64	8.149,35				7.670,54					109.355,82
	JAYAWAJAYA	52.296,41	6.842,75					89.103,11		294,99			148.537,26
	LANNY JAYA	46.219,42	17.973,66					22.322,29					86.515,37
LAPAGO	MEMBERAMO TENGAH	36.856,41	0,00					4.205,90					41.062,31
	NDUGA		10.693,02	88.566,71				1.270,59					100.530,31
	PEG. BINTANG	97.935,75	102.337,86	198.948,62				5.927,42			0,17		405.149,81
LAPAGO	PUNCAK	21.077,39	32.808,74					14.513,42		333,20	743,81		69.476,55

WILAYAH ADAT	Kawasan Budidaya											Total Budidaya	
	HPK	HPT	HP	Industri	Pelabuhan	Perkebunan	Permukiman	Pertambangan	PLB	PLK	PLTU Batubara		
KABUPATEN													
	PUNCAK JAYA	70.371.93	81.345.04				2.889.82		2.880.16	3.383.92		160.870.86	
	TOLIKARA	63.021.35	19.001.06				10.011.08		167.38	136.40		92.337.27	
	YAHUKIMO	145.618.58	96.736.82	60.002.54			17.061.66			58.12		319.477.72	
	YALIMO	54.591.28	7.744.95				11.717.33					74.053.56	
	Grand Total	2,440,394.06	3,789,442.74	4,175,358.73	12,138.66	295.64	786,947.62	39,572.19	649,345.92	537,522.12	20.42	13,144,679.88	

Tabel 2.38.
Kawasan Lindung

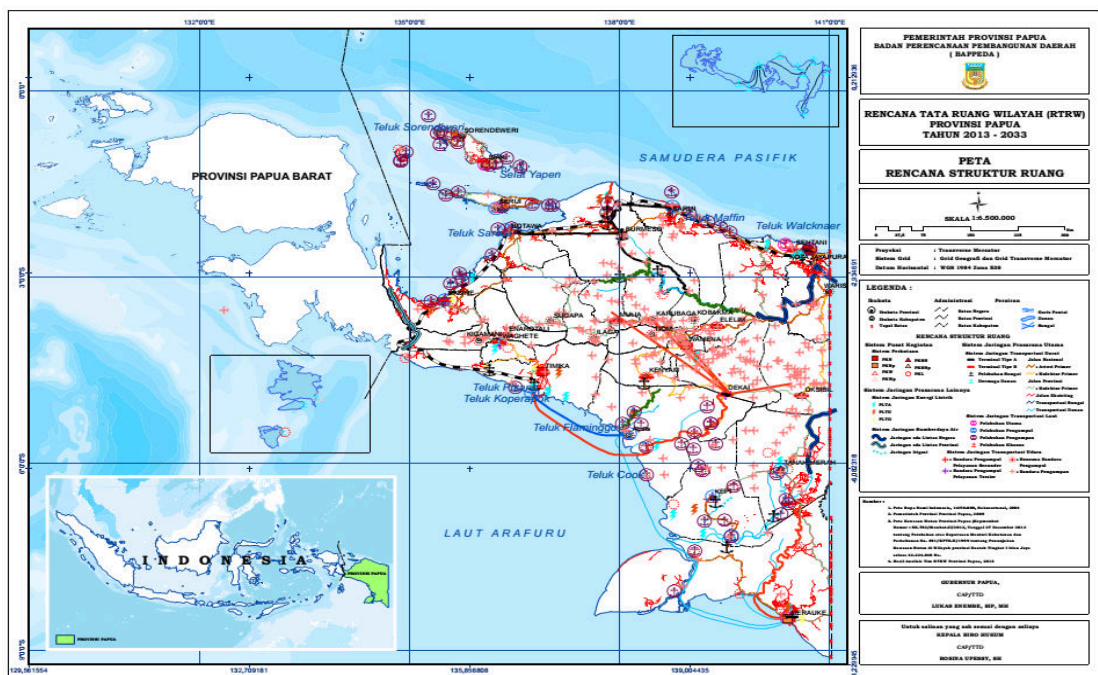
WILAYAH ADAT	Kawasan Lindung											Total Lindung	
	KABUPATEN	Kawasan Bakau	Kawasan Bergambut	Hutan Lindung	Lindung Geologi	Kawasan Rawa	Kawasan Savana	Sempadan Danau	Sempadan Pantai	Sempa dan Sungai	KSA Air		KSAKPA
HAANIM	ASMAT		173,924.53	1,089,442.55		640,331.70		0.04	18.53	104,402.66	57,318.49	332,528.96	2,397,967.45
	MERAUKE	2,643.58	68,052.34	271,206.51	284,044.23	204,658.70	98,843.39		100.63	100,522.28		1,422,837.63	2,452,909.30
	MAPPI		311,034.95	197,727.61		324,643.80	2,245.15			66,218.25			901,869.75
SAERERI	BOYENDIGOEL		84,649.08	101,490.32		60,254.89				26,633.39			273,027.66
	BIAKNUMFOR		238.04	121,634.25		742.41				14.28	173,841.03	10,205.68	306,676.58
	KEP.YAPEN SUPIORI	85.17	1,016.17	18,942.14		510.85			6.68	79.83		113,445.13	134,0896
MAMTA	WAROFEN	411.15	21,251.95	296,213.46		15,650.56		12.30		3,330.92			336,870.33
	JAYAPURA		3,999.42	534,521.84		41,388.79		22.21	3.04	16,439.41		91,011.85	687,386.56
	KEEROM		5,356.12	332,596.03		22,333.58		93.07		6,309.39		7,970.01	374,648.20
MEEPAG	MAMBERAMORAYA	419.46	29,938.05	373,468.09		281,991.19		48.53		72,653.69		920,195.54	1,678,666.02
	SARMI	146.57	28,143.89	196,172.97		87,689.25		31.68	27.01	13,887.90		229,821.09	555,937.21
	KOTAJAYAPURA		1.40	6,516.54		5,897.05			538.89	256.68		9,084.28	22,326.52
LAPAGO	MIMIKA	3.48	34,335.86	293,921.69		86,378.63				46,699.77	56,614.35	677,359.49	1,195,313.29
	DEIYAI		5.20	215,763.15		30.91				5,188.19		8,520.53	229,507.99
	DOGIYAI		826.93	240,718.22		13,178.23				3,456.19		94,655.67	352,835.25
PEG.BINTANG	INTANJAYA		12,491.95	560,894.99		93,417.36				3,796.62		47,685.93	718,286.85
	NABIRE	118.49	106,231.50	327,985.36		26,138.85		37.31	441.83	13,914.17	740,659.84	131,614.48	1,347,141.84
	PANAI		2,338.68	277,137.69		4,481.03				16,005.01		243,166.81	543,129.23
	JAYAWUJAYA			17,828.63						970.26		75,899.84	94,668.72
	LANNYJAYA			55,380.54						245.50		220,777.29	276,403.33
PEG.BINTANG	MAMBERAMOTENGAH			214,622.72						5,876.64		66,830.30	287,329.67
	NDUGA			151.26		24,181.08				4,687.46		525,872.69	554,892.49
PEG.BINTANG			486,447.11		12,611.85				11,511.46		520,181.36	1,030,751.79	

WILAYAH ADAT	Kawasan Lindung											Total Lindung	
	KABUPATEN	Kawasan Bakau	Kawasan Bergambut	Hutan Lindung	Lindung Geologi	Kawasan Rawa	Kawasan Savana	Sempadan Danau	Sempadan Pantai	Sempadan Sungai	KSA Air		KSA/KPA
	PUNCAK		8.900,04	243.917,46		20.886,81				2.645,70		196.162,02	472.512,02
	PUNCAKJAYA		19.091,73	227.270,38		37.707,07				5.411,22		59.492,50	348.972,90
	TOLIKARA		24.848,31	280.024,34		8.109,34				12.726,54		216.608,11	542.316,63
	YAHUKIMO			587.916,13		39.461,17				10.719,25		381.345,17	1.019.441,71
	YALIMO			254.122,06						6.507,43		98.612,84	359.243,23
	GrandTotal	3.827,91	936.835,84	7.831.857,21	284.044,23	2.052.675,11	191.088,54	245,15	1.136,60	561.110,07	1.028.433,71	6.742.846,33	19.544.101,30

Hal ini dilakukan dengan menetapkan pengelolaan kawasan berfungsi lindung dengan mempertahankan luas minimal 60% (enam puluh persen) dari seluruh wilayah, dan kawasan hutan minimal seluas 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh wilayah yang diharapkan dapat mengurangi laju konversi terhadap luasan lahan melalui Peraturan Gubernur yaitu pengaturan pengendalian pemanfaatan lahan lebih lanjut, sosialisasi rencana tata ruang, penyusunan regulasi meliputi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria pemanfaatan ruang serta penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis provinsi.

Di samping itu untuk pengendalian tata ruang dilakukan pemantauan kondisi penggunaan lahan dan perubahan peruntukan yang terjadi khususnya penggunaan untuk permukiman, pembangunan infrastruktur dan pengembangan investasi dengan memperhatikan penggunaan lahan pada kawasan lindung dan kawasan budidaya sehingga 90% kawasan hutan dapat dipertahankan. Penggunaan lahan kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada peta pola ruang provinsi papua.

Gambar 2.38.
Peta Struktur Ruang



Sumber: Perda Nomor 23 Tahun 2013

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua mengatur tentang Pola Ruang dan struktur ruang. Pola ruang mengatur mengenai kawasan lindung dan kawasan budidaya, sedangkan Struktur ruang mengatur mengenai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana, yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

2.1.4.2. Investasi

Meskipun wilayah Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai tujuan investasi, realisasi rencana investasi di daerah ini masih rendah. Dari 2010 sampai 2014, hanya 47 persen dari rencana investasi dari investasi langsung asing dan penanaman modal dalam negeri di provinsi Papua. Angka-angka yang rendah sebagian besar disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi oleh investor dalam berinvestasi di wilayah Papua.

Terciptanya iklim investasi yang kondusif membuat para penanam modal/investor tidak ragu-ragu untuk berinvestasi, dan hal ini sangat mempengaruhi dalam meningkatkan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan kegiatan perekonomian. Dengan semakin banyak investor atau perusahaan dalam menanamkan modalnya akan berdampak positif terhadap Pendapatan Pemerintah Daerah/PAD, pelaku usaha memperoleh laba tinggi dan tenaga kerja terserap sehingga mengurangi jumlah pengangguran.

Tabel. 2.39.
Persentase peningkatan nilai Investasi PMA Provinsi Papua Tahun 2014-2016

Tahun	Jumlah Perusahaan	Realisasi Investasi (US\$)
2014	103	18.545.113
2015	108	47.393.679
2016	122	69.783.691
rata-rata	111	45.240.828

Sumber : BPS Provinsi Papua, 2016

Jika memperhatikan tabel di atas, jumlah perusahaan (PMA) yang berinvestasi di Papua mengalami peningkatan yaitu tercatat 103 perusahaan pada tahun 2014 menjadi 122 pada tahun 2016, atau naik

18,45%. Demikian pula dengan realisasi investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 276,29% dalam kurun waktu 3(tiga) tahun terakhir (2014-2016). Secara rata-rata nilai investasi PMA di Papua mencapai US\$ 45.240.828.

Sementara jumlah perusahaan (PMDN) yang berinvestasi di Papua lebih rendah jika dibandingkan dengan PMA dalam kurun waktu yang sama (2014-2016). Realisasi investasi PMDN pada tahun 2014 mencapai Rp.10.679.551 juta pada tahun 2014, naik menjadi Rp.59.833.954 juta pada tahun 2016, naik sebesar Rp.51.238.578 juta atau sebesar 460,27%. Seperti yang digambarkan dalam tabel 2.34 di bawah.

Walaupun jumlah perusahaan (PMDN) yang berinvestasi di Papua lebih rendah dari pada perusahaan (PMA), namun persentase perkembangan nilai investasi PMDN yang mencapai 460,27% lebih tinggi dari persentase nilai investasi PMA sebesar 276,29% dalam periode yang sama. Peningkatan nilai investasi di Papua baik PMA maupun PMDN ini menggambarkan bahwa iklim investasi di Papua semakin Kondusif.

Selain iklim investasi yang semakin kondusif di Papua, proses perizinan juga terus mengalami perbaikan. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, dengan memberikan perhatian yang lebih besar pada peran usaha mikro, kecil dan menengah, perlu dilakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Dasar hukum dari pelayanan terpadu antara lain, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Provinsi Papua mempermudah para pelaku usaha meningkatkan investasinya di daerah ini. Provinsi Papua sudah mulai melaksanakan penyelenggaraan PTSP sejak pertengahan tahun 2011 bertempat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu. PTSP melayani hampir semua perizinan baik di sektor penanaman modal, komunikasi dan informatika, koperasi dan UKM, sektor kehutanan, perhubungan, kelautan dan perikanan serta sektor perindustrian dan perdagangan. Ini merupakan kebijakan pemerintah provinsi telah mempunyai e-perijinan yang terintegrasi dengan

Sistem Informasi Manajemen Tata Ruang (SIMTARU) sehingga memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam berinvestasi di Provinsi Papua. Dari sejumlah jenis perizinan hampir keseluruhannya tanpa dipungut biaya. Tercatat hanya tiga jenis perizinan yang masih dikenakan biaya yakni perizinan pembuatan izin trayek, izin sektor perikanan dan kelautan serta perizinan memperkerjakan tenaga kerja asing (IMTA). Untuk masalah perizinan tersebut pemerintah provinsi menyadari bahwa masih banyak hal yang harus dibenahi, namun di tengah keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pihaknya berkomitmen terus meningkatkan kualitas pelayanannya. Dengan adanya PTSP ini diharapkan semoga mutu pelayanan prima bagi masyarakat dapat berjalan secara optimal sesuai dengan mottonya yakni cepat, transparan, sederhana, mudah dan pasti.

2.1.4.3. Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya.

2.1.4.3.1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Dan Desa

Dengan mengetahui kondisi ketenagakerjaan suatu wilayah seperti seberapa banyak angkatan kerja yang terserap dalam pasar tenaga kerja, kualitas yang diukur dengan pendidikan tenaga kerja, lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja, dan situasi ketenagakerjaan lainnya, dapat menjadi dasar pengambilan kebijakan yang tepat. Beberapa indikator yang dapat menggambarkan kondisi ketenagakerjaan antara lain Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).

Tabel. 2.40.
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Papua Tahun 2015.

Daerah Tempat Tinggal	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
	2014	2015	2014	2015
Perkotaan	62,22	63,32	7,91	10,69
Perdesaan	84,61	85,63	2,25	1,77
Perkotaan+Perdesaan	78,57	79,57	3,40	3,99

Sumber: BPS Provinsi Papua, 2015

TPAK merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas). Hasil Sakernas menunjukkan bahwa TPAK Provinsi Papua pada tahun 2015 sebesar 79,57% mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 78,57%, perhatikan Tabel 2.39 di atas. Peningkatan ini merupakan indikasi meningkatnya kecenderungan penduduk usia kerja untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi. TPAK penduduk perkotaan sebesar 63,32% sedangkan TPAK penduduk perdesaan sebesar 85,63% masing-masing mengalami peningkatan sebesar 1,1% dan 1,02%.

Indikator selanjutnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang menunjukkan seberapa banyak angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha; tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan; atau mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Dari Tabel 2.31 terlihat

bahwa terjadi peningkatan pengangguran sebesar hampir satu persen dibandingkan tahun sebelumnya, di mana pada tahun 2015 TPT Papua tercatat 3,99%. Peningkatan tersebut disumbangkan oleh meningkatnya pengangguran di daerah perkotaan, di mana tingkat pengangguran perkotaan sebesar 10,69% mengalami peningkatan sebesar 2,78% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya pada periode yang sama, tingkat pengangguran di daerah perdesaan turun sebesar 0,48% menjadi 1,77%.

2.1.4.3.2. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Penduduk muda berusia dibawah 15 tahun umumnya dianggap sebagai penduduk yang belum produktif karena secara ekonomis masih tergantung pada orang tua atau orang lain yang menanggungnya. Selain itu, penduduk berusia diatas 65 tahun juga dianggap tidak produktif lagi sesudah melewati masa pensiun. Penduduk usia 15-64 tahun, adalah penduduk usia kerja yang dianggap sudah produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja provinsi Papua tahun 2011-2015 sebagai berikut :

Tabel. 2.41.
Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan Provinsi Papua Tahun 2011 - 2015

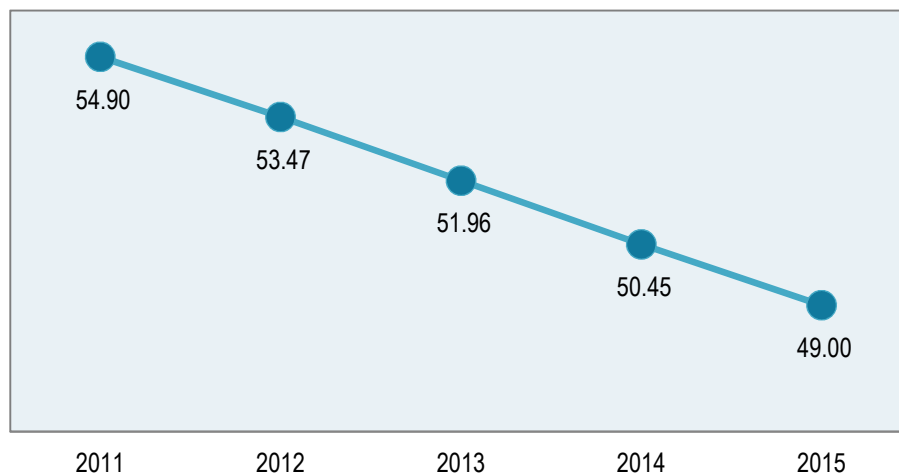
Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
Jumlah Penduduk	2.915.263	2.973.838	3.032.488	3.091.047	3.149.375
Umur 0-14 Tahun	1.003.879	1.004.429	1.002.491	999.307	995.256
Umur 15-64 Tahun	1.882.039	1.937.694	1.995.634	2.054.482	2.113.607
Umur 65 Tahun ke Atas	29.345	31.715	34.363	37.258	40.512
Angka Beban Ketergantungan	54,90	53,47	51,96	50,45	49,00

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi Papua Tahun 2015 (BPS)

Pada tabel 2.40 menunjukkan angka ketergantungan provinsi Papua dalam kurun waktu 2011-2015 mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2011 tercatat sebesar 54,90 turun menjadi 49,00 pada tahun 2015 atau turun sebesar 5,90. Hal ini menggambarkan bahwa rasio

ketergantungan di provinsi Papua setiap tahunnya mengalami perbaikan. Secara rata-rata rasio ketergantungan mencapai 51,96 dalam periode 2011-2015, yang berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban sebanyak 51,96% penduduk usia nonproduktif (kurang dari 15 tahun dan 65 tahun keatas). Rasio ketergantungan Provinsi Papua masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio ketergantungan nasional yang tercatat mencapai 49,2, (SUPAS) 2015. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.40.

Gambar 2.39.
Rasio Ketergantungan Provinsi Papua Tahun 2011-2015



2.1.5. Indikator Kinerja Penyelenggaraan pemerintah Daerah

Indikator kinerja daerah yang ditetapkan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur hingga akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Berikut ini disampaikan rasio pencapaian kinerja pembangunan daerah di tahun 2016 jika dilakukan perbandingan antara target dan realisasi untuk tahun berjalan.

Tabel. 2.42.
Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2016

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Rasio Pencapaian
1	KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1.1.	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1.1.1.1	Pertumbuhan PDRB	%	8	9.21	115.13
1.1.1.2	Laju Inflasi	%	2.5	9.21	0
1.1.1.3	PDRB per kapita	Juta Rp	27.5	55.61	202.22
1.1.1.4	Gini Rasio	%	0.35	0.39	88.57
1.2.	Kesejahteraan Sosial				
1.2.1	Pendidikan				
1.2.1.1	Angka melek huruf	%	82	70.83	86.38
1.2.1.2	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	7.25	6.15	84.83
1.2.1.4	Angka Partisipasi Mumi (APM) SD/MI/Paket A	%	74.03	78.66	106.25
1.2.1.5	Angka Partisipasi Mumi (APM) SMP/MTs/Paket B	%	44.74	54.26	121.28
1.2.1.6	Angka Partisipasi Mumi (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	%	33.61	43.27	128.74
1.3.	Kesehatan				
1.3.1	Angka Kematian Bayi (AKB)	Jiwa/1000/KH	40	7	182.5
1.3.2	Angka Kematian Balita (AKABA)	Jiwa/1000/KH	298		
1.3.3	Angka Kematian Ibu (AKI)	Jiwa/1000/KH	310	313	99.03
1.3.4	Angka Usia Harapan Hidup	Usia	68.19	65.12	95.50
1.3.5	Gizi Buruk	%	2.38	1	157.98
1.4.	Ketenagakerjaan				
1.4.1	Rasiopendudukyang Bekerja	%	0.96		
1.4.2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77.2	78.77	102.03
1.4.2.1	- Angkatan Kerja	Orang	1,279,383	1,743,160	136.25
1.4.2.2	- Bukan Angkatan Kerja	Orang	343.52	469.888	136.79
1.4.3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.42	2.97	132.81
2	PELAYANAN UMUM				
2.1	Pelayanan Urusan Wajib				
2.1.1	Pendidikan				
2.1.1.1	Pendidikan Dasar				
2.1.1.1.1	Angka Partisipasi Sekolah SD/MI	%	85	81.11	95.42
2.1.1.1.2	Angka Partisipasi Sekolah SMP/MTs	%	78.86	78.86	100.00
2.1.1.1.3	Rasio Ketersediaan Sekolah	%	34.76	173.99	500.55
2.1.1.1.3	Rasio Guru Terhadap Murid	%	39.53	24.5	138.02
2.1.1.2	Pendidikan Menengah				
2.1.1.2.1	Angka partisipasi Sekolah	%	78.86	78.86	100.00
2.1.2	Kesehatan				
2.1.2.1	Rumah Sakit	Gedung	40		

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Target 2016	Realisasi 2016	Rasio Pencapaian
2.1.2.2	- Rumah Sakit Umum	Gedung	40		
2.1.2.4	PUSKESMAS	Gedung			
2.1.2.5	- Puskesmas Perawatan	Gedung	95		
2.1.2.6	- Puskesmas non-Perawatan	Gedung	250		
2.2	Pelayanan Urusan Pilihan				
2.2.1	Pertanian				
2.2.1.1	Kontribusi Sektor Tanaman Bahan Makanan terhadap PDRB	%	8.34	2.53	30.34
2.2.1.2	Kontribusi Sektor Tanaman Perkebunan PDRB	%	0.8	0.93	116.25
2.2.1.3	Kontribusi Sektor Peternakan dan Hasilnya PDRB	%	1.13	0.87	76.99
2.2.1.4	Kontribusi Sektor Kehutanan PDRB	%	2.39	1.63	68.20
2.2.1.5	Kontribusi Sektor Perikanan PDRB	%	4.33	5.15	118.94
3,	DAYA SAING DAERAH				
3.1	Kemampuan Ekonomi				
3.1.1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian				
3.1.1.1	Rasio Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per kapita	%	27.22	24.96	91.70
3.2.1	Perhubungan				
3.2.1.1	Rasio panjang Jalan Per Jurriah Kendaraan	%	0.01		

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.2.1. Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2016

Evaluasi kinerja RKPD tahun 2016 dilakukan mempedomani UU No 23 Tahun 2014. Pembagian kewenangan didasarkan pada urusan wajib yang terbagi atas urusan wajib terkait pelayanan dasar dan tidak terkait serta urusan pilihan. Terkait pelayan dasar terbagi: (1) Pendidikan, (2) Kesehatan, (3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang, (4) Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, (5) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, dan (7) Sosial. Tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: (1) Tenaga Kerja, (2) Pemberdayaan Perempuan dan Pelayanan Anak, (3) Pangan, (4) Pertahanan, (5) Lingkungan Hidup, (6) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (7) Pemberdayaan Masyarakat dan desa, (8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, (9) Perhubungan, (10) Komunikasi dan Informasi, (11) Komperasi dan UKM, (12) Penanaman Modal, (13) Keper mudaan dan Olahraga, (14) Statistik, (15) Persandian, (16) Kebudayaan, (17)

Perpustakaan, dan (18) Kearsipan. Ususan Pilihan meliputi: (1) Kelautan dan Perikanan, (2) Pariwisata, (3) Pertanian, (4) Kehutanan, (5) Energi dan Sumber Daya Mineral, (6) Perdagangan, (7) Perindustrian, dan (8) Transmigrasi.

Adapun untuk perhitungan peringkat kinerja, sebagaimana yang dijelaskan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 menggunakan formula berikut :

- a. Rata-rata kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja;
- b. Baris rata-rata capaian kinerja (%) diisi dengan rata-rata capaian kinerja (K) dan penyerapan anggaran (Rp) setiap program, dengan menjumlahkan persentase realisasi kinerja dan anggaran yang dicapai seluruh kegiatan dibagi dengan jumlah kegiatan dalam program dimaksud;
- c. Baris predikat kinerja diisi dengan gradasi nilai (skala intensitas) berdasarkan kinerja yang dicapai pada baris rata-rata capaian kinerja dengan skala nilai peringkat kinerja sebagai berikut :

Tabel. 2.43.
Kriteria Penilaian Berdasarkan Rasio Pencapaian Kinerja

No.	Interval	Kriteria Penilaian	Notasi
1.	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi	ST
2.	76 % ≤ 90%	Tinggi	T
3.	66 % ≤ 75%	Sedang	S
4.	51% ≤ 65%	Rendah	R
5.	≤ 51%	Sangat Rendah	SR

- d. Apabila dianalisis secara parsial (masing-masing indikator), maka untuk kriteria penilaian yang Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T) baik itu pada capaian kinerja maupun penyerapan anggaran dapat diinterpretasikan bahwa capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Menggunakan formula dan kriteria penilaian di atas, berikut ini disampaikan hasil evaluasi capaian kinerja program dan penyerapan anggarannya tahun 2016 jika ditelusuri menurut urusan pembangunan.

Tabel. 2.44.
Rasio Pencapaian Kinerja Program Dan Penyerapan Anggaran Dirinci
Menurut Urusan Pembangunan Tahun 2016

No.	Urusan	Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Penyerapan Anggaran	
		Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria
A. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar					
1	Urusan Pendidikan	95.06	ST	88.52	T
2	Urusan Kesehatan	99.13	ST	74.53	S
3	Urusan Pekerjaan Umum	95.25	ST	85.50	T
4	Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	100.00	ST	96.50	ST
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	90.77	T	83.66	T
6	Urusan Sosial	100.00	ST	96.98	ST
B. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar					
7	Urusan Ketenagakerjaan	100.00	ST	97.37	ST
8	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	102.80	ST	99.39	ST
9	Urusan Pangan	98.75	ST	99.59	ST
10	Urusan Lingkungan Hidup	77.40	T	74.70	S
11	Urusan DUKCAPIL	100.00	ST	98.40	ST
12	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kampung	93.58	ST	97.58	ST
13	Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	102.80	ST	99.31	ST
14	Urusan Perhubungan	79.25	T	66.32	S
15	Urusan Komunikasi dan Informatika	100.00	ST	99.24	ST
16	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	92.50	ST	82.33	T
17	Urusan Penanaman Modal	94.00	ST	95.56	ST
18	Urusan Pemuda dan Olahraga	85.17	T	86.08	T
19	Urusan Statistik	100.00	ST	96.45	ST
20	Urusan Kebudayaan	83.71	T	89.25	T
21	Urusan Kearsipan	106.50	ST	92.45	ST
C. Urusan Pilihan					
22	Urusan Perpustakaan	100.00	ST	96.45	ST
23	Urusan Kelautan dan Perikanan	85.48	T	72.15	S
24	Urusan Peternakan	100.00	ST	98.25	ST
25	Urusan Pariwisata	102.67	ST	92.76	ST
26	Urusan Pertanian	100.00	ST	84.13	T

No.	Urusan	Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Penyerapan Anggaran	
		Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria
27	Urusan Kehutanan	88.29	T	94.35	ST
28	Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral	100.63	ST	80.53	T
29	Urusan Perdagangan	100.00	ST	95.50	ST
30	Urusan Industri	50.00	SR	47.23	SR
Rata-Rata		94.12	ST	88.70	T

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Dalam Tabel 2.43 di atas, jika dilihat berdasarkan urusan tampak jelas menurut hasil penilaian dapat diinterpretasikan bahwa capaian kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Selain itu, oleh karena rata-rata pencapaian kinerja dinilai Sangat Tinggi (ST) mencapai 94,12%, sedangkan anggaran yang terserap belum 100% yaitu 88,70% maka dapat diindikasikan bahwa penggunaan anggaran di tahun 2016 secara merata sudah berjalan secara efektif dan efisien. Dimana ada 16 urusan yang paling tinggi tingkat efektifitas dan efisiensinya yaitu :

1. Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman;
2. Urusan Sosial;
3. Urusan Ketenagakerjaan;
4. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
5. Urusan Pangan;
6. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
7. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kampung;
8. Urusan KB dan Keluarga Sejahtera;
9. Urusan Komunikasi dan Informatika;
10. Urusan Penanaman Modal;
11. Urusan Statistik (Pertanian dan Perkebunan);
12. Urusan Kearsipan;
13. Urusan Perpustakaan;
14. Urusan Peternakan;
15. Urusan Pariwisata;

16. Urusan Perdagangan.

Lebih lanjut, jika evaluasi pencapaian kinerja dan anggaran tahun 2016 tersebut ditelusuri pada masing-masing OPD pelaksana program pembangunan, terlihat bahwa dari total 37 OPD yang menggunakan belanja program ada 91,89% yang terindikasi efektif dan efisien, karena sanggup mencapai penilaian kinerja program dan penyerapan anggaran dengan kriteria Sangat Tinggi dan Tinggi. Sementara 8,11% OPD lainnya terindikasi belum mencapai efektifitas dan efisiensi yang baik. Perhatikan Tabel 2.44 berikut ini.

Tabel. 2.45.
Rasio Pencapaian Kinerja Program Dan Penyerapan Anggaran Dirinci Menurut Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2016

No.	OPD	Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Penyerapan Anggaran	
		Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria
1	Dinas Pendidikan	95.45	ST	88.04	T
2	Biro Umum Setda	85.00	T	77.85	T
3	Biro SDM	96.20	ST	91.70	ST
4	Dinas Kesehatan	97.93	ST	73.89	S
5	RSUD Dok 2	91.67	ST	81.36	T
6	RSUD Abe	111.00	ST	62.23	R
7	Rumah Sakit Jiwa Abepura	100.00	ST	76.92	T
8	Dinas Pekerjaan Umum	95.93	ST	92.19	ST
9	Bappeda	100.00	ST	99.82	ST
10	Badan Percepatan Pembangunan Kawasan	100.00	ST	83.72	T
11	Badan Kesbang Politik	70.00	S	50.70	SR
12	Kantor Satpol PP & Linmas	100.00	ST	94.39	ST
13	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	100.00	ST	99.44	ST
14	Dinas Sosial	100.00	ST	96.98	ST
15	Dinas Tenaga Kerja	100.00	ST	97.37	ST
16	Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	102.80	ST	99.39	ST
17	Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan	98.75	ST	99.59	ST
18	Badan Lingkungan Hidup	77.40	T	74.70	S
19	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil	100.00	ST	98.40	ST
20	BPMK	100.00	ST	97.94	ST
21	Biro Tata Pemerintahan	80.75	T	98.42	ST
22	Sekretariat SEKDA	101.40	ST	95.50	ST

No.	OPD	Realisasi Capaian Kinerja		Realisasi Penyerapan Anggaran	
		Rasio	Kriteria	Rasio	Kriteria
23	Dinas Perhubungan	79.25	T	66.32	S
24	Dinas Komunikasi dan Informatika	100.00	ST	99.24	ST
25	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	92.50	ST	82.33	T
26	Badan Penanaman Modal Daerah	94.00	ST	95.56	ST
27	Dinas Pemuda dan Olahraga	82.20	T	83.31	T
28	Dinas Kebudayaan	83.71	T	89.25	T
29	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	103.25	ST	94.45	ST
30	Dinas Kelautan dan Perikanan	85.48	T	72.15	S
31	Dinas Peternakan	100.00	ST	98.25	ST
32	Dinas Pariwisata	102.67	ST	92.76	ST
33	Tanaman pangan dan Hortikultura	100.00	ST	95.82	ST
34	Perkebunan	100.00	ST	77.45	T
35	Dinas Kehutanan	88.29	T	94.35	ST
36	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral	100.63	ST	80.53	T
37	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	75.00	S	71.37	S
Rata-Rata		94.12	ST	88.70	T

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

Dari 37 OPD yang dapat dikatakan paling tinggi tingkat efisiensi dan efektifitas dalam menggunakan anggaran pada tahun 2016 adalah :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
2. Dinas Sosial
3. Dinas Tenaga Kerja
4. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
5. Dinas Peternakan
6. Dinas Pariwisata
7. Dinas Tanaman pangan dan Hortikultura
8. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
9. Dinas Komunikasi dan Informatika
10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Badan Penanggulangan Bencana Alam
12. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
13. Badan Ketahanan Pangan Dan Penyuluhan
14. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung

15. Badan Penanaman Modal Daerah
16. Sekretariat SEKDA
17. Kantor SATPOL PP & Linmas
18. Biro Sumber Daya Manusia

Selanjutnya, jika diamati pada setiap OPD program apa saja yang terindikasi memiliki rasio kinerja dan anggaran yang tinggi atau rendah, serta yang efisien dan belum efisien, terlihat kondisi pencapaian kinerja dan penyerapan anggaran program pada setiap OPD di tahun 2016 sangat beragam yang dapat rinci sesuai urusan sebagai berikut.

2.2.1.1. Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

(1) Urusan Pendidikan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pendidikan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada Tahun 2016 rata-rata termasuk dalam kategori Sangat Tinggi (ST) dan Tinggi (T). Termasuk juga untuk penyerapan anggarannya terindikasi dalam kategori ST dan T, terkecuali untuk 1 (satu) program/kegiatan yang terindikasi penyerapan anggarannya Sangat Rendah (SR), hanya 42,06% yaitu Program Manajemen Pelayanan Pendidikan. Sedangkan untuk OPD lainnya, Biro Umum Setda dan Biro Umum SDM semua kinerja program/kegiatan dan penyerapan anggarannya termasuk kategori ST dan T. Kondisi ini menunjukkan baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan tinggi berarti pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja, serta terindikasi sudah efisien dan efektif.

Tabel. 2.46.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pendidikan
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1.	Dinas Pendidikan				
	1.1. Program Pendidikan Usia Dini	90	T	95,50	ST
	1.2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	100	ST	78,41	T
	1.3. Program Pendidikan Menengah	100	ST	99,65	ST
	1.4. Program Pendidikan Non Formal	87	T	80,90	T
	1.5. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Pendidikan	96	ST	96,79	ST
	1.6. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	86	T	42,06	SR
	1.7. Pendidikan Khusus dan Layanan khusus	96	ST	95,64	ST
	1.8. Pendidikan khusus	100	ST	88,08	T
	1.9. Pendidikan Luar Biasa	100	ST	99,37	ST
	1.10. Pendidikan tinggi	95	ST	92,64	ST
	1.11. Pendidikan menengah SMK	100	ST	99,45	ST
2.	Biro Umum Setda				
	Penyediaan Fasilitas Mahasiswa daerah	85	T	77,85	T
3.	Biro SDM				
	3.1. Perencanaan Pembangunan daerah	100	ST	86,32	T
	3.2. Kerjasama Pembangunan	100	ST	86,32	T
	3.3. Pengembangan Data dan Informasi	100	ST	99,15	ST
	3.4. Peningkatan Kapasitas SDM papua	100	ST	89,43	T
	3.5. Pengembangan Kemitraan	81	T	97,27	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017 (data diolah)

(2) Urusan Wajib Kesehatan

Prestasi kinerja program / kegiatan pada urusan kesehatan yang terdiri dari Dinas Kesehatan, RSUD Jayapura, RSUD Abepura dan RS Jiwa Abepura di tahun 2016 pada umumnya masuk dalam kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya terkategori Sedang. Kondisi ini menunjukkan kinerja realisasi program tinggi tetapi realisasi anggaran telah memenuhi persyaratan minimal. Dimana untuk Dinas Kesehatan terdapat tiga program yang memiliki target kinerja hasil dan keluarannya yang termasuk kategori Sangat Tinggi, namun daya serap anggarannya terkategori Sangat Rendah yaitu Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Pengawasan Obat dan Makanan, Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat.

Tabel. 2.47.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kesehatan
Tahun Anggaran 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Dinas Kesehatan				
	1.1. Obat dan perbekalan kesehatan	100	ST	77,57	T
	1.2. Upayan Kesehatan Masyarakat	100	ST	45,25	SR
	1.3. Pengawasan Obat dan Makanan	100	ST	49,03	SR
	1.4. Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	100	ST	41,5	SR
	1.5. Perbaikan gizi dan masyarakat	100	ST	87,92	T
	1.6. Pengembangan LH	100	ST	85,09	T
	1.7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	100	ST	68,35	S
	1.8. Manajemen Pembangunan Kesehatan	85	T	80,87	T
	1.9. Peningkatan kesehatan perorangan	100	ST	77,51	T
	1.10. Sumber daya Kesehatan	100	ST	89,18	T
	1.11. Peningkatan pelayanan laboratorium	84	T	90,12	T
	1.12. Peningkatan pelayanan	100	ST	79,5	T

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
	kesehatan bayi dan anak balita				
	1.13. Peningkatan kesehatan ibu dan anak	100	ST	72,5	T
	1.14. Peningkatan Jaminan Kesehatan Papua	100	ST	73,75	T
	1.15. pengembangan Obat Asli Daerah	100	ST	90,25	T
2	RSUD				
	1.1. Upaya Kesehatan Masyarakat	72,5	T	58,87	S
	1.2. Promodi kesehatan dan pemberdayaan Masyarakat	100	ST	89,88	T
	1.3. Standarisasi pelayanan kesehatan	65	R	64,58	S
	1.4. Pelayanan Peningkatan kesehatan perorangan	100	ST	93,62	ST
	1.5. Pengadaan, peningkatan sarpras RS/jiwa/paru-paru/mata	91,71	ST	70,67	T
	1.6. Pemeliharaan sarpras RS/Jiwa/Paru-Paru/Mata	98,5	ST	80,13	T
	1.7. Kebijakan dan Manajemen Pembangunan kesehatan	100	ST	100	ST
	1.8. Program Sumber Daya kesehatan	-		-	
	1.9. Pengadaan, peningkatan sarpras RS/jiwa/paru-paru/mata (kewajiban)	100	ST	97,84	ST
	1.10. Pelayanan Peningkatan kesehatan perorangan (kewajiban)	85	T	76,61	T
3	RSUD Abepura				
	1.1. Upaya Kesehatan Masyarakat	96	ST	31,35	SR
	1.2. Stadarisasi pelayanan kesehatan	100	ST	69,41	S
	1.3. Pelayana kedahatan penduduk midkin	-	-	-	-
	1.4. Pengadaan, peningkatan sarpras RS/jiwa/paru-paru/mata	100	ST	81,61	T
	1.5. Pemeliharaan sarpras RS/Jiwa/Paru-Paru/Mata	100	ST	33,23	SR
	1.6. Peningkatan Jaminan Masyarakat Miskin Papua	159	ST	95,55	ST

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
4	Rumah Sakit Jiwa Abepura				
	1.1. Pelayanan kesehatan penduduk	100	ST	43,41	SR
	1.2. Peningkatan sarpras	100	ST	97,57	ST
	1.3. Pemeliharaan sarpras	0		0	
	1.4. Peningkatan kesehatan peroragngan	100	ST	79,83	T
	1.5. Peningkatan Jiwa Masyarakat	100	ST	86,86	T

(3) Urusan Wajib Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Pekerjaan Umum Tahun 2016 secara keseluruhan dinilai Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran termasuk kategori Tinggi. Kondisi ini menunjukkan baik kinerja program maupun realisasi anggaran pembangunan sangat tinggi berarti pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Dimana terdapat satu program yang kinerja hasil dan keluarannya kategori sedang, yaitu Program peningkatan jalan dan jembatan.

Tabel. 2.48.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pekerjaan Umum Tahun Anggaran 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Dinas Pekerjaan Umum				
	1.1. Program pembangunan jalan dan jembatan	96	ST	86,6	T
	1.2. Program Pengembangan Jaringan Irigasi Rawa dan Pengairan Lainnya	100	ST	99,67	ST
	1.3. Program rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan	100	ST	98,79	ST
	1.4. Pengendalian Banjir	100	ST	99,66	ST
	1.5. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	76	T	66,97	S
	1.6. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan	71	T	70,97	S
	1.7. Program Perencanaan Tekhnis Jalan dan Jembatan	100	ST	68,6	S

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
2	Bappeda				
	1.1. Program perencanaan tata ruang	100	ST	99,82	ST
3	Badan Percepatan Pembangunan Kawasan				
	1.1. Pemanfaatan Ruang	100	ST	83	T
	1.2. Pengembangan Kemitraan	100	ST	99,7	ST
	1.3. Pengembangan data dan Informasi	100	ST	84,88	T
	1.4. Pengembangan wilayah dan cepat tumbuh	100	ST	67,29	S

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(4) Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perumahan rakyat dan kawasan pemukiman sampai dengan Tahun 2016 rata-rata umumnya termasuk kategori Sangat Tinggi, begitu juga dengan realisasi anggarannya termasuk Sangat Tinggi. Kondisi ini menunjukkan baik kinerja program maupun realisasi anggaran pembangunan tinggi dan sangat tinggi berarti pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.49.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman Tahun Anggaran 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Program Pengambangan Perumahan (Dinas PU)	100	ST	99,91	ST
2	Program Pengambangan Perumahan (Dinas Sosial)	100	ST	93,09	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(5) Urusan Wajib Kententraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat.

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Kententraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat Tahun 2016 terindikasi dalam kategori Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya termasuk

kategori Sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa kinerja program tinggi realisasi anggaran pembangunan sedang, berarti pencapaian/realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja tetapi realisasi anggaran baru memenuhi persyaratan minimal. Dimana terdapat satu program yang kinerja hasil dan keluarannya sangat rendah yaitu fasilitasi pengangkatan anggota DPRP. Hal ini disebabkan proses rekrutmen yang prosesnya lama dan melewati batas waktu anggaran. Dananya dijadikan SiLPA untuk tahun berikutnya. Selain itu terdapat satu program yang tidak mendapatkan pembiayaan untuk melaksanakan kegiatan, yaitu Program pengembangan kapasitas kelembagaan.

Tabel. 2.50.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri(Tahun 2016)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Kesbangpol				
	1.1. Pengembangan wawasan kebangsaan	100	ST	94.61	ST
	1.2. Peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	100		97.57	ST
	1.3. Pendidikan politik masyarakat	80	T	10.16	SR
	1.4. Fasilitasi Pengangkatan DPRP	0	SR	0.46	SR
2	SATPOL PP & Linmas				
	1.1. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH	100	ST	90.79	ST
	1.2. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	100	ST	97.98	ST
	1.3. Pengembangan kapasitas kelembagaan	-	-	-	-
3	Penanggulangan Bencana Alam				
	1.1. Pencegahan dini dan Penanggulangan korban bencana	100	ST	99,07	ST
	1.2. Peningkatan kualitas perencanaan dan Penganggaran BPBD	100	ST	100	ST
	1.3. Pengembangan kapasitas kelambagaan	100	ST	99,96	ST

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
	1.4. Kedaruratan penanganan bencana alam	100	ST	99,97	ST
	1.5. Pencegahan kesiapsiagaan penanggulangan bencana	100	ST	97,86	ST
	1.6. Kedaruratan penanganan bencana	100	ST	99,66	ST
	1.7. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	100	ST	99,55	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(6) Urusan Wajib Sosial

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Sosial Tahun 2016 terkategori Sangat Tinggi, begitu juga dengan realisasi anggarannya termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Kondisi ini menunjukkan baik kinerja program maupun realisasi anggaran pembangunan sangat tinggi berarti pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.51.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Sosial Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Program perlindungan dan jaminan Sosial	100	ST	99,65	ST
2	Program Pelayanan kesejahteraan social berbasis panti	100	ST	91,33	ST
3	Program Peningkatan Kualitas Perencanaan Penganggaran Sosial	100	ST	99,97	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

2.2.1.2. Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar

(1) Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Ketenagakerjaan pada tahun 2016 termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, begitu juga dengan realisasi anggarannya masuk dalam kategori Sangat Tinggi. Kondisi ini menunjukkan baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan sangat tinggi berarti pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.52.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Ketenagakerjaan

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Peningkatan Kualitas dan Produktifitas	100	ST	99,00	ST
2	Peningkatan kesempatan kerja	100	ST	99,95	ST
3	Informasi perencanaan tenaga kerja dan kependudukan	100	ST	99,95	ST
4	Peningkatan kinerja orgaanisasi	100	ST	86,34	T
5	Pengambanagan Produktifitas kerja	100	ST	99,68	ST
6	Pengembangan Kawasan Transmigrasi	100	ST	99,29	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(2) Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Tahun 2016 seluruhnya termasuk dalam kategori Sangat Tinggi, begitu pula dengan realisasi anggarannya terkategori Sangat Tinggi. Kondisi ini menunjukkan baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan sangat tinggi berarti pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.53.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan	100	ST	99,52	ST
2	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	108	ST	99,19	ST
3	Peningkatan kualitas hidup dan Perlindungan perempuan	100	ST	99,78	ST
4	Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam perempuan	100	ST	99,4	ST
5	Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	106	ST	99,05	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(3) Urusan Pangan (Ketahanan Pangan)

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Pangan Tahun 2016 semuanya dinilai dengan kategori Sangat Tinggi). Sedangkan realisasi anggaran juga kategori Sangat Tinggi. Kondisi ini menunjukkan baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan sangat tinggi berarti pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.54.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pangan
(tahun 2016)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Peningkatanh Ketahanan Pangan	100	ST	99,26	ST
2	Perencanaan Pembangunan	100	ST	99,96	ST
3	Program Peningkatan Diversifikasi penganekaragaman dan keamanan Pangan	95	ST	99,47	ST
4	Program Peningkatan SD pertanian	100	ST	99,68	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(4) Urusan Lingkungan Hidup

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Lingkungan Hidup pada Tahun 2016 tergolong Tinggi, sedangkan realisasi anggarannya termasuk kategori Sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja program berada diatas persyaratan minimal, sedang realisasi anggaran pembangunan cukup berarti telah memenuhi persyaratan minimal. Dimana terdapat dua program yang memiliki kinerja hasil maupun keluarannya sangat rendah dan sedang, yaitu Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan LH dan Program Pengembangan Kapasitas Pengelola SDA dan LH.

Tabel. 2.55.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Program Peningkatan kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	40	SR	51,48	SR
2	Pengendalian kerusakan lingkungan	116	ST	91,53	ST
3	Perlindungan dan Konservasi SDA	100	ST	84,01	T
4	Pengembangan Kapasitas Pengelola SDA dan LH	67	S	50,74	SR
5	Mitigasi dan perubahan iklim	100	ST	95,74	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(5) Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Prestasi kinerja program / kegiatan pada urusan kependudukan dan catatan sipil Tahun 2016 tergolong dalam kategori sangat tinggi, sedangkan realisasi anggaran sebesar walaupun tidak mencapai 100% tetapi masuk dalam kategori sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.56.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan DUKCAPIL
(Tahun 2016)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Program Penataan Administrasi Kependudukan	100	ST	95.66	ST
2	Pembinaan Kependudukan	100	ST	99,58	ST
3	Informasi Perencanaan Tenaga Kerja dan Kependudukan	100	ST	99,95	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(6) Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kampung

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perumahan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kampung Tahun 2016 dominan masuk dalam kategori sangat tinggi, dengan 2 program yaitu pada Biro Tata Pemerintahan yang masuk kategori sedang dan sangat rendah, yaitu program Pembinaan dan Penataan Administrasi Negara dan Peningkatan Aparatur Kampung. Namun realisasi anggaran secara keseluruhan menunjukkan kategori sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan secara umum baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan sangat tinggi, berarti pencapaian/realisasi kinerja program capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.57.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa / Kampung (Tahun 2016)

No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	BPMK				
	1.1. Penguatan kelembagaan distrik dan kampung	100	ST	92.38	ST
	1.2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	-	-	-	-
	1.3. Peningkatan pendapatan masyarakat kampung, kelurahan dan kawasan miskin perkotaan	100	ST	99.92	ST
	1.4. Pemberdayaan masyarakat kampung'	100	ST	97.53	ST
	1.5. Strategi pembangunan ekonomi dan kelembagan kampung (prospek)	100	ST	99.81	ST
	1.6. Pembanguna data dan informasi	100	ST	99.81	ST
	1.7. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	100	ST	96.81	ST
	1.8. Peningkatan perasn serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	100	ST	99.34	ST

2	Biro Tata Pemerintahan				
	1.1. Penyelenggaraan pemerintahan umum	100	ST	96,32	ST
	1.2. Pembinaan dan Penataan Administrasi pemerintahan	53	ST	98,2	ST
	1.3. Peningkatan Aparatur kampung	70	ST	99,58	ST
	1.4. Peningkatan penyelenggaraan Otda	100	ST	99,57	ST
3	Sekretariat Sekda				
	1.1. Pemerintahan Umum	100	ST	91,69	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(7) Urusan Pengendalian Penduduk dan KB

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Tahun 2016 masuk kategori sangat tinggi, demikian juga untuk realisasi anggaran tergolong kategori sangat tinggi dengan capaian yang diatas 99%. Kondisi ini menunjukkan baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan sangat tinggi, berarti pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.58.

Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan KB dan Keluarga Sejahtera (Tahun 2016)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan perempuan	100	ST	99,52	ST
2	Program Peningkatan Peran serta kesetaraan jender dalam pembangunan	100	ST	99,4	ST
3	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	108	ST	99,19	ST
4	Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	100	ST	99,4	ST
5	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	106	ST	99,05	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(8) Urusan Wajib Perhubungan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan perhubungan sampai dengan Tahun 2016 terdapat 2 program yang masuk kategori sangat tinggi dan 2 program yang tergolong rendah yaitu Program Pembangunan Prasarana Perhubungan dan Program Peningkatan Pelayanan Angkutan. Sedangkan realisasi anggaran secara keseluruhan dapat digolongkan masih rendah. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan. Terlihat juga untuk Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan tidak ada kinerja dan realisasi anggarannya.

Tabel. 2.59.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perhubungan
(Capaian s/d TW II)

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	-	-	-	-
2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	100	ST	76,91	S
3	Program Pembangunan Prasarana dan Perhubungan	61	R	65,64	S
4	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	56	R	50,98	SR
5	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	100	ST	71,73	S

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(9) Urusan Komunikasi dan Informatika

Prestasi kinerja program / kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informasi Tahun 2016 masuk dalam kategori sangat tinggi, demikian juga

realisasi anggaran walaupun ada program yang tidak mencapai 100% tetapi dapat digolongkan sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan baik kinerja maupun realisasi anggaran pembangunan capaiannya telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Namun demikian terdapat satu program tidak ada anggaran yang dialokasikan sehingga tidak ada kegiatan yang bisa dinilai kinerja dan serapan anggaranya karena tidak dilaksanakan.

Tabel. 2.60.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan
Komunikasi dan Informasi

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media massa	-	-	-	-
2	Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	100	ST	100	ST
3	Fasilitasi SDM bidang komunikasi dan informasi	100	ST	98.21	ST
4	Kerjaama informasi dengan media massa	100	ST	99.51	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(10) Urusan Koperasi dan usaha Kecil Menengah

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Koperasi dan UKM Tahun 2016 secara umum dapat dikatakan sangat tinggi kecuali untuk program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi capaian prestasinya masuk golongan tinggi, demikian juga untuk realisasi anggaran dominan sangat tinggi capaiannya, kecuali program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif UKM yang capaiannya digolongkan rendah. Namun demikian kondisi ini secara keseluruhan penilaian capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan digolongkan tinggi dan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja

Tabel. 2.61.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Pengembangan Kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM	100	ST	54.21	R
2	Pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM	90	ST	92	ST
3	Peningkatan kualitas kelembagaan kperasi	80	T	91,23	ST
4	Pengembangan Data dan Informasi	100	ST	91.86	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(11) Urusan Penanaman Modal

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Penanaman Modal Tahun 2016 dominan masuk golongan sangat tinggi dengan satu program yang masuk kategori tinggi yaitu program Peningkatan Pelayanan Perijinan Penanaman Modal, demikian juga realisasi anggaran dominan sangat tinggi prestasinya, kecuali untuk program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi masuk kategori Sangat Rendah dan program Peningkatan Daya Saing yang masuk kategori Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan dapat digolongkan tinggi dan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.62.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Program Peningkatan Pelayanan Perijinan Penanaman Modal	100	ST	98,4	ST
2	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	76	T	25,31	SR
3	Peningkatan Daya Saing Investasi	100	ST	90,81	T
4	Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal	100	ST	97,48	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(12) Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2016 terlihat variatif, dan dari 6 program terdapat 1 program dengan capaian sangat rendah yaitu program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga, program Saprasi Olah Raga dengan capaian sedang dan program Pembinaan Masyarakat Olah Raga dengan capaian tinggi namun secara keseluruhan capaiannya kinerjanya dapat digolongkan tinggi. Demikian juga untuk realisasi anggaran kondisinya sama dan masuk golongan tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. namun terdapat dua program yang tidak mendapatkan pembiayaan.

Tabel. 2.63.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pemuda dan Olahraga
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Dinas Pemuda dan Olahraga				
	1.1. Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	-	-	-	-
	1.2. Peningkatan Peran serta kepemudaan	100	ST	99.29	ST
	1.3. Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	100	ST	100	ST
	1.4. Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	50	SR	40.22	SR
	1.5. Pembinaan Masyarakat Olahraga	86	T	92.97	ST
	1.6. Peningkatan Sarpras Olahraga	75	S	84.09	T
	1.7. Peningkatan Sarpras Pemuda	-	-	-	-
2	Dinas Pekerjaan Umum				
	2.1. Peningkatan Sarpras Olahraga	100	ST	99,91	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(13) Urusan Bidang Statistik

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan statistik yang dilaksanakan pada sektor pertanian Tahun 2016 sebesar 100% dengan kategori sangat tinggi, sedangkan realisasi anggaran sebesar 96,45% namun masuk kategori sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.64.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Statistik
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Program pengembangan data / informasi / statistik daerah	100	ST	96,45	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(14) Urusan Kebudayaan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kebudayaan Tahun 2016 terlihat variatif, dari 7 program terlihat 2 program masuk kategori sangat tinggi, 3 program masuk kategori tinggi dan 2 program masuk kategori sedang yaitu program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya. Namun secara keseluruhan prestasi capaian kinerja dapat digolongkan tinggi (83%), berbeda dengan realisasi program, realisasi anggaran lebih baik capaiannya, yaitu 5 program masuk kategori sangat tinggi dan 2 program masuk kategori sedang yaitu program Pengembangan Nilai Budaya dan Program Kerjasama Pengelolaan Kebudayaan, sehingga secara keseluruhan realisasi anggaran data digolongkan tinggi (89%). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.65.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Kebudayaan
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Pengembangan Nilai Budaya	67	S	63,80	S
2	Kerjasama pengelolaan kebudayaan budaya	90	T	67,51	S
3	Pengelolaan keragaman keragaman budaya	87	T	93,46	ST

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
4	Pengembangan Nilai Budaya	100	ST	100	ST
5	Pengelolaan Kekayaan Budaya	67	S	100	ST
6	Pengelolaan Keragaman Budaya	75	T	100	ST
7	Pengelolaan Kekayaan Budaya	100	ST	100	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(15) Urusan Bidang Kearsipan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kearsipan sampai dengan Tahun 2016 terlihat telah mencapai target sehingga dapat digolongkan sangat tinggi, sedangkan untuk realisasi anggaran dari 2 program yang ada, terdapat satu program yaitu program Penyelamatan dan Pelestarian dok/arsip daerah masuk kategori tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan dapat dikategorikan sangat tinggi dan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.66.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kearsipan Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Penyelamatan dan pelestarian dok/arsip daerah	113	ST	90.81	T
2	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	100	ST	94.09	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(16) Urusan Perpustakaan

Prestasi kinerja program / kegiatan pada urusan Perpustakaan tahun 2016 dapat dikategorikan sangat tinggi, sedangkan realisasi anggaran terlihat variatif, dari 2 program yang ada, terdapat 1 program yaitu Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang

masuk kategori tinggi sedangkan program peningkatan Sarpras Perpustakaan masuk kategori sangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan dapat dikatakan sangat tinggi dan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.67.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perpustakaan Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Pengembangan budaya baca dan pembuinaan perpustakaan	100	ST	92.93	T
2	Peningkatan sarpras perpustakaan	100	ST	99.96	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

2.2.1.3. Urusan Pilihan

(1) Urusan Pilihan Perikanan dan Peternakan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 erlihat variatif dengan dominan capaian yang masuk kategri sangat tinggi, dan disisi lain ada 2 program dengan capaian yang sangat rendah yaitu program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan Pengolahan dan Pemasaran dan Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan dan 1 program dengan capaian rendah yaitu Pengembangan data dan informasi. Secara keseluruhan capaian kinerja program/kegiatan dapat dikategorikan sangat tinggi (91,56%), sedangkan realisasi anggaran terdapat 2 program dengan capaian sangat rendah yaitu program Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan dan program Pengembangan sarpras Perikanan namun secara keseluruhan dapat dikategorikan capaian kinerja tinggi (80.98%). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.68.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Kelautan Dan Perikanan				
	1.1. Pengembangan data dan informasi	56.57	R	99.1	ST
	1.2. Pengembangan budidaya perikanan	100	ST	95.96	ST
	1.3. Pengembangan dan peningkatan produksi perikanan tangkap	100	ST	33.68	ST
	1.4. Peningkatan mutu produksi nelayan pengolahan dan pemasaran	33.68	SR	60.62	S
	1.5. Optimalisasi pembangunan prasarana perikanan	100	ST	78.59	T
	1.6. Optimalisasi Fungsi dan Pelayan UPTD	100	ST	100	ST
	1.7. Pengembangan penyuluhan perikanan	100	ST	68.51	ST
	1.8. Pengembangan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil	100	ST	68.51	S
	1.9. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	100	ST	88.42	T
	1.10. Peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya kelautan dan perikanan	100	ST	17.49	SR
	1.11. Pengawasan pemanfaatan sumberdaya ikan	50	SR	98.4	ST
	1.12. Pengembangan sarpras Perikanan	100	ST	56.57	SR
2	Peternakan				
	2.1. Peningkatan kesejahteraan petani	100	ST	97.73	ST

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
	2.2. Peningkatan Ketahanan pangan	-	-	-	-
	2.3. Peningkatan pemaaran hasil produksi pertanian / perkebunan	100	ST	99.91	ST
	2.4. Pencegahan dan penangulanagn penyakit ternak	-	-	-	-
	2.5. Peningkatan produksi hasil peternakan	100	ST	93.74	ST
	2.6. Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	100	ST	98.4	ST
	2.7. Peningkatan penerpan teknologi peternakan	100	ST	98.25	ST
	2.8. Perencanaan Pembangunan	100	ST	99.78	ST
	2.9. Peningkatan keamaan pangan dan ketahaanan pangan asal hewan	100	ST	99.96	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(2) Urusan Pariwisata

Prestasi kinerja program / kegiatan pada urusan Pariwisata Tahun 2016 masuk dalam kategori sangat tinggi, begitu pula realisasi anggaran walaupun terdapat satu program capaian kinerja tinggi yaitu program Pengembangan Pemasaran Pariwisata namun secara keseluruhan masuk dalam kategorisangat tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.69.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pariwisata
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Program Pengembangan pemasaran pariwisata	97	ST	78,82	T
2	Program Pengembangan destinasi wisata	111	ST	99,82	ST
3	Program Pengembangan kemitraan	100	ST	99,65	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(3) Urusan Pilihan Pertanian

Urusan pertanian mencakup tanaman pangan dan hortikultura, ketahanan pangan dan kordinasi penyuluh serta perkebunan. Prestasi kinerja program/kegiatan urusan Pertanian pada Tahun 2016 mencapai realisasi 100% sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi, sedangkan realisasi anggaran terlihat variatif realisasinya. Untuk tanaman pangan dan hortikultura capaian realisasi masuk kategori sangat tinggi, sedangkan untuk perkebunan dari 7 program terdapat 2 program dengan realisasi capaian anggaran sangat rendah yaitu program Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan dan program Program Peningkatan SD Pertanian, sehingga secara keseluruhan realisasi anggaran masuk kategori tinggi (84.13%). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.70.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Pertanian
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Tanaman pangan dan Hortikultura				
	1.1. Program peningkatan Sumber Daya Pertanian	100	ST	98	ST
	1.2. Program pengembangan kawasan agrobisnis dan daerah khusus	100	ST	96,41	ST
	1.3. Program Perencanaan Pembangunan	100	ST	94,08	ST
	1.4. Program Peningkatan Ketahanan Pangan	100	ST	94,77	ST
2	Perkebunan				
	2.1. Program Peningkatan pemasaran hasil pertanian/pekebunan	100	ST	79,26	T
	2.2. Program Peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	100	ST	48,36	SR
	2.3. Program Peningkatan Produksi pertanian/Perkebunan	100	ST	86,31	T
	2.4. Program Perencanaan pembangunan	100	ST	93,47	ST
	2.5. Program kerangka regulasi	100	ST	100	ST
	2.6. Program Peningkatan SD Pertanian	100	ST	46,71	SR
	2.7. Program Pengendalian Hama dan penyakit Perkebunan	100	ST	88,01	T

(4) Urusan Pilihan Kehutanan

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan kehutanan Tahun 2016 memiliki capaian variatif yang didominasi capaian yang masuk kategori sangat tinggi, dengan 1 program yang memiliki capaian sedang dan 2 program dengan capaian Tinggi, sehingga secara keseluruhan

prestasi kinerja program kegiatan masuk dalam kategori Tinggi. Sedangkan realisasi anggaran terlihat di dominasi oleh capaian kinerja dengan kategori sangat tinggi, hanya 1 program yaitu Pengelolaan DAK bidang kehutanan yang memiliki capaian tinggi sehingga secara keseluruhan prestasi realisasi anggaran masuk kategori Sangat Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.71.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Kehutanan
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Perencanaan Makro bidang kehutanan dan pemanfaatan kawasan	100	ST	98,62	ST
2	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM Kehutanan	-	-	-	-
3	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	98	ST	98,79	ST
4	Rehabilitasi Hutan Dan Lahan	84	T	98,47	ST
5	Perlindungan konservasi SDH	93	ST	100	ST
6	Pengelolaan hutan masyarakat adat	76	T	96,27	ST
7	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	100	ST	100	ST
8	Pengelolaan DAK bidang kehutanan	67	S	73,95	T

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(5) Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan Energi dan sumberdaya Mineral tahun 2016 yang terdiri dari 8 program terlihat capaiannya masuk dalam kategori sangat tinggi, sedangkan realisasi anggaran capaiannya terlihat variatif, yang mana dari 8 program tersebut terdapat 1 program yaitu Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi capaian realisasi anggaran sangat rendah, sehingga secara keseluruhan capaian realisasi anggaran masuk dalam kategori Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.72.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Evaluasi kordinasi pembangunan	105	ST	75,03	T
2	Pemutahiran Data ESDM	100	ST	76,49	T
3	Pelayanan air bersih	100	ST	97,06	ST
4	Pembinaan, pengawasan Perusahaan mineral dan batubara	100	ST	91,41	ST
5	Penelitian mitigasi dan pelayanan geologi	100	ST	91,41	ST
6	Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan BBG	100	ST	79,26	T
7	Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	100	ST	36,9	SR

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
8	Penelitian dan pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	100	ST	96,66	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(6) Urusan Pilihan Perdagangan

Prestasi kinerja program / kegiatan pada urusan perdagangan Tahun 2016 ada 4 program yang ada, terlihat capaiannya sebesar 100% sehingga masuk dalam kategori sangat tinggi, sedangkan realisasi anggaran sebesar terlihat variatif capaiannya namun masuk kategori sangat tinggi (96,40%). Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

Tabel. 2.73.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Perdagangan Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	100	ST	91.31	ST
2	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	100	ST	97.89	ST
3	Sistem logistik dan distribusi Bapok	100	ST	99,89	ST
4	Peningkatan Pengembangan Ekspor	100	ST	92,90	ST

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

(7) Urusan Pilihan Bidang Industri

Prestasi kinerja program/kegiatan pada urusan pilihan industri Tahun 2016 terlihat 2 program capaiannya yang masuk kategori Sangat Tinggi, sedangkan realisasi anggaran terlihat capaiannya variatif dengan salah satunya masuk kategori Tinggi, namun secara keseluruhan penilaian realisasi anggaran masuk

kategori Tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi anggaran pembangunan telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. Namun demikian Terdapat dua program yang tidak dapat dinilai kinerja dan capaian realisasi anggarannya tidak ada kegiatan yang dilaksanakan dikarenakan tidak mendapatkan anggaran, yaitu Pengembangan Industri Kecil dan Menengah dan Peningkatan Kelompok Usaha Sektor Industri dan perdagangan.

Tabel. 2.74.
Prestasi Kinerja dan Anggaran Kegiatan Urusan Industri
Tahun 2016

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah	% Realisasi			
		Kinerja	Kategori	Anggaran	Kategori
1	Peningkatan kemampuan teknologi industri	100	ST	99,14	ST
2	Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	-	-	-	-
3	Peningkatan Kelompok Usaha Sektor Industri dan perdagangan	-	-	-	-
4	Pengembangan Industri kecil/menengah	100	ST	89,79	T

Sumber : TP2K Bappeda Provinsi Papua, 2017

2.2.2. Evaluasi Pencapaian Misi RPJMD 2013-2018 Sampai Tahun 2016

Misi pertama adalah Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam Kedaulatan NKRI, yang memiliki sasaran :

1. Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.
2. Meningkatnya masyarakat Papua yang berbudaya,
3. Meningkatnya suasana damai dan kepastian hukum serta terjaganya ketertiban umum, dan
4. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tenram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua.

Berdasarkan hasil evaluasi program di tahun 2015, terlihat sebagian besar telah mencapai target dan segera tercapai. Hanya sedikit yang masih membutuhkan upaya kerja keras mencapainya.

Tabel. 2.75.
Evaluasi Capaian Misi Pertama RPJMD Di Tahun 2015

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi Capaian : perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)	
1	1	Konflik SARA	Kasus	Menurun	19	-	
	2	Penanganan Napsah	persen	95	-	n.a	
	3	Tingkat Aktivitas Keagamaan	Kegiatan	Meningkat	-	n.a	
	4	Persentase Peraturan perundang-undangan yang responsif dan partisipatif	Persen	100	100	100	Tercapai
	4	Tingkat aktualisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat	Kegiatan	Meningkat	Meningkat	-	Tercapai
	5	Dialog Lintas Budaya	Tingkat rutinitas	Rutin	Rutin		Tercapai
2	1	Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	20	39.2	4.00	Perlu Upaya Keras
	2	Angka Kriminalitas yang tertangani	per 10.000 penduduk	100	81.63	81.63	Segera Tercapai
	3	Tingkat Konflik Horisontal (antar suku)	Kasus	Rendah		n.a	
	4	Pelanggaran Hukum dan HAM	Kasus	Rendah		n.a	
	5	Kekerasan dalam rumah tangga	Kasus	350	515	52.86	Perlu upaya keras
	6	Jumlah Korban Bencana Alam yang Tertangani	Orang	100	22.00	22	Perlu upaya keras
	7	Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran melalui Lembaga Adat	Kasus	4,000	3,732	93.3	Segera Tercapai

Misi kedua adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus, dengan sasarannya yaitu :

1. Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi
4. Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN
5. Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik
6. Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota
7. Meningkatnya Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 Wilayah adat
8. Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku)
9. Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.
10. Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.
11. Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan
12. Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan
13. Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (Mind set) Aparatur Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi program di tahun 2015, terlihat hampir semuanya mencapai target dan segera tercapai. Hanya ada 4 indikator sasaran sedikit yang masih membutuhkan upaya kerja keras mencapainya.

Tabel. 2.76.
Evaluasi Capaian Misi Kedua RPJMD Di Tahun 2015

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
1	Presentase Pejabat Sturktural yang memenuhi Syarat Jabatan.	Persen	100	99.32	99.32	Tercapai
2	Presentase Pejabat Fungsional yang sesuai kebutuhan.	Persen	100	70.79	70.79	Perlu upaya keras
3	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Nilai	B	C	66.67	Perlu upaya keras
4	Rata-rata Kehadiran Pegawai		100	87.51	87.51	Segera Tercapai
5	Persentasi SKPD yang memiliki Renstra yang sesuai peraturan	Persen	100	95.00	95.00	Segera Tercapai
6	Persentasi Penyampaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Tepat Waktu (RPJMD, RKPD, KUA dan PPAS)	Kualitas	Tersedia dan Akurat	Tersedia dan Akurat	100.00	Tercapai
7	Prosentase Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD	Persen	100	32.65	32.65	Perlu upaya keras
8	Proporsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Pemerintahan	Persen	60	40	66.67	Perlu upaya keras
9	Persentasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen	Persen	90		n.a	
10	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Meningkat		n.a	
11	Persentase Pengaduan dan Gugatan Masyarakat yang di tangani	Persen	100	100	100.00	Tercapai
12	Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan	Persen	70	55.36	79.09	Segera Tercapai
13	Persentase nilai temuan keuangan hasil audit yang dapat ditindaklanjuti	Persen	100		n.a	
14	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Wajar Tanpa Pengecualian		WTP	WTP	100.00	Tercapai

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
	(WTP)					
15	Proporsi Belanja Anggaran Publik yang lebih Besar daripada Belanja Aparatur.		85	72.62	85.44	Terlampau
16	Jumlah Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/Kota				n.a	
17	Jumlah Kerjasama antar Kabupaten/Kota		Meningkat		n.a	
18	Pembangunan Berdasarkan 5(lima) Wilayah Adat	persen	100	100	100.00	Segera Tercapai
19	Frekwensi Kerjasama tiga tungku					
20	Pembangunan Berdasarkan 5(lima) Wilayah Adat	WP	Pembagian Wialayah Pembngn berdasarkan 5(wilayah)		100	Tercapai
21	Persentasi Peraturan Daerah yang ditetapkan tepat waktu terhadap yang diusulkan	Persen	Meningkat			
22	Ditetapkan seluruh Perdasus dan Perdasi sesuai Amat Undang-undang Otsus	Persen	Tersedianya Perdasus dan Perdasi	100	100.00	Tercapai
23	Mengawal Implementasi kebijakan Otsus secara konsisten					
24	Tersedianya Undang-Undang Otonomi Khusus yang telah rekonstruksi	Dok	1	1	100	Tercapai
25	Tingkat Pendidikan Orang Asli Papua		Meningkat		n.a	
26	Angka Harapan hidup Orang Asli Papua		Meningkat		n.a	
27	Proporsi Keluarga Orang Asli Papua yang memiliki Rumah Layak Huni		Meningkat		n.a	
28	Proporsi KAT berdaya Sosial		Meningkat		n.a	
29	Jumlah Penduduk Miskin Orang Asli Papua		Meningkat		n.a	
30	Presentase Penduduk diatas Garis kemiskinan	Persen	75	71.60	95.47	Segera Tercapai
31	Tingkat Efisiensi dan efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah		Kelembg Pemerintah Daerah yg Proporsional	SOTK Kelembg telah terbentuk untuk	n.a	

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
				mendukung pencapaian RPJMD, Perlu Peningkatan Reformasi Birokrasi		
32	Kelembagaan Pemerintahan Daerah yang miskin Struktur kaya Fungsi	Perda	1	1	100.00	Tercapai
33	Persentase Pegawai yang Sudah mengikuti diklat struktural dari seluruh pejabat struktural	Persen	100	99.32	99.32	Segera Tercapai
34	Persentase pegawai yang Berpendidikan minimal sarjana	Persen	75	49.94	66.59	Perlu Upaya Keras

Misi yang ketiga adalah Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia, yang memiliki sasaran yakni :

1. Terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang berkelanjutan
2. Terwujudnya masyarakat yang religius
3. Terwujudnya layanan sosial yang berkualitas
4. Terwujudnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan
5. Lestarnya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua
6. Meningkatnya prestasi olahraga
7. Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan
8. Terwujudnya Masyarakat yang Sehat
9. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil

Berdasarkan hasil evaluasi program di tahun 2015, terlihat lebih banyak target yang dapat terlampaui dan tercapai. Meskipun beberapa ada yang masih membutuhkan kerja untuk mencapainya.

Tabel. 2.77.
Evaluasi Capaian Misi Ketiga RPJMD Di Tahun 2015

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
1	Laju pertumbuhan penduduk		2	1.89	94.35	Segera Tercapai
2	Persentase Kabupaten/Kota yang telah menerapkan Sistem Kependudukan secara Nasional		100	90.00	90.00	Segera Tercapai
3	Penggunaan Narkotika dan pemakaian Zat Adiktif		< 500 Orang		n.a	
4	Jumlah Konflik akibat SARA	Kasus	0			Perlu upaya keras
5	Cakupan KAT	Persen	80			
6	Jumlah Kelompok PMKS yang dibina	Kelompok	300	745.00	248.33	Terlampai
7	Indeks Pembangunan Gender		65	79.53	122.35	Terlampai
8	Indeks Pemberdayaan Gender		60	66.42	110.70	Terlampai
9	Apresiasi dan aktualisasi terhadap seni dan budaya	Persen	100	80.00	80.00	Segera Tercapai
10	Prestasi Papua pada perhelatan olahraga tingkat Nasional (PON)	Posisi urutan dalam PON	10	8	120.00	Terlampai
11	Jumlah Cabang Olah Raga yang diikuti dalam PON	Cabang			n.a	
12	Partisipasi Atlet Papua di Iven Nasional dan	Atlit			n.a	

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
	Internasional					
13	Jumlah pelatih yang bersertifikasi Nasional	Orang			n.a	
14	Jumlah Pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan	orang	5000		n.a	
15	Jumlah Organisasi Kepemudaan	Organisasi			n.a	
16	Jumlah wirausaha muda asli Papua	wirausaha	1000		n.a	
17	Persentase Penduduk asli Papua yang terjangkau dalam Kartu Papua Sehat (KPS)	Persen	100	100.00	100.00	Tercapai
18	Usia Harapan Hidup	Tahun	66.25	65.10	98.26	Segera Tercapai
19	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	/ 100.000 KH	250	422	31.20	Perlu upaya keras
20	Porposi Kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih	Persen	85	41.18	48.44	Perlu upaya keras
21	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	/ 1.000 KH	25	44	24.00	Perlu upaya keras
22	Prevalensi Kekurangan Gizi pada anak balita (%)	Persen	15		n.a	
23	Kasus Malaria (API) per 1.000 penduduk	/ 1.000	20	25	75.00	Segera Tercapai
24	Cakupan imunisasi Dasar	Persen	80	44.6	55.75	Perlu upaya keras

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
25	Penanganan penderita HIV/AIDS yang ditemukan mendapatkan ARV	Persen	100	100.00	100.00	
26	Angka Melek Huruf		90	70.83	78.70	Segera Tercapai
27	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	9	5.99	66.56	Perlu upaya keras
28	Angka Partisipasi Kasar (APK) (%)				n.a	
	-PAUD/TK	Persen	50	10.93	21.86	Perlu upaya keras
	- SD	Persen	100	95.15	95.15	Segera Tercapai
	- SMP	Persen	80	73.59	91.99	Segera Tercapai
	- SMA	Persen	60	66.97	111.62	Terlampai
29	Angka Partisipasi Murni (APM) (%)					
	- SD		80	78.56	98.20	Segera Tercapai
	- SMP		55	54.21	98.56	Segera Tercapai
	- SMA		45	43.22	96.04	Segera Tercapai
30	Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%)					
	- 7 - 12 Tahun		85	97.36	114.54	Terlampai
	- 13 - 15 Tahun		80	100.00	125.00	Terlampai
	- 16 - 18 Tahun		60	91.57	152.62	Terlampai
31	Prosentase Melek Huruf > 15 th		90	84.84	94.27	Segera Tercapai

Misi yang keempat adalah Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal, dengan sarasannya yaitu :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi
3. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM
4. Meningkatkan kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah
5. Terwujudnya Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja
6. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah
7. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat
8. Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat

Dari hasil evaluasi pencapaian sasaran program di tahun 2015 terindikasi bahwa misi ketiga ini segera akan tercapai di tahun 2018, oleh karena sebagian besar sasaran yang ditargetkan ada yang terlampaui, telah tercapai dan segera tercapai.

Tabel. 2.78.
Evaluasi Capaian Misi Keempat RPJMD Di Tahun 2015

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
1	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)	Rupiah per Tahun (Milyar)	35.00	48.70	139.14	Terlampaui
2	Jumlah Investor (PMA dan PMDN)	Proyek	200	186	93.00	Segera Tercapai
3	Pertumbuhan Ekonomi		7.00	8.81	125.86	Terlampaui
4	PDRB per Kapita	juta rupiah	30.00	43.20	144.00	Terlampaui
5	Indeks Gini	Persen	0.3000	0.422	59.33	Perlu upaya keras
6	Prosentase Jumlah UMKM yang berdaya saing	Persen	70		n.a	

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
7	Persentase Jumlah Koperasi yang berdaya saing		n.a		n.a	
8	Cakupan Jumlah UMKM yang di bina oleh pemerintah	Unit	n.a		n.a	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.36	3.99	108.49	Terlampai
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	77.58	78.67	101.40	Terlampai
11	Jumlah PDRB dari Sektor Pariwisata	milyar rupiah	1000.00	825.28	82.53	Segera Tercapai
12	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	3	0.56	18.67	Perlu upaya keras
13	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton/tahun	700,000	725,727	103.68	Terlampai
14	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Ton/tahun	300,000	137,935	45.98	Perlu upaya keras
15	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB	Persen	3.00	0.99	33.00	Perlu upaya keras
16	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	Persen	5.00	0.91	18.20	Perlu upaya keras
17	Persentase Pengendalian penyakit Menular	%			n.a	
18	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap	Ton/tahun	500000		n.a	
19	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton/tahun	10000		n.a	
20	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB	persen	4.32	4.40	101.85	Terlampai

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
21	Kontribusi sub sektor kehutanan terhadap PDRB		2.35	2.20	93.62	Segera Tercapai
22	Kontribusi Sub Sektor Pertambangan terhadap PDRB	Persen	33.00	32.60	98.79	Segera Tercapai
23	Paritas Daya Beli	Juta/Tahun	7.50	6.47	86.25	Segera Tercapai

Misi yang kelima adalah Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan, memiliki beberapa sasaran yaitu :

1. Meningkatnya konektivitas antar wilayah
2. Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah
3. Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah
4. Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan
5. Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni
6. Meningkatnya ketersediaan air bersih
7. Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
8. Papua sebagai paru-paru dunia
9. Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan
10. Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan

Hasil evaluasi di tahun 2015 menunjukkan bahwa sebagian besar sasaran pada misi yang kelima ini telah tercapai dan segera akan tercapai.

Tabel. 2.79.
Evaluasi Capaian Misi Kelima RPJMD Di Tahun 2015

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
1	Persentase Panjang Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (Baik dan Sedang)	persen	60.00	63.76	106.26	Terlampai
		persen	85.00	82.95	97.59	Segera Tercapai
		persen	55		n.a	
2	Terbangunnya jaringan jalan PKN-PKW, antar PKW serta PKW-PKL	km	365	365.00	100.00	Tercapai
		km	53	53.00	100.00	Tercapai
		km	533	445.00	83.49	Tercapai
		km	Terhubungkan			
		km	717.0	533.0	74.34	Perlu upaya keras
		km	274.2	274.2	100.00	Tercapai
		km	Terhubungkan			
		km	277	264.6	95.66	Segera Tercapai
3	Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik	Persen	60	45.2	75.25	Segera Tercapai
4	Tingkat ketersediaan dan fungsional bandara	Fungsional	Pelayanan Regional, Domestik & Internasional	Belum Menjadi Bandara Internasional		Segera Tercapai
		Fungsional	Pelayanan Regional & Domestik	Telah Menjadi Bandara Pelayanan Regional; Domestik		Tercapai
		Fungsional	Pelayanan Regional, Domestik & Internasional	Belum Menjadi Bandara Internasional		Segera Tercapai
		Fungsional	Pelayanan Regional, Domestik & Internasional	Belum Menjadi Bandara Internasional		Segera Tercapai
5	Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Fungsional	Pelayanan Penumpang	Masih melayani Penumpang dan Barang		Tercapai
		Persen	50	30.0	60.00	Perlu upaya keras
		Fungsional	Pelayanan Penumpang & Barang	Telah melayani penumpang & barang	100	Tercapai

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
		Fungsional	Pelayanan Penumpang , Barang, Eksport & Import Barang	Belum menjadi Pelabuhan Eksport & Import Barang		Segera Tercapai
		Fungsional	Pelayanan Penumpang , Barang, Eksport & Import Barang	Belum menjadi Pelabuhan Eksport & Import Barang		Segera Tercapai
		Fungsional	Pelayanan Penumpang & Barang	Telah melayani penumpang & barang		Tercapai
		Fungsional	Pelayanan Penumpang & Barang	Telah melayani penumpang & barang		Tercapai
		Fungsional	Pelayanan Penumpang & Barang	Telah melayani penumpang & barang		Tercapai
		Fungsional	Pelayanan Penumpang & Barang	Telah melayani penumpang & barang		Tercapai
6	Persentase Arus Penumpang Angkutan Umum Per Tahun	Per Tahun	5	3.9	77.60	Segera Tercapai
7	Prosentase cakupan sistem jaringan sumberdaya air terhadap irigasi	Persen	100	100	100.00	Tercapai
8	Prosentase cakupan sistem Pengendalian banjir dan abrasi	Persen	100	23.56	23.56	Perlu upaya keras
9	Tingkat ketersediaan air tanah	Jt M ³	18.075		n.a	
10	Prosentase ibu kota distrik yang terlayani Sistem Komunikasi dan informasi	persen	60	23.0	38.33	Perlu upaya keras
11	Rasio elektrifikasi	persen	50	47.2	94.40	Segera Tercapai
12	Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif		-		n.a	

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
13	Daya terpasang	Kw	200,000	176,096	88.05	Segera Tercapai
14	tingkat ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni	Unit	13,000	5,979.0	45.99	Perlu upaya keras
15	Persentase Rumah Tangga yang Terlayani Air Bersih	Persen	50.00	50.0	100.00	Tercapai
16	Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang		75.00	90.00	80.00	Segera Tercapai
17	Emisi GRK		640.737.952 tCO ₂ eq		n.a	
18	Serapan GRK		> 894.359.816 tCO ₂ eq		n.a	
19	Luas tutupan hutan primer dan sekunder		≤ 25.131.606 Ha (79,52%)		n.a	
20	Persentase Area Hutan Mangrove yang Kondisi Baik	Persen	90	82.64	91.82	Segera Tercapai
21	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	2	3.00	50.00	Perlu upaya keras
22	Persentase Area Hutan Lindung Terhadap seluruh kawasan	Persen	26.61	26.6	100.00	Tercapai
23	Prosentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.		100	95.0	95.00	Segera Tercapai
24	Prosentase pemangku kepentingan yang memahami pembangunan berkelanjutan	Persen	100		n.a	

No	Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Interpretasi perlu upaya keras (< 75%), segera tercapai (75% < p < 100%), tercapai dan melampaui (>= 100%)
25	Jumlah dokumen perencanaan yang mengakomodir pembangunan berkelanjutan	Dokumen	100	100	100.00	Tercapai

Secara umum dapat dikatakan bahwa program-program pembangunan yang dilaksanakan sampai dengan tahun 2015 (periode tengah tahun) sudah berada pada alur yang benar (on the right track), karena sebagian besar yang ditargetkan mampu direalisasikan lebih dari 75% namun masih dibawah 100% (akan tercapai), sehingga status pencapaian dari misi 1, misi 2, misi 3, misi 4 dan misi 5 semuanya terindikasi akan tercapai pada target tahun terakhir RPJMD yaitu 2018.

Akan tetapi, pemerintah provinsi masih perlu kerja keras untuk segera merealisasikan beberapa sasaran program yang terindikasi pencapaiannya masih di bawah 75% (perlu upaya keras) yang dapat menjadi *disturbance error* dalam pencapaian misi di tahun terakhir jika tidak tercapai targetnya. Sasaran-sasaran program yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Tabel. 2.80.
Realisasi Pencapaian Sasaran Program Yang Terindikasi Di Bawah 75%

Misi/Indikator Sasaran	Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Status Pencapaian	
Misi 1 : Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam Kedaulatan NKRI						
1	Angka Kriminalitas	per 10.000 penduduk	20	39.2	4.00	Perlu Upaya Keras
2	Kekerasan dalam rumah tangga	Kasus	350	515	52.86	Perlu Upaya Keras
3	Jumlah Korban Bencana Alam yang Tertangani	Orang	100	22.00	22	Perlu Upaya Keras
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus						
1	Presentase Pejabat Fungsional yang sesuai kebutuhan.	Persen	100	70.79	70.79	Perlu Upaya Keras
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi oleh KEMENPAN dan RB	Nilai	B	C	66.67	Perlu Upaya Keras
3	Prosentase Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD	Persen	100	32.65	32.65	Perlu Upaya Keras
4	Proporsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Pemerintahan	Persen	60	40	66.67	Perlu Upaya Keras
Misi 3 : Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia						
1	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	/ 100.000 KH	250	422	31.20	Perlu Upaya Keras
2	Porposi Kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih	Persen	85	41.18	48.44	Perlu Upaya Keras
3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	/ 1.000 KH	25	44	24.00	Perlu Upaya Keras
5	Cakupan imunisasi Dasar	Persen	80	44.6	55.75	Perlu Upaya Keras
Misi 4 : Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal						
1	Indeks Gini	Persen	0.3000	0.422	59.33	Perlu Upaya Keras
2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	Persen	3	0.56	18.67	Perlu Upaya Keras

Misi/Indikator Sasaran		Satuan	Target Akhir Tahun 2018	Capaian Sampai Dengan Tahun 2015	Persentase Capaian	Status Pencapaian
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	Ton/tahun	300,000	137,935	45.98	Perlu Upaya Keras
4	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB	Persen	3.00	0.99	33.00	Perlu Upaya Keras
5	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB	Persen	5.00	0.91	18.20	Perlu Upaya Keras
Misi 5 : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan						
1	Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Persen	50	30.0	60.00	Perlu Upaya Keras
2	Prosentase cakupan sistem Pengendalian banjir dan abrasi	Persen	100	23.56	23.56	Perlu Upaya Keras
3	Prosentase ibu kota distrik yang terlayani Sistem Komunikasi dan informasi	persen	60	23.0	38.33	Perlu Upaya Keras
4	tingkat ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni	Unit	13,000	8,934	68.72	Perlu Upaya Keras
5	Kerusakan Kawasan Hutan	Persen	2	3.00	50.00	Perlu Upaya Keras

Dari penyajian Tabel 2.78 di atas teridentifikasi bahwa pada Misi Ke-1 (Mewujudkan Suasana Aman, Tenram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam Kedaulatan NKRI) terdapat 3 sasaran program yang memerlukan upaya keras untuk mencapai targetnya hingga pada akhir tahun 2018, dimana berdasarkan hasil pemetaan permasalahan ditemukan beberapa faktor internal dan eksternal yang harus ditangani dan ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi sebagai berikut.

Tabel. 2.81.
Permasalahan Dan Tindak Lanjut Dalam Pencapaian Sasaran Program Untuk
Misi Mewujudkan Suasana Aman, Tenang dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat
Papua dalam Kedaulatan NKRI

1	Sasaran Program	Permasalahan	Tindak Lanjut
	Tingkat Kriminalitas	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya Konsumsi Minuman Keras • Rendahnya Perhatian Dalam Keluarga • Pergaulan Bebas Remaja Yang Tidak Terkontrol • Kebutuhan Ekonomi • Kecemburuan Sosial • Rendahnya Tingkat Pendidikan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penegakan PERDA miras • Peningkatan dan perluasan akses pendidikan • Peningkatan dan perluasan lapangan kerja disektor-sektor yang produktif
	Tingkat Kekerasan dalam rumah tangga	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya Penduduk Yang Kawin Dusia Muda • Tingkat Pendidikan Yang Masih Rendah • Latar Belakang Keluarga Yang Kurang Baik • Tingkat Perselingkuhan Yang Masih Tinggi • Tingginya Konsumsi Minuman Keras • Rendahnya Tingkat Kesadaran Cinta Keluarga • Rendahnya Sosialisasi Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kegiatan preventif berupa kegiatan edukasi kepada masyarakat sejak usia dini • Peningkatan bantuan medis bagi kasus KDRT • Peningkatan kerja sama dengan organisasi, LSM, dan Mahasiswa untuk memberikan dukungan bagi kasus KDRT • Melaksanakan penegakan hukum bagi korban KDRT dan penanganan korban KRDT melalui pemberdayaan
	Penanganan Korban Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi topografi yang sangat ekstrim • Ketersediaan peralatan dan perlengkapan yang belum memadai • Kuantitas dan kualitas IT yang digunakan masih rendah • Kurangnya dana yang dialokasikan untuk penanganan bencana alam • Kuantitas dan kualitas SDM yang sangat kurang dibandingkan jumlah kasus • Rendahnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai deteksi dini bencana, pasca bencana dan penanganannya 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya Rehabilitasi yang terkena dampak berupa perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat untuk normalisasi semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana. • Penyusunan rencana pengembangan sistem peringatan, pemeliharaan persediaan dan pelatihan personil -peningkatan kegiatan-kegiatan edukasi tentang pencegahan bencana dan penanganan bencana kepada masyarakat • Upaya Rekonstruksi semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat.

Selanjutnya pada Misi Ke-2 (Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus) ada 4 sasaran program yang terlihat perlu upaya keras untuk merealisasikannya. Dan berdasarkan hasil pemetaan permasalahan

ditemukan juga beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala dalam pencapaian sasaran program tersebut yang dapat dipaparkan sebagai berikut.

Tabel. 2.82.

Permasalahan Dan Tindak Lanjut Dalam Pencapaian Sasaran Program Untuk Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus

Sasaran Program		Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Peningkatan Pejabat Fungsional yang sesuai kebutuhan.	<ul style="list-style-type: none"> • Penjenjangan karir jabatan fungsional yang belum berjalan optimal • Terjadinya pemusatan bidang ilmu tertentu pada jenjang fungsional, yang menyebabkan kelangkaan pejabat fungsional di bidang ilmu lain • Belum memadainya media yang berkualitas untuk pengembangan dan peningkatan jabatan fungsional • Kurangnya hasrat PNS menempati jabatan fungsional • Perhatian terhadap kesejahteraan pejabat fungsional belum optimal • Terdapat kecenderungan pengabaian konsep berpikir yang disampaikan pejabat fungsional dalam pengambilan keputusan organisasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas PNS. • Pemberian fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan memberikan kemudahan di dalam pencapaian tujuan organisasi. • Pemberian penghargaan atas jasa atau remunerasi yang dapat menambah perolehan dan meningkatkan kesejahteraan.
2	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi oleh KEMENPAN dan RB	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat kedisiplinan dan loyalitas aparatur yang masih rendah • Rendahnya kualitas sumberdaya aparatur • Pemahaman dan pengetahuan aparatur terhadap tupoksi masih rendah • Mutasi dan rotasi kepegawaian • Penempatan aparatur yang tidak sesuai dengan kapasitasnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan perencanaan dapat berorientasi pada outcome dan memberikan sanksi dan penghargaan bagi aparatur yang tidak atau mencapai kinerja. • Mengoptimalkan kinerja pegawai di Bagian Program dan Evaluasi • Mengadakan pelatihan untuk pegawai yang menangani LAKIP.
			<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan analisis keberhasilan dan kegagalan program dan kegiatan dan mengevaluasi indikator kinerja utama untuk mengukur capaian kinerja pemerintah daerah.

Sasaran Program		Permasalahan	Tindak Lanjut
3	Prosentase Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD	<ul style="list-style-type: none"> • Belum memadainya pengetahuan, pemahaman dan keterampilan SKPD dalam menyusun SOP sesuai tupoksinya masing-masing • Masih adanya anggapan SOP belum begitu penting dalam pelayanan publik • Kecenderungan SKPD untuk menggunakan SOP yang sudah lama, tidak dilakukan pembaharuan SOP 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian pembekalan tentang SOP pada SKPD (mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan). • Menjadikan SOP sebagai petunjuk dalam melaksanakan tugas sesuai dengan Tupoksi dengan konsisten, berkomitmen, dan mengikat. • Melakukan monitoring ke setiap unit kerja sampai sejauhmana setiap pelaksana menguasai SOP yang telah ditetapkan.
4	Proporsi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Kepatuhan SKPD untuk merumuskan dan menerapkan SPM masih kurang • Pengetahuan dan keterampilan SKPD masih ada yang belum memadai • Belum optimalnya penerapan Anggaran Berbasis Kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman dan kesadaran atas SPM • Peningkatan ketrampilan analisis kesenjangan capaian (gap) terhadap target SPM, prioritas penyebab kesenjangan, dan strategi penanganan. • Integrasi Target SPM dan Kebutuhan Anggaran Pencapaian Target SPM ke dalam Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Daerah dan Dinas/SKPD

Adapun di Misi Ke-3 (Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia) terdapat 4 sasaran program yang tampak membutuhkan upaya keras untuk merealisasikannya. Dalam hal ini pemerintah provinsi perlu memperhatikan beberapa faktor internal dan eksternal yang menjadi permasalahan selama ini, dan tindak lanjut yang dibutuhkan sebagai berikut.

Tabel. 2.83.
Permasalahan Dan Tindak Lanjut Dalam Pencapaian Sasaran Program Untuk
Misi Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi
dan Berahlak Mulia

Sasaran Program		Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Aksesibilitas sarpras kesehatan yang masih rendah • Rendahnya pemahaman dan pengetahuan rumah tangga mengenai upaya kesehatan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesehatan dan perawatan diri ibu hamil sehari-hari.
2	Porposi Kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih	<ul style="list-style-type: none"> • Masih banyaknya persalinan secara tradisional • Belum memadainya obat-obatan dan tenaga medis persalinan • Rendahnya gizi bumil, bayi dan balita • Penanganan setelah persalinan yang belum optimal • Ketersediaan sarana dan prasarana persalinan yang belum memadai • Kualitas dan kuantitas tenaga medis yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemahaman pada masyarakat untuk 4T, Menghindari Terlalu tua, Terlalu muda Terlalu banyak dan Terlalu dekat saat hamil. • Peningkatan pemahaman ibu tentang pentingnya Persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. • Pemenuhan Gizi Ibu Hamil • Mengupayakan pelaksanaan Antenatal Care (ANC) • Mengupayakan peningkatan pengetahuan tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi • Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM bidang kesehatan • Penyediaan sarana prasarana kesehatan yang memadai sampai level kampung. • Peningkatan pengetahuan dan pemahaman bumil tentang pentingnya persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan
3	Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup		<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pemeriksaan kehamilan dan nifas pada Bidan atau petugas kesehatan lainnya. • Mendorong para ibu melahirkan ditolong oleh petugas kesehatan. • Mempersiapkan suami ibu hamil untuk mendukung kehamilan dan persalinan. • Mendorong diadakannya tabulin (tabungan ibu bersalin/biaya persalinan) • Mempersiapkan angkutan bagi ibu hamil atau ambulan desa. • Mendorong para ibu dan petugas kesehatan menggunakan Buku KIA sebagai sumber informasi dan alat untuk pemeriksaan dan pencatatan kesehatan ibu dan anak. • Mendorong para ibu mengikuti Kelas Ibu Hamil dan Kelas Ibu

	Sasaran Program	Permasalahan	Tindak Lanjut
			Balita. <ul style="list-style-type: none"> • Membantu kesiagaan petugas kesehatan.
4	Cakupan imunisasi Dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya komitmen pemerintah daerah kabupaten dalam mendukung pelaksanaan program imunisasi • Ketersediaan dan kemampuan sumber daya mensukseskan program imunisasi yang kurang memadai dan juga berbeda antar daerah • Ketersediaan dana operasional, fasilitas dan infrastruktur pelayanan imunisasi yang belum memadai • Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya imunisasi untuk anak yang masih rendah • Terdapatnya tenaga medis yang sering berpindah-pindah, karena rotasi dan mutasi • Adanya kampanye negatif imunisasi sebagai gerakan anti imunisasi yang menyebabkan banyak orang tua menolak anaknya diimunisasi • Kondisi topografi dan geografi yang ekstrim di Provinsi Papua 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya imunisasi • Peningkatan peran bidan dalam pemberian imunisasi pada balita • Memberikan sertifikat untuk bayi yang sudah lengkap pemberian imunisasinya.

Untuk Misi Ke-4 (Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal), permasalahan yang muncul lebih dominan pada produktifitas yang rendah sehingga dibutuhkan berbagai kebijakan pengembangan Sumber Daya yang lebih optimal. Secara rinci permasalahan yang ditemukan, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam merealisasikan sasaran program yang terindikasi masih dibawah 75% adalah sebagai berikut.

Tabel. 2.84.
Permasalahan Dan Tindak Lanjut Dalam Pencapaian Sasaran Program Untuk
Misi Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis
Potensi Lokal

	Sasaran Program	Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Indeks Gini	<ul style="list-style-type: none"> • Sumber daya pertanian yang menjadi tumpuan penduduk papua belum mampu mentransmisi pendapatan rumah tangga di atas garis kemiskinan • Adanya perbedaan topografi dan geografi yang sangat ekstrim antarkabupaten dan kota • Pembangunan infrastruktur yang masih sangat kurang dan timpang, sehingga menimbulkan terjadinya disparitas harga yang sangat mencolok antarwilayah • Sebagian pemerintah daerah masih lebih mementingkan pertumbuhan dibandingkan pemerataan • Tingkat kesulitan yang sangat tinggi untuk mengurangi ketimpangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mendapatkan keahlian. • Peningkatan kemampuan untuk memperoleh upah yang lebih baik. • Memperbesar alokasi anggaran untuk kesejahteraan kaum miskin
2	Persentase Peningkatan Jumlah Kunjungan Wisata	<ul style="list-style-type: none"> • Biaya kunjungan wisata masih terlalu tinggi • Kurangnya promosi dan informasi disektor pariwisata • Sarana dan prasarana pariwisata, serta pendukungnya yang belum memadai • Masih maraknya pungutan liar • Kurangnya perhatian dan komitmen pemerintah di sektor pariwisata • Tingkat keamanan yang masih rendah • Manajemen pariwisata yang belum profesional • Kreativitas dan inovasi disektor pariwisata belum berkembang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga keamanan wilayah • Memperbaiki sarana prasarana (infrastruktur pariwisata) • Mengenalkan tempat wisata kepada wisatawan domestik, dan mengajak untuk menjaga kelestarian-nya • Menyampaikan dan mengenalkan destinasi wisata melalui iklan/promosi kunjungan wisata yang ditayangkan channel TV nasional/Internasional
3	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan dan Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat produktifitas sektor perkebunan dan tanaman hortikultura masih sangat rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman Perkebunan dan Holtikultura • Peningkatan penggunaan teknologi

Sasaran Program		Permasalahan	Tindak Lanjut
4	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> • Penggunaan teknologi yang belum memadai • Masih banyaknya masyarakat yang hidup dengan meramu dan nomaden, sehingga pola tanam budidaya belum maksimal dijalankan • Orientasi konsumsi yang lebih dominan dibandingkan produksi, masyarakat masih berpola subsisten • Belum banyaknya produk turunan yang dihasilkan sehingga nilai tambah yang diciptakan masih sangat rendah • Pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian belum maksimal dijalankan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dan belum adanya Perda mengenai pengembangan komoditi unggulan pertanian dan perkebunan yang mengakomodir penanganan produksi dan pasca produksi dari hulu hingga ke hilir • Sarana dan prasarana produksi yang belum memadai, termasuk pendukungnya • Minimnya dana program-program pembangunan dan pengembangan pertanian rakyat • Kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi yang dihasilkan masih sangat rendah, sehingga menimbulkan uncertainty (ketidakpastian) dalam produk-produk unggulan pertanian dan perkebunan yang akhirnya mengurangi kepercayaan investor • Masih adanya gap antara investor dengan adat (hak ulayat) yang belum tertangani secara optimal • Penetapan target akhir yang terlalu optimis 	<p>tepat guna untuk sektor pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemberdayaan kelembagaan pada sektor pertanian • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung pertanian rakyat • Memasyarakatkan produk-produk pertanian lokal dengan cara: (1). mengenalkan produk lokal yang unggul dan bermutu kepada petani, (2). mengenalkan komoditas lokal yang unggul dan bermutu kepada konsumen, (3). mendekatkan produsen agribisnis kepada konsumen, (4). Meningkatkan keberlanjutan inovasi produksi produk-produk pertanian unggulan.
5	Kontribusi Sub Sektor Peternakan terhadap PDRB		

Terakhir untuk Misi Ke-5 (Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan) terindikasi ada 5 sasaran program yang realisasinya masih dibawah 75%. Terdapat beberapa masalah internal dan eksternal yang berhasil dipetakan menjadi kendala selama ini dalam pencapaian sasaran program tersebut, yang dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 2.85.

Permasalahan Dan Tindak Lanjut Dalam Pencapaian Sasaran Program Untuk Misi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapankan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Sasaran Program		Permasalahan	Tindak Lanjut
1	Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anggaran yang belum memadai • Penanganan hak ulayat yang belum optimal • Kondisi geografis dan topografis yang ekstrim 	<ul style="list-style-type: none"> • Upaya penyediaan anggaran pembangunan sarana prasana transportasi ASDP yang fungsional dan memadai • Pengendalian tata ruang, pengaturan daerah rawan banjir dan abrasi dan komitmen mentaati peraturan
2	Prosentase cakupan sistem Pengendalian banjir dan abrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan target yang terlalu optimis 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan anggaran yang memadai untuk penanggulangan dan pengendalian banjir dan abrasi
3	Prosentase ibu kota distrik yang terlayani Sistem Komunikasi dan informasi	<ul style="list-style-type: none"> • Kemitraan dengan provider yang belum maksimal • Ketersediaan sumberdaya energi listrik yang belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian banjir dan abrasi • Peningkatan anggaran untuk pembangunan sarana prasarana sistem informasi komunikasi • Peningkatan kerjasama dengan dengan provider dengan pemerintah dan dengan masyarakat sebagai pemilik hak ulayat. • Peningkatan sumber daya listrik bagi masyarakat • Peningkatan kualitas dan kesiapan SDM dan kelembagaan untuk penerapan sistem informasi dan komunikasi
4	tingkat ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni	<ul style="list-style-type: none"> • Kondisi geografis dan topografi yang ekstrim • Biaya transportasi yang tinggi • Tingkat kemahalan harga konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan dan penguatan kapasitas kelembagaan bidang perumahan untuk mendukung penyediaan pendanaan dan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah • Peningkatkan kualitas dan kapasitas pelaku pembangunan

Sasaran Program		Permasalahan	Tindak Lanjut
			perumahan untuk menjamin kualitas dari pembangunan rumah yang layak huni.
5	Kerusakan Kawasan Hutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembukaan lahan kebun dengan cara dibakar • Maraknya penebangan liar • Tingkat kesadaran masih rendah terhadap kelestarian hutan • Pembukaan lahan baru untuk pemukiman warga • Pendapatan masyarakat yang masih rendah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengawasan yang melibatkan semua pihak terhadap penggunaan hutan dan tidak melakukan pembakaran hutan dengan alasan apapun. • Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keletarian hutan dan jika melakukan penebangan harus terencana, terarah, teratur dan tidak semena-mena atau harus tebang pilih. • Pembatasan ijin penebangan hutan secara selektif kepada pengusaha, dan taat aturan hukum • Pengusaha hutan dan pemerintah harus komitmen mengadakan reboisasi dan peremajaan hutan.

2.3. Evaluasi Pengelolaan Dana Otsus

Dalam upaya meningkatkan pemantauan dan pengendalian dana otsus, Pemerintah Provinsi Papua telah melakukan monitoring dan evaluasi pengelolaan dana Otsus 80 : 20 persen di tahun 2016, dimana dari hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat dirumuskan beberapa isu strategis sebagai berikut:

1. Isu-Isu Strategis Dalam Pengelolaan Dana Otsus 20 Persen :

- a. Berdasarkan data realisasi Dana Otsus 20% tahun 2016 (Inspektorat, 2016) teridentifikasi bahwa 94,59% dari total kegiatan yang dilaksanakan SKPD sudah mengarah pada upaya untuk menekan biaya yang serendah-rendahnya bagi Orang Asli Papua. Fenomena ini mengindikasikan bahwa program OTSUS untuk menurunkan biaya pendidikan, kesehatan dan ekonomi telah diterjemahkan dengan baik oleh SKPD pelaksana kegiatan di tingkat Provinsi;
- b. Hasil monitoring menunjukkan jika dipetakan berdasarkan penerima manfaat langsung yaitu Orang Asli Papua, Unit Layanan, tenaga medis/guru, dan SKPD (aparatur, perkantoran, dan sebagainya),

terlihat pemerintah provinsi dalam mengalokasikan belanja otsus lebih dominan sarannya kepada Orang Asli Papua (52,48%). Namun demikian, ternyata masih ada beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan amanat UU Otsus dan Perdasus 13 tahun 2013, karena ditemukan alokasi belanja di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SKPD (8,84%) seperti untuk aparatur dan perkantoran;

- c. Belum diterapkannya ABK (Anggaran Berbasis Kinerja), karena tidak mentargetkan *outcome* dan *impact* dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dana otsus. Hal lainnya, terlihat juga dalam pelaksanaan kegiatannya, ada yang kurang tepat lokasi pelaksanaan kegiatan jika dilihat dari keberadaan masyarakat OAP. Semua kondisi ini bisa menyebabkan terjadi inefisiensi dalam penggunaan dana otsus 80 persen akibat tidak jelasnya target sasaran pada penerima manfaat langsung Orang Asli Papua.

2. Isu-Isu Strategis Dalam Pengelolaan Dana Otsus 80 Persen :

- a. Meskipun proporsi penggunaan dana otsus per bidang telah memenuhi aturan, namun dalam pengelolaan dana otsus 80 persen masih banyak juga ditemukan alokasi belanja di sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan yang belum mengarah pada sasaran penerima manfaat langsung Orang Asli Papua. Misalkan masih adanya alokasi belanja dana otsus untuk kegiatan-kegiatan aparatur dan perkantoran SKPD (21,40%). Secara keseluruhan, alokasi belanja dana otsus 80 persen lebih dominan pada sasaran Unit Layanan (37,87%);
- b. Jika dibandingkan dengan pengelolaan dana otsus 20 persen, ada kecenderungan kegiatan-kegiatan dana otsus 80 persen yang diimplementasikan oleh kabupaten/kota belum banyak mengarah pada upaya untuk mewujudkan biaya serendah-rendahnya, terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi kerakyatan. Dari hasil monitoring teridentifikasi hanya 24,43% dari total kegiatan yang dilaksanakan SKPD yang mengarah pada biaya serendah-rendahnya untuk Orang Asli Papua.

Fakta ini menandakan bahwa kabupaten/kota belum begitu baik menterjemahkan amanat otsus untuk biaya serendah-rendahnya bagi Orang Asli Papua dalam perencanaannya, yang berarti secara tidak langsung menunjukkan pemerintah provinsi kurang begitu cermat mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang diusulkan oleh kabupaten/kota;

- c. Sama halnya dengan pemerintah provinsi, di tingkat kabupaten/kota pengelolaan dana otsus 80 persen juga tidak menerapkan ABK (Anggaran Berbasis Kinerja), Selain itu juga dalam pelaksanaan kegiatannya, ada yang kurang tepat lokasi pelaksanaan kegiatan jika dilihat dari keberadaan masyarakat OAP, yang dapat menyebabkan terjadinya inefisiensi dalam penggunaan dana otsus 80 persen akibat tidak jelasnya target sasaran pada penerima manfaat langsung Orang Asli Papua;
- d. Terdapat juga dalam beberapa target capaian program/kegiatan yang dinilai tidak sesuai antara dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) dengan yang tercantum pada rencana definitif (RD) yang telah dibahas dan ditetapkan. Dari sisi penerima manfaat masyarakat OAP, masih terdapat keluhan walaupun tidak terdapat pada semua Kabupaten/kota di Papua, mengenai kurangnya partisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, kurangnya informasi dan sosialisasi tentang adanya program/kegiatan yang berasal dari dana Otsus, kurangnya transparansi dan keberpihakan program/kegiatan untuk masyarakat OAP. Kondisi ini menyebabkan banyaknya keluhan masyarakat di daerah terpencil yang merasa belum mendapatkan bantuan atau merasakan pembangunan yang bersumber dari dana Otsus. Di lingkup SKPD, adanya keluhan SKPD pengelola dana otsus bidang infrastruktur, bahwa proses pencairan yang menggunakan triwulan I, II, dan III cukup menyulitkan SKPD pengelola dana otsus untuk melaksanakan pekerjaan tepat waktu, adanya URD yang belum di tanda tangani oleh Gubernur sehingga menyulitkan SKPD untuk melaksanakan kegiatan di Kabupaten, dan ketidak sesuaian SKPD pelaksanaan kegiatan antara RD dan DPA dan tempat

pelaksanaan kegiatan yang berbeda dengan yang tertuang dalam dokumen;

- e. Pada saat dilakukan monitoring, sebagian besar kegiatan belum mencapai kinerja output yang maksimal, karena realisasi capaiannya rata-rata masih dibawah 50%. Hal ini lebih banyak disebabkan beberapa faktor yaitu: (a) keterlambatan pencairan dana otsus dari pemerintah provinsi, (b) ada pengurangan anggaran karena terjadi perubahan unit fisik, (b) proses revisi kegiatan, (c) aksesibilitas yang sulit ke lokasi kegiatan, (d) kendala dalam bahan baku yang mencakup harga, ketersediaan dan kualitas, dan (e) keterlambatan dalam SPJ;
- f. Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh SKPD, walaupun sudah berjalan dengan cukup baik, dan melakukan monitoring meja dan lapangan namun pada beberapa kabupaten informasi yang didapat dari kelompok kerja, diketahui bahwa SKPD teknis jarang melakukan kunjungan untuk monitoring program/kegiatan yang dikerjakan. Peran pengawasan ini dinilai oleh masyarakat sangat penting untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, atau mengidentifikasi masalah serta mencari cara untuk mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut, sehingga output, outcome dan impact dari program/kegiatan yang dilaksanakan dapat tercapai.

Sementara untuk hasil evaluasi pengelolaan dana Otsus 80 : 20 persen yang terfokus kepada realisasi pencapaian *impact* bagi masyarakat Orang Asli Papua, dengan melibatkankurang lebih 1.517 RT orang Asli Papua lokal (OAP suku setempat) sebagai responden yang tersebar pada 29 kabupaten/kota, dengan rata-rata anggota keluarga 5 orang dan rata-rata lama tinggal 28 tahun, ditemukan beberapa isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah rumah tangga OAP masih sangat rendah hanya 5,5 tahun jika dilihat secara keseluruhan di Papua. Dimana berdasarkan kewilayahan yang paling rendah di

Wilayah Me Pago, La Pago dan Ha Anim yang berada di bawah rata-rata Papua;

2. Untuk sektor kesehatan, terlihat juga derajat kesehatan RT OAP lokal masih terbelah rendah. Kondisi ini teridentifikasi dari persentase ibu rumah tangga OAP yang persalinan pertamanya ditangani oleh dokter dan bidan hanya 66,46%. Selain itu, juga ditemukan yang jarang dan bahkan tidak pernah melakukan pemeriksaan kehamilan sekitar 44,04%. Meskipun tidak semua responden memberikan jawaban, namun paling tidak dari hasil evaluasi menunjukkan bahwa tingkat kematian pada OAP ternyata lebih banyak pada anak usia antara 0 - 5 tahun. Sementara untuk penyebab kematian, yang paling banyak ditemukan pada kasus kematian karena penyakit malaria dan paru-paru;
3. Kondisi ekonomi rumah tangga OAP yang sangat rendah menjadi salah satu penyebab mengapa kualitas pendidikan dan kesehatannya terlihat rendah. Hal ini tergambar pada rata-rata pengeluaran per kapita OAP per bulan yang hanya sebesar Rp. 520.120,96 jauh dibawah catatan BPS Papua untuk pengeluaran per kapita seluruh penduduk di tahun 2015 mencapai Rp. 829.753 per bulan;
4. Kualitas perumahan rumah tangga OAP lokal masih jauh dari yang diharapkan. Misalkan untuk ketersediaan air bersih dan minum, hanya 48.66% yang menggunakan air terlindungi dan bersih (air ledeng, pompa dan sumur), sisanya lebih banyak menggunakan sumber air dari sungai, hujan, mata air, dan sebagainya, Fakta lainnya, hanya 69.93% rumah tangga OAP yang menggunakan penerangan listrik PLN atau pun non PLN (seperti : genset). Dengan kata lain ada 30,07% rumah tangga OAP dalam kondisi gelap. Selanjutnya, juga terlihat kondisi sanitasi perumahan pada rumah tangga OAP lokal masih ada yang belum layak, karena sekitar 64,74% saja yang memiliki pembuangan air;
5. Terkait dengan pengelolaan dana otsus yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota selama ini (2013 - 2015)

teridentifikasi ada beberapa aspek yang direspon dan dinilai oleh rumah tangga OAP lokal sebagai berikut :

- a. Sebagian besar rumah tangga OAP, atau 68,91% yang tidak mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan yang dievaluasi ini bersumber dari dana otsus (baik itu pada pengelolaan dana otsus 80 persen maupun 20 persen). Namun, ada kecenderungan rumah tangga OAP lebih mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan Prospek, Gerbang Mas, KPS dan perumahan rakyat berasal dari dana otsus;
- b. Walaupun rumah tangga OAP tidak tahu kegiatan tersebut menggunakan dana otsus, akan tetapi sekitar 53,13% yang mengatakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan tersebut sangat bermanfaat bagi mereka;
- c. Pengelolaan dana otsus dinilai rumah tangga OAP belum begitu transparan. Hal ini tercermin dari 55,37% responden yang menyatakan seperti demikian. Ini berarti hanya 44,63% yang mengatakan sudah transparan. Selain itu rumah tangga OAP juga menilai pengelolaan dana otsus selama ini belum akuntabel (66,06%), dan kurang partisipatif (54,78%);
- d. Bagi rumah tangga OAP lokal, selama ini pengelolaan dana otsus belum banyak menumbuhkan atau meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat OAP terhadap pemerintah, dan pada dirinya sendiri. Pernyataan ini keluar dari 57,09% responden rumah tangga OAP. Termasuk juga terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan (afirmasi), keduanya lebih banyak dinilai belum menunjukkan dampak;
- e. Sementara penilaian secara sektoral, bagi rumah tangga OAP, upaya yang dilakukan oleh pemerintah dengan menggunakan dana otsus untuk meningkatkan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dinilai sudah cukup berhasil dan sangat dirasakan oleh masyarakat OAP (rata-rata di atas 55% yang menyatakan demikian). Namun, untuk peningkatan di sektor ekonomi, khususnya ekonomi rumah tangga dan kampung, dianggap belum

optimal, dimana kurang lebih ada 61,04% yang berpandangan demikian.

Beranjak pada berbagai isu strategis dalam pengelolaan dana Otsus di atas, maka dapat disampaikan beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu diperhatikan dalam Pengelolaan Dana Otsus Provinsi Papua di tahun 2018 sebagai berikut :

1. Rekomendasi untuk pengelolaan dana otsus di bidang ekonomi kerakyatan :

- a. Pemerintah perlu memperhatikan potensi dan kebutuhan riil masyarakat OAP dalam memberikan bantuan kepada masyarakat OAP;
- b. Meningkatkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan pada perempuan OAP seperti pelatihan dalam usaha pembuatan batik Papua, kursus jahit, pemintalan benang, pembuatan kerajinan anyaman, noken dan pemanfaatan hasil hutan (kulit kayu, dll);
- c. Selain bantuan modal, dan kemudahan mendapatkan bantuan kredit, diperlukan bantuan peralatan untuk melakukan aktivitas ekonomi serta juga pendampingan dalam pembuatan produk yang bernilai ekonomi sampai dengan pemasaran hasil produk masyarakat OAP, artinya dibutuhkan suatu konsep/model pembangunan/pengembangan ekonomi orang asli Papua (hilir-hulu) secara terpadu untuk setiap program/kegiatan;
- d. Harus ada sosialisasi program/kegiatan bidang ekonomi kerakyatan yang dibiayai dana Otsus kepada masyarakat OAP di lokasi pembangunan;
- e. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah selama ini harus dapat meningkatkan pembangunan kampung OAP dengan memanfaatkan potensi SD kampung.

2. Rekomendasi untuk pengelolaan dana otsus di bidang pendidikan:

- a. Di sektor pendidikan, rata-rata lama sekolah rumah tangga OAP masih perlu ditingkatkan. Terutama di Wilayah Me Pago. La Pago dan Ha Anim yang berada di bawah rata-rata Papua;
- b. Pendidikan sudah sangat baik sesuai dengan keinginan pemerintah daerah untuk memberlakukan bebas biaya, namun di beberapa sekolah dasar

masyarakat inginkan agar perlengkapan sekolah seperti seragam, sepatu, buku dan alat-alat tulis juga disiapkan pemerintah daerah;

- c. Tingkat kesadaran agar anak-anak harus bersekolah telah ada, namun di beberapa daerah (kampung) perlu dilakukan sosialisasi bagi para orangtua khususnya pola pendidikan satu atap bukan saja pada tingkat SD tetapi juga tingkat SMP dan SMA;
- d. Selain kebutuhan akan guru juga ketersediaan rumah bagi guru-guru pada daerah terpencil perlu dipersiapkan dengan baik oleh pemerintah daerah;
- e. Perlu peningkatan kebutuhan sarana prasarana dan operasional asrama bagi pelajar dan mahasiswa OAP;
- f. Sosialisasi pada orang tua masyarakat OAP di kampung untuk pentingnya menyekolahkan anak perempuan OAP sampai jenjang SMA atau PT (Perguruan Tinggi);
- g. Sosialisasi program kegiatan bidang pendidikan perlu ditingkatkan sampai pada kampung-kampung terpencil dan menginformasikan kepada masyarakat kampung pembiayaan program/kegiatan yang bersumber dari dana Otsus dan menyertakan peran serta masyarakat OAP dalam pengawasan pelaksanaan program kegiatan di kampung.

3. Rekomendasi untuk pengelolaan dana otsus di bidang kesehatan

:

- a. Masyarakat telah banyak merasakan manfaat pelayanan pemerintah di bidang kesehatan yaitu pengobatan tanpa bayar, namun masyarakat tidak mengetahui bahwa hal itu telah dibayarkan melalui dana otsus. Diperlukan tenaga pembantu ditingkat Puskesmas maupun Pustu serta rumah petugas kesehatan;
- b. Perlu adanya pelayanan kesehatan terutama dokter spesialis yang secara periodik memberikan pelayanan yang menjangkau lokasi terpencil;
- c. Diberikan kemudahan bantuan pengobatan masyarakat OAP di kampung mendapatkan rujukan ke rumah sakit yang memiliki peralatan kesehatan yang lebih memadai;

- d. Perlunya perhatian terhadap kesehatan anak-anak usia dini 0-5 tahun di kampung;
- e. Menyediakan pelayanan kesehatan sampai ditingkat kampung dan daerah terisolir. Wilayah yang begitu luas dengan jumlah penduduk asli Papua yang tersebar di kampung-kampung atau kelompok-kelompok kecil dengan wilayah yang terisolasi menyebabkan masih ada penduduk yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kualitas baik;
- f. Sosialisasi hidup sehat sampai ke kampung dan wilayah terisolir perlu ditingkatkan;
- g. Pengobatan gratis di puskesmas dan bantuan obat-obatan, tambahan makanan dan vitamin pada ibu hamil dan menyusui OAP perlu ditingkatkan.

4. Rekomendasi untuk pengelolaan dana otsus di bidang infrastruktur :

- a. Diperlukan peningkatan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat OAP yang belum memiliki rumah sehat di kampung, menyediakan air bersih dan layak minum bagi RT OAP di kampung, menyediakan penerangan listrik, dan menyediakan akses jalan yang baik kampung;
- b. Pembangunan rumah layak huni agar dapat diperhatikan kualitas pembangunannya dan instalasi listrik agar cepat terealisasi;
- c. Perlunya perbaikan jalan-jalan yang rusak untuk memudahkan masyarakat kampung melakukan aktivitas dan memperlancar akses perekonomian kampung ke distrik dan ke kota;
- d. Meningkatkan aksesibilitas infrastruktur jalan dari kabupaten ke distrik dan kampung agar sepenuhnya terbuka karena cakupan wilayah yang luas dengan kondisi geografis yang sulit di jangkau;
- e. Meningkatkan kondisi jembatan-jembatan kecil berbahan kayu yang menghubungkan kampung-kampung di Distrik ke jalur jalan utama beraspal perlu mendapat perhatian pemerintah setempat karena banyak yang terlihat dalam kondisi rusak;

- f. Perlu pendekatan dengan masyarakat untuk pengambilan bahan-bahan bangunan untuk keperluan pembangunan infrastruktur yang ada di wilayah OAP;
- g. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus dapat membuka Hubungan transportasi pada Orang Asli Papua yang tinggal didaerah-daerah pedalaman/terpencil;

5. Rekomendasi untuk pengelolaan dana otsus di bidang afirmasi :

- a. Perlu bantuan modal, pengetahuan ketrampilan usaha untuk mengembangkan usaha khas Papua, seperti noken, kerajinan kulit kayu, batik asli papua yang dilakukan oleh mama mama Papua;
- b. Bantuan usaha pertanian, perikanan dan peternakan bagi mama-mama Papua;
- c. Pasar Mama Mama Papua agar segera dapat difungsikan dan dioptimalkan penggunaannya dalam upaya meningkatkan pendapatan mama mama papua.

Secara umum, berdasarkan seluruh hasil kajian monitoring dan evaluasi pengelolaan dana otsus tersebut, dapat disampaikan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota sebagai berikut :

1. Memperjelas kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan bidang dan peruntukannya, sehingga tidak terjadi ketimpangan belanja per bidang yang mencolok antar bidang;
2. Harus ada verifikasi dalam perencanaan kegiatan untuk melihat konsistensi dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan penggunaan dana Otsus kesesuaian dengan regulasi;
3. Perencanaan program kegiatan yang bersumber dari dana Otsus sebaiknya berasal dari masyarakat karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan permasalahan dan sosial budaya di lokasi pembangunan. Sehingga dapat meminimalkan terjadi kesalahan perencanaan yang tidak memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat OAP, untuk hal itu maka harus diperhatikan dan diimplementasikan :

- a. Melibatkan masyarakat setempat dalam hal perencanaan program/kegiatan, pelaksanaan dan pengawasan penggunaan dana Otsus pada bidang ekonomi kerakyatan;
 - b. Memperhatikan potensi dan kebutuhan riil masyarakat OAP dalam memberikan bantuan kepada masyarakat OAP;
 - c. Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah harus dapat menciptakan kemandirian (tidak ketergantungan dengan pihak lain), meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan mengelola kegiatan, dan meningkatkan ekonomi RT pada masyarakat Orang Asli Papua;
 - d. Program/kegiatan bidang ekonomi kerakyatan perlu dilakukan secara merata, adanya keberpihakan terhadap OAP, transparan dan akuntabel.
4. Dalam dokumen perencanaan harus mencantumkan sasaran, target capaian outcome dan impact berikut lokasi pelaksanaan kegiatan yang jelas untuk memudahkan monitoring dan evaluasi, serta penilaian kinerja dan kemanfaatan penggunaan dana otsus;
 5. Kegiatan yang didanai dana Otsus sebaiknya diperuntukkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat asli Papua yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan bukan konsumtif semata;
 6. Beberapa kegiatan yang membutuhkan penyediaan fisik sebaiknya diutamakan demi mendukung lancarnya kegiatan. Misalnya penyediaan gedung dan fasilitas posyandu disetiap distrik;
 7. Perlu adanya konsolidasi kelembagaan terhadap Pembagian dan Peruntukan Dana Otsus, kelembagaan terhadap Perencanaan dan Penganggaran Dana Otsus, serta kelembagaan terhadap Monitoring, Evaluasi, dan Pengawasan Dana Otsus;
 8. Menyusun Logical Framework Peruntukan Dana Otsus, berdasarkan bidang prioritas otsus agar memudahkan dalam mengarahkan program masing-masing bidang;
 9. Menyusun jadwal siklus Perencanaan sampai dengan Pelaksanaan Dana Otsus, Sehingga penyusunan Rencana Defenitif Otsus

- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan siklus perencanaan pembangunan daerah (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, Renja SKPD);
10. Mulai dari musrenbang kampung sampai dengan Provinsi telah dipisahkan program dan kegiatan yang direncanakan dibiayai oleh Dana Otsus (agar masyarakat mendapatkan informasi kegiatan yang akan dibiayai oleh dana otsus);
 11. Setiap dokumen perencanaan dari menengah sampai tahunan perlu membedakan matriks program kegiatan prioritas Otonomi Khusus dan Program kegiatan Non Otonomi Khusus;
 12. Mengembangkan sistem monitoring dan pelaporan yang terintegrasi mulai dari perencanaan dan penganggaran;
 13. Menyusun M&E Framework (kerangka monitoring dan evaluasi) Penggunaan Dana Otsus, untuk menjelaskan pengukuran efektifitas dan perkembangan program prioritas di setiap bidang berbasis data dengan mengacu pada capaian outcome dan output.

2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan visi dan misi kepala daerah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam dokumen RPJMD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum kondisi daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, serta kesepakatan dari pemangku kepentingan, maka permasalahan pembangunan jangka menengah Provinsi Papua dibagi kedalam 4 permasalahan utama, yaitu permasalahan bidang aksesibilitas/ infrastruktur daerah, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tata pemerintahan dan politik, serta permasalahan dari segi social dan budaya. Permasalahan tersebut dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut :

2.4.1. Permasalahan Pelayanan Kesehatan

- Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas masih rendah;
- Masih tingginya angka kasus malaria sebagai penyakit endemik;
- Masih tingginya angka penyakit HIV/AIDS dan TB;

2.4.2. Permasalahan Pelayanan Pendidikan

- Terbatasnya akses PAUD Formal;
- Akses terhadap pelayanan pendidikan dasar 9 tahun masih terbatas;
- Manajemen dan tatakelola pendidikan belum efektif;
- Rendahnya kesiapan anak untuk bersekolah SD menyebabkan tingginya angka mengulang kelas awal SD;
- Distribusi guru yang belum merata secara proporsional;
- Tingginya angka ketidakhadiran guru melaksanakan tugas masih tinggi;
- Kurangnya data dan informasi pendidikan;
- Belum terlaksananya akuntabilitas pendidikan - regulasi, pelaporan, pengawasan dan sanksi;
- Tingginya angka buta aksara dewasa, terutama di wilayah pegunungan;
- Kurangnya kapasitas SDM dalam menyusun perencanaan, pelaporan, pengendalian dan pengawasan pendidikan;
- Pembukaan program keahlian SMK tidak didasarkan pada analisis kebutuhan pasar kerja dan kecenderungan pembangunan daerah.

2.4.3. Permasalahan lainnya terkait Prioritas dan Sasaran Pembangunan sesuai RPJMD

2.4.3.1. Makro ekonomi

- Upaya pembangunan perekonomian untuk meningkatkan pendapatan masyarakat termasuk upaya pemerataan hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan semua lapisan masyarakat.

2.4.3.2. Perekonomian Rakyat

- Belum efektifnya pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menunjang pendapatan keluarga berbasis hak masyarakat adat;
- Belum efektifnya pelaksanaan RESPEK dalam memicu pertumbuhan produktivitas kampung;
- Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi pasar yang luas baik dalam skala nasional maupun internasional;
- Belum terhubungnya pengembangan industri pariwisata daerah dengan berbagai potensi alam dan budaya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adat dan penduduk lokal;
- Masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas kebudayaan dan hasil-hasilnya, yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan penduduk lokal;
- Belum optimalnya peran masyarakat adat dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan penduduk;
- Belum adanya konsep/Rencana Aksi pengembangan ekonomi rakyat yang lebih komprehensif dan terintegrasi mulai dari tahap produksi sampai tahap pemasaran yang mengarah pada kesesuaian dengan kebutuhan pasar.
- Belum efektifnya pengembangan ekonomi kerakyatan untuk menunjang pendapatan keluarga berbasis hak masyarakat adat;
- Belum efektifnya pelaksanaan RESPEK dalam memicu pertumbuhan produktivitas kampung;
- Belum optimalnya pengembangan komoditas unggulan daerah yang memiliki potensi pasar yang luas baik dalam skala nasional maupun internasional;

- Belum terhubungnya pengembangan industri pariwisata daerah dengan berbagai potensi alam dan budaya yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat adat dan penduduk lokal;
- Masih minimnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas kebudayaan dan hasil-hasilnya, yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan penduduk lokal;
- Belum optimalnya peran masyarakat adat dan lembaga keagamaan dalam mengembangkan ekonomi dan pendapatan penduduk;
- Belum adanya konsep/Rencana Aksi pengembangan ekonomi rakyat yang lebih komprehensif dan terintegrasi mulai dari tahap produksi sampai tahap pemasaran yang mengarah pada kesesuaian dengan kebutuhan pasar.

2.4.3.3. Perekonomian Daerah

- Pendapatan penduduk yang bekerja di sektor pertanian sangat rendah dibanding sektor ekstraktif pertambangan;
- Belum berkembangnya penelitian dan teknologi budidaya untuk meningkatkan hasil produksi dan kualitas pertanian guna menjaga ketahanan pangan;
- Kurangnya regulasi yang dapat melindungi kepentingan ekonomi daerah karena hampir semua nilai tambah produksi dari bahan baku yang dihasilkan Papua terjadi di luar Papua;
- Ancaman berkurangnya sumber daya keuangan pemerintah daerah pasca berakhirnya penerimaan dana Otsus Papua (8 tahun lagi);
- Kurangnya sumbangan dan keterkaitan sektor pertambangan terhadap pertumbuhan sektor-sektor pertanian dan jasa;
- Kurangnya kelembagaan dan infrastruktur ekonomi yang berpihak pada penduduk lokal, terutama dalam pembinaan usaha dan perkreditan.

2.4.3.4. Investasi dan Kemitraan Usaha

- Kemitraan antara penanam modal dengan warga local sebagai pemilik hak ulayat atas tanah belum efektif dilaksanakan sesuai Perdasus dan tuntutan Otonomi Khusus Papua;
- Kurangnya pemberdayaan dan pendampingan warga lokal dan masyarakat adat dalam menghadapi berbagai isu dan permasalahan yang ditimbulkan oleh suatu perjanjian kerjasama dengan investor;
- Masih minimnya proses produksi lanjutan yang dikerjakan oleh investor untuk meningkatkan nilai tambah dan penyediaan tenaga kerja di Provinsi Papua;
- Masih kurang efektifnya promosi investasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah;
- Meluasnya pemberitaan dan wacana media tentang masalah keamanan dan masalah tanah ulayat yang kurang ditanggapi Pemerintah Daerah.

2.4.3.5. Pertanian dan Ketahanan Pangan

- Minimnya SDM (tenaga penyuluh), sarana dan prasarana penyuluhan;
- Kurangnya produktifitas dan kualitas hasil produksi pertanian rakyat, terutama di daerah pedalaman dan pegunungan;
- Rendahnya harga produksi di tingkat petani;
- Kuantitas dan kualitas produksi sangat terbatas (rendahnya Produktivitas petani);
- Tingginya kerawanan pangan di wilayah pegunungan, pedalaman dan terpencil;
- Rendahnya Gizi masyarakat dan keragaman pangan;
- Bergesernya bahan konsumsi penduduk asli Papua terhadap bahan makanan dari luar Papua (beras telah menggantikan sagu, ubi-ubian dan pisang); dan

- Belum efektifnya pemanfaatan lahan pertanian.

2.4.3.6. Perindustrian dan Perdagangan

- Diversifikasi komoditi ekspor secara vertikal disektor industri sampai saat ini belum berkembang, sementara potensi sumber daya alam sangat besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
- Terbatasnya sarana penunjang (pelabuhan container) dan transportasi yang langsung dari Papua ke negara tujuan ekspor, sehingga para eksportir terpaksa mengantar pualaukan dulu ke pulau Jawa baru ke luar negeri.
- Kegiatan pengendalian dan monitoring terhadap barang-barang impor terus dilakukan, namun patut disadari bahwa sebagian Importir Papua berada di Pulau Jawa sehingga sangat sulit memperoleh laporan yang akurat tentang kegiatan impor di Papua.
- Belum sepenuhnya produsen/eksportir memanfaatkan tawaran dari negara-negara pemberi preferensi (GSP/SKA) dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.
- Melihat perkembangan baik di bidang politik maupun perekonomian di negara-negara Kawasan Pasifik Selatan (South Pacific Region) khususnya di Papua New Guinea tercipta berbagai peluang di bidang ekonomi, perdagangan dan investasi yang belum dimanfaatkan khususnya oleh para pengusaha maupun pelaku bisnis Papua/Indonesia.
- Program kegiatan pengembangan Kawasan Ekonomi seperti AIDA, BMIP-EAGA dalam rangka pengembangan komoditi ekspor belum dimanfaatkan oleh dunia usaha secara optimal.

2.4.4. Masalah Sosial Budaya

2.4.4.1. Kependudukan dan Ketenagakerjaan

- Tingginya arus migrasi penduduk dari luar Provinsi Papua yang berdampak pada tingginya persaingan pencari kerja, rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, dan meningkatnya masalah sosial kemasyarakatan;
- Tingginya arus urbanisasi dari wilayah pedesaan (kampung) ke wilayah perkotaan;
- Kurangnya pertumbuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja usia kerja;
- Rendahnya pendidikan, kompetensi dan ketrampilan pencari kerja penduduk asli Papua;
- Tingginya tingkat partisipasi kerja orang asli Papua;
- Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka dari angkatan kerja berpendidikan SMA dan Pendidikan tinggi.

2.4.4.2. Kepemudaan dan Olahraga

- Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melakukan olahraga dan menjadikan olahraga sebagai kebutuhan hidup;
- Masih perlunya pemassalan olahraga kepada seluruh masyarakat sehingga memperluas kesempatan untuk melakukan talent scouting terhadap olahragawan usia dini yang berbakat dan potensial yang dapat dibina melalui PPLP dan PPLM.
- Penanganan dalam pembinaan melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Papua yang saat ini membina sebanyak 13 Cabang Olahraga dengan jumlah siswa sebanyak 64 belum dilakukan secara serius sehingga prestasi yang diharapkan belum dapat dicapai;
- Pembinaan terhadap olahragawan pelajar sebagai bibit-bibit unggul yang dapat menciptakan prestasi dan dapat mengharumkan nama daerah, bangsa dan Negara belum

dilakukan secara serius, terkoordinasi, dan berkesinambungan.

- Minimnya dana pembinaan olahraga sehingga kemampuan melakukan pembinaan menjadi sangat terbatas;
- Inventarisasi dan pendataan terhadap sarana dan prasarana, atlet, pelatih, Pembina dan guru-guru olahraga di semua jenjang pendidikan, serta klub-klub olahraga belum dapat dilakukan secara baik sehingga data tentang hal tersebut belum tersedia di Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;
- Persiapan untuk menjadi Tuan Rumah PON XX tahun 2020 yang merupakan program prioritas Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua belum dapat dilakukan karena keterbatasan dana yang dialokasikan kepada Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua;
- Pembinaan terhadap pemuda baik secara kelembagaan maupun secara personalia belum tertangani secara baik dan berkesinambungan sehingga untuk mempersiapkan generasi muda yang tangguh, mandiri dan sejahtera masih belum dapat terwujud;
- Persiapan untuk melaksanakan kegiatan Pertukaran Pemuda Antar Negara belum dapat dilakukan secara baik karena terbentur dengan proses pencairan dana kegiatan yang terhambat;
- Minimnya kegiatan sosialisasi dan pencegahan IV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba di kalangan pemuda sehingga masih banyak pemuda harapan masa depan yang terjerumus dalam masalah tersebut;
- Masih perlu ditingkatkan kesadaran pemuda terhadap keamanan lingkungan, cinta tanah air dan bela Negara;

- Masih sangat perlu peningkatan ketrampilan pemuda untuk menunjang kebutuhan hidup sehingga menciptakan pemuda yang mampu bangkit, mandiri dan sejahtera.
- Pembinaan pemuda/pelajar melalui PASKIBRAKA baik tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional perlu ditingkatkan dan dikembangkan;

2.4.4.3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Kendala dan permasalahan yang dihadapi beberapa kegiatan dalam program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan hampir sama, waktu pelaksanaan kegiatan yang dianggap masih sangat terbatas.
- Tenaga narasumber dari Pusat sulit untuk diperoleh
- Rentang waktu pelaksanaan antara pelaksanaan kegiatan dengan SPJ
- Ketidaksiapan Kota/Kabupaten menerima pelaksanaan kegiatan Provinsi yang bertepatan dengan kegiatan daerah sendiri.
- Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Papua kesulitan mendapat peserta kegiatan yang konsisten untuk menindaklanjuti apa yang telah diperoleh di masing-masing kabupaten/Kota/sector, dari setiap kegiatan yang telah dilakukan.
- Kurangnya dukungan pimpinan SKPD terkait dalam mendorong implementasi penyusunan ARG di SKPD.
- Koordinasi lintas SKPD untuk menopang penyediaan layanan bagi Perempuan dan anak korban kekerasan masih kurang, dikarenakan masih ada kekosongan eselon III, sehingga hal-hal teknis strategis masih tidak dapat dikontrol dan ditindaklanjuti secara baik.
- Dukungan terhadap pendamping paralegal di lapangan masih kurang, persoalan/ permasalahan hukum yang dihadapi anak masih dianggap kewenangan penuh orang

tua/keluarga, menyebabkan masih banyak anak berhadapan dengan hukum tidak bisa menerima hak terbaiknya dalam proses hukum.

- Terjadi pengulangan pada beberapa kegiatan seperti Sosialisasi PUG, Workshop PUG, pada kelompok sasaran yang sama berulang-ulang setiap tahun tanpa ada Rencana Tindak Lanjut (RTL) yang jelas. Menyebabkan sulit mengukur capaiannya. Tidak dilakukannya pendampingan ke SKPD agar dapat mengetahui apa dan mengapa tidak melakukan PPRG dan ARG di SKPD, ironisnya kegiatan yang sama ulang dilakukan dengan ABT.

2.4.5. Masalah Tata Pemerintahan dan Politik

Pemerintah daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan DPRP dan MRP dalam menyelenggarakan pemerintahan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Masalah Tata Pemerintahan dan Politik ini dikelompokkan dalam: administrasi umum pemerintahan, pemberdayaan aparatur dan otonomi daerah dan keuangan daerah.

2.4.5.1. Administrasi Umum Pemerintahan, Pemberdayaan Aparatur dan Otonomi Daerah

- Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana belanja bantuan keuangan alokasi dana otonomi khusus dalam sektor pendidikan, kesehatan dan beberapa program yang disepakati;
- Belum optimalnya Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota yang dibiayai baik dari APBD Provinsimapun APBN;

- Belum optimalnya Pembinaan Kelembagaan Perangkat Daerah, Ketatalaksanaan, Analisis Jabatan serta Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah;
- Struktur organisasi belum mencerminkan kebutuhan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai amanat UU No. 21/2001 dan potensi serta tantangan daerah.

2.4.5.2. Kepegawaian Daerah

- Belum optimalnya pelaksanaan analisis kebutuhan pegawai dan analisis jabatan sebagai dasar pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, produktifitas pegawai;
- Masih rendahnya kualitas aparatur Pemerintah Daerah baik kompetensi maupun spesialisasi sesuai potensi dan tantangan daerah;
- Konfigurasi struktur organisasi pemerintah belum merefleksikan pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien (MRP, legislatif dan eksekutif);
- Budaya komunikasi pemerintahan belum mampu mengatasi berbagai kebuntuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- Restrukturisasi organisasi pemerintahan Provinsi Papua belum didukung dengan acuan standar kinerja/SPM, Standart operating and procedure dan belum mempertimbang semangat pembangunan di era Otsus.
- Dalam mengusulkan penghargaan tanda jasa Satyalancana Karya Satya, di tahun 2015 BKD telah mengusulkan 1.350 usulan namun baru 450 tanda jasa Satyalancana Karya Satya yang dapat di selesaikan oleh Sekretariat Negara;
- Banyak PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang masih salah dalam menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) sebagai pengganti Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai (DP3);

- Proses pengusulan pensiun PNS belum dapat terselesaikan tepat waktu karena masih sering terjadi kekurangan berkas dalam pengusulan pensiun PNS;
- Masih terdapat kekosongan jabatan pada beberapa SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
- Ruang pengelolaan arsip PNS sangat terbatas (ruangan kecil) sehingga masih terdapat arsip PNS yang belum dapat tertata dengan baik pada lemari arsip;
- Kapasitas data transfer atau site traffic (bandwidth) sebesar 1 Mbps sangat kurang mendukung kinerja Sistem Informasi Kepegawaian;
- Uraian tugas baru sesuai Pergub menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan tugas karena uraian tugas yang selama ini dilaksanakan oleh sub bidang tertentu sesuai Pergub tersebut saat ini harus di limpahkan ke sub bidang yang lain;
- Sistem pencairan anggaran kegiatan dengan sistem Ganti Uang (GU) sungguh terasa menghambat cepatnya proses penyelesaian suatu kegiatan, karena satu kegiatan tidak dapat langsung mengusulkan pencairan anggarannya jika kegiatan lain yang telah selesai dilaksanakan belum menyelesaikan SPJnya.

2.4.5.3. Keuangan Daerah

- Rendahnya indeks kemandirian fiskal karena Kurangnya sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat menunjang pendapatan daerah di akhir periode Otsus;
- Belum efektifnya transparansi keuangan, terutama pengelolaan dana yang bersumber dari Otsus;
- Masih banyaknya temuan BPK yang mengindikasikan adanya masalah keuangan, yang berpotensi merugikan keuangan daerah;

- Minimnya kapasitas pengelola keuangan yang berdampak pada rendahnya akuntabilitas keuangan;
- Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal (SPI) menjadi pedoman untuk mencegah berbagai masalah pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah;
- Belum ditetapkannya sebagian besar regulasi bidang keuangan yang diharuskan perundang-undangan seperti perdasu pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah, kebijakan akuntansi dan perdasus pembagian dana Otonomi Khusus Papua;
- Belum dilibatkannya MRP dalam memberikan pertimbangan alokasi dan penggunaan dana Otonomi Khusus Papua;
- Belum optimalnya implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (*Performance Budgeting*).

2.4.5.4. Pengelolaan Dana Otsus

- Pengelolaan dana Otsus yang dilaksanakan selama ini belum memperhatikan pencapaian *outcome* dan *impact* untuk masyarakat Orang Asli Papua, sebagaimana yang terlihat jelas dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dana Otsus yang belum menggunakan data terpilah selama ini;
- Transparansi dalam pengelolaan dana Otsus belum optimal, sehingga masih banyak masyarakat Orang Asli Papua yang tidak mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan Otsus yang dilaksanakanselama ini bersumber dari dana otsus. Selain itu partisipasi Orang Asli Papua dalam pengelolaan dana Otsus, dan akuntabilitas terhadap Orang Asli Papua juga dinilai belum maksimal;
- Pengelolaan dana Otsus yang dilaksanakan pemerintah provinsi selama ini belum banyak menumbuhkan atau meningkatkan rasa kepercayaan masyarakat Orang Asli Papua terhadap pemerintah provinsi dan pemerintah

pusat. Termasuk juga terhadap peningkatan pemberdayaan masyarakat dan keberpihakan (afirmasi), keduanya lebih banyak dinilai belum banyak memberikan dampak sebagaimana yang diharapkan oleh Orang Asli Papua;

- Program-program dan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang bersumber dari dana Otsus belum menunjukkan hasil yang optimal bagi Orang Asli Papua, khususnya untuk ekonomi rumah tangga dan kampung.

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAERAH BESERTA KERANGKA PENDANAAN

Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai rencana pembangunan daerah tahunan memuat tema khusus terkait ekonomi dan keuangan daerah yang disajikan dalam Bab III. Pada bagian ini sebagaimana arahan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diuraikan dua point utama yakni Arah Kebijakan Ekonomi Daerah dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Namun demikian, analisis perlu diperluas dalam lingkup pembangunan ekonomi, mengingat tujuan hakiki pembangunan ekonomi yakni kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditunjukkan oleh indikator makroekonomi, namun juga tingkat kemiskinan dan ketimpangan pendapatan, sehingga arah kebijakan ekonomi menjadi arah kebijakan pembangunan ekonomi.

Rumusan Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah untuk Tahun 2018 tidak lepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada Tahun 2016, proyeksi Tahun 2017 dan 2018. Dengan demikian pembahasan pada bagian ini diawali dengan Kondisi Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2016, selanjutnya Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2017 dan 2018. Bagian akhir sub bab adalah poin-poin arah kebijakan pembangunan ekonomi dan keuangan daerah pada tahun 2018.

3.1. Kerangka Ekonomi Daerah

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua tahun 2018 bertepatan dengan berakhirnya RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018. Dalam konteks ini, Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Tahun 2018 seyogianya mampu mencapai misi ke-4 yaitu pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal. Secara detail misi ke-4 ini bermakna membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh wilayah Papua berbasis ekonomi lokal yang ditandai dengan terwujudnya iklim investasi yang kondusif, tercapainya stabilitas makro

ekonomi, meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil dan menengah, terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari yang mendukung peningkatan pekenomian masyarakat khususnya di kampung-kampung. Semua ini bertujuan untuk membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal yang mandiri, serta menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dengan memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan. Secara agregat ada 7 (tujuh) indikator makro utama yang dapat mengindikasikan tercapainya tujuan tersebut, sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018 berikut ini.

Tabel. 3.1.
Target Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2016-2018

Indikator Kinerja	Satuan	2016	2017	2018
1. Pertumbuhan PDRB	%	8.00	8.00	8.00
2. Laju Inflasi	%	2.50	2.50	2.50
3. PDRB per kapita	juta rp	27.50	27.50	28.00
4. Gini Rasio	%	0.35	0.32	0.30
5. Rasio penduduk yang Bekerja	%	0.96	0.96	0.96
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	77.20	77.25	77.28
7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4.42	4.38	4.36

Sumber : RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018

3.1.1. Perkembangan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2012-2016

3.1.1.1. Pertumbuhan Sektoral Dan Struktur Ekonomi

Jika dirinci berdasarkan sektoral, hampir semua sektor pertumbuhannya terlihat tidak stabil yang cenderung menurun. Sektor konstruksi terlihat memiliki rata-rata dengan pertumbuhan tertinggi yaitu sebesar 10,77%, disusul oleh sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,32% dan sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,23%. Sektor yang terlihat paling rendah pertumbuhannya tahun 2016 yaitu sektor pertanian yakni sebesar 2,21% namun secara rata-rata menempati posisi ke empat terendah yaitu sebesar 5,22%, sedangkan sektor pertambangan terlihat paling tinggi pertumbuhannya yaitu 13,15% namun secara rata-rata paling rendah yaitu 3,94%.

Tabel. 3.2.
Pertumbuhan Ekonomi Sektor Di Provinsi Papua Periode 2012 - 2016

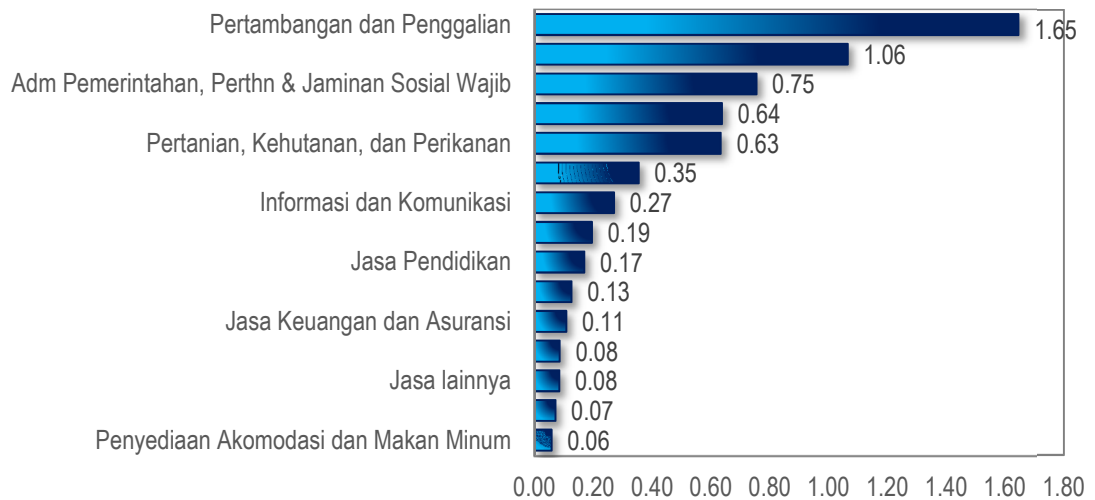
Lapangan Usaha		2012	2013	2014	2015	2016	Rata ²
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	6.18	6.04	5.79	5.88	2.21	5.22
B	Pertambangan dan Penggalian	-6.41	9.00	-2.67	6.64	13.15	3.94
C	Industri Pengolahan	1.93	2.13	8.72	3.77	4.51	4.21
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10.45	7.45	6.24	2.68	11.86	7.74
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4.63	6.53	6.25	3.99	3.37	4.95
F	Konstruksi	13.99	11.79	8.56	10.70	8.81	10.77
Q	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.84	9.36	7.30	8.13	6.91	8.31
H	Transportasi dan Pergudangan	8.74	8.15	10.26	9.93	8.13	9.04
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.86	11.67	12.57	7.52	6.54	9.23
J	Informasi dan Komunikasi	10.23	12.79	6.63	5.19	3.42	7.65
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7.85	13.89	7.26	2.63	6.08	7.54
L	Real Estate	10.01	11.67	8.09	5.86	7.02	8.53
M,N	Jasa Perusahaan	6.52	5.88	9.65	3.97	5.68	6.34
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.36	2.80	15.96	9.82	9.64	9.32
P	Jasa Pendidikan	9.62	9.75	8.15	6.52	7.83	8.37
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8.76	9.29	9.36	8.36	8.08	8.77
R,S,T,U	Jasa lainnya	9.11	10.42	8.55	7.04	6.43	8.31
PDRB		1.72	8.55	3.81	7.30	9.21	6.12

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Sedangkan jika dilihat dari andilnya secara sektoral terhadap naik turunnya laju pertumbuhan ekonomi Papua, yaitu sektor pertambangan menempati posisi pertama yaitu sebesar 1,65%, disusul oleh sektor konstruksi yaitu sebesar 1,06% dan sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial Wajib sebesar 0,75%. Sektor yang terlihat paling rendah peranannya dalam pembentukan laju pertumbuhan ekonomi Papua, yaitu sektor industri pengolahan sebesar 0,08%, sektor jasa lainnya sebesar 0,08%, sektor jasa perusahaan sebesar 0,07% dan sektor penyediaan akomodasi, dan makan minum sebesar 0,06%.

Gambar 3.1.

**Sumber-Sumber Pertumbuhan Di Provinsi Papua
Rata-Rata Dari Tahun 2012-2016**



Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Struktur perekonomian Provinsi Papua bila dinilai dengan memasukkan sektor pertambangan terlihat masih bersifat *resourced based* yang sangat bertumpu pada dua sektor sumber daya alam yaitu sektor pertambangan dan pertanian.

Tabel. 3.3.

Struktur Ekonomi Provinsi Papua Menurut Sektoral Periode 2011-2016

Lapangan Usaha	Dengan Tambang	Tanpa Tambang
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	11.59	19.10
Pertambangan dan Penggalian	42.77	5.64
Industri Pengolahan	2.01	3.31
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	0.05
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.06	0.09
Konstruksi	10.20	16.81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.74	12.77
Transportasi dan Pergudangan	4.01	6.61
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.64	1.06
Informasi dan Komunikasi	3.55	5.86
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.44	2.37
Real Estate	2.31	3.80
Jasa Perusahaan	1.12	1.85
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8.07	13.31
Jasa Pendidikan	2.00	3.30
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.45	2.39
Jasa lainnya	1.01	1.66

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Pada Tabel 3.3 kedua sektor tersebut sangat dominan menguasai pangsa PDRB hingga mencapai 42,77% per tahun selama tahun 2011 – 2016. Menyusul kemudian sektor pertanian sebesar 11,57% dan sektor konstruksi sebesar 10,20% per tahun, sedangkan andil sektor-sektor lainnya tidak lebih dari 10%, dimana yang terendah adalah sektor-sektor utilitas yaitu sektor pengadaan listrik, gas sebesar 0,03%, sektor pengadaan air bersih, dan pengelolaan sampah dan daur ulang sebesar 0,06 % per tahun kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Papua. Kondisi yang berbeda jika dengan mengeliminasi sektor pertambangan, maka terlihat sektor pertanian yang mendominasi perekonomian Provinsi Papua, yaitu sebesar 19,10%. Berikutnya yaitu sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar 13,31% dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 12,77%.

Perhitungan keunggulan komparatif sektoral dengan dan tanpa sektor pertambangan, terlihat sangat berbeda. Dengan memperhitungkan sektor pertambangan, maka sektor yang memiliki daya saing tinggi hanya 4 sektor yang didominasi oleh sektor pertambangan dengan angka 4,62 disusul kemudian sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib dengan angka 2,27, sektor jasa kesehatan dan kegiatan social dengan angka 1,35 disusul kemudian oleh sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan masing masing 1,06 dan 1,05.

Tabel. 3.4.
Daya Saing Sektoral Berdasarkan Indeks LQ Rata-Rata 2011-2016

Lapangan Usaha	Dengan Tambang		Tanpa Tambang	
	LQ	Tingkat Daya Saing	LQ	Tingkat Daya Saing
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0.88	Rendah	1.29	Tinggi
Pertambangan dan Penggalian	4.62	Tinggi	3.30	Tinggi
Industri Pengolahan	0.09	Rendah	0.14	Rendah
Pengadaan Listrik dan Gas	0.03	Rendah	0.05	Rendah
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	0.68	Rendah	1.04	Tinggi
Konstruksi	1.06	Tinggi	1.56	Tinggi
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil & Spd Motor	0.57	Rendah	0.84	Rendah
Transportasi dan Pergudangan	1.05	Tinggi	1.55	Tinggi
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.21	Rendah	0.32	Rendah
Informasi dan Komunikasi	0.81	Rendah	1.19	Tinggi
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.38	Rendah	0.56	Rendah
Real Estate	0.82	Rendah	1.21	Tinggi
Jasa Perusahaan	0.71	Rendah	1.04	Tinggi
Adm Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.27	Tinggi	3.36	Tinggi
Jasa Pendidikan	0.65	Rendah	0.96	Rendah
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.38	Tinggi	2.04	Tinggi
Jasa lainnya	0.65	Rendah	0.95	Rendah

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Kemudian jika dieliminasi sektor pertambangan, maka sektor yang mempunyai daya saing tinggi terlihat lebih banyak. Sektor pertambangan tetap terlihat memiliki daya saing tinggi yaitu dengan angka 3,30. Sektor pertanian terlihat masuk sebagai sektor yang memiliki keunggulan bersama-sama dengan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah & daur ulang, sektor konstruksi, sektor transportasi dan Pergudangan, sektor Informasi dan komunikasi, sektor real estate, sektor jasa perusahaan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial.

Tabel. 3.5.
PDRB Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016
(Rp. Trilyun)

Komponen Pengeluaran	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	41.70	44.39	47.16	50.51	53.59	56.72
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1.55	1.66	1.78	2.00	2.11	2.25
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	18.91	20.31	22.08	24.07	25.31	25.74
Pembentukan Modal Tetap Bruto	27.04	28.88	30.78	33.17	35.53	37.82
Perubahan Inventori	-1.05	0.12	0.22	-0.18	0.13	0.16
Ekspor Luar Negeri	33.91	24.28	32.14	17.09	23.74	25.34
Impor Luar Negeri	10.15	9.27	5.45	11.19	8.94	9.31
Net Ekspor Antar Daerah	-5.84	-2.48	-11.59	6.12	-0.19	3.74
Total PDRB	106.07	107.89	117.12	121.58	131.27	142.46

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Berdasarkan komponen pengeluaran, laju pertumbuhan ekonomi terlihat sangat variatif dengan capaian tertinggi pada komponen impor luar negeri dengan rata-rata pertahun 7,88%, kemudian disusul oleh pengeluaran konsumsi LNPRT dengan capaian sebesar 7,75% dan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto yang menempati posisi ke tiga dengan capaian 6,94%. Laju pertumbuhan negatif rata-rata terbesar terlihat dialami oleh komponen Net Ekspor Antar Daerah yaitu -394,90% per tahun dan komponen Perubahan Inventori sebesar -71,01%.

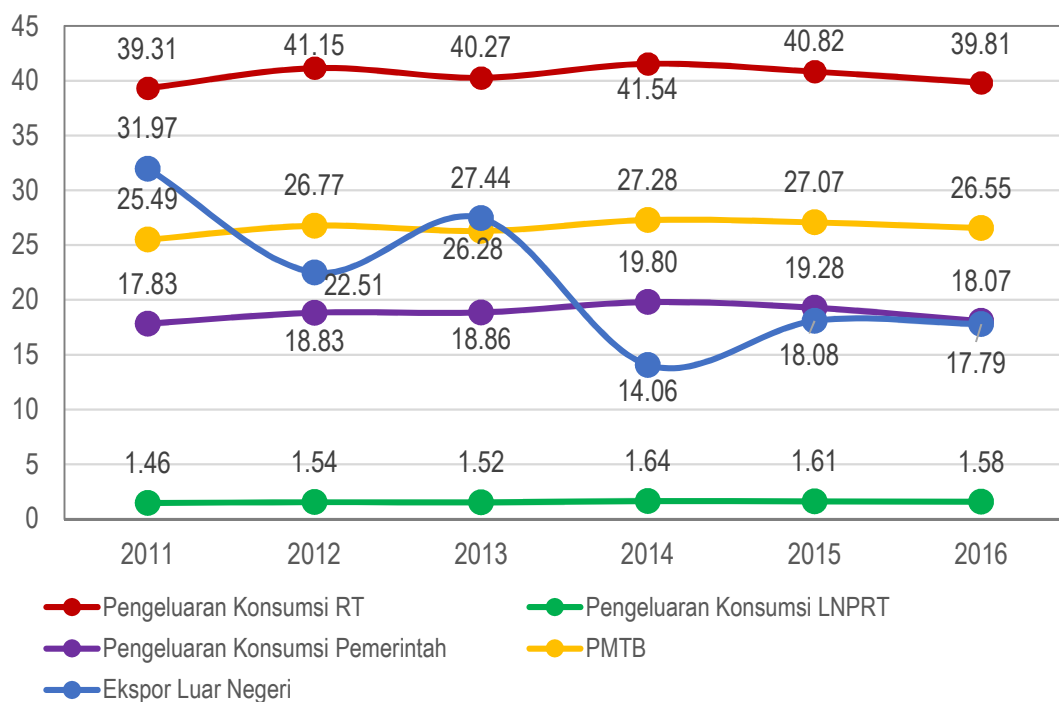
Tabel. 3.6.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Papua Menurut Pengeluaran
Tahun 2012-2016
(dalam %)

Komponen Pengeluaran	2012	2013	2014	2015	2016	Rata²
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	6.47	6.23	7.10	6.11	5.84	6.35
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	6.87	7.25	12.28	5.87	6.50	7.75
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	7.43	8.73	8.98	5.14	1.72	6.40
Pembentukan Modal Tetap Bruto	6.82	6.56	7.78	7.11	6.44	6.94
Perubahan Inventori	-111.10	90.60	-182.91	-172.26	20.64	-71.01
Ekspor Luar Negeri	-28.40	32.38	-46.83	38.88	6.75	0.56
Impor Luar Negeri	-8.69	-41.20	105.27	-20.08	4.10	7.88
Net Ekspor Antar Daerah	-57.51	367.41	-152.80	-103.17	-2,028.43	-394.90
Total PDRB	1.72	8.55	3.81	7.30	9.21	6.12

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Dari sisi pengeluaran, komponen pembentuk PDRB Provinsi Papua selama ini didominasi oleh pengeluaran rumah tangga. Peran pengeluaran rumahtangga dalam pembentukan PDRB Provinsi Papua sangat besar dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni dari 39,31% di tahun 2011 menjadi 39,81% pada tahun 2016, atau kontribusinya bertambah 0,50%. Selanjutnya yang juga dominan kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Papua adalah komponen investasi, yang terlihat juga meningkat dari 24,49% di tahun 2011 naik menjadi 26,55% di tahun 2016. Kemudian pengeluaran konsumsi pemerintah dengan kontribusi sebesar 17,83% di tahun 2011 kemudian meningkat menjadi 19,80% di tahun 2014, namun kemudian menurun menjadi 10,07 di tahun 2016. Adapun komponen yang paling rendah kontribusinya adalah pengeluaran konsumsi LNPRT hanya dibawah 1,64% per tahun

Gambar 3.2.
Struktur PDRB Provinsi Papua Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016

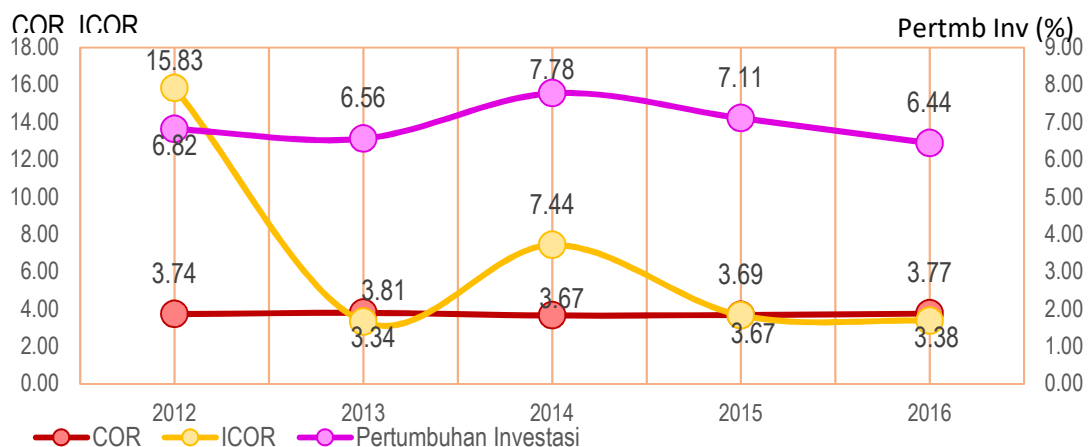


Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Peningkatan investasi diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Papua dan menurunkan angka pengangguran di Provinsi Papua. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan, diperlukan adanya perkiraan kebutuhan investasi untuk mencapai sasaran pertumbuhan output tersebut. Namun perlu disadari bahwa besar kecilnya Capital Output Rasio (COR) tersebut, sangat dipengaruhi juga oleh teknologi yang digunakan, efisiensi dalam penggunaan faktor produksi, pengelolaan sumber daya alam, persebaran penduduk, kemampuan manajerial, laju dan komposisi investasi dan prasarana sosial ekonomi yang tersedia.

Dalam perkembangannya, pertumbuhan investasi di provinsi Papua tahun 2012-2016 terlihat mengalami fluktuasi. Pertumbuhan investasi tertinggi terjadi di tahun 2014 yaitu 7,78%, dengan ICOR 7,44 dan COR sebesar 3,67. Ini mengindikasikan bahwa kebutuhan investasi untuk meningkatkan perekonomian Papua terlihat mengalami fluktuasi namun masih realistis kecuali untuk tahun 2012, dan 2014 dimana angka ICOR terlihat sangat tinggi berada pada angka di atas 4 yaitu 7,44. Artinya Kebutuhan untuk menaikkan 1 unit output di Papua dibutuhkan 7,44 unit modal, sehingga jika dilihat secara rata-rata maka dapat dikategorikan Papua masih mengalami ekonomi biaya tinggi.

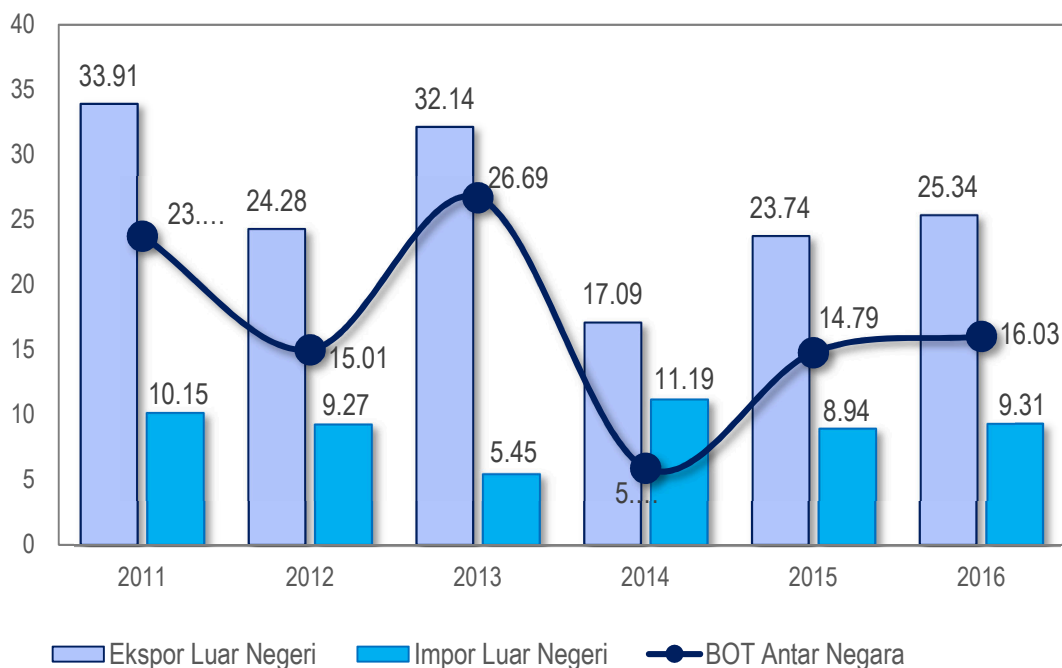
Gambar 3.3.
Pertumbuhan Investasi, COR Dan ICOR Provinsi Papua
Tahun 2012-2016



Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Perkembangan nilai ekspor luar negeri provinsi Papua mengalami surplus, atau selalu lebih besar dari pada impor, namun dengan perkembangan yang berkontraksi sepanjang tahun 2011-2016. Tahun 2011 dan Tahun 2013, terlihat ekspor Papua mencapai angka tertinggi yaitu masing-masing sebesar Rp 33,91 Triliun dan Rp 32,14 triliun. Kondisi ini tidak berlangsung lama, karena mengalami penurunan di tahun 2014 atau terendah sepanjang tahun 2011-2016. namun kemudian terlihat meningkat lagi di tahun-tahun berikutnya. Impor Luar Negeri Provinsi Papua tertinggi terlihat di Tahun 2014 yaitu sebesar Rp 11,19 triliun dan terendah di tahun 2013 yaitu sebesar Rp 5,45 triliun. Kondisi ini juga yang menyebabkan neraca perdagangan atau *Balance of Trade* (BOT) antar negara tahun 2013 menjadi tertinggi jika dibanding tahun tahun lainnya.

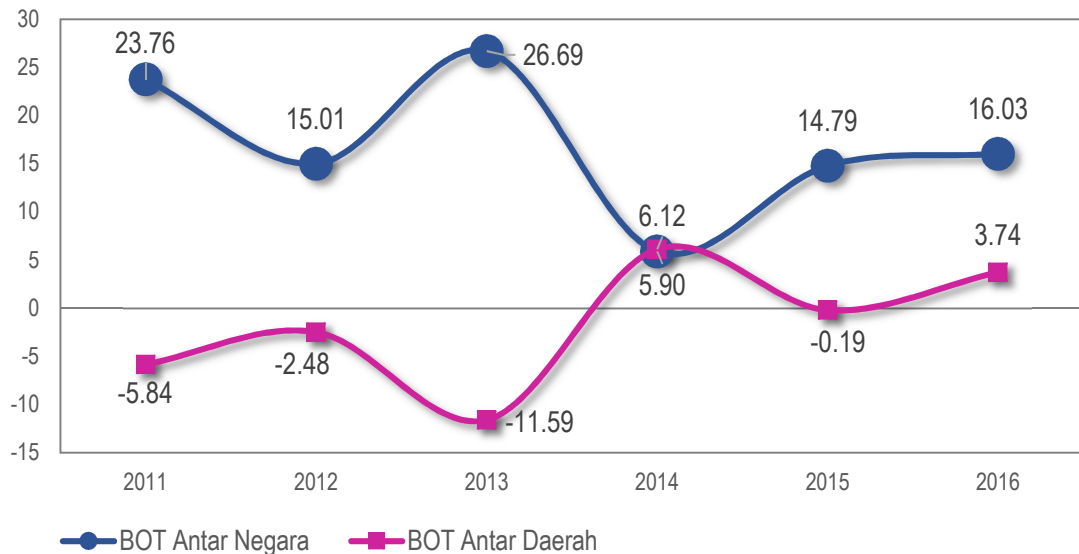
Gambar 3.4.
Perkembangan Neraca Perdagangan Luar Negeri
Provinsi Papua Tahun 2011-2016
(Rp. Triliun)



Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Kondisi berbeda jika dibandingkan BOT antar negara dengan BOT antar daerah. Neraca perdagangan antar daerah provinsi Papua terlihat dominan defisit kecuali untuk tahun 2014 dan 2016. Defisit tertinggi terlihat di tahun 2013 yang mencapai Rp 11,59 triliun.

Gambar 3.5.
Perbandingan Neraca Perdagangan Luar Negeri Dan Antar Daerah
Provinsi Papua Tahun 2011-2016
(Rp. Triliun)



Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Jika disimak pada Tabel 3.7, tujuan ekspor dari Provinsi Papua terbesar ke enam negara yaitu Spanyol, Jepang, Filipina, Korea Selatan, India dan Tiongkok. Negara tujuan ekspor tahun 2013-2015 terbesar terlihat ke India dengan proporsi paling besar di tahun 2014 yang mencapai 38,81% atau mencapai 778,15 juta US\$. Tahun 2016, proporsi ekspor terbesar bergeser ke negara Jepang yaitu 24,46% atau mencapai 489,14 juta US\$. Secara keseluruhan total ekspor dari Provinsi Papua, paling tinggi dicapai di tahun 2013 yaitu sebesar 2,728.04 juta US\$.

Tabel 3.7
Ekspor Provinsi Papua Menurut Negara Tujuan
Tahun 2013 -2016

Negara Tujuan	Jan-Des 2013		Jan-Des 2014		Jan-Des 2015		Jan-Des 2016	
	juta US\$	Share %	juta US\$	Share %	juta US\$	Share %	juta US\$	Share %
Spanyol	295.18	10.82	297.93	19.48	56.57	2.82	54.22	2.71
Jepang	685.97	25.15	270.23	17.67	403.16	20.11	489.14	24.46
Filipina	223.14	8.18	24.51	1.60	183.32	9.14	258.88	12.95
Korea Selatan	263.09	9.64	80.11	5.24	109.23	5.45	178.97	8.95
India	754.42	27.65	338.79	22.15	778.15	38.81	482.93	24.15
Tiongkok	414.05	15.18	359.32	23.49	310.71	15.50	460.43	23.02
Total 6 Negara Utama	2,635.85	96.62	1,370.89	89.62	1,841.12	91.82	1,924.57	96.24
Lainnya	92.19	3.38	158.78	10.38	164.04	8.18	75.20	3.76
Total	2,728.04	100.00	1,529.67	100.00	2,005.16	100.00	1,999.77	100.00

Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

3.1.1.2. Kesempatan Kerja

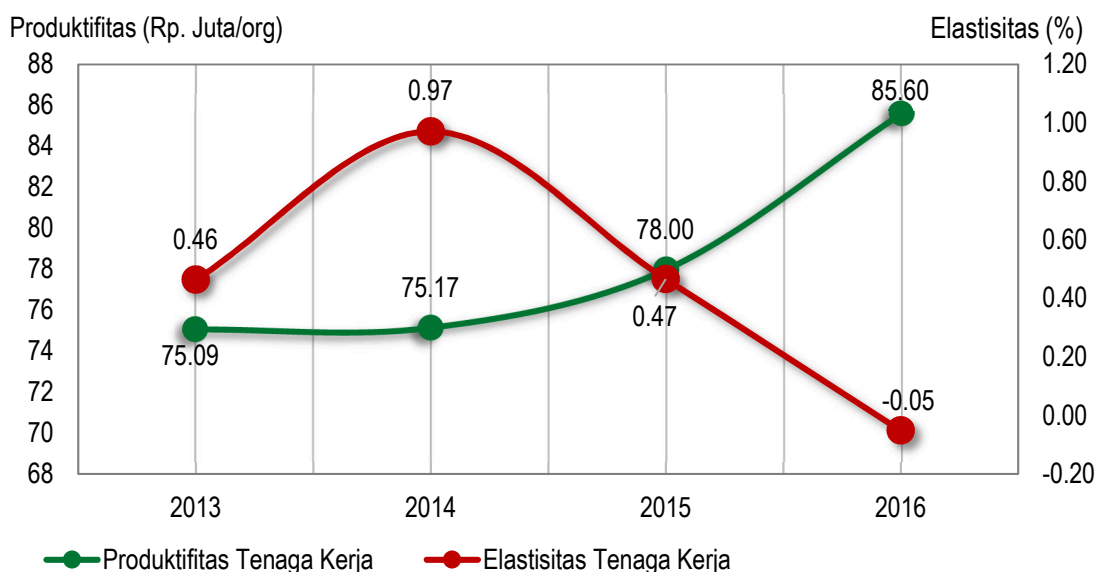
Seperti yang telah disampaikan dalam Tabel 2.11 sebelumnya, jumlah penduduk usia produktif terus mengalami kenaikan namun dengan jumlah yang semakin menurun dan disisi lain jumlah angkatan kerja terlihat semakin meningkat kecuali terjadi penurunan di tahun 2016 sebesar 19,783 orang. Kondisi ini mengindikasikan semakin besarnya jumlah penduduk yang masuk kategori bukan angkatan kerja yang disebabkan karena sedang bersekolah atau menjadi ibu rumah tangga. Hal ini terlihat adanya peningkatan drastis jumlah bukan angkatan kerja dari tahun 2015 ke tahun 2016 sebesar 76.015 orang.

Fakta lainnya, TPAK dan tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Papua cenderung berkembang stabil. Tahun 2011, TPAK provinsi Papua tercatat sebesar 78,27%, yang kemudian turun di tahun 2011 namun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2015, dan menurun kembali di tahun 2016 menjadi 74,13%. Dari sisi pengangguran, terlihat bahwa

jumlah orang yang menganggur di provinsi Papua terlihat cenderung mengalami peningkatan, namun dari sisi proporsinya mengalami fluktuasi yang penurunan, sehingga hal ini berdampak pada tingkat pengangguran terbuka di provinsi Papua. Tahun 2012 tercatat angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mencapai 3,65%, yang mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 3,15%, namun kemudian meningkat sampai dengan tahun 2015 sehingga menjadi 3,99%, dan kemudian menurun kembali di tahun 2016 menjadi 3,35% sehingga dari sisi Tingkat Kesempatan Kerja (TKT) tentunya meningkat dari 96,01% di tahun 2015 naik menjadi 96,65% di tahun 2016.

Elastisitas tenaga kerja di provinsi Papua terlihat lebih kecil dari satu atau inelastis. Elastisitas tenaga kerja tertinggi terlihat di tahun 2013 yaitu sebesar 0,97 dan terendah di tahun 2016 yaitu 0,05. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perubahan PDRB atau produksi 1 persen akan menyebabkan perubahan tenaga kerja yang terserap kurang dari 0,97 persen di tahun 2013 atau 0,05 persen di tahun 2016. Dari sisi produktifitas tenaga kerja di Provinsi Papua terlihat mengalami peningkatan sejak tahun 2013 yaitu dari Rp 75,09 juta per orang naik menjadi Rp 85,60 juta per orang.

Gambar 3.6.
Produktifitas Dan Elastisitas Tenaga Kerja Di Provinsi Papua
Tahun 2011-2016



Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

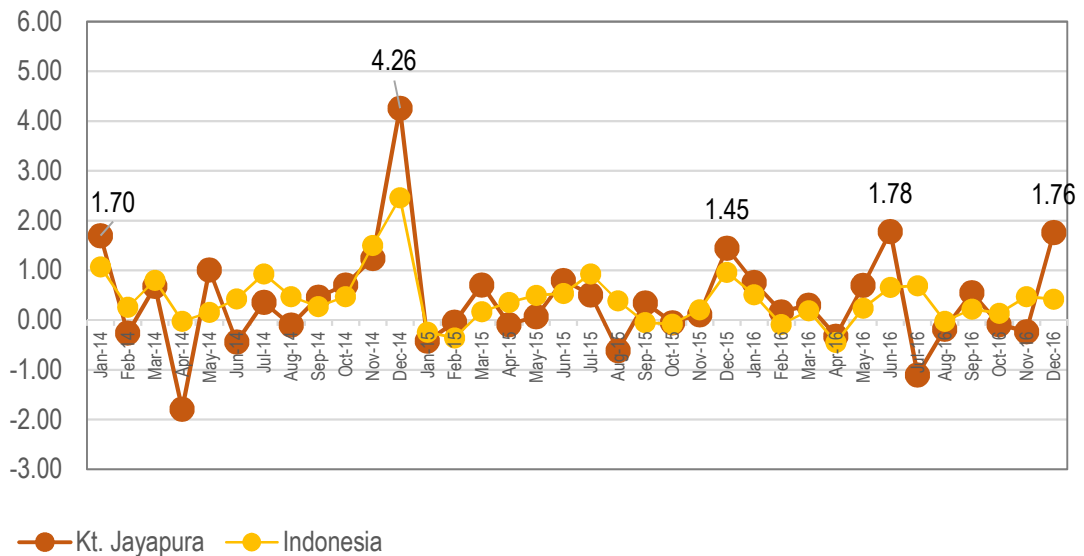
3.1.1.3. Perkembangan Inflasi dan Tingkat Kemahalan Di Provinsi Papua Tahun 2012-2016

Dari hasil monitor perkembangan harga barang dan jasa bulanan di kota Jayapura terlihat pergerakan harga dari paket barang dan jasa dari bulan Januari 2014 sampai dengan bulan Desember 2016 menunjukkan pergerakan yang fluktuatif. Lonjakan pergerakan harga barang dan jasa terlihat meningkat dan menurun tajam pada bulan-bulan tertentu di kota Jayapura. Tingkat kenaikan harga barang dan jasa secara umum terlihat pada bulan Januari 2014, bulan Desember 2014, bulan Desember 2015, bulan Juni 2016 dan bulan Desember 2016. Sedangkan tingkat inflasi terendah, terlihat pada bulan April 2014, Agustus 2015 dan bulan Juli 2016.

Secara kumulatif inflasi di Kota Jayapura, yang merepresentasikan kondisi inflasi Provinsi Papua, selama ini selalu terkendali dengan kecenderungan mengalami penurunan dan berada dibawah inflasi Indonesia kecuali untuk tahun 2016 yang terlihat berada diatas inflasi Indonesia. Tingkat pergerakan harga paket barang dan jasa secara kumulatif selama tahun 2014-2015 terlihat menurun dari 7,98% di tahun

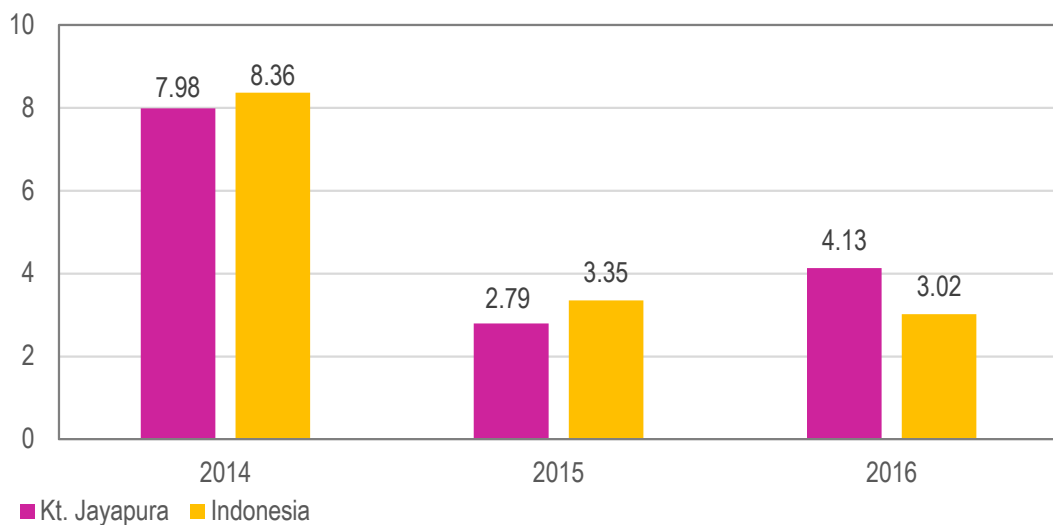
2014 menjadi 2,79% di tahun 2015 dan masih dengan besaran inflasi dibawah 10%. tetapi ada kecenderungan meningkat dan tidak stabil yang akan berpengaruh kepada pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan dan dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Gambar 3.7.
Tingkat Inflasi Bulanan Kota Jayapura dan Indonesia
Periode Januari 2014 - Desember 2016



Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Gambar 3.8.
Tingkat Inflasi Tahunan Kota Jayapura dan Indonesia
Tahun 2014 - 2016

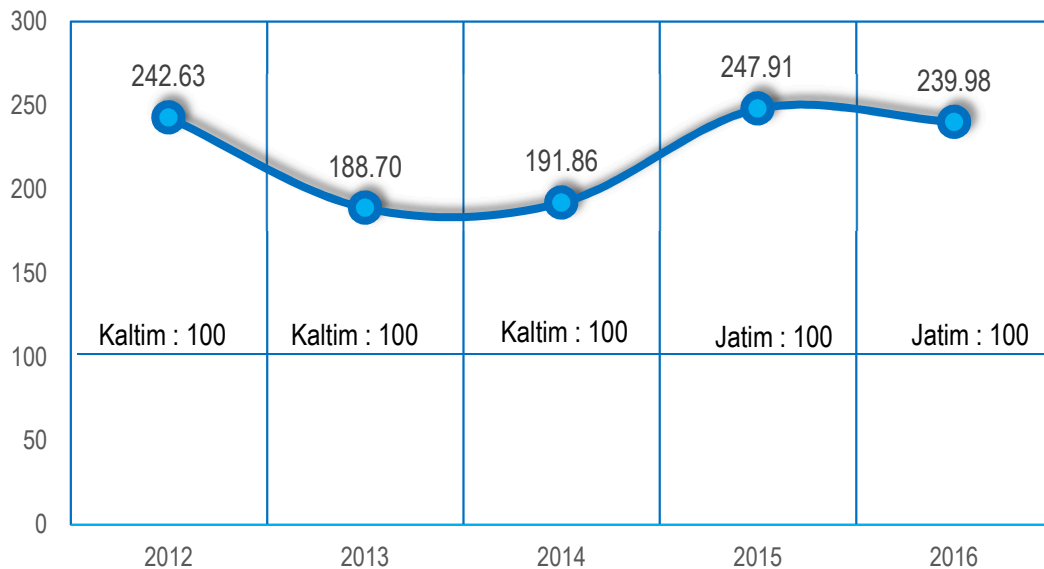


Sumber : BPS Papua, 2016 (data diolah)

Selain inflasi, perkembangan harga yang juga menjadi perhatian pemerintah daerah dalam pembangunan ekonomi adalah tingkat kemahalan harga, yang selama ini menggunakan indikator Indeks Kemahalan Kontruksi atau IKK. IKK digunakan sebagai *proxy* untuk mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. Dengan digunakannya realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pembentukan modal tetap sebagai salah satu penimbang IKK, maka IKK suatu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota acuan dapat berubah-ubah tergantung dari realisasi APBD masing-masing kabupaten/kota.

IKK sudah dihitung sejak tahun 2003. Penimbang yang digunakan untuk menghitung IKK adalah *Bill of Quantity* (BoQ) satu proyek yang sudah selesai. Perkembangan teknik sipil sangat cepat ditambah lagi dengan pesatnya industri bahan bangunan. Saat ini material yang digunakan untuk kegiatan konstruksi sudah banyak yang berubah atau muncul model baru seperti batako ringan, atap baja ringan, kusen aluminium, dan sebagainya. Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah yang mempengaruhi kegiatan konstruksi juga banyak berubah. Hal-hal tersebut mengakibatkan BoQ 2003 yang selama ini digunakan untuk menghitung IKK tidak lagi sesuai dengan kondisi di lapangan. Oleh karena itu mulai tahun 2013 penghitungan IKK sudah menggunakan BoQ terbaru yang dikumpulkan pada tahun 2012. Sedangkan IKK tahun 2016 menggunakan penimbang yang lebih lengkap dan *up to date* yaitu menggunakan updating BoQ sampai tahun 2015. Berikut ini perkembangan IKK di Provinsi Papua selama tahun 2012 - 2016.

Gambar 3.9.
Indeks Kemahalan Kontruksi Di Provinsi Papua
Tahun 2012 - 2016



Sumber : BPS Indonesia, 2016 (data diolah)

Sepanjang tahun 2012-2014 cenderung IKK Provinsi Papua mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun tetap dalam posisi teratas di seluruh Indonesia. Adanya perubahan daerah acuan di tahun 2015, yaitu dari Kota Samarinda/Provinsi Kalimantan Timur ke Kota Surabaya/Provinsi Jatim mengakibatkan IKK Provinsi Papua naik hingga menjadi 247,91. Ini berarti kenaikan IKK tersebut bukan terjadi secara struktural, namun lebih kepada teknis. Di tahun 2016 terjadi penurunan IKK dengan angka yang tipis hanya sebesar 7,93 point, sehingga IKK di tahun 2016 menjadi 239,98, yang menandakan harga-harga bahan kontruksi di Provinsi Papua secara rata-rata lebih tinggi 139,88 persen dibandingkan daerah acuan (Kota Surabaya).

3.1.2. Tantangan Dan Prospek Perekonomian Wilayah Tahun 2017 dan 2018

3.1.2.1. Tantangan Global Dan Domestik

Dalam laporan bertajuk *Indonesia Economic Quarterly* yang dirilis pada bulan Maret 2017, Bank Dunia menyatakan beberapa risiko eksternal yang dapat memberikan risiko penurunan atau *downside risk* yang signifikan antara lain perubahan besar dalam kebijakan

perdagangan di antara negara-negara maju. Selain itu, ada pula perubahan yang tidak terduga dalam kebijakan moneter di Amerika Serikat. Risiko lainnya adalah ketidakpastian politik Eropa. Hal ini terkait proses keluarnya Inggris dari keanggotaan Uni Eropa dan ketidakpastian terkait pemilihan umum di beberapa negara Eropa, antara lain di Belanda dan Perancis.

Sementara itu dalam Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2017 yang dipublikasikan oleh Bappenas (2017) dinyatakan bahwa pengaruh eksternal terbesar bagi perekonomian Indonesia diperkirakan berasal dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Amerika Serikat (AS). Perlambatan ekonomi RRT yang terjadi sejak akhir tahun lalu diperkirakan masih akan terjadi selama beberapa waktu ke depan. Sebagai negara importir terbesar kedua di dunia, perlambatan ekonomi di RRT tidak hanya merugikan mitra dagangnya secara langsung namun juga menyebabkan penurunan permintaan dunia secara keseluruhan, yang akhirnya dapat berujung pada perlambatan ekonomi global. Kebijakan yang akan diambil oleh Pemerintah RRT di tengah kondisi global yang melemah, serta sejauh mana kebijakan tersebut akan efektif mengurangi perlambatan ekonomi tersebut, perlu dipantau oleh Pemerintah Indonesia agar dapat menyusun kebijakan antisipasi yang tepat.

Kemenangan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat yang ke-45 membawa dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian Indonesia. Dalam hal ini arah dari kebijakan Donald Trump memberikan dampak kepada perekonomian Indonesia melalui dua jalur. Pertama, melalui pasar uang dan juga pasar modal akibat kenaikan yield obligasi dan *Fed Fund Rate*, dimana dampaknya sudah mulai dirasakan pada sekarang ini. Kedua, melalui dampak perdagangan internasional. Jika pengetatan impor benar-benar dilakukan, termasuk pada produk di Indonesia, sedikit ataupun banyak secara langsung berdampak bagi perekonomian kita. Nilai ekspor di Indonesia per September 2016 mencapai USD 1.378 miliar dan akan berpotensi turun jika kebijakan

proteksionisme tersebut jadi dilakukan oleh Donald Trump. Kekhawatiran ini semakin menguat ketika beberapa waktu lalu, Presiden Donald Trump menerbitkan *executive order* atau surat perintah eksekutif untuk menginvestigasi negara-negara yang dianggap curang dalam perdagangan dengan AS. Investigasi juga dilakukan terhadap negara-negara yang memiliki surplus neraca perdagangan dengan AS, salah satunya Indonesia dari 16 negara yang masuk dalam daftar tersebut. Namun hal ini diprotes oleh berbagai kalangan ekonom Indonesia, dan banyak pakar yang menilai hal tersebut merupakan bentuk retorika saja yang tidak perlu dikhawatirkan.

Tantangan global berikutnya yang perlu diantisipasi adalah berlakunya Komunitas perdagangan ASEAN yang telah membentuk konsep pasar tunggal yang digagas oleh 10 Negara ASEAN yang terdiri dari Indonesia, Myanmar, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Philipina, Laos, Kamboja dan Vietnam, yang mengharuskan terwujudnya globalisasi 5 perdagangan bebas yakni arus barang, arus jasa, arus investasi, arus modal dan arus tenaga kerja terampil. Sehingga persaingan bebas akan benar-benar terjadi lintas negara, yang dipastikan akan melintasi juga ke daerah-daerah provinsi dalam satu negara.

Untuk tantangan domestik, beberapa risiko terhadap prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2016 yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia antara lain: (1) dalam jangka menengah, tantangan perekonomian terkait dengan upaya memperkuat struktur perekonomian sehingga lebih berdaya tahan. Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk menghindarkan Indonesia dari jebakan kelompok ekonomi berpendapatan menengah, (2) tantangan berkaitan dengan upaya memperkuat struktur perekonomian dari sektor riil dan sektor keuangan. Tantangan struktural di sektor riil berhubungan dengan upaya untuk memperluas keragaman komposisi produk ekspor sehingga melengkapi peran ekspor produk sumber daya alam. Tantangan di sektor riil juga berhubungan dengan upaya meningkatkan peran industri pengolahan dalam perekonomian, dan memperkuat struktur pasar dan

tata niaga sehingga lebih efisien, dan (3) tantangan di sektor keuangan berkenaan dengan upaya untuk memperkuat struktur pembiayaan domestik sehingga menjadi lebih beragam, meningkatkan struktur dana perbankan sehingga menjadi lebih seimbang, serta memperdalam pasar keuangan sehingga dapat mendukung pembiayaan ekonomi dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter.

Adapun Bank Dunia menyebutkan tantangan domestik di tahun 2017 adalah meningkatnya inflasi di dalam negeri. Bank Dunia memprediksi inflasi naik sementara dari 3,5 persen pada tahun 2016 menjadi 4,3 persen pada tahun 2017 akibat naiknya tarif listrik, BBM dan pajak kendaraan. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan PDB riil diproyeksikan menjadi 5,2 persen di tahun 2017, dan mencapai 5,3 persen pada 2018. Bank Dunia juga mengatakan bahwa Indonesia termasuk negara dengan hambatan terbanyak untuk perdagangan jasa, hal ini mengurangi mutu sebuah layanan dan juga menghambat produktivitas sektor-sektor ekonomi lain.

Selanjutnya dalam Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2017, salah satu tantangan domestik untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang disebutkan adalah belum optimalnya pendapatan negara dari pajak, seiring dengan perlambatan ekonomi Indonesia dan masih rendahnya basis pajak. Di sisi lain, Pemerintah berencana untuk meningkatkan porsi anggaran belanjanya, khususnya untuk belanja infrastruktur, guna mengurangi kesenjangan infrastruktur antar daerah dan sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Indonesia. Akibatnya, defisit anggaran cenderung semakin melebar dan mendekati ambang batas yang ditetapkan dalam peraturan yaitu jumlah kumulatif defisit anggaran tidak dapat melebihi 3 (tiga) persen dari PDB tahun berjalan. Selain itu aktivitas sektor swasta yang terus melambat juga diperkirakan akan berdampak negatif terhadap pencapaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2017.

3.1.2.2. Prospek Perekonomian Provinsi Papua Tahun 2018

Formula ICOR (*Incremental Capital Output Ratio*) yang digunakan oleh BPS Papua dapat diderivasi berdasarkan algoritma tertentu rumus pertumbuhan ekonomi berbasis investasi yaitu:

$$LPE = k \cdot \frac{1}{COR \cdot ICOR}$$

dimana LPE adalah laju pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan, k adalah $(1 + gl)$ dengan gl merupakan pertumbuhan investasi yang direncanakan, COR dan ICOR masing-masing adalah rata-rata *Capital Output Ratio* dan *Incremental Capital Output Ratio* pada periode sebelumnya.

Dalam pembahasan di awal, berdasarkan data time series PMTB (Pertambahan Modal Tetap Bruto) dan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) periode 2012-2016 telah diketahui COR rata-rata adalah 3,77, dan ICOR rata-rata (kumulatif) adalah 4,50. Kemudian, dalam dokumen RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018, secara makro telah ditargetkan tingkat pertumbuhan ekonomi pada akhir masa pembangunan RPJMD tahun 2018 adalah sebesar 8%. Dengan menggunakan seluruh indikator ini dan rumus derivatif pertumbuhan ekonomi di atas maka dapat ditentukan berapa besar pertumbuhan investasi yang dibutuhkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi tersebut (8%) dengan asumsi COR dan ICOR konstan, sebagai berikut :

$$LPE \times COR \times ICOR = (1 + gl)$$

$$0,08 \times 3,73 \times 4,50 = 1 + gl$$

$$1,3427 = 1 + gl$$

$$gl = 1,3427 - 1$$

$$gl = 0,3427 \text{ atau } 34,27\%$$

Ini berarti untuk menciptakan LPE sebesar 8% di tahun 2018 sebagaimana yang ditargetkan dalam RPJMD 2013-2018 dibutuhkan kenaikan investasi sebesar 34,27%.

Kebutuhan pertambahan investasi sebesar 34,27% ini dapat dikatakan kurang begitu realistis untuk saat ini mengingat kondisi makro ekonomi Provinsi Papua sepanjang periode 2014-2016 sangat fluktuatif, serta berhadapan dengan tantangan ekonomi global dan domestik di

tahun 2017. Selain itu dari data historis rata-rata pertumbuhan investasi (PMTB) selama tahun 2011 - 2016 hanya sekitar 6,94% (lihat Tabel 3.5). Oleh karena itu diperlukan adanya koreksi target pertumbuhan di tahun 2018 berdasarkan asumsi-asumsi berikut ini.

1). Asumsi-asumsi yang mendistorsi pertumbuhan ekonomi

- a. Meskipun porsi ekspor Provinsi Papua dalam struktur ekspor luar negeri Indonesia masih sangat kecil, namun jika dilihat dari kontribusinya terhadap perekonomian wilayah sendiri, dapat dikatakan perekonomian Papua sudah cukup terbuka karena kontribusi ekspor luar negeri terhadap pembentukan PDRB rata-rata mencapai 19,90% per tahun yang berada di urutan ketiga setelah PMTB dan konsumsi RT. Selama ini ada 3 negara tujuan ekspor yang sangat mendominasi komposisi ekspor luar negeri Provinsi Papua yaitu India, Tiongkok dan Jepang, dengan kisaran kontribusinya terhadap total ekspor Papua selama periode 2014 - 2016 rata-rata mencapai 23,16% per tahun. Ketiga negara ini mempunyai risiko global yang dapat berdampak terhadap penurunan ekspor Provinsi Papua di tahun 2018. Negara Tiongkok saat ini mengeluarkan kebijakan ekonomi ketat untuk menghadapi perlambatan ekonomi di negaranya (*Tiongkok tighter policy*), sehingga berdampak terhadap ekspor mitra dagangnya, termasuk Provinsi Papua. Selain itu, negara Tiongkok, India dan Jepang, ketiganya dimasukkan sebagai negara yang curang dalam *executive order* Amerika Serikat karena paling besar memiliki surplus perdagangan dengan negara Amerika Serikat. Sekiranya Amerika Serikat memberikan sanksi terhadap ketiga negara tersebut, maka secara tidak langsung hal ini akan berdampak terhadap perkembangan ekspor mitra-mitra dagangnya.
- b. Disamping risiko global, permasalahan ketergantungan ekspor Provinsi Papua terhadap satu komoditi yaitu tambang tembaga yang diproduksi oleh PT. Freeport Indonesia juga sangat mengganggu ekspor Papua di tahun 2018 mendatang. Terjadinya penurunan produksi di PT. Freeport Indonesia akibat polemik yang terjadi dengan pemerintah pusat akhirnya berdampak terhadap penurunan ekspor sektor pertambangan di Provinsi Papua pada

tahun 2017. Kondisi ini ditegaskan oleh BPS Papua (2017) bahwa nilai ekspor bulan Februari 2017 turun hingga 96,25% bila dibandingkan dengan bulan Januari tahun yang sama. Ketergantungan terhadap satu komoditi ini juga menyebabkan perekonomian Provinsi Papua menjadi penuh ketidakpastian (*uncertainty*).

- c. Walaupun eksistensi pasar tunggal MEA dapat memberi pengaruh yang positif, namun dampak negatifnya perlu diperhatikan juga oleh Provinsi Papua. Dengan adanya MEA, arus barang yang masuk dari negara-negara ASEAN tidak dapat dihindari oleh Provinsi Papua di tahun 2018. Kondisi ini dapat berdampak dengan menurunnya surplus perdagangan luar negeri diakibatkan impor yang akan terus meningkat, ditambah lagi dengan kurs rupiah terhadap dolar AS yang diperkirakan akan naik di tahun 2018 dengan kisaran pada nilai Rp.13.700 per dolar AS (asumsi kurs dolar AS pada RAPBN 2018) menyebabkan *leakage* (kebocoran) dalam neraca perdagangan akan semakin besar.
- d. Neraca perdagangan antar daerah yang selalu rendah dibawah Rp. 4 triliun per tahun, bahkan untuk beberapa tahun sebelumnya sempat mengalami defisit, mengindikasikan sangat tergantungnya perekonomian Provinsi Papua terhadap daerah-daerah lainnya di Indonesia, terutama dengan Pulau Jawa dan Sulawesi. Terjadinya perubahan ekonomi nasional, terutama akibat kenaikan harga BBM, Tarif Dasar Listrik dan LPG, akan memicu kenaikan harga-harga barang yang diimpor Provinsi Papua dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Dalam hal ini berdasarkan data *time series* selama periode 2011 - 2016, dan menggunakan *trend analysis* maka diproyeksi harga BBM umum di tahun 2018 rata-rata bisa mencapai Rp. 6.500 - Rp. 6.700 per liter. Sedangkan untuk TDL, khususnya yang non subsidi diperkirakan akan naik menjadi Rp. 1.500 - Rp. 1.600 per kWh untuk tahun yang sama. Kenaikan harga kedua komoditi penting tersebut akan berimbas pada

naiknya harga-harga barang dari luar daerah yang diperkirakan sebesar 4% (asumsi inflasi pada RAPBN 2018), yang dimungkinkan dapat mengurangi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Provinsi Papua.

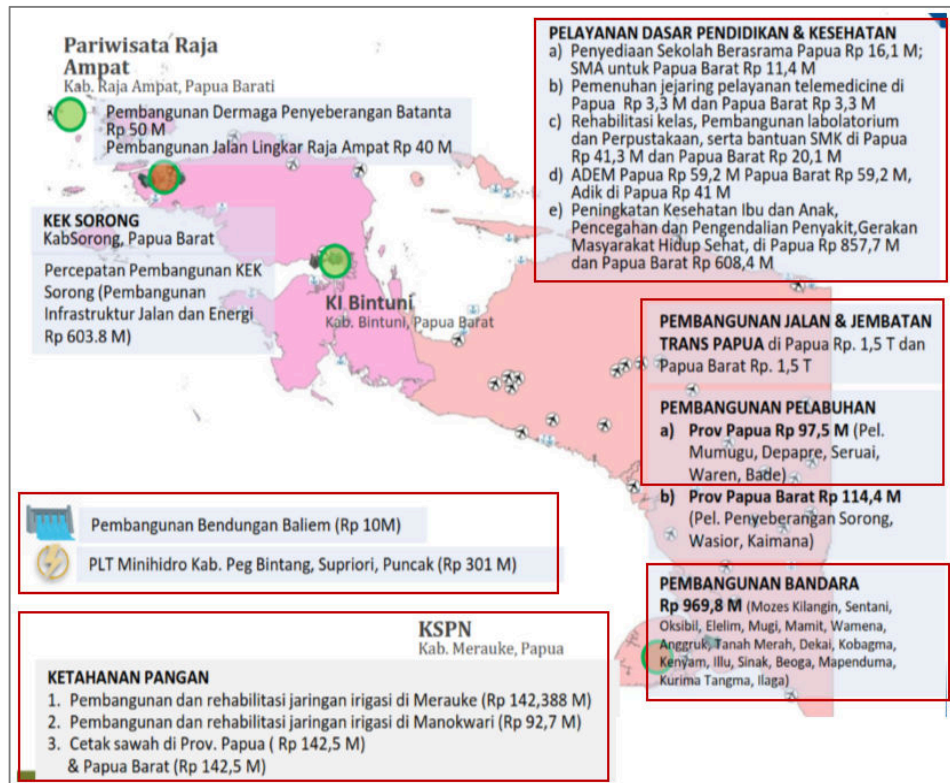
2). Asumsi-asumsi yang menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi

- a. Kontribusi pengeluaran RT masih mendominasi pembentukan PDRB pengeluaran sampai dengan tahun 2018. Sehingga gejala nilai ekspor yang sangat dipengaruhi oleh penurunan produksi sektor pertambangan dari PT. Freeport dapat di minimalisir melalui peningkatan konsumsi RT yang diperkirakan berdasarkan data proyeksi *time series* (2011 - 2016) dapat tumbuh antara 6,40% - 7,40% dengan kontribusinya sebesar 40,85 persen pada tahun 2018. Walaupun ada distorsi akibat inflasi pada harga BBM, LPG dan TDL, namun angka proyeksi sebesar itu tidaklah naif, mengingat ekspektasi konsumen rumah tangga terhadap kondisi perekonomian di Provinsi Papua selama ini cenderung meningkat setiap tahunnya. Seperti yang dirilis oleh BPS Papua bahwa Indeks Tendensi Konsumen (ITK) sepanjang tahun 2016 rata-rata mencapai 107.99, yang selalu dominan dibentuk oleh optimisme dari konsumen bahwa pendapatan rumah tangga meningkat. Adapun stimulus terbesar berasal dari pengeluaran konsumsi makanan dan minum serta transportasi.
- b. Secara sektoral, meskipun kontribusinya terhadap PDRB masih dibawah sektor pertambangan, namun kinerja sektor pertanian selama periode 2012 – 2016 menunjukkan arah yang lebih baik dengan rata-rata pertumbuhannya di atas sektor pertambangan yakni 5,22% per tahun. Selain itu, sektor pertanian yang digerakan oleh 5 sub sektor produktif yaitu tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan semuanya juga memperlihatkan kinerja pencapaian target RPJMD 2013 - 2018 yang paling baik di tahun 2016, rata-rata sekitar 97,6% - 101,30%. Untuk itu sangatlah relevan jika semua sub sektor pertanian

tersebut ditempatkan sebagai mesin pertumbuhan ekonomi di tahun 2018, yang diperkirakan mampu meningkatkan nilai tambah sektor pertanian rata-rata 5% pada tahun tersebut. Namun perkiraan pertumbuhan ini dapat dicapai apabila ada injeksi yang proporsional pada faktor-faktor *final demand* (permintaan akhir) dari sektor pertanian, terutama pada PMTB dan pengeluaran pemerintah.

- c. Kemudian tidak kalah pentingnya lagi adalah sektor konstruksi dan transportasi, yang terindikasi sangat berperan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua. Dalam perekonomian Papua, selama periode 2012 - 2016 kedua sektor infrastruktur ini tercatat mempunyai pertumbuhan yang paling tinggi diantara semua sektor, masing-masing sebesar 10,77% untuk sektor konstruksi, dan 9,04% untuk sektor transportasi. Sektor infrastruktur mempunyai pengaruh ganda dalam perekonomian wilayah, yaitu *direct effect* (pengaruh langsung) dan *indirect effect* (pengaruh tidak langsung). Pengaruh langsungnya dapat dilihat dalam menyerap lapangan kerja, mendorong produksi di sektor lainnya yang terkait, meningkatkan pendapatan per kapita, dan sebagainya. Sedangkan pengaruh tidak langsungnya menyebar sangat luas baik itu dalam jangka pendek maupun jangka panjang, seperti memacu kenaikan investasi, menggerakkan produksi di sektor-sektor *tradeable*, menurunkan angka kemiskinan, ketimpangan, inflasi, dan lain-lain. Singkatnya, sektor infrastruktur merupakan faktor *enabler* yang paling utama dan strategis dalam perekonomian wilayah, dan menjadi *first order condition* untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua. Sebagaimana yang dimuat dalam Rancangan Awal RKP 2018 (Bappenas, 2017), percepatan pembangunan Provinsi Papua menjadi *Highlight* Prioritas Nasional melalui pengembangan infrastruktur yang diarahkan pada upaya penurunan kesenjangan intra wilayah Papua, khususnya wilayah pegunungan dan pesisir pantai. Lihat Gambar 3.10 berikut ini.

Gambar 3.10.
Highlight Prioritas Nasional Pembangunan Wilayah
Percepatan Pembangunan Papua



Sumber : Rancangan Awal RKP 2018, Bappenas

- d. Pengeluaran konsumsi pemerintah juga diharapkan bisa menjadi stimulus yang optimal bagi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018, sejalan dengan percepatan realisasi anggaran dan kemungkinan tidak adanya skenario fiskal pemerintah pusat terkait penundaan pencairan dana perimbangan. Adanya pencairan dana terkait pilkada serentak, peningkatan pembangunan dan penyelesaian infrastruktur-infrastruktur strategis di Provinsi Papua diperkirakan akan berdampak positif terhadap kinerja serta kontribusi pengeluaran konsumsi pemerintah. Selain itu persiapan PON ke-20 yang sudah *start up* dari tahun 2016 akan semakin terasa pada tahun 2018, karena pembangunan berbagai *venue* PON akan semakin dipercepat, sehingga stimulus fiskal semakin besar dalam perekonomian wilayah yang didorong dengan peningkatan pengeluaran pemerintah. Diperkirakan

pengeluaran pemerintah akan meningkat dalam interval 6,40% - 8,40% pada tahun 2018.

- e. Peningkatan produktifitas tenaga kerja regional yang terjadi selama tahun 2012-2016, yang bahkan lebih baik dari produktifitas nasional, merupakan indikator bahwa tenaga kerja di Provinsi Papua dapat diandalkan sebagai salah satu stimulus pertumbuhan ekonomi wilayah. Terlebih lagi dengan adanya *Bonus Demografi* yang akan lebih dirasakan pada tahun 2018 merupakan modal yang potensial untuk meningkatkan produktifitas regional. Dalam hal ini, mengikuti kecenderungan tahun-tahun sebelumnya, maka berdasarkan *trend analysis* produktifitas regional di tahun 2018 diperkirakan akan meningkat menjadi 89.26 juta per tenaga kerja.
- f. Faktor stimulus lainnya adalah terkait dengan ekspektasi lingkungan bisnis. Investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) diperkirakan masih akan tumbuh positif, sejalan dengan ekspektasi kenaikan pertumbuhan kredit, perbaikan kondisi lingkungan investasi dan perekonomian serta dampak dari relaksasi kebijakan pemerintah melalui implementasi paket-paket kebijakan ekonomi di tahun 2018. Kemudian terkait dengan reformasi fiskal, dan penurunan *moral hazard* juga akan menstimulasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua yang diindikasikan dengan (1) kinerja belanja yang semakin baik, (2) penambahan dana dan dengan insentif yang lebih baik bagi pemerintah daerah, (3) strategi penerimaan jangka menengah yang fokus pada keberlanjutan, (4) reformasi struktural yang diarahkan untuk meningkatkan investasi infrastruktur, perbaikan kondisi bisnis, logistik yang lebih baik, perbaikan pendidikan dan pelatihan vokasi, kebijakan pertanahan / reformasi agraria, kebijakan industrialisasi, hilirisasi industri dan industri pariwisata, dan deregulasi peraturan / perijinan di daerah. Di sektor angkutan udara dan komunikasi, ada rencana Kementerian Perhubungan yang akan investasi Rp. 4 triliun untuk membangun Tol Udara di

Provinsi Papua pada tahun 2017, serta dari Kementerian Komunikasi dan Informasi yang akan melaksanakan proyek Palapa Ring Paket Timur bernilai Rp 5,1 triliun yang dijalankan oleh konsorsium PT Palapa Timur Telematika. Semua faktor stimulus ini diperkirakan dapat menciptakan pertumbuhan investasi regional Provinsi Papua pada tahun 2018 sekitar 6.94% - 9.94%.

- g. Terakhir, adanya perkembangan terbaru dari permasalahan antara PT. Freeport Indonesia dengan pemerintah pusat yaitu diberikannya izin untuk mengeksport kembali konsentrat tembaga sebesar 1.113.105 Wet Metric Ton (WMT) hingga bulan Oktober 2017, diperkirakan akan memberi dampak terhadap pertumbuhan ekspor di tahun 2018 sekitar 5.38% - 10.38%.

Dibalik segala tantangan ekonomi global dan domestik yang akan dihadapi di tahun 2018, tetap ada optimisme perbaikan kondisi perekonomian Papua pada tahun tersebut yang di dukung dengan adanya harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait peningkatan daya saing ekonomi yang diharapkan lebih menguat di tahun 2018, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja PMTB menjadi lebih baik. Serta adanya rencana investasi di sektor infrastruktur, angkutan udara, dan komunikasi, kemudian hasil negosiasi antara PT. Freeport Indonesia dengan Pemerintah Indonesia yang akhirnya mengizinkan keluarnya ekspor konsentrat tembaga sampai bulan Oktober 2017. Semua faktor pendukung ini dapat memberi harapan yang optimis bahwa pertumbuhan investasi di tahun 2018 bisa mencapai maksimal sebesar 9,49%. Ini berarti, apabila beranjak pada model pertumbuhan berbasis investasi sebelumnya (model ICOR), maka dapat diprediksi LPE di tahun 2018 sebagai berikut :

$$LPE = k \cdot \frac{1}{COR \cdot ICOR} = 6,55\%$$

dimana COR = 3,77, ICOR = 4,50, dan $k = 1 + 0,0949 = 1,0949$

Akan tetapi, dalam kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Provinsi Papua bukan hanya ditentukan oleh investasi semata.

Sebagaimana yang diformulasikan dalam model ekonomi agregat, yang juga digunakan oleh BPS Papua bahwa pendapatan regional ditentukan oleh 4 indikator makro yaitu konsumsi rumah tangga (C), investasi (I), pengeluaran pemerintah (G), dan net ekspor (X). Untuk itu dalam perkiraan LPE berikut ini juga dimasukkan variabel-variabel pertumbuhan C, G dan X dengan menggunakan model ekonometrik dan berdasarkan data *time series* sepanjang tahun 2011- 2016. Dimana mengikuti hasil pengolahan data regresi linier berganda diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$LPE_t = 0.0371 gC_t + 0.2704 gG_t + 0.4951 gI_t + 0.1315 gX_t$$

Dalam hal ini LPE menunjukkan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang akan diproyeksikan, g adalah pertumbuhan pada masing-masing variabel, dan t tahun proyeksi. Secara statistik model pertumbuhan ini telah teruji tingkat signifikansinya. Jika berdasarkan asumsi-asumsi pertumbuhan sebelumnya, yaitu :(1) pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada tahun 2018 sebesar gC_{2018} : 6,40% - 7,00%, yang telah dijustifikasi dengan tingkat inflasi dan ekspektasi konsumen, (2) pertumbuhan pengeluaran pemerintah sebesar gG_{2018} : 6,40% - 7,00%, yang telah dijustifikasi dengan perkiraan penerimaan daerah, reformasi fiskal dan pengeluaran untuk percepatan persiapan PON XX, (3) pertumbuhan investasi sebesar gI_{2018} : 6.94% - 9.94%, dan pertumbuhan ekspor sebesar gX_{2018} : 5,38% - 7,38%, yang masing-masing telah dikoreksi dan dijustifikasi berdasarkan tantangan global dan domestik, serta harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan swasta, kemudian adanya ekspektasi bisnis yang positif dan peningkatan investasi di sektor pertanian, maka Laju Pertumbuhan Ekonomi pada tahun 2018 atau LPE_{2018} diperkirakan dalam interval :

$$\begin{aligned} LPE_{\min(2018)} &= 0.0371 (0,0640) + 0.2704 (0,0640) + 0.4951 (0,0694) \\ &\quad + 0.1315 (0,0538) \\ &= 0,0611 \\ &= 6,11\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} LPE_{\max(2018)} &= 0.0371 (0,0700) + 0.2704 (0,070) + 0.4951 (0,0994) \\ &\quad + 0.1315 (0,0738) \end{aligned}$$

= 0,0805

= 8,05%

Dengan demikian diproyeksi pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua pada tahun 2018 berkisar antara 6,11% - 8,05%. Angka proyeksi sebesar ini masih berada dalam kisaran pertumbuhan ekonomi untuk Provinsi Papua yang ditargetkan dalam Rancangan Awal RKP 2018 yaitu sebesar 6,81% (Bappenas, 2017). Meskipun angka maksimumnya sebesar 8,05% terlihat lebih optimis dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada Rancangan Awal RKP 2018 tersebut, namun jika belajar dari kecenderungan diantara tahun 2013 sampai dengan 2016 sebelumnya maka angka maksimum tersebut tidak naif untuk dicapai (lihat Gambar 3.1 sebelumnya), selain itu juga mendekati target RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018, yaitu di tahun 2018 ditargetkan sebesar 8%.

Adapun untuk perkiraan indikator ekonomi lainnya, berdasarkan pertimbangan bahwa : (1) pendapatan per kapita meningkat secara proporsional dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi, (2) terdapat peningkatan lapangan kerja, (3) terjadi kenaikan produktifitas di sektor-sektor pertanian, industri, konstruksi, transportasi, dan jasa-jasa lainnya, (4) adanya *highlight* prioritas nasional untuk melaksanakan percepatan pembangunan Papua yang akan berdampak terhadap perbaikan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat, dan terakhir (5) dengan tetap memperhatikan target RPJMD 2013-2018 serta Rancangan Awal RKP 2018, maka secara keseluruhan dapat diurai target-target pembangunan ekonomi Provinsi Papua di tahun 2018 selengkapanya sebagai berikut.

Tabel 3.8
Target Pembangunan Ekonomi Provinsi Papua Tahun 2018

Indikator Kinerja	Satuan	Nilai
1. Pertumbuhan PDRB	%	6,11 -8,05
2. Laju Inflasi	%	2,50- 4,00
3. PDRB per kapita	juta rp	27,50- 50,11
4. Gini Rasio	indeks	0,32- 0.38

Indikator Kinerja	Satuan	Nilai
5. Rasio penduduk yang Bekerja	%	0,93 - 0,96
6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	75,10 -77,25
7. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,60 -4,38

Sumber : RPJMD 2013-2018; Ranwal RKP 2018; dan proyeksi 2018.

3.1.3. Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2018

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi sebagaimana yang diproyeksikan di atas, maka arah kebijakan pembangunan ekonomi di tahun 2018 adalah sebagai berikut.

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Reformasi prosedur peijinan investasi;
 - b. Mengembangkan kualitas dan kuantitas informasi peluang investasi daerah, Membangun sarana dan prasarana investasi, dan
 - c. Menyiapkan dokumen pendukung penyusunan regulasi.
2. Tercapainya stabilitas makro ekonomi, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa;
 - b. Pengembangan informasi peluang pasar perdagangan luar negeri;
 - c. Pengendalian laju inflasi.
3. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Fasilitasi kemudahan formalisasi Badan Usaha Kecil dan Menengah, Pengembangan jaringan infrastruktur usaha kecil menengah;
 - b. Fasilitasi pengamanan kawasan usaha kecil menengah;
 - c. Fasilitasi pengembangan inkubator teknologi dan bisnis;
 - d. Peningkatan kemitraan usaha bagi usaha mikro kecil menengah;
 - e. Pengembangan sarana promosi hasil produksi;
 - f. Pembinaan industri rumah tangga, industri kecil dan industri menengah;

- g. Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi, Penyediaan lembaga keuangan mikro di tingkat Distrik/ Kampung.
4. Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
- a. Pengembangan industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber daya;
 - b. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri;
 - c. Kemudahan ijin usaha industri kecil dan menengah;
 - d. Pemberian akses perbankan bagi industri kecil dan menengah;
 - e. Mendorong kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan pihak swasta;
 - f. Menyusun kebijakan keterkaitan industri hulu dan hilir;
 - g. Pembangunan akses transportasi sentra-sentra industri potensial, dan Penyediaan sarana prasarana klaster industri.
 - h. Meningkatnya kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendapatan daerah.
5. Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
- a. Penyiapan tenaga kerja siap pakai;
 - b. Penyediaan peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan.
6. Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
- a. Promosi dan pemasaran obyek pariwisata;
 - b. Pengembangan jaringan kerjasama promosi pariwisata;
 - c. Promosi pariwisata dalam dan luar negeri;
 - d. Pengembangan obyek pariwisata unggulan;
 - e. Pembangunan saran dan prasarana pariwisata, dan pengembangan jenis dan paket wisata.

7. Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Optimalisasi lahan produksi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan;
 - b. Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah;
 - c. Mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat;
 - d. Meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal, meningkatkan kapasitas kelembagaan petani;
 - e. Penyediaan tenaga penyuluh/pendamping ditingkat masyarakat;
 - f. Penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - g. Implementasi Prospek di seluruh Kabupaten/Kota se Papua.
8. Meningkatnya pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan;
 - b. Pengembangan usaha pemanfaatan kayu masyarakat hukum adat;
 - c. Pengembangan industri kayu masyarakat hukum adat, Pengembangan usaha pengolahan hasil hutan bukan kayu;
 - d. Pengembangan usaha wisata alam masyarakat adat;
 - e. Pemetaan partisipatif masyarakat adat pemilik hak ulayat;
 - f. Pengembangan sertifikasi usaha pemanfaatan industri kayu rakyat masyarakat adat dan
 - g. Mengembangkan kesatuan pengelolaan hutan (KPH) untuk perbaikan tata kelola kehutanan.
9. Meningkatnya konektivitas antar wilayah, melalui kebijakan yang diarahkan pada :
 - a. Perencanaan teknis jalan dan jembatan;
 - b. Pengawasan teknis jalan dan jembatan, pembangunan jalan dan jembatan yang tersebar di 5 wilayah adat;
 - c. Pembangunan jaringan air bersih tersebar di 5 wilayah adat; pembangunan pengaman pantai;
 - d. Pembangunan bandara dan pelabuhan yang tersebar di 5 wilayah adat;

- e. Pembangunan terminal Type B, sarana Angkutan, fasilitas transportasi darat yang tersebar di Seluruh Wilayah Papua:
 - f. Pembangunan jaringan telekomunikasi tersebar di 5 wilayah adat.
10. Meningkatnya pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik, melalui kebijakan yang diarahkan pada:
- a. Pembangunan dan pengembangan rumah layak huni tersebar di lima wilayah adat;
 - b. Pembangunan dan pengembangan air bersih, kelistrikan dan telekomunikasi tersebar di lima wilayah adat, pembangunan PLTA Urumuka, pembangunan PLTA Mamberamo, pembangunan energi baru terbarukan, pembangunan PLTA Supiori.

3.2. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan profesional.

Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan), dana kemitraan, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan serta bina lingkungan di Provinsi Papua yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

Kebijakan keuangan Provinsi Papua Tahun 2018 disusun tetap dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018 yang merupakan tahun terakhir, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan Provinsi Papua.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

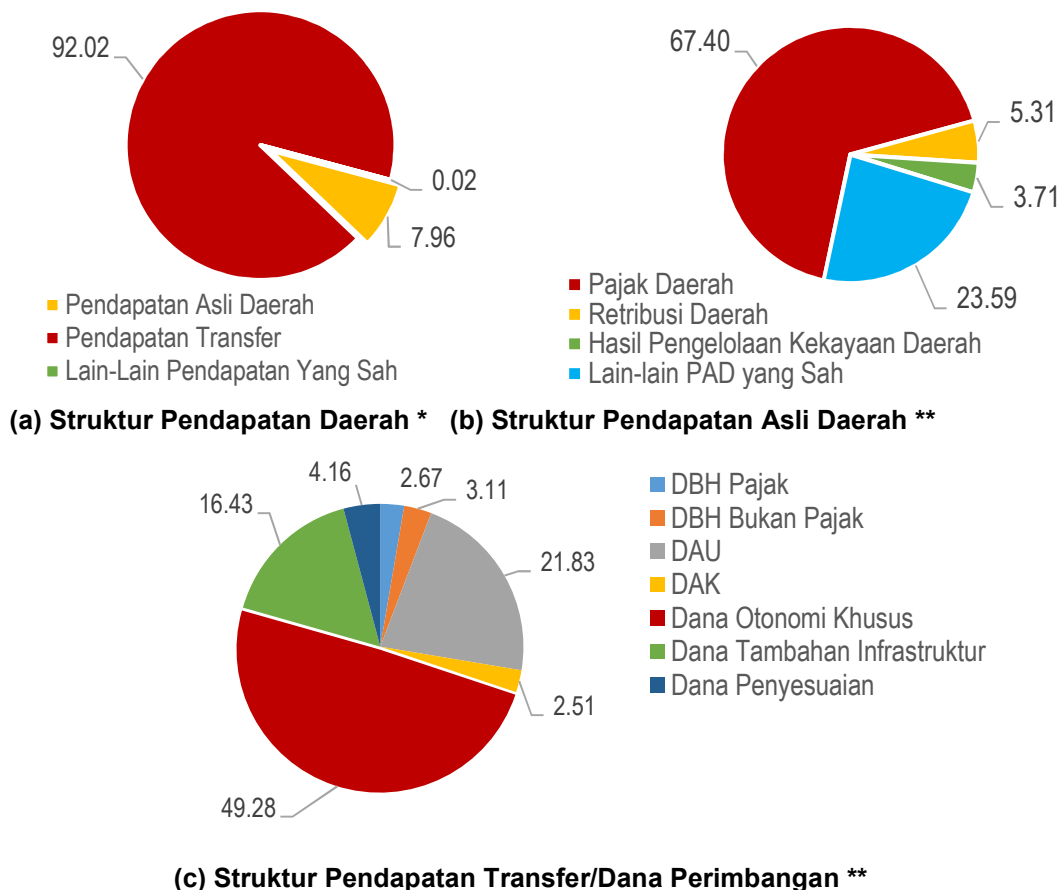
Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, (2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK, Dana Bagi Hasil, dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yang meliputi hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari pemerintah daerah lainnya, dana penyesuaian dan dana otonomi khusus, dana bantuan keuangan dari provinsi/kabupaten/kota lainnya, lain-lain penerimaan, dana transfer pusat dan dana insentif daerah. Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SiLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perhatikan Tabel 3.9.

Tabel 3.11.
Anggaran Dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013 - 2016
(dalam Rp.)

URAIAN	2013		2014		2015		2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN DAERAH	8.298.239.247.000	8.397.138.332.245	10.802.461.214.000	10.709.818.949.527	11.987.595.808.455	11.805.767.353.119	13.065.980.097.715	12.518.967.152.943
Pendapatan Asli Daerah	512.034.309.000	633.726.316.291	927.253.691.000	944.929.691.841	882.299.190.455	912.908.312.259	1.161.421.531.600	970.778.660.407
Pendapatan Pajak Daerah	413.930.000.000	453.677.291.141	992.820.377.000	966.062.614.674	659.441.989.000	633.391.996.120	879.023.910.992	666.992.321.240
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	129.400.000.000	152.700.510.202	155.799.995.000	155.643.543.868	178.299.996.000	170.983.705.271	179.260.000.000	179.130.751.751
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BENKB)	168.000.000.000	178.536.448.497	175.000.000.000	166.049.860.455	195.099.995.000	151.680.086.700	153.750.000.000	162.501.031.675
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	115.000.000.000	120.697.475.312	137.921.829.000	144.321.731.196	151.699.998.000	160.642.187.861	164.000.000.000	127.362.054.754
Pajak Air Permukaan	1.550.000.000	1.742.857.130	1.756.553.000	2.199.222.516	2.000.000.000	2.314.934.370	141.350.366.014	982.165.357
Pajak Rokok	-	-	122.342.000.000	97.848.256.639	132.342.000.000	147.771.082.118	240.663.544.978	197.016.317.703
Pendapatan Retribusi Daerah	17.639.200.000	24.524.171.734	53.864.937.000	57.091.738.976	59.670.440.000	49.085.468.698	83.188.222.780	57.649.876.374
Retribusi Pelayanan Kesehatan	-	20.392.360.934	50.714.398.000	387.138.000	55.519.000.000	44.840.615.133	78.328.374.100	53.352.724.393
Retribusi Jasa Umum	14.564.075.000	402.584.200	2.967.611.000	4.123.201.265	3.760.940.000	3.681.424.645	3.586.937.380	2.847.390.791
Retribusi Jasa Usaha	2.975.125.000	3.573.806.600	182.928.000	115.260.000	390.500.000	562.928.920	1.175.484.800	1.258.102.690
Retribusi Perizinan Tertentu	100.000.000	155.420.000	-	52.466.139.711	-	500.000	97.426.500	191.658.500
Pendapatan Hsl Pengln Kekayaan Drh yang Dipisahkan	25.492.803.000	25.792.803.380	32.916.934.000	32.942.178.218	15.898.578.172	15.932.454.293	52.810.182.602	53.798.803.378
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMD	25.492.803.000	25.792.803.380	32.916.934.000	32.916.935.678	15.898.578.172	15.923.678.172	52.810.182.602	52.810.182.602
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-	-	25.242.540	-	8.876.121	-	948.620.776
Lain-lain PAD yang Sah	54.952.306.000	129.732.050.036	247.651.443.000	288.833.159.973	147.288.183.283	214.498.393.148	146.399.215.226	192.377.659.415
Penerimaan Jasa Giro	16.867.958.000	26.476.204.756	16.867.958.000	15.200.824.111	7.319.344.464	13.829.703.744	16.508.603.861	17.900.130.046
Pendapatan Bunga	-	32.121.405.874	35.000.000.000	125.492.647.948	75.000.000.000	104.398.666.948	88.462.235.046	68.903.930.951
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.576.256.000	12.538.701.186	45.772.663.000	16.732.811.643	13.857.980.319	21.606.013.271	7.513.806.707	19.689.465.221
Pendapt Denda atas Keterlamban Pelaksn Pekerjaan	25.000.000	2.084.416.250	-	811.912.474	-	110.194.516	383.495.286	2.500.910.014
Pendapatan Denda Pajak	-	-	-	-	13.155.182.900	17.912.557.835	15.600.000.000	22.709.796.537
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	1.276.582.000	175.000.000	175.000.000	12.172.500.126	12.172.500.126
Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-	85.403.000	4.872.186.358	-	953.442.305

Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya : kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara nasional, kebijakan fiskal nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM, eksptasi bisnis dan konsumen, potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Gambar 3.11.
Struktur Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Rata-Rata Selama Tahun 2013-2016
(dalam %)



Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2016 (data diolah)

Keterangan :

* Dirasiokan dengan total pendapatan daerah

** Dirasiokan dengan masing-masing total komponen pendapatan daerah

Apabila memperhatikan perkembangan historis data pendapatan daerah selama periode 2013-2016 cenderung setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan rata-rata pertumbuhannya sekitar 14,61% per tahun. Dimana yang paling tinggi pertumbuhannya secara normal selama ini adalah Pendapatan Asli Daerah yaitu rata-rata 17,35% per tahun untuk periode yang sama. Sementara itu komposisi pendapatan daerah Provinsi Papua masih dominan pada pendapatan transfer. Seperti yang disajikan dalam Gambar 3.12 rata-rata kontribusi pendapatan transfer bisa mencapai 92,02% per tahun, yang cenderung stabil tanpa fluktuasi yang berarti selama tahun 2013 - 2016.

Adapun pendapatan yang berasal dari daerah sendiri yaitu PAD, rata-rata memberi kontribusi 7,96% per tahun yang dimotori oleh pajak daerah terutama dari komponen pajak yang terkait dengan kepemilikan kendaraan bermotor yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

Meskipun kontribusinya masih jauh dibawah pendapatan transfer, akan tetapi kinerja pencapaian PAD terlihat lebih baik dalam komposisi pendapatan daerah Provinsi Papua. Dapat dikatakan setiap tahunnya rasio pencapaian target PAD selalu diatas 100%, dengan rata-ratanya sekitar 103,18% per tahun. Sehingga perkembangan PAD di Provinsi Papua selama ini cenderung lebih efektif dibandingkan komponen pendapatan daerah lainnya. Perhatikan Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel. 3.10.
Kinerja Pencapaian Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013-2016
(dalam %)

Uraian	2013	2014	2015	2016	Rata ²
PENDAPATAN DAERAH	101.19	99.14	98.48	95.81	98.66
Pendapatan Asli Daerah	123.77	101.91	103.47	83.59	103.18
Pajak Daerah	109.60	95.49	96.05	75.88	94.25
Retribusi Daerah	139.03	105.99	82.26	69.30	99.15
Hasil Pengln Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	101.18	100.08	100.21	101.80	100.82
Lain-lain PAD yang Sah	236.08	116.63	145.63	131.41	157.44
Pendapatan Transfer	99.89	98.88	98.09	97.02	98.47
Dana Bagi Hasil Pajak	98.14	77.86	68.35	89.11	83.37
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/SDA	105.83	87.84	74.52	79.84	87.01
Dana Alokasi Umum (DAU)	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	100.00	100.00	100.00	62.46	90.61
Dana Otonomi Khusus	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Dana Tambahan Infrastruktur	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	7.01	-	111.96	70.84	63.27

Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2016 (data diolah)

Keterangan : * Kinerja Pencapaian merupakan rasio antara realisasi dengan target

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan adanya pengalihan beberapa kewenangan kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi, dari provinsi ke kabupaten/kota, dari provinsi ke pusat, dan sebaliknya, menyebabkan terjadinya peningkatan yang cukup signifikan dalam komponen Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan. Hal ini disebabkan adanya perubahan peralihan pada beberapa urusan pembangunan ke pemerintahan daerah.

Urusan yang mengalami perubahan antara lain Urusan Pendidikan terkait dengan Pengelolaan Pendidikan Menengah dan Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Dan Muatan Lokal Pendidikan Khusus sehingga Dana Alokasi Khusus (DAK) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dikarenakan pada DAK terdapat penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Tunjangan Profesi

Guru, dana tersebut berasal dari pusat ditempatkan pada posting DAK non Fisik. Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), mengacu kepada peningkatan asumsi efektivitas KBM yang melakukan pembayaran PKB, sehingga diestimasi pada akhir tahun akan terealisasi cukup signifikan. Dengan tetap mengandalkan PKB sebagai sumber utama penerimaan daerah, maka setiap daerah harus segera melakukan upaya-upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap penerimaan dari pajak daerah yang bersifat terbatas (*limitative*).

Berdasarkan berbagai kondisi faktual perekonomian wilayah Papua dan dinamika urusan pembangunan, serta asumsi-asumsidi atas, maka target pendapatan daerah Provinsi Papua pada kurun waktu Tahun 2017, serta proyeksi pendapatan di Tahun 2018, disajikan pada Tabel 3.11 berikut ini.

Tabel. 3.11.
Target Dan Proyeksi Pendapatan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2017 - 2018
(dalam Rp.)

Uraian	Target 2017 (APBD 2017)	Proyeksi 2018 *
PENDAPATAN DAERAH	13.573.876.703.796	14.031.727.123.000
PENDAPATAN ASLI DAERAH	1.308.280.585.796	1.093.237.350.000
Pendapatan Pajak Daerah	1.030.423.565.000	786.605.378.000
Hasil Retribusi Daerah	82.930.263.480	100.747.841.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.810.182.602	30.128.063.000
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yg Sah	142.116.574.714	175.756.068.000
DANA PERIMBANGAN	4.019.279.187.000	4.692.172.842.000
Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	606.163.244.000	1.119.741.269.000
Dana Alokasi Umum	2.570.118.273.000	2.570.118.273.000
Dana Alokasi Khusus	842.997.670.000	1.002.313.300.000
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	8.246.316.931.000	8.246.316.931.000
Pendapatan Hibah	5.500.000.000	5.500.000.000
Dana Penyesuaian / Dana BOS	-	-
Dana Otonomi Khusus	5.615.816.931.000	5.615.816.931.000
Dana Tambahan Infrastruktur	2.625.000.000.000	2.625.000.000.000
Dana Insentif Daerah	-	-

Sumber : BPKAD Provinsi Papua dan BAPPENDA Provinsi Papua

Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin luasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka secara bertahap daerah dituntut untuk mengupayakan kemandirian pendapatannya dengan mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang dimilikinya. Dalam konteks pengelolaan pendapatan daerah di Provinsi Papua, proporsi sumber pendapatan utama daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), masih diproyeksikan dengan proporsi rata-rata masih dibawah 10% dari total pendapatan daerah, maka perlu adanya strategi-strategi dalam rangka peningkatan PAD di waktu yang akan datang. Disamping itu, sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain bagian laba Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Lain-Lain Pendapatan yang sah, Dana Perimbangan Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil bukan Pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, proporsi DAU dan Dana Otsus secara bertahap dapat mulai digantikan oleh sumber-sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah berdasarkan penjabaran kondisi keuangan serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi perekonomian daerah.

Dana yang berasal dari DAU perlu dikelola dengan sebaik-baiknya, meskipun relatif sulit untuk memperkirakan jumlah realisasinya karena bergantung pada pemerintah pusat. Sumber dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) juga dapat diupayakan peningkatannya melalui penyusunan program-program unggulan yang dapat diajukan untuk dibiayai dengan DAK. Bagi hasil pajak provinsi dan pusat dapat diupayakan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendapatan bagi hasil sangat terkait dengan aktivitas perekonomian daerah. Dengan demikian semakin meningkatnya aktivitas ekonomi akan berkorelasi dengan naiknya pendapatan yang berasal dari bagi hasil, oleh karena itu Pemerintah Daerah harus mendorong peningkatan aktivitas perekonomian.

Berdasarkan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut, dalam merealisasikan perkiraan rencana pendapatan daerah (target dan proyeksi), sesuai dengan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018 diperlukan strategi pencapaiannya sebagai berikut.

1. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, ditempuh melalui:

- a. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan serta penyederhanaan sistem prosedur pelayanan;
 - b. Pelaksanaan pemungutan atas obyek pajak/retribusi baru dan pengembangan sistem operasi penagihan atas potensi pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
 - c. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
 - d. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak.
 - e. Penyebarluasan informasi di bidang pendapatan daerah dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat;
 - f. Revitalisasi BUMD melalui berbagai upaya antar lain : pengelolaan BUMD secara profesional, peningkatan sarana, prasarana, kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah, serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas, agar BUMD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari perbankan;
 - g. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan pendapatan asli daerah;
 - h. melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan pada tataran kebijakan, dengan POLRI dan kabupaten/kota termasuk dengan daerah perbatasan, dalam operasional pemungutan dan pelayanan Pendapatan Daerah, serta mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan OPD penghasil.
2. Strategi pencapaian target dana perimbangan, dilakukan melalui:
- a. Sosialisasi secara terus menerus mengenai pungutan pajak penghasilan dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
 - b. Peningkatan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Pajak sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.

- c. Peningkatan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan lifting migas dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi;
 - d. Peningkatan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, Badan Anggaran DPR RI dan DPD RI untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Perimbangan (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).
3. Sedangkan Lain-lain Pendapatan yang sah, strategi yang ditempuh melalui :
- a. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.
 - b. Inisiasi dan pengenalan sumber pendapatan dari masyarakat.

3.2.2.Arah Kebijakan Belanja Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sedangkan menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, belanja daerah dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). BTL yaitu belanja yang tidak memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Sedangkan BL merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang meliputi: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun 2018 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap OPD dalam pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya. Pada Tahun 2017 pemerintah telah merubah prinsip dari yang menggunakan prinsip *money follow function*, karena manfaatnya tidak jelas, diubah menjadi *money follow programme*, artinya program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritaslah yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan tahun 2018.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (*fixed cost*), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah walaupun pendapatan daerah Provinsi Papua dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada kemampuan riil keuangan daerah yang cenderung semakin menurun. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah), ruang fiskal daerah Provinsi Papua menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Terlihat dalam Tabel 3.12 realisasi belanja daerah selama tahun 2013 - 2016 meningkat cepat dengan rata-rata 17,95% per tahun. Dimana komponen belanja yang memberi kontribusi besar terhadap pertumbuhan belanja daerah selama ini adalah belanja modal yang tumbuh sekitar 31,64% per tahun. Adapun belanja operasi yang mencakup antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, subsidi dan bantuan sosial, rata-rata mengalami pertumbuhan sebesar 13,51% per tahun.

Struktur belanja daerah di Provinsi Papua masih dominan pada belanja operasi, kurang lebih proporsinya 66,42% dari total belanja. Sementara proporsi belanja modal sebesar 33,43%, dan hanya 0,14% untuk belanja tak terduga. Porsi belanja terbesar pada belanja operasi adalah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan barang dan jasa yaitu sekitar 54,43% per tahun. Setelah itu untuk pengeluaran belanja pegawai dan hibah, masing-masing sebanyak 22,41% dan 20,07% per tahun.

Tabel 3.12.
Anggaran Dan Realisasi Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013 - 2016
(dalam Rp.)

URAIAN	2013		2014		2015		2016	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
BELANJA DAERAH	5.343.048.524.000	4.590.110.853.092	6.626.989.749.166	5.460.756.791.566	8.127.791.894.922	7.275.918.304.885	8.447.130.395.141	7.396.201.733.457
Belanja Operasi	3.787.491.818.000	3.356.809.228.739	4.327.147.511.296	3.759.858.653.953	4.936.059.343.400	4.399.478.873.552	5.503.586.860.608	4.905.818.907.312
Belanja Pegawai	928.838.763.000	833.439.639.685	1.116.921.744.360	940.659.446.469	1.006.628.803.230	919.022.324.033	1.082.738.604.122	986.866.116.876
Belanja Barang dan Jasa	1.888.047.062.000	1.694.118.383.186	2.189.513.649.315	1.998.521.177.884	2.944.379.263.498	2.550.797.479.555	3.099.442.058.884	2.695.574.435.336
Bunga	-	-	-	-	-	-	-	-
Subsidi	-	-	-	-	-	-	-	-
Hibah	685.960.406.000	651.084.026.068	863.484.845.706	732.224.237.800	885.016.965.650	835.350.289.000	1.167.661.004.476	1.077.606.950.000
Bantuan Sosial	274.645.567.000	178.167.169.800	157.227.271.915	88.453.791.800	100.034.311.022	94.308.780.964	153.745.193.126	145.771.405.100
Belanja Modal	1.525.556.706.000	1.220.744.851.353	2.270.137.537.870	1.689.302.792.613	3.168.732.551.522	2.865.461.762.743	2.938.027.534.533	2.490.333.441.810
Belanja Tanah	45.547.679.000	28.541.350.000	15.586.030.000	12.328.862.000	91.706.775.000	36.806.344.040	93.536.850.000	39.463.965.000
Belanja Peralatan dan Mesin	236.183.322.600	184.842.082.253	190.780.555.530	169.940.282.777	251.646.089.392	205.623.332.233	214.290.432.949	169.078.497.741
Belanja Gedung dan Bangunan	354.975.023.900	259.193.175.450	348.233.149.650	237.638.944.963	620.224.844.780	515.826.977.655	641.028.289.670	551.902.440.949
Belanja Jalan, Irigasi dan Janingan	847.665.019.500	718.444.194.015	1.639.198.550.000	1.208.493.483.673	2.192.090.100.350	2.094.585.903.985	1.987.304.026.914	1.728.269.145.480
Belanja Aset Tetap Lainnya	41.185.661.000	29.724.049.635	76.379.252.690	60.901.219.200	13.064.742.000	12.619.204.830	1.867.925.000	1.619.392.640
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-
Belanja Tak Terduga	30.000.000.000	12.556.773.000	29.704.700.000	11.595.345.000	23.000.000.000	10.977.668.590	5.516.000.000	49.384.335
TRANSFER	3.598.388.723.000	3.581.241.495.385	4.893.674.328.834	4.843.030.054.615	5.140.668.461.782	5.120.528.931.379	5.154.034.367.678	4.572.213.885.371
Transfer/Bagi Hasil Pendpt Ke Kab/Kota	233.162.194.000	232.800.664.735	280.831.451.934	280.781.136.077	297.467.196.982	290.677.196.982	362.829.186.142	313.261.779.818
Transfer Bantuan Keuangan	3.365.226.529.000	3.348.440.830.650	4.612.842.876.900	4.562.248.918.738	4.843.201.264.800	4.829.851.734.397	4.791.205.181.536	4.258.952.105.553
BELANJA DAN TRANSFER	8.941.437.247.000	8.171.352.348.477	11.520.664.078.000	10.303.786.846.381	13.268.460.356.704	12.396.447.236.264	13.601.164.762.819	11.968.415.618.828

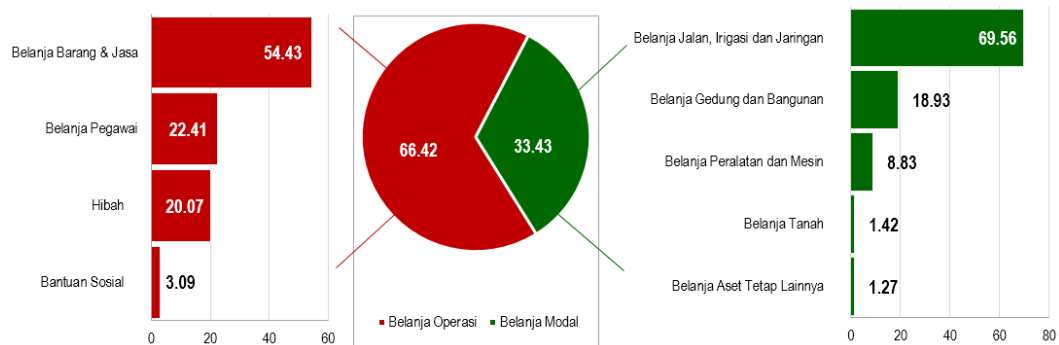
Sumber : LKPJ 2013-2016 (Bappeda Papua)

Keterangan :

1. Data Anggaran bersumber dari Perda APBD
2. Data Realisasi bersumber dari realisasi *unaudited*

Adapun di belanja modal, yang terbesar porsinya adalah untuk belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringannya yang bisa mencapai 69,59% per tahun. Selengkapnya hal ini dapat lihat pada Gambar 3.12.

Gambar 3.12.
Struktur Belanja Daerah Provinsi Papua
Rata-Rata Selama Tahun 2013-2016
(dalam %)



Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2016 (data diolah)

Keterangan :

- * Porsi belanja operasi dan modal dirasiokan dengan total belanja daerah
- ** Struktur belanja operasi dirasiokan dengan total belanja operasi
- *** Struktur belanja modal dirasiokan dengan total belanja modal

Daya serap belanja di Provinsi Papua meskipun masih di bawah 100% akan tetapi cenderung mengalami kenaikan yang cukup signifikan diantara tahun 2013 - 2016, terutama di tahun 2015 sempat meningkat tajam hingga mencapai 89,52%. Rata-rata daya serap belanja daerah di Provinsi Papua selama periode tersebut adalah 86,35% per tahun, dimana yang paling tinggi adalah daya serap pada belanja transfer yakni 96,70% per tahun.

Tabel. 3.13.
Daya Serap Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun 2013-2016
(dalam %)

Uraian	2013	2014	2015	2016	Rata ²
BELANJA DAERAH	85.91	82.40	89.52	87.56	86.35
Belanja Operasi	88.63	86.89	89.13	89.14	88.45
Belanja Pegawai	89.73	84.22	91.30	91.15	89.10
Belanja Barang dan Jasa	89.26	91.28	86.63	86.97	88.53
Hibah	94.92	84.80	94.39	92.29	91.60
Bantuan Sosial	64.87	56.26	94.28	94.81	77.56
Belanja Modal	80.02	74.41	90.43	84.76	82.41
Belanja Tanah	62.66	79.10	40.13	42.19	56.02
Belanja Peralatan dan Mesin	78.26	89.08	81.71	78.90	81.99
Belanja Gedung dan Bangunan	73.02	68.24	83.17	86.10	77.63
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	84.76	73.73	95.55	86.97	85.25
Belanja Aset Tetap Lainnya	72.17	79.74	96.59	86.69	83.80
Belanja Tak Terduga	41.86	39.04	47.73	0.90	32.38
TRANSFER	99.52	98.97	99.61	88.71	96.70
Transfer/Bagi Hasil Pendapatan Ke Kabupaten/Kota	99.84	99.98	97.72	86.34	95.97
Transfer Bantuan Keuangan	99.50	98.90	99.72	88.89	96.75
BELANJA DAN TRANSFER	91.39	89.44	93.43	88.00	90.56

Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2016 (data diolah)

Daya serap belanja untuk tanah terlihat paling rendah dalam komposisi belanja modal, hanya sekitar 56,02% per tahun. Polemik yang terjadi dalam sengketa tanah seringkali menyebabkan keterlambatan dalam penyerapan belanja modal untuk tanah, sehingga daya serapnya sangat rendah. Salah satu faktor dominan yang menyebabkan kondisi ini bisa terjadi adalah minimnya kepemilikan sertifikat tanah pada masyarakat, baik itu personal maupun kelompok (tanah adat). Hal ini sudah menjadi perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Papua selama ini. Namun karena belum optimalnya program-program sertifikasi tanah yang dijalankan mengakibatkan permasalahan ini masih berlarut-larut hingga saat ini.

Rendahnya daya serap belanja daerah, karena masih jauh di bawah 100%, mengindikasikan dua hal penting. **Pertama**, produktivitas anggaran sangat rendah. Anggaran yang tidak terserap seluruhnya selama satu tahun anggaran, mengindikasikan SKPD kurang produktif dalam mengelola dana belanjanya, padahal dalam penyusunan APBD didasarkan atas kinerja, maknanya harus ada korelasi antara belanja atau pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan. Sehingga, jika daya serap anggarannya rendah, otomatis kinerja SKPD juga rendah. **Kedua**, pengelolaan anggaran tidak efisien dan efektif. Dalam konteks penganggaran, efisien dan efektif itu berkaitan dengan penghematan dana (input) yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, seyogyanya bisa menghasilkan output yang tinggi. Namun, daya serap belanja yang rendah menjadi paradoks karena dampaknya justru bisa memperlambat laju pertumbuhan ekonomi daerah, bahkan nasional.

Berdasarkan fakta kecenderungan daya serap belanja selama ini, serta pertumbuhan belanja daerah dari tahun ke tahun relatif meningkat, selanjutnya pada tahun 2017 diperkirakan belanja tidak langsung mengalami kenaikan dikarenakan pada tahun tersebut ada kenaikan pada Belanja Pegawai sebagai konsekuensi dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu beralihnya gaji dan tunjangan tenaga kependidikan SMA/SMK seiring dengan beralihnya pengelolaan sekolah menengah dari urusan Kabupaten/Kota menjadi urusan Provinsi, sehingga besaran belanja pegawai mengalami kenaikan yang cukup signifikan, maka dari hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah, serta realisasi dan proyeksi pendapatan daerah 2 (dua) tahun kedepan, arah kebijakan belanja daerah pada Tahun 2018 disajikan dalam Tabel 3.14 di bawah ini.

Tabel. 3.14.
Target Dan Proyeksi Belanja Daerah Provinsi Papua
Tahun 2017 - 2018
(dalam Rp.)

Uraian	Target 2017 (APBD 2017)	Proyeksi 2018
BELANJA	15.083.876.703.796	14.031.727.123.000
BELANJA TIDAK LANGSUNG	8.072.068.175.855	5.836.842.173.000
Belanja Pegawai	1.358.388.729.440	1.007.128.734.000
Belanja Hibah	1.089.144.837.924	186.990.654.000
Belanja Subsidi	40.000.000.000	-
Belanja Bantuan Sosial	91.509.700.000	110.112.948.000
Belanja Bagi Hasil pajak daerah kepada Kab/Kota	383.667.481.485	214.959.522.000
Belanja Bantuan Keuangan kepada Kab/Kota, Pemerintah Kampung & Parpol	5.094.357.427.006	4.308.979.499.000
Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000	8.670.816.000
BELANJA LANGSUNG	7.011.808.527.941	8.194.884.950.000
Belanja Pegawai	278.960.841.876	266.369.457.000
Belanja Barang dan Jasa	3.202.630.586.130	4.044.043.363.000
Belanja Modal	3.530.217.099.935	3.884.472.130.000

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (data diolah)

Sementara itu, untuk belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus akan dikelola dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, melalui pembagian 20% untuk pemerintah provinsi dan 80% untuk pemerintah kabupaten/kota, setelah dari total penerimaan dana Otonomi Khusus tersebut dikeluarkan untuk pembiayaan urusan bersama yang selama periode tahun 2013-2016 terdiri atas pembiayaan untuk kebijakan-kebijakan afirmatif yang strategis bagi Orang Asli Papua meliputi Prospek, KPS (Kartu Papua Sehat), Gerbangmas Hasrat Papua, Perumahan Rakyat dan Pendidikan.

Berdasarkan target penerimaan dana otsus tahun 2017, dan proyeksi di tahun 2018 (lihat Tabel 3.14 sebelumnya), serta merujuk kepada pembagian dana Otonomi Khusus untuk kabupaten/kota yang telah dilakukan selama ini, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. maka alokasi belanja yang bersumber dari dana Otonomi Khusus untuk pembiayaan urusan bersama dan kabupaten/kota di Provinsi Papua pada tahun 2018 dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel. 3.15.
Proyeksi Belanja Daerah Yang Bersumber Dari Dana Otonomi Khusus
Provinsi Papua Tahun 2018
(dalam Rp.)

Uraian	Target 2017 (APBD 2017)	Proyeksi 2018
A. Dana Otsus	5.615.816.931.000	5.615.816.931.000
1. Prospek	588.741.156.000	565.596.975.000
2. KPS	312.275.975.000	312.275.975.000
3. Gerbangmas	260.229.979.000	250.000.000.000
4. Perumahan Rakyat	104.091.992.000	100.000.000.000
5. Pendidikan	330.993.068.000	350.000.000.000
B. Urusan Bersama (Total A1 s/d A5)	1.596.332.170.000	1.577.872.950.000
C. Bagian Yang Di Bagi Provinsi (A - B)	4.019.484.761.000	4.037.943.981.000
1. Porsi Provinsi (20%)	803.896.952.200	807.588.796.200
2. Porsi Kab/Kota (80%)	3.215.587.808.800	3.230.355.184.800

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (data diolah)

Mengacu kepada target dan proyeksi pengelolaan belanja yang bersumber pada dana Otonomi Khusus di atas, serta kebutuhan belanja dalam rangka mengimplementasi amanat Perdasus Nomor Provinsi Papua, berikut ini disampaikan target dan proyeksi alokasi belanja dana Otonomi Khusus pada setiap kabupaten/kota sebagai berikut.

Tabel. 3.16.
Proyeksi Alokasi Dana Otonomi Khusus Untuk Kabupaten/Kota
Di Provinsi Papua Tahun 2018
(dalam Rp.)

Kabupaten/Kota	Target APBD	Proyeksi
	2017	2018
Total Dana Otsus Ke Kabupaten/Kota	3.215.587.808.000	3.230.355.184.000
Kabupaten Jayapura	107.822.619.000	108.317.787.000
Kabupaten Kep. Yapen	98.529.841.000	98.982.333.000
Kabupaten Biak Numfor	104.200.448.000	104.678.982.000
Kabupaten Nabire	105.121.771.000	105.604.536.000
Kabupaten Merauke	106.708.315.000	107.198.366.000
Kabupaten Jayawijaya	121.829.375.000	122.388.868.000
Kabupaten Paniai	120.288.448.000	120.840.865.000
Kabupaten Puncak Jaya	133.820.407.000	134.434.968.000
Kabupaten Mimika	105.087.314.000	105.569.921.000
Kota Jayapura	99.465.156.000	99.921.943.000
Kabupaten Asmat	110.010.815.000	110.516.032.000

Kabupaten/Kota	Target APBD	Proyeksi
	2017	2018
Kabupaten Boven Digoel	104.567.218.000	105.047.436.000
Kabupaten Mappi	108.350.697.000	108.848.290.000
Kabupaten Sarmi	102.923.955.000	103.396.627.000
Kabupaten Keerom	98.783.253.000	99.236.909.000
Kabupaten Tolikara	126.101.253.000	126.680.365.000
Kabupaten Pegunungan Bintang	119.161.731.000	119.708.973.000
Kabupaten Yahukimo	115.224.103.000	115.753.262.000
Kabupaten Waropen	104.933.691.000	105.415.592.000
Kabupaten Supiori	90.053.567.000	90.467.132.000
Kabupaten Mamberamo Raya	104.720.598.000	105.201.521.000
Kabupaten Nduga	110.952.829.000	111.462.373.000
Kabupaten Lanny Jaya	131.910.737.000	132.516.528.000
Kabupaten Mamberamo Tengah	112.183.359.000	112.698.554.000
Kabupaten Yalimo	110.694.289.000	111.202.645.000
Kabupaten Puncak	125.022.530.000	125.596.688.000
Kabupaten Dogiyai	113.605.640.000	114.127.366.000
Kabupaten Intan Jaya	115.012.840.000	115.541.029.000
Kabupaten Deiyai	108.501.009.000	108.999.293.000

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (data diolah)

Belanja daerah diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan ditambah satu tahun transisi. Untuk itu kebijakan belanja daerah Tahun 2018 secara umum diupayakan dengan pengaturan pola dan prinsip-prinsip yaitu :

1. Efisiensi dan efektivitas anggaran. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat meningkatkan pelayanan pada masyarakat yang pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan masyarakat dapat diwujudkan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur daerah, terutama yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat;
2. Prioritas. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan-kegiatan penyediaan infrastruktur dan peningkatan pendapatan masyarakat serta penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;

3. Tolok ukur dan target kinerja. Belanja daerah pada setiap kegiatan harus disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Optimalisasi belanja langsung. Belanja langsung diupayakan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif. Belanja langsung disusun atas dasar kebutuhan nyata masyarakat, sesuai strategi pembangunan untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
5. Transparan dan akuntabel. Setiap pengeluaran belanja, dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melalui publikasi masyarakat sehingga mudah dan tidak mendapatkan hambatan dalam mengakses informasi belanja. Pertanggungjawaban belanja tidak hanya menyangkut aspek administrasi keuangan, tetapi juga proses, keluaran dan hasil.

Adapun arah kebijakan belanja daerah untuk Tahun 2018 sebagai berikut:

1. RPJMD 2013-2018, prioritas pembangunan, program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian, urusan pembangunan, *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta janji Gubernur;
2. Dukungan terhadap RPJMN 2015–2019 dan RKP 2018;
3. Penggunaan dana fungsi pendidikan sebesar 20% dari total belanja;
4. Penggunaan dana fungsi kesehatan sebesar 10%;
5. Bantuan keuangan kabupaten/kota, bantuan pada pemerintahan kampung, hibah, Bansos dan subsidi;
6. Penggunaan Dana DAK, Dana Bagi Hasil, Dana Penyesuaian/BOS, dan Dana Otonomi Khusus;
7. Dukungan untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;
8. Dukungan penyelenggaraan PON XX Tahun 2020;
9. Pembinaan bagi atlet berprestasi;
10. Pembiayaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Provinsi Papua tahun 2018;
11. Dukungan terhadap DPRP dan MRP;
12. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga terdapat defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 belum merencanakan SiLPA. Kebijakan pembiayaan daerah Provinsi Papua diarahkan untuk menutup defisit dan mengalokasikan pada pos-pos pembiayaan. Dalam hal APBD mengalami defisit, maka kebijakan pembiayaan mengupayakan sumber pemasukan untuk menutup defisit tersebut (pembiayaan penerimaan). Apabila APBD mengalami selisih lebih, maka surplus tersebut akan dialokasikan dalam pembiayaan pengeluaran pada item-item pembiayaan yang diperkenankan oleh peraturan. Oleh karena itu, dengan menggunakan asumsi bahwa pada tahun 2018 belum memperkirakan SiLPA, serta dari analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi pengeluaran pembiayaan daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir, maka proyeksi tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 3.17
Target Dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Provinsi Papua
Tahun 2017 - 2018
(dalam Rp.)

Uraian	Target 2017 (APBD 2017)	Proyeksi 2018
SURPLUS / (DEFISIT)	-1.115.000.000.000	0
PEMBIAYAAN DAERAH		
1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	1.190.000.000.000	0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	650.000.000.000	0
Pencairan Cadangan	540.000.000.000	0
2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	75.000.000.000	0
Pembentukan Dana Cadangan	-	
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	75.000.000.000	0
3. PEMBIAYAAN NETTO	1.115.000.000.000	0
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0	0

Sumber : BPKAD Provinsi Papua (data diolah)

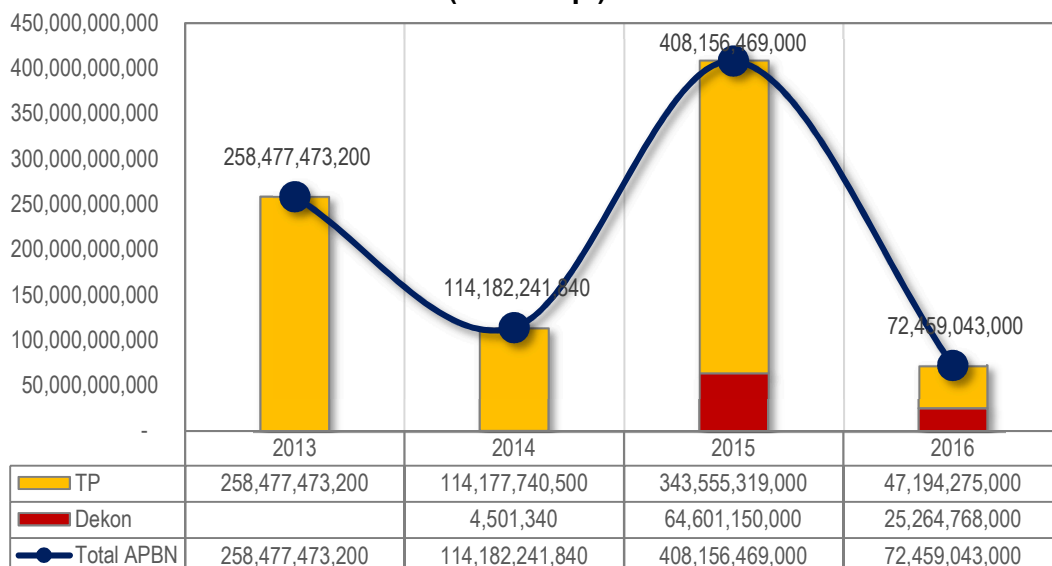
Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberlakuan anggaran kinerja memungkinkan adanya surplus atau defisit pada penyusunan APBD. Untuk menutup defisit dan surplus diperlukan pembiayaan daerah. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah. Pembiayaan defisit anggaran antara lain bersumber dari pinjaman daerah, sisa lebih perhitungan anggaran, dana cadangan dan penjualan aset. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hadiah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri, Pemerintah daerah berhak melakukan pinjaman daerah dengan ketentuan besaran pinjaman daerah tidak melebihi kemampuan daerah dalam mengembalikan pinjaman. Kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengatur pembiayaan seperti mengatur defisit anggaran dan pinjaman daerah (*sub national deficit, borrowing and debt*) dan mengatur surplus anggaran dan penyertaan modal (*investment*).

3.2.4. Kebijakan Non Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

3.2.4.1. APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), berupa dana APBN dekonsentrasi yang pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada OPD Provinsi dan dana APBN tugas pembantuan, yang dikelola oleh OPD di kabupaten/kota maupun oleh OPD Provinsi. Besarnya alokasi APBN yang masuk ke Provinsi Papua setiap tahunnya mengalami fluktuasi, sebagaimana yang terlihat pada Gambar 3.13 berikut ini.

Gambar 3.13.
Dana APBN Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Di Provinsi Papua
Tahun 2013 - 2016
(dalam Rp.)



Sedangkan distribusi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan untuk Provinsi Papua selama tahun 2013 - 2016 jika dirinci menurut kementerian sebagai berikut.

Tabel 3.18
Dana APBN Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Untuk Provinsi Papua
Dirinci Menurut Kementerian Tahun 2013 - 2015
(dalam Rp.)

Kementerian	2013	2014	2015	2016
Kementerian Sosial	8.018.117.000	9.824.135.000	17.013.559.000	16.026.976.000
Kementerian Dalam Negeri	3.940.393.200	400.000.000	1.529.400.000	1.300.000.000
Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	-	-	-	4.230.776.000
Kementerian Kelautan dan Perikanan	3.160.000.000	3.016.700.000	5.768.741.000	2.000.000.000
Kementerian Kesehatan	28.500.000.000	20.000.000.000	21.000.000.000	-
Kementerian Pekerjaan Umum	47.063.864.000	43.325.051.000	43.325.051.000	-
Kementerian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	41.063.510.000	-	-	-
Kementerian Pertanian	121.799.780.000	33.968.267.840	268.781.075.000	48.901.291.000
Kementerian Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	-	20.014.547.000	-
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.931.809.000	3.648.088.000	30.724.096.000	-
Total	258.477.473.200	114.182.241.840	408.156.469.000	72.459.043.000

Sumber : Bappeda Papua, LKPJ Tahun 2013-2016 (data diolah)

3.2.4.2. Dana Mitra Pembangunan

Tidak dapat dipungkiri bahwa peranan mitra pembangunan dalam pembangunan Provinsi Papua sangat berarti sekali, dan sudah berjalan lama sejak masa pembangunan dilaksanakan di Provinsi Papua. Secara umum terdapat beberapa bidang cakupan pembiayaan yang dilaksanakan oleh mitra pembangunan selama ini di Provinsi Papua, antara lain :

1. Bidang pendidikan, yaitu memberikan bantuan pendidikan formal atau informal, baik kepada masyarakat, organisasi atau individu, termasuk di dalamnya beasiswa dan pelatihan. Secara umum bantuan yang diberikan lebih mengarah pada upaya untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan dan sumber daya tenaga pendidikan dan kependidikan, mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi.

2. Bidang kesehatan, yaitu memberikan bantuan kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan, upaya kesehatan masyarakat, dan sumber daya kesehatan. Sumber pembiayaan di bidang ini dapat dimanfaatkan oleh individu-individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan khusus, atau dimanfaatkan oleh kelompok.
3. Bidang ekonomi, yaitu segala kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan modal, menciptakan mata pencarian dan meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk juga penyediaan layanan finansial. Sumber pembiayaan di bidang ini dapat membantu program-program yang terkait untuk penyediaan modal, penyiapan dan pengelolaan usaha produktif; pembukaan akses masyarakat terhadap lembaga keuangan; dan lainnya.
4. Infrastruktur dan teknologi, yaitu pembangunan fisik serta penyediaan, pembuatan dan penelitian mengenai teknologi pendukung. Misalkan membantu pembiayaan dalam penyediaan dana instalasi fasilitas umum pembangkit listrik, instalasi air minum untuk masyarakat, penyediaan teknologi tepat guna pendukung usaha produktif, dan lainnya.
5. Lingkungan hidup, yaitu berbagai upaya untuk menjaga kelestarian alam, serta memberikan penyadaran serta pendidikan kepada masyarakat mengenai manajemen sumber daya alam. Sumber pembiayaan di bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan berkelanjutan seperti penyadaran masyarakat untuk beralih ke sumber energi yang ramah lingkungan, dan sebagainya.
6. Pemerintahan dan kebijakan, yaitu berbagai upaya advokasi dan penyusunan peraturan serta anggaran negara (tingkat pusat dan lokal) yang dapat mewakili kebutuhan pengembangan sektor tertentu misalnya sektor energi yang ramah lingkungan.
7. Gender, yaitu memastikan adanya kesetaraan antara peran laki-laki dengan perempuan dalam segala aspek. Sumber pembiayaan di

bidang ini contohnya dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi pengambilan keputusan pelaksanaan suatu program pembangunan di suatu daerah yang mengedepankan keseimbangan gender.

Terhadap program dan kegiatan dalam prioritas pembangunan daerah, namun pemerintah tidak mampu mendanainya seperti penyediaan fasilitas atau infrastruktur strategis yang dapat meningkatkan daya saing daerah dan penyediaan pelayanan dasar masyarakat, maka kebijakan pendanaan pembangunan diarahkan dengan melibatkan masyarakat dan dunia usaha serta lembaga non pemerintah atau lembaga donor melalui pelaksanaan kerjasama pembiayaan pembangunan dengan skema diantaranya Kerjasama kemitraan dengan Lembaga Non Pemerintah Lainnya baik Lembaga Dalam Negeri maupun Lembaga Internasional. Kemitraan ini diarahkan pada pelaksanaan program, kegiatan yang sesuai dengan budaya lokal dan mendukung Program Prioritas Daerah serta dapat menstimulasi adanya transfer teknologi dan perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat.

Kerjasama dengan pihak swasta maupun kemitraan lembaga non pemerintah merupakan terobosan yang dapat dilakukan dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Selain itu, pelibatan swasta dan lembaga mitra dalam pembangunan sejalan dengan prinsip tata pemerintahan yang baik atau *good governance* yang saat ini telah menjadi kecenderungan global sebagai model dalam penyelenggaraan pemerintahan secara umum.

Saat ini lembaga non pemerintah atau lembaga donor dan NGO yang mempunyai program dan kegiatan yang tercatat di Provinsi Papua kurang lebih 33 lembaga non pemerintah atau lembaga donor. Selengkapnya jumlah dana kemitraan yang dialokasikan di Provinsi Papua selama tahun 2008 - 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.19 berikut.

Tabel 3.19.
Dana Lembaga Mitra Pembangunan Di Provinsi Papua
Tahun 2013 - 2016

Pemerintahan Asing / Lembaga Donor	Mata Uang	Nilai	Periode	Bidang
Pemerintah Belanda	\$ USA	22,675,772	2006 - 2013	Pendidikan, Pengembangan Keterampilan dan Kewirausahaan
Technical Assistance dari World Bank dan UNICEF	\$AUD	8,000,000	2007 - 2013	Pendidikan
Pemerintah Kerajaan Belanda	\$ USA	1,190,000	2007 - 2013	Kesehatan dan Lingkungan
IDA, IBRD, Pemerintah Belanda	\$ USA	195,000,000	2007 - 2013	Pendidikan
DFID	\$ USA	370,000	2008 - 2013	Kesetaraan Jender, Kesehatan, Tata-pemerintahan
USAID (seluruh indonesia)	\$ USA	44,000,000	2008 - 2013	Pendidikan, Kesehatan, Tata Pemerintahan yang Demokratis
AUSAID	\$ USA	7,000,000	2008 - 2013	Kesehatan
Pemerintah Indonesia, Pemerintah Provinsi Papua, Bank Dunia, AusAID dan IFAD	n.a.	n.a.	n.a.	Pengurangan Kemiskinan
Handicap International	n.a.	n.a.	2009 - 2013	Kesehatan
Japan Social Development Fund - JSDF	n.a.	n.a.	2009 - 2013	Gender dan Perlindungan Anak
Macquarie Bank dan BACP-IFC	n.a.	n.a.	2009 - 2013	Pengelolaan Sumber Daya Alam
AusAID	\$ USA	1,500,000	2009 - 2013	Infrastruktur
AIFDR - Australia-Indonesia Facility for Disaster Reduction (AusAID)	\$AUD	538,642	2009 - 2013	Perubahan Iklim dan Bencana Alam
OXFAM GB	GBP	44,612	2010 - 2013	Pengurangan Kemiskinan
USAID	\$ USA	3,000,000	2010 - 2013	Pendidikan
UNICEF	\$ USA	101,000	2012 - 2013	Kesehatan
CIDA (Canada International Development Aid) dan World Vision	\$ USA	822,359	2010 - 2013	Kesehatan
United Nations Trust Fund to End Violence Against Women (seluruh indonesia)	\$ USA	1,079,886	2010 - 2013	Gender dan Perlindungan Anak
Pemerintah Belanda, NZAID dan UNDP Indonesia	\$ USA	9,100,000	2011 - 2013	Pengurangan Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan

Pemerintahan Asing / Lembaga Donor	Mata Uang	Nilai	Periode	Bidang
UNICEF	\$ USA	282,000	2011 - 2013	Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan
YAM	\$ USA	500,000	2011 - 2013	Ketahanan Pangan, Fortifikasi Pangan, Pengurangan Risiko Bencana dan Perubahan Iklim
WISE	\$ USA	305,100	2011 - 2013	Kesehatan dan Lingkungan
AUSAID	\$ USA	5,300,000	2010 - 2014	Pendidikan
European Commission	\$ USA	822,359	2010 - 2014	Kesehatan
USAID (untuk seluruh proyek di Indonesia)	\$ USA	40,000,000	2010 - 2014	Perubahan Iklim dan Kehutanan
New Zealand Aid – Oxfam New Zealand	\$ NZ	3,499,702	2011 - 2014	Pengurangan Kemiskinan
Pemerintah Belanda	\$ USA	5,600,000	2011 - 2014	Kesehatan
USAID	\$ USA	19,557,990	2010 - 2015	Kesehatan
USAID	\$ USA	83,500	2010 - 2015	Kesehatan
NLR	\$ USA	80,000	2010 - 2015	Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan
Country Programme Cycle 8th UNFPA – Government of Indonesia.	n.a.	n.a.	2011 - 2015	Kesehatan
AUSAID	n.a.	n.a.	2011 - 2016	Ketahanan Pangan dan Pengurangan Kemiskinan, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur, Kebijakan Afirmatif
UNICEF	\$ USA	1,500,000	2011 - 2016	Pengurangan Kemiskinan, Kesehatan, Pendidikan, Tata pemerintahan
WHO	n.a.	n.a.	Jangka Panjang	Kesehatan

Sumber : LKPJ Tahun 2013 - 2016 (Bappeda Provinsi Papua)

BAB IV

TEMA, PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

Penyusunan Prioritas dan Sasaran pembangunan daerah pada RKPD tahun 2018 dirumuskan dalam rangka untuk mencapai target Visi dan Misi sebagaimana yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018. Selain itu dokumen ini juga mencakup kebijakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional di Tahun 2018. Terkait dengan hal itu semua, substansi dokumen RKPD tahun 2018 disusun dengan berlandaskan dan memperhatikan beberapa hal yaitu: (1) Arah Kebijakan Pemerintah Indonesia yang dijabarkan dalam 9 prioritas pembangunannasional atau Nawa Cita, (2) Arah kebijakan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018, dan (3) Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua pada penyusunan RKPD 2018.

Prioritas pembangunan daerah yang telah tersusun akan menjadi acuan dan pedoman bagi seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua dalammenjabarkan program dan kegiatan tahun 2018. Selain itu prioritas pembangunan daerah tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga percepatan pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional sebagaimana yang dimuat dalam RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2018. Dan terakhir, penyusunan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2018 ini diarahkan untuk menjamin terwujudnya Visi dan Misi RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018

4.1. Rumusan Dan Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua

Pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua menjadi bahan masukan yang sangat penting di dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi papua Tahun 2018. Adapun rumusan dan telaah pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Papua, sebagai berikut :

4.1.1. Rumusan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua

(a) Bidang Aparatur, Hukum, Politik, Pertahanan dan Keamanan

1. Upaya untuk meningkatkan pelayanan Pemerintah, Pembangunan dan Pembinaan masyarakat di seluruh Tanah Papua perlu ditingkatkan;
2. Sengketa Pilkada di beberapa Kabupaten yang belum tuntas hendaknya diselesaikan dengan mengikutsertakan semua *stakeholder*;
3. Konflik tapal batas yang terjadi di beberapa daerah perlu diselesaikan secara bijaksana tanpa menimbulkan masalah baru di kemudian hari;
4. Kepemilikan ganda atas tanah yang diklaim oleh masyarakat sebagai hak ulayat perlu diatur dalam regulasi hukum adat yang tidak bertentangan dengan hukum positif;
5. Rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun TNI Polri, hendaknya memperhatikan Putra/Putri Asli Papua dengan porsi 80% dan Non Papua sebesar 20%;
6. Permasalahan Hak Asasi manusia (HAM) yang terjadi selama ini terkesan berjalan ditempat. Untuk itu perlu diselesaikan secara bijaksana oleh Pemerintah daerah serta lembaga terkait termasuk TNI/POLRI;
7. Permasalahan yang terkait dengan konflik di DPRD Mimika telah berlangsung lebih dari dua (2) Tahun, belum terlihat penyelesaian yang kongkrit, karenanya Pemerintah Provinsi perlu segera menyelesaikan secara baik.

(b) Bidang Ekonomi

1. Mendukung Program Pemerintah Provinsi Papua di Bidang Perekonomian guna mengangkat kesejahteraan masyarakat Papua, serta pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar atau pokok;
2. Peningkatan pendapatan masyarakat diantaranya diupayakan melalui perkembangan aktivitas sektor-sektor ekonomi produktif antara lain Perindustrian, Peternakan, Perikanan, Perkebunan,

Pertanian, koperasi dan UKM, Perindustrian dan perdagangan yang dikelola oleh masyarakat Papua;

3. Target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti yang sangat luas. Artinya pengembangan ekonomi masyarakat yang luas diharapkan bisa diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik yang dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain.

(c) Bidang Perencanaan Pembangunan

1. DPRD Provinsi Papua menyambut baik program *e-planning* yang diterapkan pemerintah daerah dalam penyusunan program TA 2018;
2. Tahun Anggaran 2018 adalah tahapan terakhir dari RPJMD tahun 2013-2018. Oleh karena itu semua target RPJM tersebut harus dirampungkan.

(d) Bidang Keuangan Dan Aset Daerah

1. Berdasarkan peraturan daerah tentang pengelolaan dana otonomi khusus, telah diatur pembagian dana otsus antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, dimana 80% dialokasikan untuk kabupaten/kota, dan 20% dialokasikan untuk pemerintah provinsi. Hal ini perlu dievaluasi kembali, mengingat beberapa kewenangan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah daerah, telah dilimpahkan ke pemerintah provinsi berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Dalam rangka pengelolaan aset daerah yang tertib administrasi perlu ditingkatkan aspek pengelolaan aset daerah, baik perencanaan, pemanfaatan, penyimpanan, dan penghapusan, agar disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
3. Dalam rangka mengoptimalkan perusahaan daerah yang sudah dimergerkan dalam satu induk perusahaan (*holding company*), diminta untuk segera mendorong fokus perhatian pada kegiatan

bisnis yang dapat menghasilkan pendapatan asli daerah yang ditargetkan dalam RPJMD;

4. Terkait dengan rencana pembangunan hotel pada aset tanah pemerintah daerah yang dipisahkan (ex PD. Irian Bakti), perlu dilakukan kajian mendalam dari aspek pembiayaannya. Hal ini perlu dipertimbangkan, mengingat potensi permasalahan bagi pemerintah daerah di masa mendatang;
5. Untuk mendukung pengelolaan bank milik pemerintah daerah yang lebih baik, DPRP mengingatkan pentingnya aspek kehati-hatian dalam pemberian dukungan anggaran pemerintah daerah. Khususnya jika dihubungkan dengan tingginya permasalahan kredit macet yang saat ini sedang dihadapi oleh Bank Papua.

(e) Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

1. Sampai dengan tahun 2017 masih banyak infrastruktur jalan dan jembatan pada daerah pelosok yang belum terkoneksi dengan baik;
2. Belum maksimalnya pemeliharaan bangunan fisik penunjang kegiatan masyarakat;
3. Program-program pembangunan infrastruktur yang diusulkan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang berorientasi pada jalan, jembatan, bangunan-bangunan kantor pelayanan masyarakat, gedung sekolah, terminal-terminal, bandar udara, dan dermaga-dermaga penghubung yang nantinya akan menghubungkan daerah satu ke daerah yang lain;
4. Pembangunan infrastruktur harus dapat dirasakan juga sampai pada pelosok-pelosok daerah terpencil masyarakat dalam Provinsi Papua.

(f) Bidang Pendidikan

1. Kurangnya guru yang mengajar di daerah pedalaman dan pesisir pantai dan kabupaten pemekaran hingga saat ini masih mengalami kendala, maka Pemerintah perlu melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan guru di daerah tersebut, sehingga

- pemerataan guru dan kualitas guru dalam berbagai disiplin ilmu terpenuhi secara merata di seluruh Provinsi Papua;
2. Kesejahteraan guru di daerah terpencil di Papua, menyangkut, anggaran, kesehatan, perumahan perlu menjadi prioritas setiap tahun anggaran. Pelayanan bagi para guru di daerah terpencil perlu dilakukan secara serius dan tuntas oleh Pemerintah Daerah, agar guru mengajar secara serius dan tidak meninggalkan tempat tugas;
 3. Sarana dan prasarana pendidikan, terutama gedung sekolah, fasilitas sekolah, buku-buku pelajaran, perpustakaan sekolah, usaha kesehatan sekolah sangat minim di rasakan di berbagai daerah yang berpengaruh kepada peningkatan kualitas siswa, ditingkat SD, SLTP dan SLTA;
 4. Perlu inventarisasi buta aksara di Papua serta pelayanan sarana/prasarana dan pengadaan/pengangkatan para tutor yang mengajar secara profesional, agar angka IPM Papua secara pelan tetapi pasti menjadi lebih baik dan memperbaiki ranking Papua dalam pencapaian IPM secara Nasional;
 5. Pelimpahan wewenang SMK dan SMA seluruh Provinsi Papua yang akan diambil alih oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua perlu diatur secara baik agar kualitas pendidikan untuk tingkat SMK dan SMA yang saat sudah baik jangan akan menurun setelah diambil alih oleh Dinas Pendidikan Provinsi Papua. Mengingat karena SMK dan SMA yang selama ini ditangani oleh kabupaten dan kota memperoleh support dana yang cukup banyak sehingga kemajuan SMA dan SMK berjalan cukup baik;
 6. Mengingat bahwa Permendikbud No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan telah diberlakukan di seluruh Indonesia, dimana Kategori Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A dan Tipe B. Hingga saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua belum menggunakan Struktur tersebut. Untuk dapat segera mengikuti Permendikbud tahun 2016;

7. Perlu ada transparansi terhadap rekrutmen / penerimaan calon mahasiswa baru melalui program Adik diberbagai perguruan tinggi di Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh melalui manajemen yang terbuka serta penyediaan dana bagi program Afirmasi Pendidikan Tinggi Papua (ADIK);
8. Diharapkan perlu pengadaan dana untuk melakukan monitoring diberbagai kabupaten terhadap keberhasilan pendidikan bagi alumni yang telah menyelesaikan program Adik sehingga dapat diidentifikasi sumber daya Orang Asli Papua serta keterampilan yang dimilikinya;
9. Perlu perhatian khusus terhadap beberapa perguruan tinggi swasta yang dikembangkan oleh yayasan keagamaan kristen yang masih sangat membutuhkan perhatian terhadap anggaran guna meningkatkan sarana prasarana dan kualitas sumber daya manusia perguruan tinggi. Hal ini untuk mengatasi kebutuhan belajar para mahasiswa di Papua.

(g) Bidang Kesehatan

1. Dinas Kesehatan

- a. Keberhasilan Dinas kesehatan melalui UP2K dalam kebijakan barunya, berupa dokter kaki telanjang, dokter terbang dan dokter terapung, telah mengidentifikasi berbagai penyakit yang diderita masyarakat Papua di daerah terpencil. Kebijakan tersebut sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar. Mengingat kebijakan tersebut sudah terbukti bahwa banyak masyarakat mengalami banyak gejolak kesehatan, bahkan ada yang meninggal tanpa tersentuh medis. Hal ini juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk asli papua yang semakin berkurang secara perlahan-lahan. Untuk itu diperlukan anggaran yang besar untuk membiaya persolan ini;
- b. Keberadaan Kartu Papua Sehat harus diturunkan dan BPJS kepesertaannya dinaikan. Apabila KPS tidak dapat melayani

masyarakat maka diharapkan BPJS menjadi menjadi faktor utama melayani semua masyarakat Papua secara merata. Hal ini perlu di dukung dana yang sangat besar karena melayani masyarakat Papua yang sakit, baik sakit ringan maupun yang sakit parah yang membutuhkan rujukan;

- c. Pemerintah Provinsi Papua diharapkan memperhatikan secara serius dan diperlukan dana yang sangat memungkinkan terhadap Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Papua karena merupakan Laboratorium pembinaan dan rujukan dari seluruh laboratorium rumah dan puskesmas di seluruh Papua dan juga Laboratorium rujukan nasional untuk HIV, TBC dan malaria. Saat ini masih mengalami kekurangan dana dalam operasionalnya;
- d. Kendala utama mendatangkan Dokter Spesialis ke Papua, adalah tidak adanya rumah bagi dokter spesialis serta fasilitas lain yang dianggap layak, mengakibatkan minat dokter spesialis ke Papua sangat kecil. Agar menjadi perhatian Pemerintah Provinsi terhadap hal ini. Kondisi ini juga menyebabkan banyak pasien dari Papua yang berobat ke luar Papua bahkan ke luar negeri;
- e. Dibutuhkan Pengadaan anggaran yang besar untuk melakukan kontrol terhadap distribusi obat, terutama pengiriman obat di daerah wilayah pegunungan untuk menghindari Masa Kadaluarsa obat tersebut;
- f. Perlu ada Pengadaan dana untuk Verifikator dalam monitoring KOS dan BPJS.

2. Rumah Sakit Jiwa Abepura

- a. Mengingat Rumah Sakit Jiwa Abepura melayani seluruh Pasien dari seluruh daerah baik dari Papua maupun Papua Barat, maka diperlukan dana yang besar untuk melakukan monitoring jumlah pasien dan bagaimana pelayanan pasien Jiwa diberbagai daerah di Papua dan Papua Barat;

- b. Lokasi Rumah Sakit Jiwa Saat ini sudah tidak layak untuk melayani pasien Jiwa, mengingat jumlah pasien setiap tahun meningkat, sehingga diadakan lokasi baru yaitu di Koya Barat menuju keerom. Demikian pula anggaran bagi Pasien narkoba dibawah bina pelayanan sakit jiwa dan rehabilitasi narkoba. Dibutuhkan anggaran untuk pembayaran kepemilikan tanah adat dan proses tatap muka dengan masyarakat pemilik tanah adat;

3. Rumah Sakit Umum Abepura

- a. Dibutuhkan anggaran untuk Pembayaran pelunasan tanah adat yang selama ini belum tuntas;
- b. Perlu pengadaan/diangkat Dokter fungsional untuk menjadi tenaga kontrak. Tenaga Struktural sangat banyak jadi dikembalikan ke instansi lain. Agar beban anggaran kurang karena belanja mereka bagi tenaga tersebut memakan biaya. Oleh sebab itu anggaran kontrak dokter spesialis sangat dibutuhkan sebagai prioritas guna pelayanan kesehatan masyarakat secara prima;
- c. Perlu pengadaan anggaran untuk biaya Tenaga perawat bidan yang selama ini masih dirasakan sangat kurang.
- d. Pengadaan anggaran cadangan untuk belanja obat yang tiba-tiba tidak ada pesediaannya.

4. Rumah Sakit Umum Daerah Dok II

- a. Dibutuhkan anggaran untuk pasien rujukan dari daerah kabupaten ke Rumah Sakit DOK II sebagai rumah sakit rujukan di Jayapura, dan rujukan dari Jayapura ke rumah sakit rujukan ke Luar Papua. Hal ini karena pasien rujukan tidak dapat di prediksi sehingga membengkak melampaui target yang ditentukan sehingga membutuhkan kesiapan dana atau dana cadangan yang besar. Hal ini sangat berpengaruh terhadap Kerja Sama dengan RSUD Sarjito dan RS Dharmais, RS Cikini, RS di Makassar, RS Dr. Sutomo, dapat berjalan secara baik;

- b. Dibutuhkan sejumlah anggaran untuk pengadaan Ketel uap, listrik , gizi dan ruang bersalin perlu ada pembenahan karena ini merupakan masalah yang krusial yang sejak dulu hingga saat ini dialami terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, terutama pasien;
- c. Diperlukan anggaran untuk memenuhi kebutuhan 4 (empat) hal wajib bagi Pelayanan untuk Orang Asli Papua yaitu pelayanan prima, fasilitas, prioritas, listrik, gizi dan obat, ketel uap, listrik, ruang bersalin;
- d. Gedung yang ada hampir 11 tahun tidak terselesaikan oleh sebab itu membutuhkan dana penyelesaian secara tuntas, agar dapat digunakan sebagaimana fungsi pelayanan rumah sakit yang memenuhi standar pelayan;
- e. Dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk pembuatan bak penampung air bagi pelayanan pasien rumah sakit yang selama ini kekurangan air atau macet secara rutin.

(h) Bidang Ketenagakerjaan

1. Dalam Rangka meningkatkan kesejahteraan Orang Papua Asli di berbagai perusahaan swasta berskala menengah dan kecil, maka Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini, Dinas Tenaga Provinsi Papua perlu melakukan kontrol terhadap berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua, agar konsekuen membayar Upah Minimum, sehingga tidak menimbulkan konflik bagi para pekerja. serta berusaha mengutamakan tenaga kerja Orang Asli Papua secara merata dari berbagai suku yang ada. Untuk itu perlu ada pelatihan tentang kewirausahaan, pengenalan budaya kerja, secara faktor psikologi kerja;
2. Kurangnya Orang Asli Papua yang bekerja di berbagai jasa perdagangan atau perusahaan swasta maupun di bidang pelayanan publik, atau banyak pekerja Orang Asli Papua yang dianggap tidak mampu bekerja di institusi Swasta, oleh karena itu diperlukan kajian mendalam atau penelitian tentang bagaimana

budaya kerja Orang Asli Papua serta mencari jalan keluar yang tepat sehingga para tenaga kerja asli juga dapat terlibat sebagai pekerja dalam lembaga-lembaga tersebut. Hal ini sebagai perwujudan afirmasi di era otonomi khusus;

3. Diperlukan dana untuk melakukan survei angkatan kerja serta karakteristik penduduk angkatan kerja orang asli Papua, agar distribusi tenaga kerja orang asli Papua dapat dilakukan pada bidang kerja yang membutuhkan keahlian yang telah dimiliki;
4. Perlu dilanjutkan pelatihan atau *Vocational Training Centre* di berbagai negara agar Anak-anak Papua yang di latih di negara Jepang, dan negara lainnya setelah memperoleh keterampilan dapat kembali ke kampung halamannya. Harap diperhatikan atau difasilitasi oleh kabupaten asalnya. Sehingga tidak terjadi pengangguran intelektual terutama mereka yang sudah memiliki keterampilan. Untuk itu diharapkan pemerintah dapat menciptakan proyek pembangunan berorientasi padat karya agar dapat melibatkan anak Papua yang memiliki keterampilan dapat diserap.

(i) Bidang Kesejahteraan Sosial Dan Komunitas Adat Terpencil

1. Perlu pengadaan dana untuk melakukan survei tentang Komunitas Adat Terpencil (KAT) untuk memahami bagaimana pola kehidupan dan perkembangan masyarakat yang sedang dalam perubahan hingga saat ini;
2. Perlu dilakukan penelitian khusus tentang Ketahanan Sosial Keluarga Miskin di Papua terutama masyarakat wilayah perbatasan yang merupakan pintu masuk Narkoba dari wilayah PNG sebagai pemasok. Tanpa penelitian ini maka masuknya narkoba menjadi lebih tinggi karena satu-satunya pendapatan rumah tangga melalui perdagangan narkoba;
3. Perlu anggaran bagi anak jalanan sebagai potensi sumber manusia Papua masa depan yang sudah harus di inventarisasi di lakukan pembinaan sehingga masa depan anak Papua tidak mengalami kendala sebagai pelaku pembangunan di kemudian hari.

(j) Bidang Pemuda Dan Olah Raga

1. Perlu segera diadakan kompetisi bibit muda terbaik Papua menjelang PON XX untuk dapat diprediksi jumlah perolehan sesuai kemampuan prestasi yang diperoleh;
2. Pengadaan anggaran penyelesaian venue di berbagai kabupaten sebagai kabupaten penyelenggaraan PON XX. Koordinasi dan kepastian anggaran sesuai dengan pembangunan venue, cabor yang dipertandingkan,serta fasilitas alat olah raga bagi atlet, mengingat waktu penyelenggaraan PON XX sudah tidak dapat dikatakan masih lama;
3. Anggaran untuk promosi PON XX di Papua sudah harus dilakukan melalui media cetak, media elektronik serta berbagai media lainnya, agar kesiapan masyarakat Papua sudah dapat mempersiapkan diri menyambut PON XX dengan berbagai kesiapan dan kontribusinya, terutama mempromosikan Papua melalui Pariwisata dan ketrampilan Home Industrinya;
4. Dalam upaya menyukseskan PON ke-20 Tahun 2020 di Provinsi Papua, Komisi III memandang perlu untuk melakukan evaluasi yang menyeluruh terkait dengan progres persiapan pelaksanaan PON (pembangunan venue baik di Kota Jayapura, maupun kabupaten penyelenggara PON).

(k) Bidang Perpustakaan Dan Arsip Daerah

1. Diperlukan pengadaan anggaran untuk pengadaan fasilitas internet WIFI sehingga mempermudah akses terhadap informasi serta literatur penerbitan terbaru bagi pembaca siswa SD, SLTP dan SLTA;
2. Perlu disediakan anggaran untuk rehabilitasi gedung baca, mengingat semakin meningkatnya pembaca mahasiswa yaitu 200 orang perhari, sudah tidak dapat menampung lagi.

4.1.2. Telaah Pokok-Pokok Pikiran DPRD Provinsi Papua

Telaah rumusan pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian sangat penting dalam upaya mengakomodir berbagai konsep pemikiran yang diajukan oleh pihak legislatif guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan Provinsi Papua di tahun 2018. Melalui penelaahan ini, maka dapat disinkronkan dan disinerjikan rumusan dan usulan program/kegiatan yang disampaikan oleh pihak legislatif kedalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2018, yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

(a) Aspek Aparatur, Hukum, Politik, Pertahanan dan Keamanan

Hingga saat ini masih terdapat berbagai masalah dalam Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Otonomi Daerah di Provinsi Papua, di antaranya yang krusial dan perlu segera diatasi adalah: (1) masih rendahnya kualitas aparatur Pemerintah Daerah baik kompetensi maupun spesialisasi sesuai potensi dan tantangan daerah, (2) budaya komunikasi pemerintahan belum mampu mengatasi berbagai kebuntuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, (3) belum optimalnya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota, dalam hal pelaksanaan kegiatan yang bersumber dana belanja bantuan keuangan alokasi dana otonomi khusus dalam sektor pendidikan, kesehatan dan beberapa program yang disepakati, dan (4) restrukturisasi organisasi pemerintahan Provinsi Papua belum didukung dengan acuan standar kinerja/SPM, *Standart Operating and Procedure*(SOP) dan belum mempertimbangkan semangat pembangunan di era Otsus. Semua ini mengakibatkan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Papua terlihat belum optimal hingga saat ini, khususnya kepada masyarakat Orang Asli Papua, dan keseluruhan masyarakat pada umumnya.

Sementara itu, meskipun iklim politik yang berjalan selama ini dalam kondisi yang lebih kondusif, namun tetap ada permasalahan sengketa hukum, politik, HAM dan adat yang sifatnya kedaerahan dan kasuistis baik itu antar kelompok, individu maupun dengan aparat, seperti

sengketa Pilkada di Kabupaten Tolikara dan Dogiyai, serta polemik yang terjadi antara Kepala Daerah dengan anggota DPRD di Kabupaten Mimika, yang mana keduanya disebabkan belum optimalnya peran lembaga-lembaga politik dalam pembinaan demokrasi, serta kurang terbangunnya budaya politik yang sehat, dewasa, bermutu, dan bertanggungjawab. Kemudian permasalahan hak ulayat khususnya yang terkait dengan kepemilikan tanah adat belum optimal terselesaikan, oleh karena implementasi sejumlah Perdasus dan Perdasi yang mengatur hak-hak dasar orang asli Papua, dan Peradilan Adat belum berjalan baik. Begitu juga dengan konflik batas yang terjadi antara daerah induk dengan pemekaran, dan penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM yang belum berjalan maksimal misalkan kasus Wamena dan Paniai. Apabila semua kondisi semacam ini dibiarkan berlarut tanpa ada penanganan yang efektif dan segera diselesaikan dengan melibatkan seluruh *stakeholder*, maka dipastikan dapat mengganggu upaya untuk Mewujudkan Suasana Aman, Tenang dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam kedaulatan NKRI yang merupakan wujud dari misi pertama RPJMD Provinsi Papua 2013-2018.

Untuk mengatasi berbagai masalah di atas, sebagaimana yang diindikasikan dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua, maka terdapat beberapa program yang dirancang dalam RKPD 2018 yang dapat mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD tersebut sebagai berikut:

1. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
2. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan;
4. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung;
5. Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah;
6. Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas;
7. Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda;
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum;

9. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur;
10. Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat;
11. Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program di bidang aparatur, hukum, politik, pertahanan dan keamanan ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

(b) Aspek Ekonomi

Kompleksitas masalah ekonomi di Provinsi Papua dapat difokuskan pada ruang lingkup tataran mikro dan makro ekonomi, yang masing-masing mencakup perekonomian rakyat dan perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua yang diindikasikan dengan kenaikan PDRB sepanjang tahun 2013-2016 terlihat berhasil melampaui target RPJMD 2013-2018. Bahkan untuk tahun 2016, Provinsi Papua mendapat predikat sebagai daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbaik di Indonesia. Namun demikian hal ini ternyata kurang didukung dengan pemerataan pendapatan masyarakat dan regional yang semakin baik. Sampai saat ini masih terdapat kesenjangan pendapatan antar personal maupun antarwilayah, yang menyebabkan terjadinya *economy leakage* (kebocoran ekonomi) sehingga berdampak terhadap pengurasan sumber daya lokal yang berlebihan. Guna mengatasi hal tersebut diperlukan adanya upaya peningkatan pendapatan masyarakat diantaranya melalui pengembangan aktivitas sektor-sektor ekonomi produktif terutama di sector perindustrian, peternakan, perikanan, perkebunan, pertanian, koperasi dan UKM, perindustrian dan perdagangan yang dikelola oleh masyarakat Papua yang berbasis pada kearifan lokal, seperti yang telah diungkap dalam pokok-pokok pikiran DPRD.

Sebagaimana yang tersirat juga dalam pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua bahwa target utama pengembangan ekonomi masyarakat memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam arti luas yang diskenariokan melalui kegiatan-kegiatan spesifik lokal yang

dikelola oleh Pemda, swadaya masyarakat, pelaku ekonomi swasta, dan lain-lain. Untuk mengakomodir konsep berpikir dari anggota DPRD tersebut maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 telah dibuat beberapa program yang terkait dengan perekonomian yaitu :

1. Program Membangun SDM Petani Papua;
2. Program Pembangunan Kawasan Industri Agribisnis;
3. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan;
4. Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Lokal;
5. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan Dan Wawasan Maritim Kepada Masyarakat;
6. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
7. Program Pengembangan Dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap;
8. Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan;
9. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar;
10. Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan Dan Pemasaran;
11. Program Optimalisasi Dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap;
12. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani;
13. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan;
14. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan;
15. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
16. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan;
17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan;
18. Program Pengembangan Agribisnis;
19. Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian;
20. Program Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal;
21. Program Peningkatan Dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tani;

22. Program Penggunaan Pupuk Organik;
23. Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Ternak;
24. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan;
25. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan;
26. Program Penataan Kawasan Hutan;
27. Program Pengawasan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) Dan Bahan Bakar Gas (BBG);
28. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah;
29. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial;
30. Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil;
31. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata;
32. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata;
33. Program Pengembangan Kemitraan;
34. Program Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program di bidang ekonomi ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

(c) Aspek Perencanaan Pembangunan

Saat ini *e-Government* menjadi salah satu instrumen perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua yang sangat penting guna memantau dan mengendalikan implementasi dari perencanaan dan penganggaran untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dianggarkan dapat mewujudkan Visi dan Misi RPJMD 2013-2018, sehingga setiap rupiah yang dianggarkan dan dikeluarkan bisa memberikan kesejahteraan seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat di Provinsi Papua.

Di dalam *e-Government* untuk perencanaan dan penganggaran yang telah dibangun ada 3 (tiga) komponen penting yakni *e-musrenbang*, *e-planning* dan *e-budgeting*, ketiga komponen ini untuk memastikan terwujudnya sinkronisasi dan konsistensi antara Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), perencanaan dan penganggaran secara nyata. Selain itu juga merupakan

pengjawantahan dari prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Terkait dengan konsep pemikiran seperti itu maka penyusunan RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 telah menerapkan *e-Government* tersebut melalui aplikasi *e-Papua Pu Rencana*.

Tahun Anggaran 2018 merupakan tahapan terakhir dari RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018, yang mana dalam pokok-pokok pikiran DPRD ditegaskan bahwa semua target RPJMD tersebut harus dirampungkan. Berdasarkan rekomendasi tersebut maka Bappeda Provinsi Papua melalui *e-Government* akan memantau, mengendalikan dan mengevaluasi tercapainya target-target program/kegiatan yang dimuat dalam RPJMD 2013-2018. Oleh karena itu dalam RKPD 2018 telah dibuat beberapa program terkait dengan pelaksanaan perencanaan pembangunan yaitu :

1. Program Pengembangan Data/Informasi;
2. Program Pengembangan Kawasan;
3. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh;
4. Program Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi;
6. Program Perencanaan Sosial Dan Budaya;
7. Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana Dan Lingkungan Hidup;
8. Program Perencanaan Tata Ruang;
9. Program Peningkatan Kinerja BUMD;
10. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
11. Program Pemanfaatan Ruang;
12. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar;
13. Program Kerjasama Pembangunan;
14. Program Perencanaan Kawasan.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang perencanaan pembangunan ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

(d) Aspek Keuangan Dan Aset Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan pengganti UU Nomor 32 Tahun 2004. Terdapat beberapa perubahan secara substansional, terutama terkait dengan kewenangan dan urusan pemerintahan daerah antara kabupaten dengan provinsi. Perubahan tersebut berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, salah satunya terkait dengan proses perencanaan pembangunan. Menurut UU No. 23 Tahun 2014, beberapa sub urusan pemerintahan konkruen yang perlu ditindaklanjuti antara lain di bidang pendidikan menengah, dan bidang kehutanan yang mencakup pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan, pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi, pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan, serta pelaksanaan penyuluhan kehutanan provinsi. Sudah barang tentu dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut akan mempengaruhi proporsi pengelolaan Dana Otsus 80 : 20 persen antara pemerintah kabupaten dan provinsi, oleh sebab itu dalam pokok-pokok pikiran DPRD direkomendasikan perlu adanya evaluasi pengelolaan Dana Otsus lebih lanjut untuk merespon berlakunya UU Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, karena beberapa kewenangan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah kabupaten, telah dilimpahkan ke pemerintah provinsi.

Pemerintah Provinsi Papua selama ini telah menggunakan instrumen yang berkualitas dalam pengelolaan/manajemen aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efisien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini terbukti dengan diraihnya Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) berturut-turut selama 3 tahun yaitu tahun 2014, 2015 dan 2016. Pengelolaan aset daerah yang dilakukan oleh pemerintah provinsi

secara garis besarnya meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah dapat diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui DPRD Provinsi Papua. Terdapat beberapa strategi optimalisasi pengelolaan aset daerah yang dijalankan selama ini yaitu : (1) identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset daerah, (2) adanya sistem informasi manajemen aset daerah, (3) pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset, dan (4) pelibatan berbagai profesi atau keahlian yang terkait seperti auditor internal dan eksternal. Strategi ini juga diterapkan dalam mengoptimalkan aset BUMD (misalkan Bank Papua), yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar tidak membebani keuangan daerah, sebagaimana yang tersirat dalam pokok-pokok pikiran DPRD.

Terkait dengan seluruh konsep pemikiran diatas, dan untuk mengakomodir rekomendasi yang disampaikan oleh pihak legislatif maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 telah direncanakan beberapa program dalam upaya meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan dan aset daerah sebagai berikut :

1. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota;
3. Program Peningkatan Pendapatan Daerah;
4. Program peningkatan kinerja BUMD.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program di bidang keuangan dan aset daerah ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

(e) Aspek Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

Berbagai infrastruktur dasar masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat Papua dengan penyediaan yang harus memperhatikan pola sebaran pemukiman penduduk dalam kelompok-kelompok kecil dan

tersebar dengan kondisi geografis yang berat. Isu-isu strategis yang mengemuka di tahun 2018 terkait dengan pembangunan infrastruktur dasar sebagaimana yang tersirat dalam pokok-pokok pikiran DPRD adalah: (1) jaringan jalan dan jembatan belum menjangkau banyak wilayah pemukiman penduduk sehingga pelayanan dasar belum dirasakan oleh sebagian besar penduduk, (2) jalan dalam kondisi yang baik, dan permukaan jalan yang beraspal masih sangat kurang, sehingga mengganggu kelancaran pendistribusian barang dan penumpang yang pada akhirnya berakibat pada *high cost economy* di daerah-daerah pegunungan dan sulit akses di Provinsi Papua, (3) kuantitas dan kualitas jembatan yang masih belum memadai menyebabkan hubungan transportasi darat antara satu daerah dengan daerah lainnya menjadi terhambat dan tidak lancar.

Untuk mengatasi permasalahan infrastruktur dasar di atas, serta mengakomodir pokok-pokok pikiran yang disampaikan oleh DPRD maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 telah dibuat program-program pekerjaan umum sebagai berikut :

1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan;
2. Program Pembangunan turap/talud/brojong;
3. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah;
4. Program pengendalian banjir;
5. Program pembangunan infrastruktur pedesaan;
6. Program Peningkatan Jalan dan Jembatan;
7. Program Pengembangan Perumahan.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

(f) Aspek Pendidikan

Pemerataan dalam pendistribusian guru merupakan permasalahan yang fundamental dan struktural di Provinsi Papua. Hingga saat ini masih dirasakan adanya ketidakmerataan dalam pendistribusian guru antara wilayah perkotaan dengan perdesaan, dan antara daerah pesisir mudah akses dengan daerah pegunungan dan pesisir sulit akses. Fenomena yang terjadi sebagian besar guru berada di wilayah perkotaan, sedangkan untuk wilayah pegunungan yang terisolasi masih banyak kekurangan guru. Permasalahan lainnya terkait eksistensi guru adalah tingkat kemangkiran guru. Faktor-faktor rendahnya kesejahteraan guru, jarak yang jauh, topografi yang ekstrim, minimnya sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi merupakan faktor penyebab laten yang perlu diatasi segera di tahun 2018, sebagaimana yang disebutkan dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Kemudian untuk sarana dan prasarana pendidikan, terutama untuk penunjang pengajaran dan pembelajaran murid (misalkan buku pelajaran, peralatan laboratorium, perpustakaan, dan sebagainya), meskipun setiap tahun telah menjadi fokus perhatian dalam perencanaan pembangunan pendidikan, dan terus ditingkatkan kuantitas dan kualitasnya namun sampai saat ini masih terlihat belum optimal, sehingga kualitas lulusan sekolah belum meningkat signifikan. Semua kondisi faktual ini (belum optimalnya guru dan prasarana pendidikan) menjadi salah satu penyebab RLS (Rata-Rata Lama Sekolah) di Provinsi Papua sangat rendah, sehingga IPM (Indeks Pembangunan Manusia) sampai dengan tahun 2016 masih yang terendah di Indonesia.

Dalam upaya mengatasi permasalahan guru, pemerintah provinsi telah melaksanakan program nasional yaitu Program SM-3T (Sarjana Mendidik Di Daerah Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Melalui Program SM-3T tersebut maka kekurangan guru dan atau ketidakmerataan dalam pendistribusian guru diharapkan dapat teratasi dengan baik, khususnya di daerah-daerah pegunungan dan pesisir sulit akses yang merupakan daerah tertinggal. Sedangkan untuk meningkatkan RLS, melalui salah satu program pendidikan yang strategis yaitu Sekolah Asrama Satu Atap

(SATAP) pemerintah provinsi selama ini berupaya untuk memupuk dan meningkatkan kesadaran penduduk usia sekolah mengenai pentingnya program wajib belajar sembilan tahun untuk menciptakan kualitas pendidikan anak-anak Papua yang handal. Melalui SATAP ini juga pemerintah provinsi melakukan gerakan literasi guna meningkatkan angka melek huruf yang masih belum optimal mencapai 100%.

Untuk tata kelola, khususnya yang terkait dengan pelimpahan kewenangan dalam pengelolaan sekolah di jenjang pendidikan SMA dan SMK, menurut pokok-pokok pikiran DPRD jangan sampai mengorbankan kualitas SMA dan SMK yang sudah terbangun selama ini yang di kelola oleh pemerintah kabupaten. Selain itu, perlu adanya kepatuhan mengikuti peraturan yang berlaku dalam merubah struktur Dinas Pendidikan berdasarkan tipenya (Tipe A atau Tipe B).

Program ADIK (Afirmasi Pendidikan Tinggi) merupakan salah satu program afirmasi bagi Orang Asli Papua yang dilaksanakan pemerintah provinsi selama ini. Tujuannya adalah membidik potensi anak-anak Papua lulusan SMA/SMK/ sederajat yang berprestasi akademik untuk memperoleh pendidikan tinggi di PTN unggulan baik itu di dalam negeri maupun luar negeri, dan menyiapkan sumber daya manusia anak-anak Papua yang berkualitas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Transparansi dalam seleksi penerimaan ADIK perlu ditingkatkan, dan harus berlandaskan pada kompetensi yang menjunjung kualitas tinggi. Selain itu perlu didukung dengan pendanaan yang memadai hingga peserta ADIK selesai perkuliahan, dimana pada akhir pelaksanaan program tersebut harus dilaksanakan evaluasi yang menyeluruh dan luas hingga mencapai penilaian *outcome* dan *benefit*.

Berdasarkan seluruh telaah pokok-pokok pikiran DPRD di atas, maka untuk RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 telah disusun program-program pembangunan pendidikan sebagai berikut :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun;
3. Program Pendidikan Menengah Atas;

4. Program Pendidikan Non Formal;
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan;
6. Program Pendidikan Menengah Kejuruan;
7. Program Pemberantasan Buta Aksara;
8. Pengembangan sarana dan prasarana pendidikan.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program dibidang pendidikan ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

(g) Aspek Kesehatan

Pelayanan kesehatan didaerah terpencil dan terisolir telah menjadi program prioritas yang ditetapkan dalam rencana strategis urusan kesehatan, yakni memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat pada daerah terpencil, terisolir, dan perbatasan. Daerah yang menjadi sasaran kegiatan adalah daerah yang mempunyai kriteria sulit dari segi transportasi, memiliki topografi yang ekstrim, dan masyarakat yang masih tergolong miskin dengan status kesehatan yang masih rendah. Permasalahan penting yang masih dihadapi dalam pembangunan kesehatan di Provinsi Papua selama ini adalah terbatasnya aksesibilitas terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas terutama pada kelompok penduduk miskin, penduduk daerah tertinggal, terpencil dan daerah perbatasan. Hal ini, antara lain, disebabkan oleh karena kendala jarak, biaya dan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan seperti Puskesmas dan jaringannya yang belum sepenuhnya dapat dijangkau oleh masyarakat.

Guna mengantisipasi hal tersebut dalam 3 tahun terakhir ini pemerintah provinsi telah membentuk Satgas Kijang (Kaki Telanjang) yang diprogramkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua melalui UP2KP (Unit Percepatan Pembangunan dan Kesehatan Papua). Satgas ini terdiri dari sejumlah profesi kesehatan yang direkrut Dinas Kesehatan Provinsi Papua yaitu tenaga dokter, bidan, perawat, ahli gizi, apoteker, dan ahli kesehatan lingkungan untuk ditempatkan di berbagai Puskesmas terpencil dan terisolir di Provinsi Papua. Pada tahun 2016 jumlah Satgas Kijang sudah sebanyak 162 tenaga kesehatan untuk melayani 26 Puskesmas di

18 kabupaten. Selain Satgas Kijang, UP2KP juga menjalankan program kesehatan pelayanan terbang dan pelayanan terapung. Pelayanan terbang difokuskan untuk wilayah di Papua yang hanya bisa dijangkau dengan menggunakan pesawat. Sementara pelayanan terapung di fokuskan untuk wilayah yang berada di pinggiran atau pesisir pantai dan hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kapal atau sampan (perahu). Dan untuk pelayanan kaki telanjang difokuskan pada daerah yang sulit dijangkau dengan menggunakan pesawat maupun kendaraan roda dua.

Ketiga program Dinas Kesehatan tersebut telah berkontribusi besar terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Papua. Sebagai misal Angka Kematian Ibu (AKI) dapat diturunkan dari 575 per 100.000 klh (kelahiran hidup) di tahun 2013 menjadi 313 per 100.000klh pada tahun 2016. Begitu juga dengan Angka Kematian Bayi (AKB) mengalami penurunan dari angka 54 per 1000 klh menjadi 13 per 1000 klh. Termasuk Gizi buruk mengalami penurunan dari 21,6 persen menjadi 7,7 persen. Secara langsung ketiga indikator kesehatan tersebut merupakan variabel yang paling dominan mempengaruhi kenaikan Angka Harapan Hidup Provinsi Papua secara agregat yaitu dari 64,76 tahun di tahun 2013 menjadi 65,12 tahun di tahun 2016. Namun demikian, tetap disadari bahwa secara regional ketimpangan pembangunan kesehatan antar kabupaten/kota di Provinsi Papua sampai saat ini masih merupakan permasalahan yang krusial untuk segera diatasi, oleh karena itu dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRD direkomendasikan agar ada penambahan anggaran yang besar, khususnya untuk pembiayaan pada program-program yang di laksanakan oleh UP2KP, dan belanja di urusan kesehatan pada umumnya di seluruh kawasan pembangunan Provinsi Papua. Mengingat selama ini porsi belanja kesehatan dalam APBD baik itu pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota masih dibawah syarat minimum pembiayaan pembangunan kesehatan yaitu 15 persen.

Pemerintah Provinsi Papua juga memberikan perhatian yang sangat khusus terhadap peningkatan derajat kesehatan Orang Asli

Papua. Melalui program KPS (Kartu Papua Sehat), dan Gerbang Mas Hasrat Papua yang mengusung program Seribu Hari Kehidupan, keduanya mampu memberi harapan besar bagi peningkatan derajat kesehatan keluarga Orang Asli Papua. Contohnya program Seribu Hari Kehidupan dapat memberi dampak terhadap kenaikan berat badan bayi Orang Asli Papua yang dilahirkan, dari sebelumnya rata-rata mencapai 1-2 kilogram, bahkan banyak yang meninggal, sekarang dengan program Gerbangmas tersebut anak-anak Papua yang dilahirkan bisa memiliki berat badan 2,8-3,9 kg, dan tidak ada yang sakit. Sementara melalui KPS, saat ini Orang Asli Papua sudah mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dengan mudah di setiap rumah sakit kabupaten/kota. Dimana salah satu pemanfaatan KPS yang paling banyak dirasakan oleh Orang Asli Papua adalah rujukan pengobatan dan pelayanan opname. Dinas Kesehatan Provinsi Papua sampai dengan tahun 2016 telah mendistribusikan KPS ke 29 kabupaten/kota sebanyak 1.174.907 kartu. Bersama dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), maka program KPS yang dilaksanakan oleh Provinsi Papua ini menjadi program komplemen pelayanan publik yang saling melengkapi dengan program nasional tersebut dalam upaya mengangkat derajat kesehatan masyarakat Papua. Menurut DPRD, dengan adanya program JKN ini, maka perlu dipikirkan redistribusi KPS yang lebih spesifik lagi yang mengarah kepada masyarakat Orang Asli Papua yang miskin serta menetap di daerah-daerah terpencil dan terisolir dimana program JKN dari BPJS tidak dapat menjangkaunya. Adapun untuk Orang Asli Papua yang menetap di daerah-daerah perkotaan, sebaiknya dikurangi kepesertaannya dalam KPS yang kemudian dialihkan kepada program JKN yang dilaksanakan oleh BPJS. Sudah barang tentu semuanya ini membutuhkan penambahan dana yang lebih besar dari sebelumnya.

Selain memberikan rekomendasi untuk peningkatan derajat kesehatan, dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRD juga diungkap rekomendasi yang terkait dengan peningkatan upaya kesehatan

masyarakat dan sumber daya kesehatan, yakni : (1) penambahan dana operasional untuk membangun mengembangkan Balai laboratorium Kesehatan Provinsi Papua, (2) memberi perhatian yang lebih serius terhadap pemberian fasilitas kesejahteraan bagi para dokter spesialis, (3) menganggarkan biaya operasional pemantauan distribusi obat yang lebih besar, khususnya untuk pendistribusian obat yang cepat sampai di daerah wilayah pegunungan agar tidak menjadi kadaluarsa, dan (4) pemberian anggaran untuk biaya operasional verifikator dalam melaksanakan memonitoring KOS dan BPJS.

Kemudian secara spesifik, untuk meningkatkan pelayanan pada RSUD (Rumah Sakit Umumk Daerah) dan RSJ (Rumas Sakit Jiwa), patut diperhatikan beberapa hal oleh pemerintah provinsi yaitu : (1) memberikan dana yang lebih banyak pada RSJ untuk melakukan monitoring jumlah pasien dan pelayanan pasien Jiwa diberbagai daerah di Papua dan Papua Barat, (2) menganggarkan pembayaran hak ulayat dalam pelepasan tanah adat untuk pembangunan RSJ dilokasi baru Koya Barat, (3) penambahan dokter spesialis di RSUD Abepura dan RSUD Dok II, serta penambahan anggaran untuk biaya operasioal keperawatan dan kebidanan, (4) meningkatkan porsi belanja untuk pasien rujukan dari kabupaten/kota ke RSUD Dok II, dan ke rumah sakit rujukan di luar Papua khususnya yang sudah ada MOU seperti RSUD Sarjito, RS Dharmais, dan RS Cikini di Jakarta, rumah sakit di Makassar, RS Dr. Sutomo di Surabaya, (5) meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana RSUD Dok II seperti ketel uap, listrik, ruang gizi, ruang bersalin, dan bak penampung air.

Beranjak dari berbagai masalah pembangunan kesehatan di atas, dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD, maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 telah diakomodir beberapa program kesehatan yang strategis sebagai berikut :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Perbaikan Gizi Masyarakat;

4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
5. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin;
6. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
7. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata;
8. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program di bidang kesehatan ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

(h) Aspek Ketenagakerjaan

Terjadinya ketimpangan pendapatan yang cukup mencolok di Provinsi Papua selama ini jika diamati dengan seksama berakar pada ketidakmerataan dalam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. Terutama sekali ketimpangan antara peluang kesempatan kerja pada Orang Asli Papua dengan Non Papua. Walaupun pertumbuhan ekonomi Provinsi Papua di tahun 2016 dinyatakan yang paling baik di Indonesia, akan tetapi pembagian nilai tambah yang diberikan dalam perekonomian wilayah sangatlah tidak merata jika disoroti pada tenaga kerja Orang Asli dan Non Papua. Fenomena tersebut disebabkan peluang kerja yang terbuka selama ini lebih banyak diserap oleh tenaga kerja Non Papua. Misalkan di sektor jasa perdagangan, perhotelan, restoran, transportasi, komunikasi, perusahaan, perbankan, dan sebagainya, sebagian besar menyerap tenaga kerja Non Papua. Sementara tenaga kerja Orang Asli Papua, dikarenakan kualitas dan produktifitas kerjanya masih rendah, akhirnya kalah bersaing dalam kompetisi pasar kerja. Jumlah tenaga kerja Orang Asli Papua yang bekerja pada sektor-sektor tersebut sangat sedikit. Tidak seperti pada peluang kerja di sektor pemerintahan yang dapat diintervensi oleh Pemerintah Provinsi Papua, pada sektor swasta berlaku hukum pasar yang lebih mengedepankan kompetensi tenaga kerja yang tinggi, yang sulit diintervensi langsung oleh pemerintah provinsi.

Kondisi faktual pasar kerja seperti ini sudah terbaca oleh pihak legislatif secara komprehensif dan holistik. Oleh karena itu dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRD tersirat bahwa pemerintah provinsi perlu meningkatkan produktifitas dan kualitas tenaga kerja Orang Asli Papua melalui pelatihan-pelatihan yang intensif dan peningkatan pendidikan vokasional yang mengarah pada tenaga kerja yang siap pakai dan mampu bersaing dalam pasar kerja, misalkan pelatihan tentang kewirausahaan, pengenalan budaya kerja secara faktor psikologi kerja. Selain itu pemerintah provinsi juga perlu memikirkan kebijakan afirmasi pada Orang Asli Papua, namun dengan tetap mengindahkan persaingan yang sehat, untuk meningkatkan daya serap tenaga kerja Orang Asli Papua dalam perekonomian wilayah, bukan hanya sebatas pada sektor pertanian, namun juga pada sektor-sektor ekonomi produktif lainnya terutama di sektor industri dan jasa perdagangan. Patut dilakukan kajian yang mendalam dan survey tenaga kerja untuk hal ini.

Telah diatur secara nasional bahwa setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota harus menetapkan Upah Minimum Regional (UMR), yang merupakan standar kelayakan hidup yang minimum bagi tenaga kerja. Setiap pelaku bisnis pada sektor swasta diharuskan mematuhi penetapan UMR yang berlaku. Oleh sebab itu, direkomendasikan dalam pokok-pokok pikiran DPRD agar Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini Dinas Tenaga Provinsi Papua melakukan kontrol terhadap berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua, agar konsekwen dan konsisten membayar upah yang minimum sama dengan UMR, sehingga tidak menimbulkan sengketa antara tenaga kerja dengan perusahaan.

Bertitik tolak dari berbagai wacana dan pemikiran konstruktif yang disampaikan oleh DPRD di atas, maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 telah disusun program-program yang terkait dengan ketenagakerjaan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja;
2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
3. Program Pengolahan dan Penyebarluasan Informasi Produktivitas;

4. Program Pengawasan Ketenagakerjaan;
5. Program Peningkatan Kinerja Organisasi;
6. Program Pengembangan Produktivitas Kerja.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program di bidang ketenagakerjaan ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

(i) Aspek Kesejahteraan Sosial Dan Komunitas Adat Terpencil

Penyalahgunaan dan peredaran narkoba, khususnya ganja, di Provinsi Papua sudah pada tahap yang cukup mengkhawatirkan. Apabila dibiarkan berlarut, dapat merusak generasi muda Papua. Penyalahgunaan narkoba juga mempunyai dampak multi dimensi yang sangat luas bagi suatu daerah, mencakup dampak kesehatan, sosial dan ekonomi. Mengingat dampaknya begitu buruk, maka pemerintah provinsi selama ini sudah berupaya untuk menekan dan menghapus peredaran narkoba. Misalkan Dinas Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Terisolir Kabupaten Keerom di tahun 2014 telah mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayahnya. Kondisi geografis wilayah Keerom yang memiliki garis batas darat dan pintu masuk dengan Papua New Guenia (PNG) merupakan salah satu kerawanan masuknya narkotika gelap. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan BNN Propinsi Papua menginisiasi terciptanya kampung siaga narkoba di daerah yang berbatasan dengan NKRI. Masyarakat kampung setempat yang diwakili oleh kepala kampung, perwakilan tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut telah menyatakan komitmen bersama untuk menanggulangi peredaran narkoba. Namun demikian, program penanggulangan yang dijalankan pemerintah daerah tersebut tampak belum optimal. Sampai dengan tahun 2017 ternyata masih ditemukan beberapa ladang ganja di daerah perbatasan RI - PNG. Tawaran yang menggiurkan dari bandar narkoba untuk menanam ganja di kebun milik masyarakat kampung tidak dapat ditolak karena tekanan ekonomi. Rumah tangga petani di daerah-daerah tersebut pada umumnya

miskin dan berpendidikan rendah. Sehingga ketika diiming-imingi dengan uang puluhan juta untuk menanam ganja, mereka tergiur untuk melaksanakannya. Untuk itu dalam rumusan pokok-pokok pikiran DPRD tersirat bahwa pemerintah provinsi harus memberikan perhatian yang lebih serius terhadap Ketahanan Sosial Keluarga Miskin di daerah-daerah perbatasan. Program-program penanggulangan PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) harus lebih dioptimalkan hingga bisa memperkuat daya tahan sosial keluarga miskin mencapai terwujudnya keluarga yang sejahtera baik itu dari sisi ekonomi maupun kehidupan sosial. Jika hal ini terwujud dengan baik maka tidak akan ada lagi keluarga petani di daerah perbatasan yang mau menanam ganja.

Dalam UUD 1945 Pasal 34 ayat 1 ditegaskan bahwa Fakir Miskin dan anak - anak yang terlantar dipelihara oleh negara. UUD 1945 Pasal 34 Ayat 1 tersebut mempunyai makna bahwa selain gelandangan dan pengemis, anak-anak jalanan juga harus dipelihara dan diberdayakan oleh negara yang dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian secara khusus juga ada aturan hukum yang ditujukan untuk melindungi anak yaitu UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban anak, pada Pasal 4 disebutkan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Berdasarkan amanat dari UUD 1945 dan UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut maka sudah seharusnya dan merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah provinsi untuk selalu memperhatikan, melindungi dan mensejahterakan anak-anak papua, termasuk anak jalanan. Sehubungan dengan hal itu maka menurut pokok-pokok pikiran DPRD diperlukan anggaran dan perhatian yang lebih besar dari pemerintah provinsi untuk menangani anak jalanan sebagai potensi sumber manusia Papua masa depan yang sudah harus di inventarisasi untuk di lakukan pembinaan sehingga masa depan anak Papua tidak mengalami kendala sebagai pelaku pembangunan di kemudian hari.

Beranjak dari rumusan pokok-pokok pikiran DPRD di atas, maka terdapat beberapa program kesejahteraan sosial yang telah disusun sebagai program prioritas dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT); dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya;
2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
4. Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Penganggaran Kesejahteraan Sosial;
6. Program Sinkronisasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program di bidang kesejahteraan sosial ini, dan telah mengkomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

(j) Aspek Pemuda Dan Olah Raga

Selepas PON XIX di Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan PON XX sudah ditetapkan oleh KONI Pusat di Provinsi Papua. PON XX akan diselenggarakan pada tahun 2020 yang rencananya tersebar pada 5 kabupaten/kota yakni Jayapura, Timika, Wamena, Biak dan Merauke. Persiapan menuju PON XX sudah dilaksanakan oleh pemerintah provinsi semenjak tahun 2016 lalu, mulai dari pembangunan fisik yang terkait dengan berbagai venue PON XX, termasuk juga sarana dan prasarana pendukung PON XX, hingga koordinasi yang intensif guna mendapatkan dana penyelenggaraan PON XX yang sangat besar, baik itu dengan pemerintah pusat, maupun dengan pihak swasta lokal dan nasional. Hasilnya dapat dilihat sampai dengan tahun 2017 ini, beberapa venue sudah mulai dibangun. Bahkan di Kabupaten Mimika sudah terbangun salah satu venue yang siap 100% untuk pelaksanaan PON XX yaitu

Mimika Sport Complex (MSC). Sementara di Kabupaten Merauke, pembangunan infrastruktur Stadion Katalpal telah mencapai 40 persen, yang dipastikan akan rampung di akhir tahun 2018. Begitu juga dengan Stadion Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura, sedang dalam taraf pengerjaan di tahun 2017 ini.

Lobi dan koordinasi pemerintah provinsi terhadap pemerintah pusat juga membuahkan hasil yang sangat menggembirakan. Dimana dari hasil Ratas Kabinet (Rapat Terbatas) bulan Juli 2017 dengan Presiden Joko Widodo yang antara lain membahas program-program strategis nasional (PSN) yang ada di Provinsi Papua, salah satunya adalah penyelenggaraan PON XX Papua, diperintahkan oleh presiden untuk mengeluarkan INPRES (Instruksi Presiden) PON XX tahun 2020. Dengan Inpres tersebut, Kementerian PUPR akan membantu pembangunan beberapa venue yang penting antara lain Istana Olah Raga (Stadion Papua Bangkit), stadion akuatik, hockey dan sepeda.

Langkah-langkah kesiapan PON XX yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi di atas menurut pemikiran DPRD masih perlu dimaksimalkan. Pemerintah provinsi harus mendukung 100% pengadaan anggaran penyelesaian venue di berbagai kabupaten penyelenggaraan PON XX, terutama yang belum rampung pekerjaannya. Kemudian promosi PON XX Papua harus gencar dilakukan baik itu di media cetak maupun media elektronik yang berskala lokal dan nasional, terutama juga untuk mempromosikan Papua melalui pariwisata dan ketrampilan Home Industri. Hal terpenting juga terkait dengan kesiapan venue PON XX, maka pada tahun 2018 sangat diperlukan evaluasi yang menyeluruh terkait dengan kemajuan persiapan pelaksanaan PON XX, mengingat waktu yang tersisa 2 tahun lagi dari tahun 2018 sangat pendek.

Dalam hal kesiapan atlet PON, maka perolehan medali emas dan peringkat Papua di PON XIX Jawa Barat dapat dijadikan sebagai indikatornya. Peringkat Papua di PON XIX Jawa Barat naik signifikan jika dibandingkan dengan posisinya di PON XVIII Riau yaitu dari peringkat 15 menjadi peringkat 7, dengan jumlah medali emas yang berhasil diraih

mencapai 19 emas, atau bertambah 10 emas dari PON XVIII sebelumnya. Fakta ini menunjukkan bahwa saat ini atlet-atlet Papua sudah cukup siap menghadapi PON XX. Dengan sisa waktu 3 tahun lagi, maka DPRD merekomendasikan agar dilaksanakan kompetisi bibit muda terbaik Papua menjelang PON XX untuk dapat diprediksi jumlah perolehan sesuai kemampuan prestasi yang diperoleh.

Untuk mengakomodir berbagai konsep pemikiran dari DPRD yang terkait dengan persiapan penyelenggaraan PON XX di atas, maka dalam RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 telah disusun program-program pemuda dan olah raga sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga;
2. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga;
4. Pengembangan Prasarana PON;
5. Program Penyelenggaraan Kompetisi/Pekan Olahraga/Kejuaraan Olah Raga;
6. Program Peningkatan Koordinasi dan Sinergitas untuk Penyelenggaraan PON XX 2020;
7. Program Pembinaan Atlet Muda dan Olahraga Prestasi;
8. Program Persiapan Penyelenggaraan PON XX 2020;
9. Program Pelaksanaan Penyelenggaraan PON XX 2020.

Selengkapnya kegiatan-kegiatan yang direncanakan pada setiap program di bidang pemuda dan olah raga ini, dan telah mengakomodir pokok-pokok pikiran DPRD dapat dilihat pada lampiran.

(k) Aspek Perpustakaan Dan Arsip Daerah

Pada era globalisasi saat ini, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Setiap institusi termasuk perpustakaan daerah terus berupaya untuk mengintegrasikan TIK guna membangun dan memberdayakan masyarakat berbasis pengetahuan agar dapat bersaing dalam era global, salah satunya melalui perpustakaan berbasis teknologi informasi. Keberadaan perpustakaan berbasis TIK dapat meningkatkan

kualitas dan kecepatan proses layanan pada pengguna perpustakaan khususnya untuk pelajar dan mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya. Selain itu sistem TIK juga dapat membantu manajemen perpustakaan serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi penatalaksanaan perpustakaan. Mengingat begitu pentingnya pengelolaan perpustakaan daerah berbasis TIK tersebut, maka dalam pokok-pokok pikiran DPRD telah direkomendasikan agar disediakan anggaran untuk pemasangan Wi-Fi. Wi-Fi atau *Wireless Fidelity* merupakan pengembangan dari istilah Hi-Fi (*High Fidelity*), yaitu sebuah media penghantar komunikasi data nirkabel (tanpa kabel) yang bisa digunakan untuk komunikasi atau mentransfer program dan data dengan kemampuan yang sangat cepat. Dimana salah satu fungsinya adalah untuk mengakses jaringan internet tanpa menggunakan kabel data. Melalui fasilitas Wi-Fi tersebut menurut pemikiran DPRD dapat mempermudah dan mempercepat akses terhadap informasi serta literatur penerbitan terbaru bagi pengguna perpustakaan daerah melalui jaringan internet, terutama bagi siswa SD, SLTP dan SLTA.

Kondisi *existing* gedung perpustakaan daerah juga menjadi fokus perhatian dalam pokok-pokok pikiran DPRD. Sebagian besar Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah di Provinsi Papua kondisinya tak terawat dan memprihatinkan. Beberapa Kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah yang tersebar di Papua bahkan masih menumpang pada kantor dinas lainnya, seperti di Kabupaten Nduga. Sementara untuk perpustakaan daerah Provinsi Papua yang bertempat di Kota Jayapura menurut pandangan DPRD sudah tidak representatif lagi karena tidak dapat menampung jumlah pengunjung yang diperkirakan rata-rata 200 orang per hari. Oleh karena itu direkomendasikan agar ada penambahan anggaran untuk merehabilitasi ruang baca pada perpustakaan daerah provinsi agar menjadi lebih luas dan mampu menampung pengunjung secara maksimal.

Memperhatikan berbagai pikiran dan pandangan dari DPRD di atas maka dalam RKPD 2018 telah diakomodir program strategis untuk

pengembangan perpustakaan daerah yaitu Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan, serta Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang dioperasionalkan dengan kegiatan-kegiatan pengembangan dan pembangunan perpustakaan antara lain kegiatan pengembangan minat dan budaya baca, penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum dan daerah, dan otomasi perpustakaan.

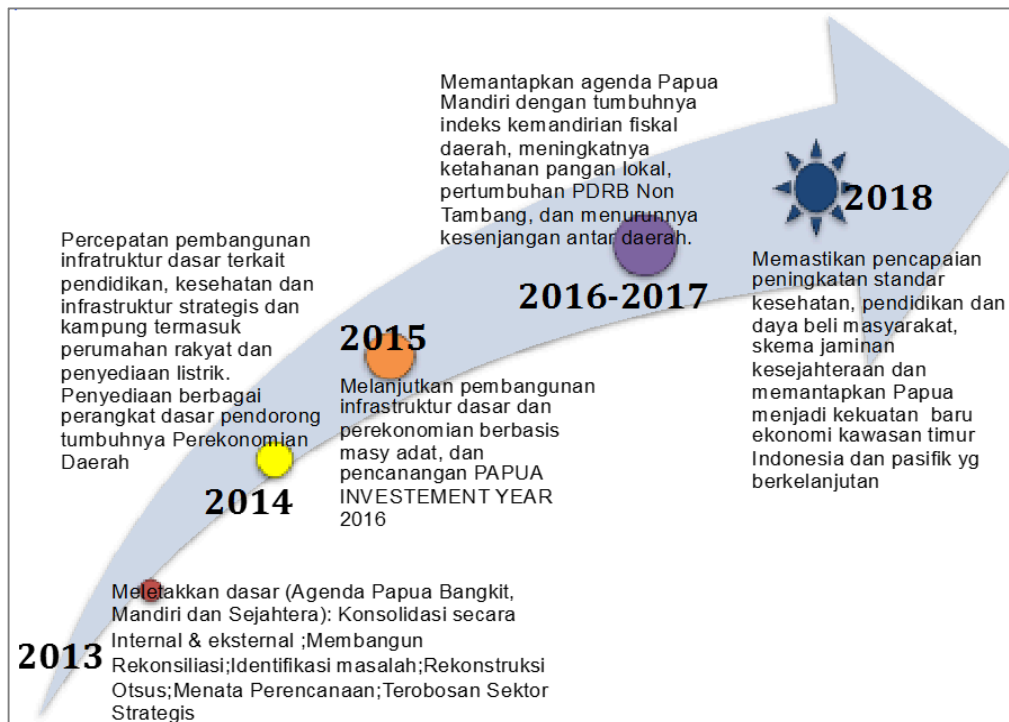
4.2. Tema Pembangunan

4.2.1 Dasar penentuan Tema RKPD Tahun 2018

Tema RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 harus merujuk kepada tema RKP 2018. Oleh karena itu perlu diketahui Tema Rencana kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 sebagai acuan penetapan dan kesinambungan prioritas pembangunan daerah. Adapun Tema RKP 2018 adalah : “Memacu Investasi Dan Pembangunan Infrastruktur Untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas”

RKPD tahun 2018 merupakan tahapan ke lima dan terakhir dari pelaksanaan RPJMD Provinsi Papua dalam rangka mewujudkan visi “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera”. Untuk Pembangunan tahun 2018 ini difokuskan pada upaya “memastikan agenda Papua sejahtera”, sebagaimana fokus pembangunan dalam RPJMD Tahun 2013-2018 di bawah ini.

Gambar 4.1
Fokus Pembangunan Provinsi Papua tahun 2013-2018



Berdasarkan isu strategis dan permasalahan pembangunan Provinsi Papua pada tahun 2018, serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005 - 2025, yang mana RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018 berada pada Tahap II, dengan prioritas pembangunan RPJPD pada tahap ini adalah memantapkan dan meningkatkan kesejahteraan dan penguatan daya saing lokal yang berkelanjutan, maka perumusan tema pembangunan yang tepat menjadi penting dalam rangka mewujudkan pembangunan lima tahunan ke-2 yang *inline* dengan tahapan pembangunan tahunan ke-5 dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018.

Selain itu, oleh karena pendekatan penyusunan RKP dan RKPD 2018 dilakukan dengan perkuatan pelaksanaan kebijakan *money follow program*, serta mempertimbangkan bahwa tahun 2018 merupakan tahun ke-5 atau tahun terakhir dari RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018, yang menjadikan RKPD 2018 sangat strategis untuk memastikan tercapainya sasaran-sasaran utama RPJMD 2013-2018 dalam proses mewujudkan *Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera*, maka secara

substansial rumusan terhadap tema pembangunan tahun 2018 adalah: "*Perluasan Peningkatan Kualitas Hidup Dan Pemantapan Kemandirian Daerah Yang Berdaya Saing, Merata Dan Berkelanjutan*". Dengan unsur utama dalam tema tersebut adalah (1) pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas SDM yang dapat menaikkan derajat kualitas hidup, (2) pengembangan sektor-sektor unggulan yang mampu meningkatkan daya saing, (3) peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur kampung dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan kampung, (4) peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, (5) peningkatan pembangunan berkelanjutan.

4.2.2 RKPD Tahun 2018 sebagai Bagian Integral dari RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018

Visi yang termuat dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah "*Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong*". Upaya pencapaian visi dilakukan melalui 7 misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum;
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera;
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional;
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan nasional jangka menengah tersebut, ditetapkan sembilan agenda prioritas yang disebut "*Nawa Cita*", yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
8. Melakukan revolusi karakter bangsa;
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Selanjutnya pada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018, tercantum Visi yang akan diwujudkan adalah *Papua Bangkit, Mandiri Dan Sejahtera*. Pemahaman *Papua Bangkit* adalah terwujudnya masyarakat Papua yang berkemauan dan bertekad tinggi sebagai kesadaran kontemplatif kolektif untuk melepaskan diri dari label ketertinggalan dan kemiskinan untuk mencapai derajat kualitas hidup yang setinggi-tingginya, sehingga mampu berdiri tegak dengan harkat dan martabat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa menghilangkan identitas diri dan kekhususan ke-Papua-an. Kebangkitan ini terjadi di level individu, keluarga, komunitas, maupun regional. Identitas diri orang Papua diakui dan dihormati dalam berbagai level dan bidang pembangunan. Dimana Orang Papua mampu mengaktualisasikan diri dan

mengambil peran di berbagai bidang pembangunan. Papua Bangkit dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia(IPM) yang semakin baik.

Kemudian *Papua Mandiri*, merupakan keinginan dari pemerintah provinsi untuk mewujudkan kondisi Masyarakat Papua mampu mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik dengan mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan kemajuan ekonomi. Dengan didukung Generasi baru Papua yang memiliki jiwa kewirausahaan (Entrepreneurship) serta ekonomi kampung tumbuh dan berkembang. Perwujudan Papua Mandiri dilakukan dengan mendorong tumbuhnya berbagai sektor unggulan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan sektor kehutanan dan pariwisata harus dikembangkan sehingga memberi nilai tambah dalam pembangunan dan memastikan tersedianya lapangan kerja,serta didukung pengembangan Industri pengolahan yang berbasis keunggulan potensi daerah. Papua Mandiri dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi Papua pada sektor dan sub sektor unggulan yang semakin baik.

Dengan terwujudnya kemandirian, maka di harapkan dapat menciptakan *Papua Sejahtera* yaitu kondisi terwujudnya semua Masyarakat Papua tanpa terkecuali dapat memenuhi hak-hak dasarnya di bidang sosial, ekonomi dan budaya terutama pangan, sandang dan papan secara merata, serta memiliki rasa aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki sebagai tidak kekurangan sesuatu apapun, perasaan aman sentosa, makmur dan selamat atau terlepas dari segala macam gangguan. Dengan pendekatan yang lain, sejahtera juga dapat dikaitkan dengan terbebasnya masyarakat dari “rasa lapar” dan “rasa takut”. Di sini, kesejahteraan dikaitkan tidak saja pada konsep lahiriah, tapi juga menjangkau segi batiniah. Dalam konteks makro, pembangunan daerah juga dimaknai sebagai upaya mencapai kesejahteraan sosial.

Kesejahteraan sosial merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa

keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir bathin, yang memungkinkan bagi setiap Masyarakat Papua untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak azasi serta kewajiban manusia.

Seluruh Visi tersebut akan dicapai melalui 5 misi yang diemban yaitu : (1) mewujudkan suasana aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat di Papua dalam kedaulatan NKRI, (2) mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa serta penguatan otonomi khusus, (3) mewujudkan sumberdaya manusia Papua yang sehat, berprestasi dan berakhlak mulia, (4) pengembangan dan peningkatan taraf ekonomi masyarakat yang berbasis potensi lokal, dan (5) percepatan konektivitas pembangunan infrastruktur dan konektivitas antara kawasan dan antar daerah dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Strategi yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Papua untuk mencapai Visi pembangunan jangka menengah daerah dalam menjalankan misi pembangunan sebagai berikut :

1. Revitalisasi dan Optimalisasi Peran Lembaga Keagamaan dan Adat;
2. Penegakan Hukum dan revitalisasi peran Masyarakat dalam mewujudkan Ketenteraman dan ketertiban Masyarakat;
3. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;
4. Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi antar wilayah dan antar sektor dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
5. Penguatan Fungsi Koordinasi antar lembaga daerah dan Penataan Kewenangan dalam Pemerintahan Berbasis Otsus;
6. Optimalisasi Pengawasan dan pengendalian kependudukan;
7. Revitalisasi dan optimalisasi peran lembaga keagamaan, peran perempuan dan Pelayanan Sosial;
8. Revitalisasi nilai-nilai budaya;
9. Optimalisasi Pembinaan Olah Raga dan Pemuda;
10. Optimalisasi dan revitalisasi pelayanan kesehatan dan pendidikan;

11. Mengembangkan struktur perekonomian yang berbasis Keunggulan Lokal Daerah;
12. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam;
13. Pembangunan sarana dan prasarana yang berbasis pada kebutuhan masyarakat dan konektivitas antar wilayah;
14. Pembangunan infrastruktur dasar sesuai dengan potensi, kondisi dan budaya setempat;
15. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan.

Secara prinsip antara agenda prioritas pembangunan nasional dan sasaran pokok pembangunan nasional merupakan satu bagian integral yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan pembangunan nasional periode 2015-2019. Dalam hal ini tentunya prinsip perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan tersebut juga menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam konteks perencanaan pembangunan 5 (lima) tahunan nasional maupun perencanaan pembangunan tahunan Provinsi Papua. Hubungan tema tahunan di dalam RKPD tahun 2018 dengan misi RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 sebagai berikut :

1. Pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kualitas SDM yang dapat menaikkan derajat kualitas hidup, selaras dengan sasaran pembangunan Provinsi Papua yaitu terwujudnya masyarakat yang sehat, terwujudnya masyarakat yang cerdas dan terampil, dan terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja, serta terpenuhinya hak-hak dasar orang asli papua berupa hak memperoleh pelayanan pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar, hak politik, dan hak budaya. Dan selaras juga dengan misi pembangunan nasional yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
2. Pengembangan sektor-sektor unggulan yang mampu meningkatkan daya saing, selaras dengan sasaran pembangunan Provinsi Papua yaitu terwujudnya iklim investasi yang kondusif, meningkatnya

kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM, meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil dan menengah, terselenggaranya promosi potensi kepariwisataan daerah, serta tercapainya stabilitas makro ekonomi. Selain itu juga selaras dengan misi pembangunan nasional yakni mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

3. Peningkatan infrastruktur dasar dan infrastruktur kampung dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan dan percepatan pembangunan kampung, selaras dengan sasaran pembangunan Provinsi Papua yaitu Meningkatnya konektivitas antar wilayah, Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah, Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah, Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan, Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni, dan Meningkatnya ketersediaan air bersih. Juga sejalan dengan misi pembangunan nasional yaitu upaya untuk mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
4. Peningkatan pelayanan publik, pendidikan, dan kesehatan, sangat selaras dengan sasaran pembangunan Provinsi Papua yakni Meningkatnya profesionalisme dan akuntabilitas kinerja serta disiplin aparatur, meningkatnya kualitas pelayanan publik yang komprehensif berbasis teknologi informasi, terwujudnya pengelolaan keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel yang berpihak pada layanan publik, serta meningkatnya kapasitas dan berubahnya pola pikir (*mind set*) aparatur pemerintah daerah. Termasuk selaras juga dengan misi pembangunan nasional dalam upaya mewujudkan masyarakat maju, berkeeseimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
5. Peningkatan pembangunan berkelanjutan, selaras dengan sasaran pembangunan Provinsi Papua yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat adat papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat papua, terwujudnya papua sebagai

paru-paru dunia, serta meningkatnya pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan.

4.3. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan

4.3.1. Dasar Penetapan Prioritas Pembangunan Tahun 2018

Untuk menentukan prioritas pembangunan daerah tahun 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan dan mendasarkan 5 (lima) hal sebagai berikut :

- 1) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang dijabarkan dalam 9 (sembilan) agenda pembangunan (NAWA CITA) sebagaimana tercantum dalam RKP 2018;
- 2) Arah pembangunan tahap ke-2 RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025 dengan prioritas yaitu memantapkan dan meningkatkan kesejahteraan dan penguatan daya saing lokal yang berkelanjutan;
- 3) Arah kebijakan dan prioritas pembangunan dalam RPJMD Provinsi Papua 2013-2018 pada tahun ke lima;
- 4) Pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Papua;
- 5) Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016, dan target Tahun 2017 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh pemerintah provinsi yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2018.

4.3.2. Prioritas RPJMN Pada Tahun 2018

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 ayat 3 Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Kemudian seluruh aspek tersebut nantinya akan menjadi landasan dalam menciptakan perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu. Dengan demikian hal tersebut dapat menjadi kunci untuk mencapai

efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program sehingga sasaran dan manfaat pembangunan lebih mudah dapat tercapai. Adapun prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2018 secara garis besarnya sebagai berikut :

1. Prioritas pertama di bidang pendidikan, mencakup peningkatan pendidikan Vokasi dan kualitas guru;
2. Prioritas kedua di bidang kesehatan yaitu Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak, Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit, dan Preventif dan Promotif (Gerakan Masyarakat Hidup Sehat);
3. Prioritas ketiga di bidang perumahan dan permukiman yang meliputi Penyediaan Perumahan Layak, serta Air Bersih dan Sanitasi;
4. Prioritas keempat pada bidang pengembangan dunia usaha dan pariwisata yang meliputi Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), pengembangan Kawasan Industri (KI), Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja, serta Peningkatan Ekspor Barang dan Jasa Bernilai Tambah Tinggi;
5. Prioritas kelima di bidang ketahanan energi, meliputi peningkatan EBT dan Konservasi Energi, dan Pemenuhan Kebutuhan Energi;
6. Prioritas keenam pada bidang ketahanan pangan, yaitu berupa Peningkatan Produksi pangan, dan Pembangunan sarana dan prasarana pertanian (termasuk irigasi);
7. Prioritas ketujuh pada penanggulangan kemiskinan, dengan prioritasnya pada pemberian Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, serta Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi;
8. Prioritas kedelapan di bidang infrastruktur, konektivitas, dan kemaritiman, yang mencakup Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi (darat, laut, udara, dan inter-moda), serta Pengembangan Telekomunikasi dan Informatika;
9. Prioritas kesembilan pada bidang pembangunan wilayah, antara lain Pembangunan Wilayah Perbatasan dan Daerah Tertinggal,

Pembangunan Perdesaan, Reforma Agraria, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (a.l Kebakaran Hutan), serta Percepatan Pembangunan Papua;

10. Prioritas kesepuluh adalah bidang politik, hukum, pertahanan & keamanan yang mencakup Penguatan Pertahanan, Kepastian Hukum, Stabilitas Politik dan Keamanan, serta Reformasi Birokrasi.

4.3.3. Prioritas RPJMD Provinsi Papua Pada Tahun 2018

Prioritas pembangunan pada tahun 2018 disesuaikan dengan fokus pembangunan setiap tahunnya selama 5 (lima) tahun, yang menjadi pedoman dalam perumusan prioritas dan sasaran pembangunan di Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Berdasarkan fokus pembangunan tiap tahunnya disusunlah arah kebijakan yang merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih sehingga lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari tahun ke tahun selama 5 (lima) tahun.

Sesuai dengan arah kebijakan pada tahun 2018 yang merupakan tahap terakhir dari periode RPJMD 2013-2018, maka prioritas pembangunan di tahun 2018 ini selain untuk melaksanakan pencapaian-pencapaian pada tahap-tahap sebelumnya dari sasaran yang masih belum tercapai, sehingga pada tahap ini diharapkan keseluruhan sasaran dan indikatornya yang telah ditetapkan dapat tercapai keseluruhannya dan apa yang diamanatkan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penjabaran visi dan misi yang ada didalam dokumen RPJMD dapat tercapai sehingga dapat mewujudkan visi Papua Bangkit Mandiri dan Sejahtera, juga diprioritaskan untuk : (1) mewujudkan prestasi olahraga dan partisipasi pemuda dalam pembangunan, (2) mewujudkan iklim investasi yang kondusif; (3) menciptakan stabilitas makro ekonomi, (4) meningkatkan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK, (5) meningkatkan kapasitas dan produktivitas industri kecil dan menengah, (6) meningkatkan kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah, (7) meningkatkan penyediaan

lapangan kerja, dan menyelenggarakan promosi potensi kepariwisataan daerah, (8) meningkatkan konektivitas antar wilayah, (9) meningkatkan pemenuhan perumahan layak huni, ketersediaan air bersih, pemenuhan energi listrik.

4.3.4. Prioritas RKPD Tahun 2018

Prioritas pembangunan Provinsi Papua tahun 2018 disusun dengan mempertimbangkan berbagai kebijakan pembangunan baik di tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun nasional, yakni :

1. Komitmen-komitmen nasional yang juga merupakan komitmen internasional, yaitu dimana Negara Indonesia merupakan salah satu negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen *Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*, dan untuk memenuhi komitmen Pemerintah dalam pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals* perlu penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang pelaksanaan pencapaiannya tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017. Selain komitmen menuju pembangunan berkelanjutan, Pemerintah juga berkomitmen dalam Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Inpres Nomor 5 Tahun 2004;
2. Sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum RPJMN Tahun 2015-2019;
3. Sasaran pembangunan yang dimuat dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.
4. Arah pembangunan tahap ke-2 RPJPD Provinsi Papua Tahun 2005-2025.
5. Pokok-pokok pikiran DPRP Papua pada penyusunan RKPD 2018;
6. Hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah tahun 2016, dan target Tahun 2017 yang menunjukkan berbagai permasalahan dan isu

strategis yang dihadapi oleh pemerintah provinsi yang bersifat mendesak dan harus segera diatasi pada tahun 2018.

Adapun penyusunan prioritas program/kegiatan SKPD disusun dengan menggunakan beberapa kriteria, antara lain :

1. Kegiatan Unggulan dan Prioritas yang telah disepakati dalam Musrenbang RKPD Tahun 2018;
2. Program/Kegiatan yang mengarah pada pemecahan isu strategis Provinsi Papua Tahun 2018;
3. Program/ Kegiatan yang mengarah pada sasaran pada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 – 2018;
4. Program/ Kegiatan yang mengacu pada tema dan fokus pembangunan tahun 2018;
5. Program/ Kegiatan yang mendesak untuk segera ditangani pada tahun 2018;
6. Program/Kegiatan yang mengarah pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal; dan
7. Program/Kegiatan yang sesuai dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDG's), yang meliputi 17 tujuan yaitu :
 - a. Menghapus kemiskinan dalam segala bentuknya dimanapun;
 - b. Mengakhiri kelaparan, mencapai keamanan pangan dan perbaikan gizi, dan memajukan pertanian berkelanjutan;
 - c. Memastikan hidup sehat dan memajukan kesejahteraan bagi semua orang di semua usia;
 - d. Memastikan kualitas pendidikan yang inklusif dan adil serta mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup bagi semua;
 - e. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
 - f. Memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan bagi semua;
 - g. Memastikan akses ke energi yang terjangkau, dapat diandalkan, berkelanjutan dan modern bagi semua;

- h. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, kesempatan kerja yang penuh dan produktif serta pekerjaan yang layak bagi semua;
- i. Membangun infrastruktur yang tangguh, menggalakkan industrialisasi yang berkelanjutan dan inklusif dan mengembangkan inovasi;
- j. Mengurangi ketimpangan di dalam dan diantara negara-negara;
- k. Membuat kota dan permukiman manusia menjadi inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- l. Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan;
- m. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampak-dampaknya;
- n. Menghemat dan menjaga kesinambungan dalam menggunakan samudera, laut dan sumberdaya untuk pembangunan yang berkelanjutan;
- o. Melindungi, memulihkan dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, dan menghentikan degradasi tanah cadangan serta menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- p. Mendorong kehidupan masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan;
- q. Memperkuat sarana pelaksanaan revitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Merujuk pada berbagai wawasan dan konsep berpikir di atas maka prioritas dan fokus pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2018 adalah sebagai berikut.

Tabel. 4.1.
Prioritas Dan Fokus Pembangunan Tahun 2018

No.	Prioritas Daerah	Fokus Pembangunan
1	Pemenuhan kebutuhan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang merata bagi masyarakat khususnya orang asli Papua 2. Peningkatan jaminan kesehatan masyarakat serta pelayanan kesehatan dasar 3. Penyediaan Rumah Layak Huni dan infrastruktur dasar kampung 4. Peningkatan produksi pertanian tanaman pangan yang berbasis sumber daya local dan ketahanan pangan 5. Peningkatan sistem distribusi dan logistik yg terjangkau 6. Peningkatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, peningkatan bantuan sosial
2	Peningkatan kualitas SDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Pendidikan Vokasi berbasis Potensi Lokal 2. Peningkatan akses, kualitas dan relevansi Pendidikan 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG & Pemberdayaan perempuan 4. Perlindungan, Pembinaan dan Pengembangan Kebudayaan 5. Peningkatan Mutu Kesehatan Masyarakat 6. Penelitian dan Pengembangan, Pengembangan IPTEK
3	Pemberdayaan ekonomi berbasis komoditas unggulan dan pengembangan kawasan strategis untuk peningkatan investasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri, pemasaran, distribusi dan dukungan modal usaha 2. Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam dan keanekaragaman hayati 4. Peningkatan Investasi berbasis hilirisasi komoditas lokal papua serta pengendalian dan pengawasan investasi berbasis lahan skala luas 5. Perbaikan dan pemb. Jaringan irigasi/Rawa 6. Optimalisasi lahan produksi pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perikanan/ kehutanan, meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah 7. Peningkatan kinerja dan pendapatan BUMD 8. Pengembangan Pariwisata & ekonomi kreatif berbasis Potensi Lokal
4	Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan Infrastruktur Dasar Wilayah (Air bersih, sanitasi, listrik dan telekomunikasi)

No.	Prioritas Daerah	Fokus Pembangunan
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi, air baku, pengendalian banjir, dan abrasi pantai 3. Percepatan konektivitas transportasi antar moda fokus penuntasan konektivitas kab /distrik/kampung terisolir 4. Penataan kawasan permukiman
5	Pengembangan kawasan khusus berbasis perkampungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi Gerbangmas di 15 Kab 2. Implementasi PROSPEK
6	Percepatan kesiapan pelaksanaan PON XX	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan internasional 2. Penyediaan Infrastruktur penunjang Venue 3. Mendorong partisipasi dan peran aktif Masyarakat dalam menunjang Pelaksanaan PON XX 4. Pembinaan atlit muda dan olah raga prestasi
7	Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Sistem Kepegawaian dan Pendayagunaan aparatur 2. Peningkatan sistem administrasi pengelolaan dan koordinasi Otsus 3. Peningkatan sistem administrasi umum, pemerintahan dan Kehumasan 4. Penguatan Perencanaan, Penganggaran, Pendapatan daerah, Pengendalian dan Evaluasi serta tata kelola Asset 5. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Aktivitas Keagamaan dan Bantuan kepada Lembaga Keagamaan, Menciptakan kerukunan antar Umat Beragama, Etnik dan Kelompok Sosial Lainnya 6. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 7. Peningkatan Fungsi Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Eksternal dan Internal 8. Penataan Batas wilayah, kerjasama pembangunan dan kerjasama pembangunan
8	Pengendalian Pemanfaatan ruang, pengelolaan lingkungan hidup dan penanganan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengendalian kualitas lingkungan 2. Pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan sanksi 3. Penanggulangan Bencana 4. Implementasi RAD GRK 5. Penguatan Perencanaan dan kelembagaan tata ruang provinsi dan Kab/kota

4.4. Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan Sasaran pembangunan Provinsi Papua setiap tahunnya mengacu pada pencapaian Visi Pembangunan Provinsi Papua, yaitu : “Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera” yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018.

Dalam mewujudkan visi tersebut dilakukan dengan beberapa misi atau agenda pembangunan selama 5 (lima) tahun yang dijelaskan dalam setiap tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai arahan arahan dan evaluasi penyusunan prioritas pembangunan setiap tahunnya. Adapun tujuan dan sasaran dari pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks sebagai berikut :

Tabel. 4.2.
Hubungan Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran Pembangunan

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran
Visi: Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera		
Misi 1: Mewujudkan Suasana Aman, Tentram dan Nyaman Bagi Seluruh Masyarakat Papua dalam Kedaulatan NKRI	Meningkatkan Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius dan Berbudaya	Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.
		Meningkatnya masyarakat Papua yang berbudaya
	Meningkatkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh Masyarakat Papua	Meningkatnya suasana damai dan kepastian hukum serta terjaganya ketertiban umum
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua
Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Berwibawa serta Penguatan Otonomi Khusus	Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Aparatur	Meningkatnya Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi
		Meningkatnya Penegakan Hukum dan Pemberantasan KKN
		Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran
		Akuntabel yang berpihak pada Layanan Publik
	Mewujudkan Hubungan Kerja antara Provinsi dan Kabupaten/kota yang harmonis	Meningkatnya Kerjasama antara Pemerintah Provinsi dan Kab/Kota dan antar Kab/Kota
		Meningkatnya Koordinasi Wilayah Pembangunan berdasarkan 5 Wilayah adat
	Mengoptimalkan Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua Secara Konsekuen	Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku)
		Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRD dalam rangka Implementasi Kebijakan Otonomi Khusus Papua.
		Terpenuhinya Hak-Hak Dasar Orang Asli Papua berupa Hak memperoleh Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Hak Politik, dan Hak Budaya.
	Penataan Sistem Kelembagaan Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang mencerminkan Kebutuhan Fungsi-fungsi Pemerintahan	Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan
		Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan
		Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (Mind set) Aparatur Pemerintah Daerah
	Misi 3: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Papua yang Sehat, Berprestasi dan Berahlak Mulia	Meningkatkan Layanan Sosial Budaya dan Keagamaan
Terwujudnya masyarakat yang religius		
Terwujudnya layanan sosial yang berkualitas		
Terwujudnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan		
Lestarnya budaya asli dalam perkembangan modernisasi di Papua		
Meningkatkan Kualitas		Meningkatnya prestasi olahraga

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran
	SDM Papua yang berdaya saing dan beretika	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan
		Terwujudnya Masyarakat yang Sehat
		Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil
Misi 4: Pengembangan dan Peningkatan Taraf Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Potensi Lokal	Membangun struktur perekonomian yang kokoh dan berkelanjutan di seluruh Papua berbasis ekonomi lokal yang mandiri	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif
		Tercapainya stabilitas makro ekonomi
		Meningkatnya kapasitas dan produktivitas koperasi dan UMKM
		Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah
		Terwujudnya Peningkatan Penyediaan Lapangan Kerja
		Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah
	Menciptakan pengelolaan SDA secara terpadu dgn memperhatikan penataan ruang dan kelestarian lingkungan	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat
		Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat
Misi 5: Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Kawasan dan Antar Daerah dengan Mengedapatkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan wilayah	Meningkatnya konektivitas antar wilayah
		Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah
		Meningkatnya jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah
		Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan
		Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni
		Meningkatnya ketersediaan air bersih
	Terwujudnya pembangunan berkelanjutan	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten
		Papua sebagai paru-paru dunia

Visi / Misi	Tujuan	Sasaran
		Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan
		Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh pemangku kepentingan

4.5.Prioritas Program Pembangunan Daerah Tahun 2018

Selanjutnya dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018, maka perlu disusun penjelasan program prioritas daerah yang akan dilaksanakan pada tahun 2018. Perumusan program prioritas tahun 2018 ini dilandaskan pada permasalahan yang ada di Provinsi Papua guna memastikan perubahan dan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah. Upaya ini sesuai dengan tahapan pembangunan pada tahun 2018 yang diharapkan memiliki dampak nyata dan langsung bagi keberlanjutan pembangunan.

Berdasarkan prioritas dan fokus pembangunan Provinsi Papua Tahun 2018, maka upaya pencapaiannya dijabarkan secara lebih sistematis melalui Program Prioritas Daerah Tahun 2018 yang bersifat strategis, berdampak luas pada pencapaian sasaran, dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, dengan indikator kinerja sasaran pembangunan yang jelas, sederhana, terukur dan dapat tercapai dalam kurun waktu pelaksanaan yang telah ditentukan.

Indikator dan target capaian sasaran pembangunan di Provinsi Papua disusun sebagai bagian dari capaian terhadap kinerja sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2013 -2018. Indikator kinerja sasaran pembangunan Daerah dalam RPJMD ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU), yang harus diacusebagai sasaran maupun indikator sasaran dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Pencapaian sasaran pembangunan tersebut selanjutnya dijabarkan melalui pelaksanaan program dan kegiatan prioritas daerah. Pada tahun 2018 orientasi perencanaan dan penganggaran Pemerintah Provinsi Papua bergeser dari *money follow function* menuju *money follow priority program*, yaitu alokasi anggaran diarahkan pada Program Prioritas Pembangunan Daerah guna memenuhi target sasaran RPJMD dan SPM yang telah ditetapkan, sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus dibiayai secara merata. Oleh karena itu, pendekatan sistem perencanaan dan penganggaran program prioritas daerah disusun berdasarkan aspek holistik, tematik, integratif dan spasial.

Prioritas dan program pembangunan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan. Dimensi pembangunan dan permasalahannya begitu luas dan membutuhkan sumber daya yang besar untuk menyelesaikannya. Dengan penetapan prioritas akan semakin memudahkan dilakukan intervensi terhadap pembangunan. Hal ini selaras dengan pendekatan perencanaan dan penganggaran, bahwa penganggaran yang disusun harus berbasis kepada prioritas. Penguatan penganggaran akan diberikan lebih kepada usulan pembangunan yang memiliki keterhubungan dengan prioritas dalam upaya pencapaian target pembangunan.

Prioritas daerah merupakan bagian dari prioritas nasional, sehingga rencana terhadap pembangunan nasional adalah perwujudan terhadap rencana pembangunan daerah. Selain itu, dalam rangka mengakomodir penegasan urusan sebagaimana amanat peraturan perundang-undangan, maka rangkaian keterhubungan prioritas dan pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.3.

**Tabel. 4.3.
Indikator dan Target Program Prioritas Pembangunan Daerah**

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
1 Kesehatan; Perumahan dan Pemukiman; Ketahanan Pangan; Penanggulangan Kemiskinan; Pembangunan Wilayah;	1 Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1 Terwujudnya layanan sosial yang berkualitas.	Cakupan KAT	90%	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Menurunnya Prosentase Kemiskinan di Provinsi Papua	75%
			Cakupan Layanan PMKS	4%	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Prosentase KAT yang mandiri	75%
						Meningkatnya keberfungsian sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	70%
					Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Meningkatnya akses pelayanan kelembagaan kesejahteraan sosial	70%
					Perlindungan dan Jaminan Sosial	Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi Keluarga miskin	20%
		Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	70%			
		2 Terwujudnya Keadilan dan kesetaraan Gender dalam Pembangunan.	Indeks Pemberdayaan Gender		Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Meningkatnya kebijakan daerah tentang pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak	79%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
			Indeks Pembangunan Gender	78	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Meningkatnya program dan kegiatan berbasis gender	11 Acara
					Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	Meningkatnya kehidupan aman, damai dan sejahtera bagi perempuan dan anak	72 Acara
					Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan	40 Kelompok
					Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Prosentasi peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan	70%
					Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	Prosentase peningkatan peran Perempuan dalam pembangunan	60%
		3 Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekonomian masyarakat.	Optimalisasi lahan produksi pertanian/ perkebunan/peternakan/perikanan/ kehutanan		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	terwujudnya ketahanan pangan daerah	3 Wilayah
			Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan daerah		Program Peningkatan Diversifikasi Panganekaragaman dan Keamanan Pangan	terwujudnya ketahanan pangan lokal	5 Wilayah
			Terwujudnya kecukupan pangan dan gizi		Membangun SDM Petani Papua	Peresentase Petani terdidik	500 Orang
			meningkatnya produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal		pembangunan kawasan industri agribisnis	terwujudnya kawasan industri agribisnis	2 Wilayah

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
			tersedianya cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	persentase penyuluh pertanian/perkebunan profesion	100 Orang
			meningkatnya kapasitas kelembagaan petani		Program peningkatan pemasaran hasil produksi perta	produk pertanian yang menjangkau pasaran kawasan	5 Jenis
			tersedianya tenaga penyuluh/pendamping ditingkat masyarakat		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	persentase petani sejahtera	5 Wilayah
			tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian		peningkatan produksi tanaman pangan lokal	terwujudnya kemndirian pangan daerah	5 Wilayah
					Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Cakupan lembaga yang diperkuat kapasitas kelembagaannya di Distrik dan kampung	70%
					Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyakat	100 Kelompok
					Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan	12 Kelompok
				Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan		100%	

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dalam p	2 Kegiatan
					Program pengembangan budidaya perikanan	terwujudnya pengembangan budidaya perikanan	500 Kelompok
					Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Terwujudnya Pengembangan Perikanan tangkap	50 Kelompok
						Meningkatkannya produksi Perikanan Tangkap	4.500 Ton
					Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan	7 Ton
						Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	30 Produk
					Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Meningkatnya Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	30 Produk
					Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Meningkatnya hasil produksi perikanan	100 Produk
					Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Meningkatnya fungsi pelayanan UPTD	100%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Persentase Meningkatnya kemampuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	100%
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	terwujudnya petani /kelompok mandiri	6 Wilayah
						terwujudnya petani /kelompok mandiri	1 Wilayah
						terwujudnya petani /kelompok mandiri	5 Wilayah
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya Produksi perkebunan	261,711
						Meningkatnya produksi perkebunan	517.559 Ha
						Meningkatnya produksi perkebunan	300 Ha
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	10.000 Ton
						Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	75 Ton
					Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	cakupan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1
						Terlaksananya inovasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan	5 Kegiatan

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persentase penyuluh handle	100%
						Persentase Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	100%
						persentase penyuluh handle	47%
						Persentase Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	47%
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	1 Kegiatan
					Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	7
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Hasil Produksi Peternakan yang dipasarkan	4
					Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Meningkatnya n penerapan teknologi peternakan	1 Kegiatan
					Program Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	3 Dokumen

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	3 Kegiatan
						Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	2 Kegiatan
						Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	3 Dokumen
					Program Pengembangan Agribisnis	Meningkatnya Pendapatan Petani Pelaku Agribisnis	15%
					Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Jumlah Sumber Daya Pertanian Yang ditingkatkan kem	500 Kelompok
					Program Peningkatan kemandirian pangan dan ketahanan pangan asal hewan	Meningkatnya kemandirian pangan dan ketahanan pangan asal hewan	3 Kegiatan
					Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Jumlah Jenis Tanaman Spesifik lokal yang dikembang	3 Bibit
						Jumlah Jenis Tanaman Spesifik lokal yang dikembang	100 Bibit
					Peningkatan dan Pengembangan Teknologi budidaya tanaman pangan	Meningkatnya Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultur	5 Wilayah

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					dan hortikultur		
					Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	100
					Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Persentase meningkatnya Pembinaan dan penertiban Industri Primer Hasil Hutan Kayu	100%
					Program perencanaan dan pengembangan hutan	terwujudnya pengelolaan hutan	32 Wilayah
					Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum adat	3 Kegiatan
					Program Penataan Kawasan Hutan	Presentase Luas lahan	100 Hektar
					Program Pencegahan Deforestasi	Terlaksananya aksi mitigasi penurunan emisi di bid	5 Kegiatan
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi	Presentase Meningkatnya Kualitas dan Akses informasi	100%
					Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	persentase masy pertambangan ramah lingkungan	10 Obyek
					Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	menurunnya persentase kerusakan lingkungan km keg tambang	10 Lokasi

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan	Meningkatnya kerjasama aparaturn pemerintah	20%
					Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat	20%
					Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema	20%
					Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Pertambangan	20%
					Penataan Struktur Industri	Tertatanya struktur industri	85%
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya produktifitas wilayah transmigrasi	75%
					Program Transmigrasi Lokal	Meningkatnya Produktifitas Kawasan Transmigrasi Lokal	80%
		4	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan.	Rasio elektrifikasi	Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	Meningkatnya jumlah investor untuk berinvestasi di bidang pertambangan dan energi	10%
				Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan	20%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
			Daya terpasang			Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)	Meningkatnya ketersediaan bbm untuk nelayan
			Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Jumlah/cakupan pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan	60%		
		5 Meningkatnya ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni.	tingkat ketersediaan perumahan rakyat yang layak huni		Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Prosentase kampung yang terlayani infrastruktur dasar	65%
					Program Pengembangan Perumahan	Rumah Layak huni yang terbangun	294 Unit
					Program Lingkungan Sehat Perumahan	Prosentase penduduk yang terakses lingkungan sehat	100%
						cakupan keterlayanan lingkungan sehat	0%
					Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Penyelesaian perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	100%
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya produktifitas wilayah transmigrasi	75%
					Program Transmigrasi Lokal	Meningkatnya Produktifitas Kawasan Transmigrasi Lokal	80%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja		
			Uraian	Target		Uraian	Target	
		6 Meningkatkan ketersediaan air bersih.	cakupan pelayanan air bersih		Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Meningkatnya kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	65%	
					Program pembangunan infrastruktur pedesaan	Prosentase kampung yang terlayani infrastruktur dasar	65%	
					Program Pelayanan Air Bersih	Meningkatnya ketersediaan air bersih	20%	
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya produktifitas wilayah transmigrasi	75%	
2	Pendidikan; Dunia Usaha dan Pariwisata; Pembangunan Wilayah;	2 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	1 Terwujudnya masyarakat yang religius.	Penggunaan Narkotika dan pemakaian Zat Adiktif		Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman organisasi masyarakat tentang undang-undang ormas/LSM	80%
				Jumlah Konflik akibat SARA	18%	Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan		0
				Tingkat Kriminalitas	33%	Program Pemberdayaan Keagamaan		0
		2	Meningkatnya Partisipasi pemuda dalam pembangunan.	Jumlah Pemuda yang dilatih dalam kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan		Program peningkatan peran serta kepemudaan		0
				Peningkatan wirausaha muda asli Papua	7%			
		3	Terwujudnya	Usia Harapan Hidup	65 Tahun	Program Obat dan	Prosentase obat dan	100%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
		Masyarakat yang Sehat			Perbekalan Kesehatan	perbekalan	
			Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	313	Program Upaya Kesehatan Masyarakat		0
			Porposi Kelahiran yang ditolong oleh Tenaga Kesehatan terlatih	28%			0
			Tingkat Kesadaran masyarakat terhadap kesehatan				0
			Frekuensi pengawasan obat dan makanan		Program Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dasar tersosialisasi MJAS yang aman dari bahan berbahaya	70 Sekolah
			Angkan kecukupan gizi (AKG)		Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Jumlah puskesmas yang membudidayakan tanaman obat tradisional	29 Lokasi
			Terpenuhinya sanitasi dasar		Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		0
			Prevalensi Kekurangan Gizi pada anak balita (%)			Jumlah penyebarluasan informasi melalui media massa	70 Kali Tahun
			Kasus Malaria (AMI) per 1000 penduduk		Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan gizi buruk dan gizi kurang	14%
			Cakupan Imunisasi dasar (persen)			jumlah cakupan gizi masyarakat	85%
			Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup	9	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Jumlah kampung Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)	325 Kampung
						Jumlah kampung yang melaksanakan Sanitasi	225 Kampung

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						Total Berbasis Masyarakat (STBM)	
					Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Penderita HIV yang mendapat akses ARV	60%
				Jumlah kabupaten yang mempunyai peraturan KTR (Kawasan Tanpa Rokok)		16 Kabupaten	
				Jumlah kabupaten dengan angka malaria (API) < 1 per 1000 penduduk		7 Kabupaten	
				Penemuan kasus baru TB Paru BTA + (CDR)		70%	
				Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan	15 Tahun	
						0	
				Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk OAP miskin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	5 Orang	
				Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		0	
						0	
					Jumlah rumah sakit yang terbangun	1 Unit	

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata		0
						Tersedianya pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	20 Unit
							0
					Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kegiatan mitra pembangunan kesehatan yang tersinkronisasi	75%
					Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	Cakupan puskesmas yang melaksanakan Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR)	40%
						Cakupan puskesmas yang melaksanakan penjangkaran anak sekolah kelas 7 dan kelas 10	40%
						Cakupan puskesmas yang melaksanakan penjangkaran anak sekolah kelas 1	40%
					Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	Cakupan pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan (PF)	40%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						Cakupan kunjungan Neonatal pertama	68%
						Cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil K4	65%
					Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan		0
						Dinas Kesehatan Kabupaten yang memiliki dokumen Renstra	19 Kabupaten
					Program upaya kesehatan perorangan	Rumah Sakit yang terakreditasi	35%
							0
						Presentase Upaya kesehatan perorangan	100%
					Program Sumber Daya Kesehatan	Puskesmas sangat terpencil yang memiliki minimal 5 jenis tenaga sesuai standar	70%
						Daerah terisolir/sangat terpencil yang dijangkau pelayanan kesehatan	40 Lokasi
							0
						Jumlah Diklat Aparatur yang terakreditasi	19 Bh
					Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Jumlah Fasyankes di kabupaten yang melakukan pemantapan	175 Bh

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja		
			Uraian	Target		Uraian	Target	
						mutu eksternal		
						Pelayanan Laboratorium Kesehatan yang terakreditasi ISO 17025	95%	
					Program Pengembangan Data/Informasi	Kabupaten yang melaporkan rutin melalui SIKNAS/Komdat	22 Kabupaten	
						Kabupaten yang menyusun Profil Kesehatan	18 Kabupaten	
					Program Peningkatan Kesehatan Jiwa Masyarakat	Kabupaten yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa	29%	
						Kabupaten yang melakukan pelayanan kesehatan jiwa	29%	
					Upaya Kesehatan Perorangan		0	
		4	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas dan terampil.	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)		Program Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah PKBM yang terfasilitasi	100%
				Angka Partisipasi Kasar (APK) (%) - SD - SMP - SMA		Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	angka partisipasi murni	0%
				Angka Partisipasi Murni (APM) (%) - SD - SMP - SMA			Jumlah pembangunan sekolah untuk kegiatan sekolah	1 Unit
				Angka Partisipasi Sekolah (APS) (%) - 7 - 12 Tahun - 13 - 15 Tahun - 16 - 18		Program Pendidikan Menengah Atas		0

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
			Tahun				
			Jumlah S1, S2 dan S3 asli papua		Program Pendidikan Non Formal	menurunnya jumlah buta aksara	100%
			Prosentase Melek Huruf > 15 th			Meningkatnya Pendidikan Non Formal yang terfasilitasi	100%
			Kemampuan Baca-Tulis-Berhitung SD kelas 3		Program Pendidikan Luar Biasa	Jumlah Lembaga Pendidikan Luar Biasa Yang Terfasilitasi	50 Orang Paket
			Jumlah Sebaran Sarana dan Prasarana - SD - SMP - SMA/SMK		Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Jumlah Tenaga Pendidik dan Kependidikan	10.000 Orang
			Jumlah Inovasi/penemuan daerah		Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Kurangnya jumlah tenaga pengajar	20 Orang
						Jumlah Layanan Manajemen dan Tata Kelola Pendidikan	20 Orang Kegiatan
					Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi		0
					Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	Meningkatnya Layanan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	100%
					Program Pendidikan Menengah Kejuruan		0
					Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		0

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja		
			Uraian	Target		Uraian	Target	
					Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan Standar Nasional Yang Dibangun	3 Unit	
					Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Konvensional dan Elektronik	30.000 Orang	
					Program Penyediaan Fasilitas Mahasiswa Daerah		0	
					Program Peningkatan Kapasitas SDM Papua		0	
					Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	Rasio Mutu Penelitian dan Pengembangan	90%	
					Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK	Rasio Mutu Penelitian dan Pengembangan	90%	
					Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		0	
		5	Meningkatnya kapasitas dan produktivitas industri kecil & menengah.	Menguatnya kapasitas SDM dan kelembagaan pelaku industri kecil dan menengah		Pengembangan industri kecil dan menengah	tingkat produktifitas kualitas hasil produk industri kecil dan menengah	100
				Meluasnya pangsa pasar produk industri			persentase IKM yang berkualitas	100
				Meningkatnya kapasitas modal usaha industri		Penataan Struktur Industri	Tertatanya struktur industri	85%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja				
			Uraian	Target		Uraian	Target			
				Meningkatnya realisasi penyaluran skim kredit bagi industri kecil dan menengah						
				Meningkatnya produksi industri kecil dan menengah						
		6	Terwujudnya peningkatan penyediaan lapangan kerja.	Meningkatnya persentase penyerapan Tenaga Kerja		Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Meningkatnya Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	80%		
				Menurunnya angka pengangguran		Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Meningkatnya kesempatan kerja	100%		
				Tersedianya regulasi tentang ketenagakerjaan		Program Pengolahan dan Penyebarluasan Informasi Produktivitas	Meningkatnya penyerapan Tenaga Kerja	75%		
				Meningkatnya ketrampilan pencaker		Program Pengawasan Ketenagakerjaan	Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan	80%		
						Program Pengembangan Produktivitas Kerja	Meningkatnya Produktifitas Kerja	80%		
3	Dunia Usaha dan Pariwisata; Ketahanan Pangan; Ketahanan Energi; Penanggulangan Kemiskinan; Pembangunan Wilayah;	3	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komoditas Unggulan Dan Peningkatan Investasi	1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif.	Terbentuknya sistem pelayanan perijinan secara terpadu (satu atap)		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Papua	230 Perusahaan
						Terlaksananya promosi potensi investasi dalam dan luar negeri		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase meningkatnya rencana nilai investasi Perusahaan PMA dan PMDN	2%
						Meningkatnya persetujuan dan realisasi investasi		Program Peningkatan Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non	100%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Penanaman Modal	perijinan yang tepat waktu	
			Tersedianya dan meningkatnya jumlah dan kualitas sarana pendukung investasi (jalan produksi, jalan usahatani, pelabuhan peti kemas, energi listrik, bandara)		Program Peningkatan Daya Saing Investasi	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN Baru yang menanamkan modalnya di Papua	23 Perusahaan
			Tersedianya perdasi investasi dan aturan pelaksanaannya		Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang merealisasikan kegiatannya	150 Perusahaan
		2	Tercapainya stabilitas makro ekonomi.	Terwujudnya peningkatan neraca perdagangan daerah	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Meningkatnya jumlah perusahaan PMA/PMDN yang menanamkan modalnya di Papua	230 Perusahaan
				Meningkatnya pertumbuhan Ekonomi	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Persentase meningkatnya rencana nilai investasi Perusahaan PMA dan PMDN	2%
				Terkendalnya laju inflasi	Program Peningkatan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang tepat waktu	100%
				PDRB atas Harga Berlaku	Program Peningkatan Daya Saing Investasi	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN Baru yang menanamkan modalnya di Papua	23 Perusahaan
				Share PDRB Harga Berlaku	Program Peningkatan, Pengawasan, Pengendalian Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA dan PMDN yang merealisasikan kegiatannya	150 Perusahaan

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)	Meningkatnya ketersediaan bbm untuk nelayan	60%
					Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Terlaksananya Perlindungan Konsumen dan pengamanan	8 Kegiatan
					Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	prosentase Peningkatan Pengembangan Ekspor	75%
					Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri	Terlaksananya Peningkatan Efisiensi Pedagangan Da	5 Kegiatan
					Pengembangan industri kecil dan menengah	tingkat produktifitas kualitas hasil produk industri kecil dan menengah	100
						persentase IKM yang berkualitas	100
		3 Meningkatkan kapasitas dan produktivitas koperasi dan UKMK.	Menguatnya kapasitas kelembagaan koperasi dan UKMK		Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase Pertumbuhan Jumlah Wirausaha Baru	10990%
			Meluasnya pangsa pasar produk koperasi dan UKMK		Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Persentase Peningkatan Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)	35%
			Meningkatnya kapasitas modal usaha koperasi dan UKMK		Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase Koperasi Sehat (Koperasi Sehat Yang Melaksanakan RAT)	31%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
			Meningkatnya realisasi penyaluran skim kredit UKMK				
		meningkatnya pendapatan masyarakat					
		4 Meningkatkan kinerja dan daya saing BUMD dalam rangka memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat dan memberikan sumbangan terhadap pendatan daerah.	Peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD		Program Peningkatan Kinerja BUMD	Terlaksananya fasilitas kemitraan swasta dan pelaku ekonomi	3 Acara
	Tersedianya PERDASI tentang Pengelolaan BUMD						
		5 Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah.	Meningkatnya promosi potensi pariwisata		Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Kelestarian Lingkungan terjaga	10 Kelompok
	Bertambahnya jumlah event pariwisata			Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata	1.000 Kali	
	Meningkatnya sarana prasarana wisata			Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kegiatan	
	Meningkatnya jumlah daeah objek tujuan wisata			Program Pengembangan Kemitraan	Terlaksananya pengembangan kemitraan	6 Kegiatan	
	Meningkatnya kunjungan wisatawan						
	Meningkatnya investasi di sektor pariwisata						

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
			Meningkatnya pelaku usaha wisata				
			Terwujudnya pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat				
		6 Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekenomian masyarakat.	Optimalisasi lahan produksi pertanian/ perkebunan/peternakan/perikanan/ kehutanan		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	terwujudnya ketahanan pangan daerah	3 Wilayah
			Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan daerah		Program Peningkatan Diversifikasi Panganekaragaman dan Keamanan Pangan	terwujudnya ketahanan pangan lokal	5 Wilayah
			Terwujudnya kecukupan pangan dan gizi		Membangun SDM Petani Papua	Peresentase Petani terdidik	500 Orang
			meningkatnya produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal		pembangunan kawasan industri agribisnis	terwujudnya kawasan industri agribisnis	2 Wilayah
			tersedianya cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	persentase penyuluh pertanian/perkebunan profesian	100 Orang
			meningkatnya kapasitas kelembagaan petani		Program peningkatan pemasaran hasil produksi perta	produk pertanian yang menjangkau pasaran kawasan	5 Jenis
			tersedianya tenaga penyuluh/pendamping ditingkat masyarakat		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	persentase petani sejahtera	5 Wilayah
			tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian		peningkatan produksi tanaman pangan lokal	terwujudnya kemndirian pangan daerah	5 Wilayah
					Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Cakupan lembaga yang diperkuat kapasitas kelembagaannya di	70%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						Distrik dan kampung	
					Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	meningkatnya pemberdayaan ekonomi masya	100 Kelompok
					Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pengawa	12 Kelompok
						Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	100%
					Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dalam p	2 Kegiatan
					Program pengembangan budidaya perikanan	terwujudnya pengembangan budidaya perikanan	500 Kelompok
					Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Terwujudnya Pengembangan Perikanan tangkap	50 Kelompok
						Meningkatkanya produksi Perikanan Tangkap	4.500 Ton
					Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran	Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan	7 Ton

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					produksi perikanan	Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	30 Produk
					Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Meningkatnya Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	30 Produk
					Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Meningkatnya hasil produksi perikanan	100 Produk
					Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Meningkatnya fungsi pelayanan UPTD	100%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Persentase Meningkatnya kemampuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	100%
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	terwujudnya petani /kelompok mandiri	6 Wilayah
						terwujudnya petani /kelompok mandiri	1 Wilayah
						terwujudnya petani /kelompok mandiri	5 Wilayah
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya Produksi perkebunan	261,711
						Meningkatnya produksi perkebunan	517.559 Ha

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						Meningkatnya produksi perkebunan	300 Ha
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	10.000 Ton
						Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	75 Ton
					Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	cakupan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1
						Terlaksananya inovasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan	5 Kegiatan
					Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	persentase penyuluh handle	100%
						Persentase Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	100%
						persentase penyuluh handle	47%
						Persentase Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	47%
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit	1 Kegiatan

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						ternak.	
					Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	7
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Hasil Produksi Peternakan yang dipasarkan	4
					Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Meningkatnya n penerapan teknologi peternakan	1 Kegiatan
					Program Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	3 Dokumen
						Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	3 Kegiatan
						Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	2 Kegiatan
						Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	3 Dokumen
					Program Pengembangan Agribisnis	Meningkatnya Pendapatan Petani Pelaku Agribisnis	15%
					Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Jumlah Sumber Daya Pertanian Yang	500 Kelompok

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						ditingkatkan kem	
					Program Peningkatan kemandirian pangan dan ketahanan pangan asal hewan	Meningkatnya kemandirian pangan dan ketahanan pangan asal hewan	3 Kegiatan
					Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Jumlah Jenis Tanaman Spesifik lokal yang dikembangkan	3 Bibit
						Jumlah Jenis Tanaman Spesifik lokal yang dikembangkan	100 Bibit
					Peningkatan dan Pengembangan Teknologi budidaya ta	Meningkatnya Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikult	5 Wilayah
					Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	100
					Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Persentase meningkatnya Pembinaan dan penertiban Industri Primer Hasil Hutan Kayu	100%
					Program perencanaan dan pengembangan hutan	terwujudnya pengelolaan hutan	32 Wilayah
					Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum adat	3 Kegiatan
					Program Penataan Kawasan Hutan	Presentase Luas lahan	100 Hektar

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program Pencegahan Deforestasi	Terlaksananya aksi mitigasi penurunan emisi di bid	5 Kegiatan
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi	Presentase Meningkatnya Kualitas dan Akses informasi	100%
					Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	persentase masy pertambangan ramah lingkungan	10 Obyek
					Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	menurunnya persentase kerusakan lingkungan km keg tambang	10 Lokasi
					Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan	Meningkatnya kerjasama aparatur pemerintah	20%
					Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara	Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak ulayat	20%
					Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema	20%
					Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Pertambangan	20%
					Penataan Struktur Industri	Tertatanya struktur industri	85%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
		7 Meningkatkan pendapatan masyarakat adat pemilik hak rakyat.	Meningkatnya pendapatan masyarakat pemilik hak ulayat		Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya produktifitas wilayah transmigrasi	75%
					Program Transmigrasi Lokal	Meningkatnya Produktifitas Kawasan Transmigrasi Lokal	80%
					Membangun SDM Petani Papua	Peresentase Petani terdidik	500 Orang
					Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Cakupan lembaga yang diperkuat kapasitas kelembagaannya di Distrik dan kampung	70%
					Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan	7 Ton
						Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	30 Produk
					Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Meningkatnya Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	30 Produk
					Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Persentase Meningkatnya kemampuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	100%
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	75 Ton

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja			
			Uraian	Target		Uraian	Target		
						Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	10.000 Ton		
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Hasil Produksi Peternakan yang dipasarkan	4		
					Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum adat	3 Kegiatan		
					Program Penataan Kawasan Hutan	Presentase Luas lahan	100 Hektar		
		8	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan irigasi dalam mendukung pengembangan wilayah.	Prosentase cakupan sistem jaringan sumberdaya air terhadap irigasi		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Penurunan genangan air permukaan	85%	
				Prosentase cakupan sistem Pengendalian banjir dan abrasi		Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Peningkatan kinerja Daerah Irigasi (DI)	75%	
				Tingkat ketersediaan air tanah		Program penyediaan dan pengolahan air baku	Ketersediaan sumber air baku	65%	
4	Perumahan dan Pemukiman; Ketahanan Pangan; Infrastuktur; Konektivitas; dan Kemaritiman; Pembangunan	4	Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah	1	Meningkatnya konektivitas antar wilayah.	Tingkat ketersediaan dan fungsional jalan nasional dan provinsi	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	panjang jalan yang terbangun	300 Km
						Terbangunnya jaringan jalan PKN-PKW, antar PKW serta PKW-PKL	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Penurunan genangan air permukaan	85%
						Tingkat ketersediaan dan fungsional bandara	Program Pembangunan turap/talud/brojong		0

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
Wilayah;			Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan kinerja Jalan/Jembatan	65%
					Program pengendalian banjir	Prosentase luapan banjir yang dapat dikendalikan	65%
					Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terlaksananya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	5 Wilayah
					Peningkatan Jalan dan Jembatan		0
					Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	40 Dokumen
					Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi	Cakupan/jumlah pembinaan dan pengembangan konstruksi	65%
					Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya regulasi dan fasilitas yang mendorong pembangunan yang tepat sasaran	10 Dokumen
						Terbangunnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 Unit
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi/dipelihara	17 Unit					

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya moda angkutan kampung/distrik	5 Unit
						Tersedianya angkutan untuk pelayanan transportasi	3 Unit
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	29 Unit
					Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	100%
					Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur perhubungan	100%
		2 Meningkatkan jangkauan pelayanan sistem komunikasi dan Informasi antar wilayah.	Prosentase ibu kota distrik yang terlayani Sistem Komunikasi dan informasi		Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM Aparatur yang memahami IT	60%
						Jumlah Kelompok Masyarakat yang memahami IT	60 Kelompok
						Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Komunikasi
		3 Meningkatkan ketersediaan energi murah dan ramah lingkungan.	Rasio elektrifikasi		Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	Meningkatnya jumlah investor untuk berinvestasi di bidang pertambangan dan energi	10%
			Jumlah pembangkit listrik yang menggunakan energi alternatif		Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	Meningkatnya ketersediaan energi murah dan ramah	20%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja				
			Uraian	Target		Uraian	Target			
						lingkungan				
			Daya terpasang		Program pengawasan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) dan bahan bakar gas (BBG)	Meningkatnya ketersediaan bbm untuk nelayan	60%			
					Pengembangan & Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan	Jumlah/cakupan pengembangan dan pemanfaatan energy baru terbarukan	60%			
5	Pendidikan; Kesehatan; Ketahanan Pangan; Ketahanan Energi; Penanggulangan Kemiskinan; Pembangunan Wilayah;	5	Pengembangan Kawasan Khusus Pembangunan Berbasis Kampung	1	Meningkatnya Kemitraan antara Pemerintah, Lembaga adat dan Agama (tiga tungku).	Cakupan Pemenuhan Infrastruktur Dasar Kampung Orang Asli Papua		Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kegiatan mitra pembangunan kesehatan yang tersinkronisasi	75%
					Proporsi Orang Asli Papua di Legislatif dan Eksekutif		Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen	6 Dokumen	
					Proporsi H AK Komunal dan Individu Masyarakat Adat Papua yang terlindungi		Program Kerjasama Pembangunan		0	
					Proporsi Bahasa Asli Papua yang terlindungi					
				2	Terselenggaranya Promosi potensi kepariwisataan daerah.	Meningkatnya promosi potensi pariwisata		Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Kelestarian Lingkungan terjaga	10 Kelompok terjaga
						Bertambahnya jumlah event pariwisata		Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Jumlah Kunjungan wisata	1.000 Kali

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
			Meningkatnya sarana prasarana wisata		Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Terlaksanannya Pengembangan Destinasi Pariwisata	5 Kegiatan
			Meningkatnya jumlah daeah objek tujuan wisata		Program Pengembangan Kemitraan	Terlaksananya pengembangan kemitraan	6 Kegiatan
			Meningkatnya kunjungan wisatawan				
			Meningkatnya investasi di sektor pariwisata				
			Meningkatnya pelaku usaha wisata				
			Terwujudnya pengelolaan ekowisata berbasis masyarakat				
		3	Terwujudnya pengelolaan SDA secara lestari mendukung peningkatan pekonomian masyarakat.		Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	terwujudnya ketahanan pangan daerah	3 Wilayah
			Meningkatnya ketahanan dan kedaulatan pangan daerah		Program Peningkatan Diversifikasi Panganekaragaman dan Keamanan Pangan	terwujudnya ketahanan pangan lokal	5 Wilayah
			Terwujudnya kecukupan pangan dan gizi		Membangun SDM Petani Papua	Peresentase Petani terdidik	500 Orang
			meningkatnya produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal		pembangunan kawasan industri agribisnis	terwujudnya kawasan industri agribisnis	2 Wilayah
			tersedianya cadangan pangan ditingkat pemerintah dan masyarakat		Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan	persentase penyuluh pertanian/perkebunan profesion	100 Orang
			meningkatnya kapasitas kelembagaan petani		Program peningkatan pemasaran hasil produksi	produk pertanian yang menjangkau pasaran	5 Jenis

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					perta	kawasan	
			tersedianya tenaga penyuluh/pendamping ditingkat masyarakat		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	persentase petani sejahtera	5 Wilayah
			tersedianya sarana dan prasarana produksi pertanian		peningkatan produksi tanaman pangan lokal	terwujudnya kemndirian pangan daerah	5 Wilayah
					Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Cakupan lembaga yang diperkuat kapasitas kelembagaannya di Distrik dan kampung	70%
					Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	meningkatnya pemberdayaan ekonomi masya	100 Kelompok
					Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	12 Kelompok
						Persentase meningkatnya kemampuan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan	100%
					Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum dalam ppendayagunaan sumberdaya laut	2 Kegiatan

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program pengembangan budidaya perikanan	terwujudnya pengembangan budidaya perikanan	500 Kelompok
					Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Terwujudnya Pengembangan Perikanan tangkap	50 Kelompok
						Meningkatkannya produksi Perikanan Tangkap	4.500 Ton
					Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Meningkatnya Hasil Produksi Perikanan	7 Ton
						Meningkatnya pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	30 Produk
					Program Peningkatan Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	Meningkatnya Mutu Produksi Nelayan, Pengelolaan dan Pemasaran	30 Produk
					Program Optimalisasi dan Pembangunan Prasarana Perikanan Tangkap	Meningkatnya hasil produksi perikanan	100 Produk
					Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	Meningkatnya fungsi pelayanan UPTD	100%
					Program Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Persentase Meningkatnya kemampuan Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	100%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	terwujudnya petani /kelompok mandiri	6 Wilayah
						terwujudnya petani /kelompok mandiri	1 Wilayah
						terwujudnya petani /kelompok mandiri	5 Wilayah
					Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	Meningkatnya Produksi perkebunan	261,711
						Meningkatnya produksi perkebunan	517.559 Ha
						Meningkatnya produksi perkebunan	300 Ha
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	10.000 Ton
						Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	75 Ton
					Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	cakupan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	1
						Terlaksananya inovasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan	5 Kegiatan
					Program pemberdayaan penyuluh	persentase penyuluh handle	100%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					pertanian/perkebunan lapangan	Persentase Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	100%
						persentase penyuluh handle	47%
						Persentase Meningkatnya penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	47%
					Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	Terlaksananya upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.	1 Kegiatan
					Program peningkatan produksi hasil peternakan	Meningkatnya produksi hasil peternakan	7
					Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Hasil Produksi Peternakan yang dipasarkan	4
					Program peningkatan penerapan teknologi peternakan	Meningkatnya n penerapan teknologi peternakan	1 Kegiatan
					Program Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	3 Dokumen
						Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	3 Kegiatan

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	2 Kegiatan
						Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	3 Dokumen
					Program Pengembangan Agribisnis	Meningkatnya Pendapatan Petani Pelaku Agribisnis	15%
					Program Peningkatan Sumberdaya Pertanian	Jumlah Sumber Daya Pertanian Yang ditingkatkan kem	500 Kelompok
					Program Peningkatan keamanan pangan dan ketahanan pangan asal hewan	Meningkatnya keamanan pangan dan ketahanan pangan asal hewan	3 Kegiatan
					Pengembangan Tanaman Spesifik Lokal	Jumlah Jenis Tanaman Spesifik lokal yang dikembang	3 Bibit
						Jumlah Jenis Tanaman Spesifik lokal yang dikembang	100 Bibit
					Peningkatan dan Pengembangan Teknologi budidaya ta	Meningkatnya Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikult	5 Wilayah
					Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	100

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Persentase meningkatnya Pembinaan dan penertiban Industri Primer Hasil Hutan Kayu	100%
					Program perencanaan dan pengembangan hutan	terwujudnya pengelolaan hutan	32 Wilayah
					Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum adat	3 Kegiatan
					Program Penataan Kawasan Hutan	Presentase Luas lahan	100 Hektar
					Program Pencegahan Deforestasi	Terlaksananya aksi mitigasi penurunan emisi di bid	5 Kegiatan
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi	Presentase Meningkatnya Kualitas dan Akses informasi	100%
					Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	persentase masy pertambangan ramah lingkungan	10 Obyek
					Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	menurunnya persentase kerusakan lingkungan km keg tambang	10 Lokasi
					Program evaluasi dan koordinasi perencanaan program pembangunan	Meningkatnya kerjasama aparaturn pemerintah	20%
					Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan	Meningkatkan pendapatan masyarakat	20%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja		
			Uraian	Target		Uraian	Target	
					Mineral dan Batubara	adat pemilik hak ulayat		
					Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema	20%	
					Program Penelitian dan Pengembangan Balai Latihan dan Laboratorium Pertambangan	Meningkatnya Penelitian dan Pengembangan Laboratorium Pertambangan	20%	
					Penataan Struktur Industri	Tertatanya struktur industri	85%	
					Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Meningkatnya produktifitas wilayah transmigrasi	75%	
					Program Transmigrasi Lokal	Meningkatnya Produktifitas Kawasan Transmigrasi Lokal	80%	
6	Pembangunan Wilayah;	6	Percepatan Kesiapan Pelaksanaan Pon XX	1	Meningkatnya prestasi olahraga.	Prestasi Papua pada perhelatan olahraga tingkat Nasional (PON)		0
					Jumlah Cabang Olah Raga yang diikuti dalam PON	Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga		0
					Partisipasi Atlit Papua di Iven Nasional dan Internasional	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		0
					Jumlah pelatih yang bersertifikasi Nasional	Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang		0

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					berstandar nasional dan Internasional		
			Persentase Cabang Olah Raga yang Mendapatkan Penghargaan Tingkat Nasional	75%			
		2 Meningkatkan konektivitas antar wilayah.	Tingkat ketersediaan dan fungsional jalan nasional dan provinsi		Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	panjang jalan yang terbangun	300 Km
			Terbangunnya jaringan jalan PKN-PKW, antar PKW serta PKW-PKL		Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Penurunan genangan air permukaan	85%
			Tingkat ketersediaan dan fungsional bandara		Program Pembangunan turap/talud/brojong		0
			Tingkat ketersediaan dan fungsional pelabuhan dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP)		Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Peningkatan kinerja Jalan/Jembatan	65%
					Program pengendalian banjir	Prosentase luapan banjir yang dapat dikendalikan	65%
					Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Terlaksananya pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	5 Wilayah
				Peningkatan Jalan dan Jembatan		0	
				Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	Terlaksananya Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	40 Dokumen	

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi	Cakupan/jumlah pembinaan dan pengembangan konstruksi	65%
					Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Tersedianya regulasi dan fasilitas yang mendorong pembangunan yang tepat sasaran	10 Dokumen
						Terbangunnya Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	1 Unit
					Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Jumlah sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor yang direhabilitasi/dipelihara	17 Unit
					Program peningkatan pelayanan angkutan	Tersedianya moda angkutan kampung/distrik	5 Unit
						Tersedianya angkutan untuk pelayanan transportasi	3 Unit
					Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan	29 Unit
					Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	Terlaksananya pengendalian dan pengamanan lalu lintas	100%
					Program Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur Perhubungan	Terlaksananya pengendalian pelaksanaan kegiatan infrastruktur perhubungan	100%

Prioritas Nasional		Prioritas Daerah		Sasaran 2018		Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
						Uraian	Target		Uraian	Target
7	Politik; Hukum; Pertahanan dan Keamanan.;	7	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan	1	Meningkatnya Tata Kehidupan Masyarakat Papua yang Religius.	Tingkat Kesadaran Menjalankan Nilai- nilai Keagamaan		Program Pembinaan Mental Spritual		0
						Frekuensi dialog antar umat beragama		Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan		0
								Program Peningkatan dan Pembinaan di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan		0
								Program Pemberdayaan Keagamaan		0
				2	Meningkatnya masyarakat Papua yang berbudaya.	Tingkat Aktivitas Keagamaan		Program Pengembangan Nilai Budaya	jumlah nilai-nilai budaya yang dikembangkan	100%
						Tingkat aktualisasi nilai-nilai budaya dalam kehidupan masyarakat		Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Jumlah Pengelolaan Kekayaan Budaya yang dilakukan	100%
						Frekwensi Dialog Lintas Budaya		Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Pengelolaan Keragaman Budaya yang dilakukan	100%
								Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Jumlah Program Pengembangan Kerjasama Pengolahan Kekayaan BUdaya	100%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						Jumlah Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya yang dilakukan	0%
					Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Jumlah Pengelolaan Keragaman Budaya	0 Kegiatan
						Jumlah Pengelolaan Keragaman Budaya yang dilakukan	100%
		3 Meningkatkan rasa aman, tentram dan nyaman dan Ketaatan terhadap Hukum seluruh masyarakat Papua.	Tingkat Konflik Vertikal		Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Penyelesaian perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	100%
			Tingkat Kejahatan Trans Nasional (Crime Clearance)		Program Pemeliharaan Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Terlaksananya Pemeliharaan dan Terwujudnya Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	3 Kegiatan
			Tingkat ketaatan Masyarakat terhadap Hukum			Terlaksananya Pemeliharaan dan Terwujudnya Kantratribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	280 Kegiatan
			Tingkat Kenyamanan Investasi			Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan wawasan kebangsaan
			Angka Kriminalitas	33%	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Ketertiban dan Keamanan	85%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
			Penurunan Tingkat Konflik Horisontal berdasarkan SARA	18%	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	80%
			Persentase Peraturan Perundang-undangan yang Responsif dan Partisipatif	100%		Persentase Penurunan Penyakit Masyarakat	85%
					Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Politik	80%
					Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Terwujudnya Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	13 Kegiatan
						Prosentase Peningkatan Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana	80%
						Prosentase Peningkatan Pelayanan Pemulihan Terkena Dampak Bencana	85%
					Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	Meningkatnya pemahaman organisasi masyarakat tentang undang-undang ormas/LSM	80%
					Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	Persentase Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	85%
					Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum	Meningkatnya pemberian bantuan hukum dan	100%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					dan Penegakan Perda	penegakan perda	
					Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Terlaksananya kegiatan pengawasan produk hukum kab/kota	100%
						Meningkatnya penegakan hukum	100%
					Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan		0
					Program Peningkatan Koordinasi, Singkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan		0
					Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Prosentase Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	100%
		4 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Adat Papua dalam mewujudkan rasa aman, tentram dan nyaman bagi seluruh masyarakat Papua.	Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran melalui Lembaga Adat		Program pengembangan wawasan kebangsaan	Peningkatan wawasan kebangsaan	85%
					Program Pendidikan Politik Masyarakat	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang Politik	80%
					Program Pembinaan Kemasyarakatan dan Kemahasiswaan		0

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program Peningkatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Fasilitasi di Bidang Bina Kesejahteraan Rakyat, Bina Mental Spiritual dan Bina Kemasyarakatan		0
		5 Meningkatkan Profesionalisme dan Akuntabilitas Kinerja serta Disiplin Aparatur.	Proporsi Aparatur Pemda yang Profesional, Akuntabel dan Disiplin		Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Cakupan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	52 Organisasi
			Tingkat Prestasi Kerja dan Disiplin Aparatur		Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	100 Orang
			Persentase Pejabat Struktural yang Memenuhi Syarat Jabatan	100%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%
			Persentase Pemenuhan Jabatan fungsional sesuai kebutuhan	70%			
			Rata-rata Kehadiran Pegawai	95%			
			Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Papua oleh KemenPAN dan RB	Tahun			
		6 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah.	Jumlah Dokumen Perencanaan	2 Dokumen	Program Pengembangan Data/Informasi	Kabupaten yang melaporkan rutin melalui SIKNAS/Komdat	22 Kabupaten
			Tingkat Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah	100%		Kabupaten yang menyusun Profil Kesehatan	18 Kabupaten
			Tingkat ketersediaan data Perencanaan	90%	Program Pengembangan data/informasi	Prosentase data/informasi yang diperoleh dari keseluruhan	70%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						data/informasi yang dibutuhkan	
					Program Perencanaan Pembangunan	Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	3 Dokumen
						Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	2 Kegiatan
						Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	3 Dokumen
						Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	3 Kegiatan
					Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi	Presentase Meningkatnya Kualitas dan Akses informasi	100%
					Program Pengembangan Data dan Informasi		0
					Program Pengembangan data/informasi	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi dalam Perencanaan	80%
						Persentase Pemenuhan Data dan Informasi dalam Perencanaan	85%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
					Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	Jumlah wilayah strategis dan cepat tumbuh yang di kembangkan	15 Kabupaten
					Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah	10 Dokumen
					Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi	29%
						Terwujudnya perencanaan pembangunan ekonomi	80%
					Program Perencanaan Sosial dan Budaya	Terlaksananya perencanaan sosial dan budaya	10 Dokumen
					Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	10 Dokumen
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terimplementasinya Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perda RTRW Provinsi Papua	1 Dokumen
					Program Pengembangan Data dan Informasi	Prosentase Data dan Informasi yang Dikembangkan	100%
		7	Meningkatnya Kualitas Pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program pengembangan komunikasi, informasi dan	Meningkatnya Komunikasi dan Informasi melalui	31 Media

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
		Publik yang Komprehensif berbasis Teknologi Informasi.			media massa	Media Massa	
			Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	50%		Meningkatnya Komunikasi dan Informasi melalui Media Massa	2 Media
			Persentasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen	80%		Terlaksananya pengembangan komunikasi dan informasi di Lingkungan Pemda	6 Media
			Tingkat Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) khusus	60%	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang memahami IT	60 Kelompok
						Persentase SDM Aparatur yang memahami IT	60%
					Penyiapan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Tersedianya Sarana dan Prasarana Komunikasi	2 Kegiatan
					Program Pengembangan data/informasi/statistik daerah	Jumlah Rekomendasi Kajian/Survei Statistik Sektoral yang mendapatkan	2 rekomendasi
				Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	Cakupan Pelayanan Kearsipan bagi lembaga/instansi pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat	40 Organisasi	
		8 Meningkatkan Penegakan Hukum dan	Jumlah Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi		Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja		
			Uraian	Target		Uraian	Target	
		Pemberantasan KKN.	Persentase Pengaduan dan Gugatan Masyarakat yang ditangani	100%	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	Meningkatnya penegakan hukum	100%	
			Persentase Tindak Lanjut atas Rekomendasi Temuan Hasil Pemeriksaan		55%		Terlaksananya kegiatan pengawasan produk hukum kab/kota	100%
						Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase tenaga pemeriksa yang telah memiliki sertifikat kompetensi	100%
						Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan dan gugatan masyarakat yang ditindaklanjuti	1 Kasus
						Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan yang terbit	3 Laporan
						Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	Jumlah tindak lanjut atas rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	2 rekomendasi
						Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	Prosentase Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	100%
						9 Terwujudnya Pengelolaan Keuangan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel yang berpihak pada	Opini BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Tahun
		Proporsi Belanja Anggaran Publik yang lebih Besar daripada Belanja	70%		Persentase peningkatan dan pengembangan		90%	

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja		
			Uraian	Target		Uraian	Target	
		Layanan Publik.	Aparatur			pengelolaan keuangan daerah		
						Meningkat dan berkembangnya pengelolaan keuangan daerah	3 Kegiatan	
					Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	Persentase meningkatnya pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota	90%	
					Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Meningkatnya sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	80%	
					Program Peningkatan Pendapatan Daerah	Meningkatnya Pendapatan Daerah	1.132.270.78 3.936 Rupiah	
		1 0	Tertatanya Sistem dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah pada semua Tingkatan.	Jumlah Kerjasama Provinsi dan Kabupaten/Kota		Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	Cakupan lembaga yang diperkuat kapasitas kelembagaannya di Distrik dan kampung	70%
				Jumlah Kerjasama antar Kabupaten/Kota		Program Peningkatan Pelayanan Protokol dan Perjalanan	Meningkatnya pelaksanaan acara/upacara yang tertib dan lancar sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.	90%
						Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	Meningkatnya Sistem Administrasi Kearsipan di	6 Dokumen

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						Provinsi Papua	
					Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Jumlah Dokumen / Arsip milik pemerintah daerah yang diselamatkan dan dilestarikan	150 Berkas
					Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	jumlah sarana / prasarana kearsipan yang dilakukan perawatan	200 Unit
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%
					Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan	Organisasi perangkat daerah yang efisien dan efektif	51 SKPD
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen	6 Dokumen
					Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1 Dokumen
					Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	Meningkatnya dokumentasi dan informasi hukum	100%
					Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	kegiatan	1 Kegiatan
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi	Cakupan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Kegiatan

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
		1 1	Restrukturisasi Kelembagaan Pemerintahan Daerah sesuai Kebutuhan dan Fungsi-fungsi Pemerintahan.	Frekwensi Kerjasama tiga tungku	Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Otonomi Khusus yang terdata	29 Kabupaten
					Program Kerjasama Pembangunan		0
					Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya Penataan Peraturan Perundang-undangan	100%
					Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		0
						Meningkatnya kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	100%
						Meningkatnya kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	100%
						Meningkatnya kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	100%
						Meningkatnya kompetensi teknis/fungsional aparatur melalui pembinaan dan pengembangan	75%
					Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya kompetensi aparatur dalam jabatan struktural dan non struktural sesuai tupoksi	100%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						melalui diklat kepemimpinan dan pelatihan dasar ASN	
					Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	Dokumen	1 Dokumen
					Program Peningkatan Penyelenggaraan Otonomi Daerah		0
						Jumlah Sarana dan Prasarana Otonomi Khusus yang terdata	29 Kabupaten
						Cakupan Penyelenggaraan Otonomi Daerah	1 Kegiatan
		1 2 Meningkatnya Kapasitas dan Berubahnya Pola Pikir (Mind set) Aparatur Pemerintah Daerah.	Meningkatnya keberdayaan Masyarakat Kampung		Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung di Provinsi Papua	kegiatan	1 Kegiatan
		1 3 Terwujudnya Hubungan Kerja sama yang Harmonis Antara Pemerintah daerah dengan Lembaga DPRP dalam rangka Implementasi	Tingkat Efisiensi dan efektifitas Kelembagaan Pemerintah Daerah	90%	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Perdasi dan Perdassus yang ditetapkan	8 Produk
						Tingkat kehadiran Anggota dewan	95%
						Persentase Raperda yang ditindaklanjuti dalam rapat paripurna	90%

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja		
			Uraian	Target		Uraian	Target	
		Kebijakan Otonomi Khusus Papua..			Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah	Meningkatnya peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	
						Meningkatnya peningkatan pelayanan kepala daerah/wakil kepala daerah	100%	
					Program Peningkatan Kapasitas Lembaga MRP	Tingkat kehadiran Anggota MRP	100%	
						Persentase Rancangan Perdasu dan Perdasus yang ditindaklanjuti	100%	
8	Pembangunan Wilayah;	8 Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penanganan Bencana	1	Implementasi Rencana Tata Ruang secara konsisten.	Pemanfaatan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	100
						Program rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya ehabilitasi hutan dan lahan	12 Kegiatan
						Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Terwujudnya Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	13 Kegiatan
						Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema	20%
						Program Perencanaan Tata Ruang		0

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja		
			Uraian	Target		Uraian	Target	
					Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terimplementasinya Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perda RTRW Provinsi Papua	1 Dokumen	
		2 Papua sebagai paru-paru dunia.	Emisi GRK		Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	menurunnya pencemaran Lingkungan Hidup di Provinsi Papua	55%	
			Serapan GRK		Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah balai/alat pengujian kendaraan bermotor yang beroperasi	1 Unit	
			Luas tutupan hutan primer dan sekunder			Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	100
						Program rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya ehabilitasi hutan dan lahan	12 Kegiatan
						Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Terwujudnya Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	13 Kegiatan
						Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Persentase meningkatnya Pembinaan dan penertiban Industri Primer Hasil Hutan Kayu	100%
						Program perencanaan dan pengembangan hutan	terwujudnya pengelolaan hutan	32 Wilayah
						Program Pengelolaan hutan masyarakat hukum adat	Terselenggaranya Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Hukum adat	3 Kegiatan
					Program Penataan Kawasan	Presentase Luas lahan	100 Hektar	

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja		
			Uraian	Target		Uraian	Target	
		3	Kepatuhan setiap pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan.	Prosentase kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap proses perizinan lingkungan		Hutan		
						Program Pencegahan Deforestasi	Terlaksananya aksi mitigasi penurunan emisi di bid	5 Kegiatan
						Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	menurunnya pencemaran Lingkungan Hidup di Provinsi Papua	55%
						Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi SDA	15 Kelompok
						Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	50%
							presentase status lingkungan hidup	50%
						Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Jumlah balai/alat pengujian kendaraan bermotor yang beroperasi	1 Unit
						Program Perencanaan Tata Ruang		0
						Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Terimplementasinya Peraturan Gubernur Papua tentang Penjabaran Perda RTRW Provinsi Papua	1 Dokumen
		4	Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan oleh	Prosentase pemangku kepentingan yang memahami pembangunan berkelanjutan		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi SDA	15 Kelompok

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
		pemangku kepentingan.	Jumlah dokumen perencanaan yang mengakomodir pembangunan berkelanjutan		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	presentase status lingkungan hidup	50%
						Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	50%
					Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Kelestarian Lingkungan terjaga	10 Kelompok terjaga
					Program Perencanaan Pembangunan	Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	3 Kegiatan
						Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	3 Dokumen
						Tersusunnya dokumen perencanaan dan evaluasi pelaporan	3 Dokumen
						Terlaksananya rapat evaluasi OPD se-Provinsi Papua, konsultasi, dan monitoring kegiatan	2 Kegiatan
					Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	Peningkatan Produksi Hasil Hutan	100
					Program rehabilitasi hutan dan lahan	Terlaksananya Rehabilitasi hutan dan	12 Kegiatan

Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Sasaran 2018	Indikator Sasaran		Program Pembangunan	Indikator Kinerja	
			Uraian	Target		Uraian	Target
						lahan	
					Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	menurunnya persentase kerusakan lingkungan km keg tambang	10 Lokasi
					Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	Meningkatnya jumlah Wilayah/Kawasan Pemetaan Geologi Bersistem dan Bertema	20%
					Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	10 Dokumen

4.6. Arah Pembangunan Wilayah

Kebijakan pembangunan wilayah pada dasarnya merupakan keputusan dan intervensi pemerintah, baik secara nasional maupun regional untuk mendorong proses pembangunan daerah secara keseluruhan. Analisis ini sangat penting artinya dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan pada wilayah yang masih terbelakang. Semua ini diperlukan untuk dapat meningkatkan proses pembangunan daerah sekaligus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

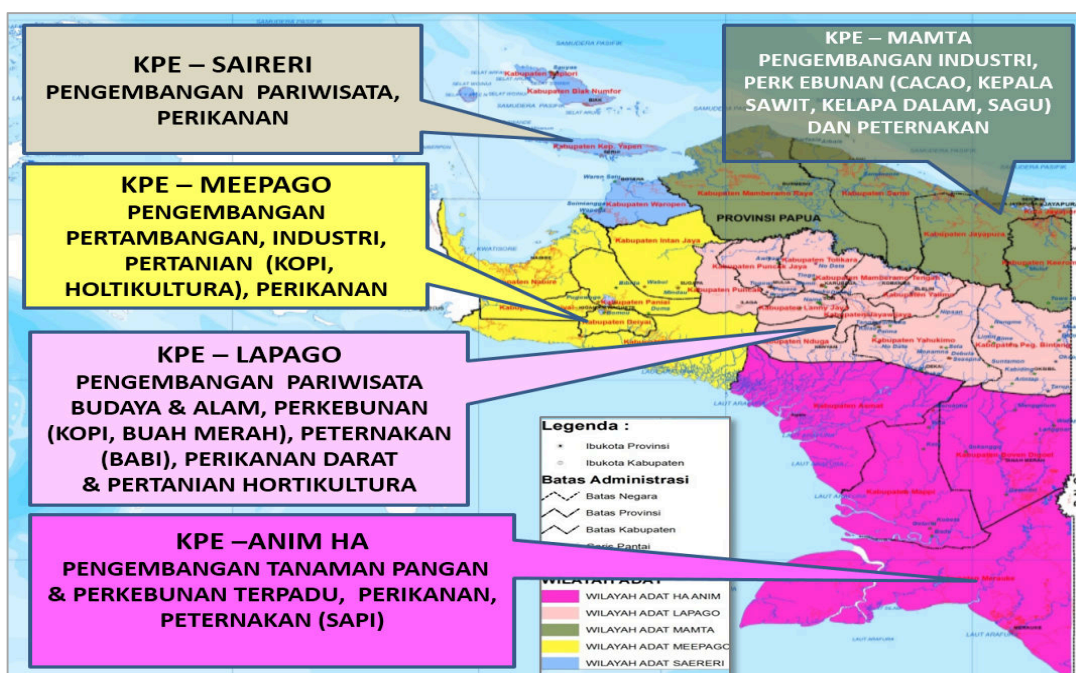
Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama. Untuk itu sejak tahun 2013 Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan lima Kawasan Pengembangan Ekonomi (KPE) berbasis wilayah adat di Papua dengan mengembangkan infrastruktur yang mendukung pembangunan ekonomi sektoral dan spasial. Lima KPE berbasis wilayah adat yang dimaksud adalah : (1) Wilayah adat Saireri yang terdiri atas kabupaten-kabupaten yang terletak di wilayah Kepulauan Teluk Cenderawasih yaitu Kabupaten Biak Numfor, Supiori, Kepulauan Yapen, dan Waropen, (2) Wilayah adat Mamta yang terbagi atas kabupaten yang berada disepanjang sungai memberamo hingga lautan pasifik yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Keerom dan Mamberamo Raya, (3) Wilayah adat Me Pago yang terletak di wilayah Pegunungan Tengah sisi barat terdiri atas Kabupaten Mimika, Nabire, Paniai, Intan Jaya, Dogiyai dan Deyiai, (4) Wilayah adat La Pago yang terletak di kawasan Pegunungan Tengah sisi timur, terdiri atas Kabupaten Jayawijaya, Puncak Jaya, Puncak, Nduga, Yahukimo, Yalimo, Tolikara, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya dan Pegunungan Bintang, dan terakhir (5) Wilayah adat Anim Ha yang berada di wilayah selatan Papua, yaitu Kabupaten Merauke, Asmat, Mappi dan Boven Digoel.

Dalam rangka mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera maka pelaksanaan pembangunan akan dilakukan secara simultan dengan tahapan-tahapan yang jelas dan sistematis, memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan wilayah, memperhatikan dan menghormati nilai-nilai serta hak-hak adat masyarakat asli Papua.

Arah kebijakan spasial akan berintegrasi dengan kebijakan sektoral untuk mewujudkan harmonisasi pembangunan wilayah yang

dilaksanakan secara sektoral oleh SKPD maupun pelaku pembangunan lainnya. Arah Kebijakan spasial mengacu pada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018. Selain itu juga merujuk kepada RPJMN Tahun 2014-2019 yang telah mengakomodir lima KPE berbasis adat di Provinsi Papua dengan fokus pengembangannya pada hilirisasi berbasis komoditi unggulan, dimana percepatan pembangunan kawasan strategis di wilayah Papua ini dilakukan dengan strategi: (1) peningkatan potensi ekonomi wilayah, (2) percepatan penguatan konektivitas, (3) pengembangan ekonomi lokal, (4) penguatan kemampuan SDM dan IPTEK.

Gambar 4.2.
Fokus Pembangunan Ekonomi Kewilayahan Di Provinsi Papua Tahun 2018



Fokus pembangunan wilayah di Provinsi Papua pada tahun 2018 ini diarahkan pada pemantapan kelima wilayah KPE berbasis adat menjadi wilayah pengembangan dan peningkatan keterkaitan kantong-kantong produksi utama di Provinsi Papua dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agribisnis serta memantapkan pengembangan KPE dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan. Fokus tersebut memperhatikan kebutuhan kawasan yang secara fungsional dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan strategis dan kawasan sekitarnya. Secara singkat hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.1.

Sehubungan dengan hal itu maka untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan lima tahun ke depan dalam rangka mencapai suatu masyarakat dan wilayah Papua yang damai, sejahtera dan aman serta

didukung oleh sarana dan prasarana fisik kewilayahan yang mampu membuka akses ekonomi dan menerobos keterisolasian sebagai upaya untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat asli Papua maka akan diterapkan strategi dan arah kebijakan pengembangan wilayah pada tahun 2018 sebagai berikut :

4.6.1. Arah Pengembangan Wilayah Adat Mamta/Tabi

4.6.1.1. Pengembangan Ekonomi Kawasan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pengembangan kakao, yang meliputi :
 - Pembangunan nursery di distrik Kemtuk kab Jayapura (eksisting)
 - Industri Pengolahan biji kakao di distrik Kemtuk (eksisting)
 - Pembangunan lantai Jemur di Sarmi, Keerom & Jayapura (eksisting)
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan di Sarmi, Keerom & Jayapura (eksisting)
 - kajian khusus ttg penanganan hama kakao di Sarmi, Keerom & Jayapura (usulan 2018)
 - Target papua : Ekspor Pasta Coklat
2. Pengembangan kelapa dalam, yang meliputi :
 - Industri Pengolahan kelapa dalam di Sarmi (eksisting)
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan di Sarmi (usulan 2018)
3. Pengembangan Peternakan Sapi, yang meliputi :
 - Inseminasi Buatan di Keerom, Kab Jayapura dan Sarmi
 - Penyediaan bibit unggul di Keerom, Kab Jayapura, dan Sarmi
 - Target Peternakan : swasembada daging sapi untuk Mamta dan Papua
4. Kawasan wisata Danau Sentani dan ekowisata Kab Jayapura (Kawasan CA Cyclop), yang meliputi :
 - Penataan Kawasan Wisata Danau Sentani (Masterplan sudah dibuat thn 2016 – KemenPUPR)
 - Pembangunan sarana-Prasarana penunjang wisata danau Sentani (Dermaga, bus air, jalan akses, homestay, outlet ekraf)
 - Promosi destinasi ekowisata danau sentani dan CA Cyclop
 - Pembinaan sadar wisata masyarakat lokal

- Pengembangan kemitraan
 - Pengembangan event wisata Papua terintegrasi
 - Target: Menjadikan Jayapura sebagai salah satu icon wisata unggulan Papua (Paket Ekowisata Papua : Raja Ampat-Biak-Jayapura-Jayawijaya, Asmat)
5. Pembangunan pabrik pengolahan betatas (produk : mie & biskuit), yang meliputi :
- Pembangunan Pabrik Betatas di Keerom (2017)
 - Perluasan lahan betatas di Kab. Jayapura dan Keerom (2014-2017)
 - Pembangunan Infrastruktur penunjang (Jalan akses & Air baku) 2017
 - Target : memenuhi kebutuhan ketahanan pangan lokal & gizi anak sekolah
6. Pembangunan Industri Pengolahan Sagu, yang meliputi :
- Pembangunan pabrik pengolahan beras analog sagu di Kehiran-Jayapura
 - Perluasan perkebunan sagu (Jayapura, Sarmi & mamberamo Raya)
 - Target : ketahanan pangan lokal

4.6.1.2. Pengembangan Pendidikan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan Sekolah Asrama di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura
2. Pembangunan Sekolah vokasi di Kabupaten Jayapura

4.6.1.3. Pengembangan Kesehatan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan RS Rujukan Type A di Kota Jayapura
2. Pembangunan RS Rujukan Type B di Kota Jayapura
3. Pembangunan RS Mata di Kota Jayapura

4.6.1.4. Pengembangan Infrastruktur Strategis

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pengembangan bandara internasional sentani
2. Pembangunan pelabuhan peti kemas depapre
3. Pembangunan terminal type A dan B

4. Pembangunan dan peningkatan Jalan nasional, provinsi dan Kabupaten/kota
5. Pembangunan jembatan Hamadi Holtekamp
6. Pengembangan Air Baku/Bersih Danau Sentani
7. Pembangunan transmisi PLTA Genyem & PLTU Holtekamp.
8. Pembangunan sarana dan prasarana pariwisata Danau Sentani

4.6.1.5. Pengembangan Perumahan & Infrastruktur Kampung

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan rumah layak huni (pusat, prov, kab/kota)
2. Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
3. Pembangunan jalan akses kampung dan sentra-sentra produksi masyarakat
4. Pembangunan pelabuhan/dermaga rakyat
5. Pembangunan listrik kampung (PLTS, PLTMH)

4.6.1.6. Infrastuktur PON XX

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan Kawasan Venue Utama di Kampung Harapan, yang meliputi :
 - Stadion Utama
 - ISTORA
 - Velodrome
 - Wisma Atlit
2. Pembangunan Venue tersebar di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura, yang meliputi :
 - Hotel dan GOR Mandala
 - Pengembangan Lapangan Mandala
 - Rehabilitasi GOR-GOR tersebar

4.6.2. Arah Pengembangan Wilayah Adat Saereri

4.6.2.1. Pengembangan Ekonomi Kawasan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pengembangan budidaya rumput laut di Yapen & Supiori (sdh berjalan), yang meliputi :
 - Pembinaan petani rumput laut
 - Pembangunan gudang & lantai jemur (usulan 2018)
 - Bantuan peralatan : kerambah apung
 - Butuh pengembangan pengolahan rumput laut

- Target : peningkatan ekspor rumput laut
2. Pengembangan Perikanan tangkap (4 kabupaten), yang meliputi :
 - Bantuan peralatan tangkap : Kapal 5 GT, perahu motor, jaring, kerambah apung
 - Pembangunan pabrik es, cold storage di Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Nabire
 - Pembangunan infrastruktur : PLTS di Pulau Numfor, mesin disel
 - Pembangunan industri pengolahan ikan (packaging ikan presto dan ikan asar, pengalengan ikan, abon ikan).
 - Infratstruktur : tambatan perahu, pelabuhan
 - Pembangunan PPI di Supiori (usulan 2018)
 - Fasilitasi kerjasama ekspor perikanan
 - Target : kebutuhan pasar dalam dan LN
 3. Pengembangan pariwisata kelautan dan Kehutanan (P. Padaido-Supiori, P.Owi-Biak, P. Rani-Supiori, CA Yapen, Kws mangrove Waropen, Taman burung Biak), yang meliputi:
 - Pembangunan sarpras penunjang : (dermaga kamp sumber, kapal wisata, jalan akses, jalan kayu/jerambah)
 - Pembangunan homestay di kamp. Sumber
 - Revitalisasi kawasan taman burung Biak
 - Promosi destinasi wisata Saereri
 - Pembinaan sadar wisata masyarakat lokal
 - Pengembangan kemitraan
 - Target : Menjadikan kawasan Saereri sebagai salah satu icon wisata unggulan kelautan/pesisir dan pusat produksi perikanan kelautan.

4.6.2.2. Pengembangan Pendidikan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan Sekolah Asrama di Biak
2. Pembangunan Sekolah vokasi di Kabupaten Biak

4.6.2.3. Pengembangan Kesehatan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan RS Rujukan Type B di Kab. Biak Numfor

4.6.2.4. Pengembangan Infrastruktur Strategis

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pengembangan bandara internasional Frans Kaisepo
2. Pembangunan bandara Yapen, Numfor, dan waropen
3. Pembangunan pelabuhan kabupaten
4. Pembangunan dan peningkatan Jalan nasional, provinsi dan Kabupaten/kota
5. Peningkatan jalan korem-sorendoweri
6. Pengembangan Air Baku/Bersih
7. Pembangunan PLTA dan PLTU
8. Pembangunan sarana prasarana pariwisata
9. Penyediaan sarana angkutan darat dan laut untuk distribusi komoditas

4.6.2.5. Pengembangan Perumahan & Infrastruktur Kampung

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan rumah layak huni (pusat, prov, kab/kota)
2. Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
3. Pembangunan jalan akses kampung dan sentra-sentra produksi masyarakat
4. Pembangunan pelabuhan/dermaga rakyat
5. Pembangunan listrik kampung (PLTS, PLTMH)

4.6.2.6. Infrastruktur PON XX

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan Venue tersebar di Kab Biak Numfor

4.6.3. Arah Pengembangan Wilayah Adat Meepago

4.6.3.1. Pengembangan Ekonomi Kawasan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pengembangan kopi di Paniai, Deyai, Dogiyai dan Intan Jaya, yang meliputi :
 - Penyediaan Kebun Bibit dan Pembinaan petani kopi;
 - Intensifikasi dan Ekstensifikasi lahan perkebunan kopi;
 - Pengadaan saprodi untuk petani kopi di 4 kab
 - Pengendalian hama penyakit kopi di 4 kab
 - Pengembangan bibit unggul, jalan produksi, Pembangunan lantai jemur di 4 kabupaten;
 - Pembangunan pabrik pengolahan kopi terpusat di Dogiyai

- Promosi pemasaran kopi di Dalam Negeri dan Luar Negeri
 - Pengembangan kerjasama kemitraan;
2. Pengembangan sayur organik dan buah buahan di Kab Nabire, yang meliputi :
 - Penyediaan lahan pembibitan dan bibit unggul;
 - Pembinaan petani masyarakat lokal;
 - Promosi dan Fasilitasi pemasaran
 - Target: Kebutuhan sayur organik Papua
 3. Pengembangan perikanan di Nabire dan Timika, yang meliputi :
 - Bantuan peralatan tangkap: Kapal 5 GT, perahu motor, jaring, kerambah apung
 - Pembangunan pabrik es, cold storage
 - Pembangunan industri pengolahan ikan (Nabire di pusatkan di Biak, Timika di pusatkan di Merauke)
 - Infracstruktur : tambatan perahu, pelabuhan
 - Fasilitasi kerjasama ekspor perikanan
 - Target : kebutuhan pasar dalam dan LN
 4. Pembangunan kawasan industri timika (smelter dan semen)

4.6.3.2. Pengembangan Pendidikan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan Sekolah Asrama di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire
2. Pembangunan Sekolah vokasi di Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire

4.6.3.3. Pengembangan Kesehatan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan RS Rujukan Type B di Kab. Nabire

4.6.3.4. Pengembangan Infrastruktur Strategis

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pengembangan bandara internasional moses kilangin
2. Pengembangan pelabuhan Pomako
3. Pengembangan bandara Kabupaten
4. Pembangunan dan peningkatan Jalan nasional, provinsi dan Kabupaten/kota
5. Pembangunan transmisi PLTA & PLTMG

6. Penyediaan sarana angkutan darat dan laut untuk distribusi komoditas

4.6.3.5. Pengembangan Perumahan & Infrastruktur Kampung

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan rumah layak huni (Pusat, Prov, Kab/Kota)
2. Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
3. Pembangunan jalan akses kampung dan sentra-sentra produksi masyarakat
4. Pembangunan pelabuhan/dermaga rakyat
5. Pembangunan listrik kampung (PLTS, PLTMH)

4.6.3.6. Infrastuktur PON XX

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu:

1. Pembangunan Kawasan Olah Raga di kabupaten Mimika (PT. FI)
2. Peningkatan jalan dalam Kota Timika

4.6.4. Arah Pengembangan Wilayah Adat Lapago

4.6.4.1. Pengembangan Ekonomi Kawasan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pengembangan kopi di Tolikara, Jayawijaya, Pegunungan Bintang, yang meliputi :
 - Penyediaan lahan pembibitan dan bibit kopi serta Pembinaan petani kopi;
 - Intensifikasi & Ekstensifikasi lahan perkebunan kopi;
 - Pengadaan saprodi untuk petani kopi di 4 kab
 - Pengendalian hama penyakit kopi di 4 kab
 - Pengembangan bibit unggul, jalan produksi, Pemb lantai jemur di 4 kab;
 - Pembangunan pabrik pengolahan kopi terpusat di Wamena
 - Promosi pemasaran kopi di DN dan LN
 - Pengembangan kerjasama kemitraan;
2. Pengembangan buah merah di Tolikara dan Jayawijaya;
3. Pengembangan sayur dan buah organik di Tolikara, Puncak Jaya, yang meliputi :
 - Penyediaan bibit unggul dan intensifikasi lahan organik;
 - Pembinaan petani masyarakat lokal;

- Promosi dan Fasilitasi pemasaran
 - Target: Kebutuhan sayur dan buah organik Papua
4. Pengembangan ternak babi di semua Kabupaten Wilayah Adat Lapago, yang meliputi :
- Penyediaan bibit unggul
 - Target Peternakan : pasar Papua
5. Pengembangan Wisata budaya, yang meliputi :
- Penataan Kawasan Wisata di Wamena
 - Pembangunan sarana-Prasarana penunjang wisata (jalan akses, homestay, outlet ekraf, listrik, air bersih)
 - Promosi destinasi wisata budaya
 - Pembinaan sadar wisata masyarakat lokal
 - Pengembangan kemitraan
 - Target : Menjadikan Jayawijaya sebagai salah satu icon wisata unggulan Papua (Paket Ekowisata Papua : Raja Ampat-Biak-Jayapura-Jayawijaya, Asmat)
 - Pengembangan event wisata Papua terintegrasi

4.6.4.2. Pengembangan Pendidikan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan Sekolah Asrama di Jayawijaya
2. Pembangunan Sekolah vokasi di Kabupaten Tolikara dan Kabupaten Puncak serta Kabupaten Mamberamo Tengah

4.6.4.3. Pengembangan Kesehatan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan RS Rujukan Type B di Kab. Jayawijaya
2. Pembangunan Puskesmas Perawatan di Gome Kab. Puncak
3. Pembangunan RS Bergerak di Mamit Kab. Tolikara

4.6.4.4. Pengembangan Infrastruktur Strategis

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pengembangan bandara Wamena
2. Pembangunan Pelabuhan sungai Kenyam & Dekai
3. Pembang dan peningktn Jalan nas, provinsi dan Kabupaten/kota
4. Pembangunan transmisi PLTA/PLTMH & PLTMG
5. Pembangunan Daerah irigasi nabire
6. Pembangunan daerah irigasi yahukimo untuk perikanan darat

7. Pembangunan sarpras pariwisata budaya
8. Penyediaan sarana angkutan darat dan udara untuk distribusi komoditas

4.6.4.5. Pengembangan Perumahan & Infrastruktur Kampung

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan rumah layak huni (pusat, prov, kab/kota)
2. Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
3. Pembangunan jalan akses kampung dan sentra-sentra produksi masyarakat
4. Pembangunan lapangan/ bandara perintis
5. Pembangunan listrik kampung (PLTS, PLTMH)

4.6.4.6. Infrastruktur PON XX

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan Venue di Jayawijaya
2. Peningkatan jalan dalam kota Wamena

4.6.5. Arah Pengembangan Wilayah Adat Anim Ha

4.6.5.1. Pengembangan Ekonomi Ekonomi Kawasan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pengembangan kawasan pangan Merauke (KSEP), yang meliputi :
 - Penyiapan lahan (perubahan status kawasan)
 - Review investasi/ijin usaha yang tidak operasional
 - Penyiapan infrastruktur penunjang :
Irigasi yang bersumber dari sungai Digul (sebagai alternatif sumber air baku, pertanian di Merauke), pelabuhan khusus ekspor (beras ke PNG dll), infrastruktur jalan dan jembatan
2. Pengembangan perkebunan (tebu, karet, sawit), yang meliputi :
 - Pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan
3. Pengembangan perikanan, yang meliputi :
 - Bantuan peralatan tangkap: Kapal 5 GT, perahu motor, jaring, kerambah apung
 - Pembangunan pabrik es, cold storage
 - Pembangunan industri pengolahan ikan (packaging ikan presto dan ikan asar, pengalengan ikan, abon ikan).
 - Infrastruktur : tambatan perahu, pelabuhan
 - Fasilitasi kerjasama ekspor perikanan

- Target : kebutuhan pasar dalam dan LN
4. Pengembangan Peternakan, yang meliputi :
 - Inseminasi Buatan
 - Penyediaan bibit
 - Target Peternakan : swasembada daging sapi untuk Papua dan ekspor ke PNG
 5. Pengembangan wisata budaya Asmat, sejarah Boven Digoel, keanekaragaman hayati Merauke, yang meliputi :
 - Penataan situs kawasan wisata penjara Soekarno-Hatta di Tanah Merah
 - Pembangunan homestay di TN Wasur untuk pengamatan Rusa dan Kasuari
 - Pembangunan sarana prasarana penunjang (pelabuhan/dermaga sungai, homestay, outlet, listrik dll)
 - Promosi destinasi wisata budaya asmat
 - Pembinaan sadar wisata masyarakat lokal
 - Pengembangan kemitraan
 - Target : Menjadikan Asmat sebagai salah satu icon wisata unggulan Papua (Paket Ekowisata Papua : Raja Ampat-Biak-Jayapura-Jayawijaya, Asmat)
 - Pengembangan event wisata Papua terintegrasi

4.6.5.2. Pengembangan Pendidikan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan Sekolah Asrama di kab. Merauke
2. Pembangunan Sekolah vokasi di kab. Merauke

4.6.5.3. Pengembangan Kesehatan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan RS Rujukan Type B di Kab. Merauke
2. Pembangunan RS Khusus Kusta di Mumugu kab. Asmat

4.6.5.4. Pengembangan Infrastruktur Strategis

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pengembangan bandara Mopah
2. Pengembangan pelabuhan Merauke
3. Pembangunan pelabuhan-pelabuhan sungai
4. Pembangunan dan peningkatan Jalan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota

5. Pengembangan irigasi rawa Merauke
6. Pengembangan Air Baku Sungai Maro
7. Pembangunan PLTMH dan PLTU
8. Penyediaan sarana angkutan darat dan laut untuk distribusi komoditas
9. Peningkatan jalan Merauke-Waropko dan penyelesaian jalan waropko-oksibil

4.6.5.5. Pengembangan Perumahan & Infrastruktur Kampung

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan rumah layak huni (Pusat, Prov, Kab/Kota)
2. Pembangunan jaringan air bersih dan sanitasi
3. Pembangunan jalan akses kampung dan sentra-sentra produksi masyarakat
4. Pembangunan pelabuhan/dermaga rakyat
5. Pembangunan listrik kampung (PLTS, PLTMH)

4.6.5.6. Infrastruktur PON XX

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Pembangunan Venue di Kabupaten Merauke
2. Peningkatan jalan-jalan dalam kota Merauke

4.6.6. Arah Pengembangan Gerbangmas Hasrat Papua

4.6.6.1. Pengembangan Ekonomi Kerakyatan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Distrik Subur (Kampung Subur & Kaisa) dan Distrik Iniyandit (Kampung Ogenetan & Autriop)
2. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Distrik Distrik Subur (Kampung Subur & Kaisa) dan Distrik Iniyandit (Kampung Ogenetan & Autriop)

4.6.6.2. Pendidikan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Program pendidikan anak usia dini Distrik Subur (Kampung Subur & Kaisa) dan Distrik Iniyandit (Kampung Ogenetan & Autriop)
2. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 Tahun Distrik Subur (Kampung Subur & Kaisa) dan Distrik Iniyandit (Kampung Ogenetan & Autriop)

4.6.6.3. Kesehatan

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Program perbaikan gizi Distrik Subur (Kampung Subur & Kaisa) dan Distrik Iniyandit (Kampung Ogenetan & Autriop)
2. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak Distrik Subur (Kampung Subur & Kaisa) dan Distrik Iniyandit (Kampung Ogenetan & Autriop)

4.6.6.4. Infrastruktur Dasar

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Program pengembangan kampung mandiri Energi & Air Bawah Tanah Distrik Subur (Kampung Subur & Kaisa) dan Distrik Iniyandit (Kampung Ogenetan & Autriop)
2. Pembangunan sarpras air minum dan sanitasi di sekolah dan puskesmas
3. Pembangunan jalan poros kampung dan jalan produksi
4. Penyediaan energi listrik
5. Penyediaan sarpras telekomunikasi

4.6.6.5. Peningkatan Derajat Kesehatan Dan Pendidikan Pada Generasi Anak Papua

Dengan arah pengembangan prioritas yaitu :

1. Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Asmat
2. Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Lanny Jaya
3. Program Perlindungan Sosial di Kabupaten Paniai

Target : meningkatnya derajat kesehatan dan pendidikan usia dini pada generasi anak Papua usia 0 - 4 tahun di setiap Keluarga Orang Asli Papua.

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, bahwa rencana program dan kegiatan prioritas daerah merupakan penjabaran terhadap konsistensi antar dokumen yang memberi informasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada rencanan pembangunan tahun 2018.

Selain itu pula, Program Prioritas yaitu program yang diselenggarakan oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak langsung mendukung capaian program pembangunan daerah atau prioritas dan sasaran pembangunan daerah, serta berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan minimal.

Rencana program dan kegiatan prioritas daerah, adalah bagian yang tidak terpisahkan yang penyusunannya memperhatikan batasan urusan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Sejalan dengan perubahan paradigma penganggaran “ *money follow function* kepada *money follow program*”, maka perlu dilakukan penjabaran secara operasional tentang program prioritas. Hal penting yang menjadi penekanan dalam perubahan paradigma tersebut, bahwa program prioritas wajib mendapat penguatan penganggaran, sehingga penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 merupakan rumusan penganggaran yang memiliki korelasi terhadap pembangunan daerah yang dimana penganggaran lebih fokus dan terarah kepada target capaian pembangunan daerah. Adapun penentuan program prioritas disusun berdasarkan : (1). Merupakan program prioritas pembangunan daerah Tahun 2018 sesuai dengan pentahapan tema RPJMD atau program unggulan Gubernur Papua, (2). Merupakan program

prioritas pembangunan daerah dalam rangka pencapaian Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2018 serta indikatornya. (3). Merupakan prioritas program ditingkat SKPD yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi tiap SKPD.

Program prioritas yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah mengacu pada program prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013 - 2018, dimana prioritas program tersebut telah menggambarkan target indikator capaian kinerja beserta pagu indikatif selama 5 (lima) tahun. Program prioritas pembangunan daerah RPJMD oleh SKPD dijabarkan dalam Renstra SKPD, masing-masing program diuraikan kedalam kegiatan disertai pagunya. Selanjutnya di RKPD, dalam hal terjadi perhitungan kapasitas keuangan daerah tahun rencana yang berbeda dengan perhitungan RPJMD maka atas kelebihan/kekurangan dana pagu tersebut dialokasikan untuk program/kegiatan alternatif dan program kegiatan baru. Suatu program kegiatan baru yaitu program dan kegiatan yang tidak tercantum pada renstra SKPD dengan kriteria sebagai berikut : (1). Tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat; (2). Dalam rangka mempercepat capaian sasaran SKPD; (3). Adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah; (4). Dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra SKPD.

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan yang dilakukan oleh tim penyusun RKPD, dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1). Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran berupa alokasi belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagaimana telah dihitung dalam perumusan kerangka pendanaan. (2). Menentukan keluaran/output setiap kegiatan. (3). Menghitung alokasi pagu dari setiap output kegiatan untuk setiap program. (4). Menghitung alokasi pagu setiap program setelah output kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya.

Menghitung alokasi SKPD berdasarkan program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Elemen-elemen utama program prioritas memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan dan SKPD yang bertanggungjawab. Program yang disusun harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu, anggaran, kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki daerah. Setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dapat diukur tingkat capaiannya. Pencapaian kinerja program merupakan akumulasi dari pencapaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan.

Program prioritas dan pagu indikatif yang telah ditetapkan untuk rancangan awal RKPD, disampaikan ke SKPD sesuai program terkait beserta pagu indikatif untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kegiatan prioritas masing-masing program dimaksud. Dalam penyusunan prioritas kegiatan SKPD juga memperhatikan kegiatan yang telah disusun dalam dokumen Renstra SKPD sehingga terjadi keselarasan dalam penyusunan program dan kegiatan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah dan SKPD. Program, capaian kinerja, beserta pagu indikatifnya, yang mengacu pada RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.

Adapun proporsi anggaran pembangunan daerah secara keseluruhan dapat dijelaskan pada tabel Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Alokasi Anggaran secara keseluruhan.

Tabel 5.1.
Rencana Total Pembiayaan Pembangunan Daerah Tahun 2018

	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu
Program Prioritas	123	616	3.808.295.422.861,00
Program Non Prioritas	132	903	3.668.993.628.721,00
Program Rutin	253	1.259	724.185.899.098,00
Total	508	2.778	8.201.474.950.680,00

5.1. Prioritas Pembangunan Daerah Beserta Pagu Anggarannya

Program prioritas Provinsi Papua Tahun 2018 yang telah diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Papua tahun 2013-2018 terdiri atas 8 (delapan) prioritas pembangunan daerah yang melaksanakan 16 (enam belas) Urusan Wajib, 6 (enam) Urusan Pilihan, dan 6 (enam) Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Satu persatu semua ini dapat dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 5.2.
Rencana Pembiayaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

No	Prioritas Pembangunan	Bobot	Pagu Anggaran
1	Pemenuhan Kebutuhan Dasar	7,48	284.842.844.642
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	8,52	324.576.785.519
3	Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Komoditas Unggulan Dan Peningkatan Investasi	3,34	127.168.645.000
4	Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah	54,20	2.063.917.149.000
5	Pengembangan Kawasan Khusus Pembangunan Berbasis Kampung	0,33	12.781.800.000
6	Percepatan Kesiapan Pelaksanaan PON XX	23,67	901.511.000.000
7	Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola Pemerintahan	2,06	78.625.503.700
8	Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penanganan Bencana	0,39	14.871.695.000
Total			3.808.295.422.861

Total pagu yang ditetapkan untuk belanja program-program prioritas pada tahun 2018 adalah sebanyak Rp. 3.808.295.422.861,00 atau 46,43% dari total belanja langsung yang diproyeksikan pada tahun ini (lihat kembali Tabel 3.16). Penetapan bobot pada prioritas pembangunan dilakukan menggunakan Metode AHP (*Analytical Hierarchy Process*) dengan melibatkan beberapa *expert* yang berkompeten dibidangnya masing-masing. Terlihat di Tabel 5.1, bobot terbesar adalah untuk Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah (54,20%), kemudian

Percepatan Kesiapan Pelaksanaan PON XX (23,67%), Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (8,52%), dan terakhir Pemenuhan Kebutuhan Dasar (7,48%). Adapun yang terendah adalah Pengendalian Pemanfaatan Ruang, Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Penanganan Bencana (0,39%). Selanjutnya berdasarkan bobot dan total pagu anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program-program prioritas tersebut, ditetapkan bahwa untuk pembiayaan prioritas Pembangunan Infrastruktur Dan Konektivitas Wilayah adalah sebesar Rp.2.063.917.149.000. Kemudian untuk Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia sebesar Rp.324.576.785.519, dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebesar Rp.284.842.844.642.

Selanjutnya, jika total pagu anggaran untuk pelaksanaan program-program prioritas tersebut dirinci menurut urusan, maka terlihat jelas kelompok urusan yang memperoleh pagu terbesar adalah untuk Urusan Wajib Pelayanan Dasar yaitu sebesar Rp. 2.489.125.150.161, yang terkonsentrasi untuk pembiayaan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp. 1.900.736.445.000. Selanjutnya untuk Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar sebesar Rp. 339.430.420.000, yang lebih banyak dibelanjakan untuk bidang Perhubungan yaitu Rp. 298.046.800.000. Sedangkan sisanya sebanyak Rp. 188,822,152,700 digunakan untuk belanja program-program prioritas di Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang. Selengkapnya pagu anggaran untuk program-program prioritas tahun 2018 jika dirinci menurut urusan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.
Rencana Total Pembiayaan Pembangunan Daerah
menurut Urusan dan Bidang

Kode	Urusan/Bidang	Pagu
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	4.396.707.631.680,00
1.01	Pendidikan	502.195.746.680,00
1.02	Kesehatan	967.553.465.000,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.616.882.100.000,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	213.325.000.000,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	58.373.720.000,00
1.06	Sosial	38.377.600.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.461.195.750.000,00
2.01	Tenaga Kerja	12.100.000.000,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	15.000.000.000,00
2.03	Pangan	22.692.600.000,00
2.04	Pertanahan	675.000.000,00
2.05	Lingkungan Hidup	10.617.900.000,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	1.600.000.000,00
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	15.773.400.000,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0
2.09	Perhubungan	363.091.800.000,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	53.759.050.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.500.000.000,00
2.12	Penanaman Modal	10.000.000.000,00
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	910.000.000.000,00
2.14	Statistik	300.000.000,00
2.15	Persandian	0
2.16	Kebudayaan	18.090.000.000,00
2.17	Perpustakaan	5.549.738.400,00
2.18	Kearsipan	2.446.261.600,00
3	Urusan Pilihan	474.230.385.000,00
3.01	Kelautan dan Perikanan	43.298.300.000,00
3.02	Pariwisata	15.849.785.000,00
3.03	Pertanian	161.463.400.000,00
3.04	Kehutanan	35.926.100.000,00
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	178.768.700.000,00
3.06	Perdagangan	38.024.100.000,00
3.07	Perindustrian	0

3.08	Transmigrasi	900.000.000,00
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	1.869.341.184.000,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	1.623.429.523.000,00
4.02	Pengawasan	25.016.000.000,00
4.03	Perencanaan	65.515.361.000,00
4.04	Keuangan	118.669.200.000,00
4.05	Kepegawaian	28.211.100.000,00
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	0
4.07	Penelitian dan Pengembangan	8.500.000.000,00
TOTAL		8.201.474.950.680,00

Tabel 5.4.
Rencana Pembiayaan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018
Dirinci Menurut Urusan dan Bidang

Kode	Urusan / Bidang	Pagu
1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	2.489.125.150.161,00
1.01	Pendidikan	153.656.500.000,00
1.02	Kesehatan	275.719.465.019,00
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.900.736.445.000,00
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	136.674.945.142,00
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	14.187.795.000,00
1.06	Sosial	8.150.000.000,00
2	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	1.125.391.420.000,00
2.01	Tenaga Kerja	6.075.000.000,00
2.02	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.866.400.000,00
2.03	Pangan	7.518.900.000,00
2.04	Pertanahan	0
2.05	Lingkungan Hidup	6.800.700.000,00
2.06	Administrasi Kependudukan dan Capil	0
2.07	Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.481.800.000,00
2.08	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0
2.09	Perhubungan	298.046.800.000,00
2.10	Komunikasi dan Informatika	2.550.000.000,00
2.11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.185.000.000,00
2.12	Penanaman Modal	0
2.13	Kepemudaan dan Olah Raga	785.961.000.000,00
2.14	Statistik	0

Kode	Urusan / Bidang	Pagu
2.15	Persandian	0
2.16	Kebudayaan	4.670.000.000,00
2.17	Perpustakaan	0
2.18	Kearsipan	1.235.820.000,00
3	Urusan Pilihan	111.741.149.000,00
3.01	Kelautan dan Perikanan	7.050.000.000,00
3.02	Pariwisata	4.100.000.000,00
3.03	Pertanian	48.116.800.000,00
3.04	Kehutanan	17.118.345.000,00
3.05	Energi dan Sumberdaya Mineral	10.706.004.000,00
3.06	Perdagangan	24.650.000.000,00
3.07	Perindustrian	0
3.08	Transmigrasi	0
4	Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	82.037.703.700,00
4.01	Administrasi Pemerintahan	13.042.480.000,00
4.02	Pengawasan	6.012.350.000,00
4.03	Perencanaan	26.025.500.000,00
4.04	Keuangan	20.257.373.700,00
4.05	Kepegawaian	14.600.000.000,00
4.06	Pendidikan dan Pelatihan	0
4.07	Penelitian dan Pengembangan	2.100.000.000,00
TOTAL		3.808.295.422.861,00

5.2. Program Prioritas Beserta Pagu Anggarannya

Jumlah program prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018 adalah sebanyak 123 program, dengan jumlah OPD (Organisasi Perangkat Daerah) pelaksana sebanyak 38 OPD. Secara rinci hal ini dapat disampaikan sebagai berikut.

Tabel 5.5.
Rencana Pembiayaan Program-Program Prioritas Tahun 2018
Dirinci Menurut OPD

Prioritas / Program	Pagu	SKPD
PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR	284.842.844.642,00	
Program Pendidikan Menengah Atas	104.270.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	5.700.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Menengah Kejuruan	12.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	1.026.399.500,00	Dinas Kesehatan
Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi	5.800.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pengembangan Perumahan	134.774.945.142,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan	400.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.150.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti	6.000.000.000,00	Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil
Program kerjasama informasi dengan mas media	1.800.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Program Pelayanan Air Bersih	3.750.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi	6.671.500.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA	324.576.785.519,00	
Program Pendidikan Anak Usia Dini	2.150.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal	950.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Luar Biasa	1.500.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus	22.586.500.000,00	Dinas Pendidikan
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	3.553.210.620,00	Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	625.425.000,00	Dinas Kesehatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	1.308.192.550,00	Dinas Kesehatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.482.635.000,00	Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	1.259.189.000,00	Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	325.221.000,00	Dinas Kesehatan
Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan	325.221.000,00	Dinas Kesehatan
Program upaya kesehatan perorangan	217.720.137.849,00	Dinas Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Jayapura Rumah Sakit Jiwa
Program Sumber Daya Kesehatan	32.828.524.500,00	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium	10.265.309.000,00	Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	3.175.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengolahan dan Penyebarluasan Informasi Produktivitas	100.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
Program Pengawasan Ketenagakerjaan	400.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	450.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak	3.416.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	750.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	2.800.000.000,00	Dinas Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.870.000.000,00	Dinas Kebudayaan
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1.235.820.000,00	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah
Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan	2.100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT BERBASIS KOMODITAS UNGGULAN DAN PENINGKATAN INVESTASI	127.168.645.000,00	
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	13.525.600.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	7.518.900.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	246.950.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	364.550.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	5.573.500.000,00	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Program pengembangan budidaya perikanan	4.150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.900.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)	950.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	4.100.000.000,00	Dinas Pariwisata
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	3.900.000.000,00	Dinas Perkebunan
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	3.320.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Perkebunan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	19.446.800.000,00	Dinas Perkebunan
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	1.500.000.000,00	Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak	1.150.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program peningkatan produksi hasil peternakan	18.800.000.000,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan	3.956.700.000,00	Dinas Kehutanan
Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	150.000.000,00	Dinas Kehutanan
Program perencanaan dan pengembangan hutan	11.065.645.000,00	Dinas Kehutanan
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	1.450.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	14.500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Pengembangan industri kecil dan menengah	4.700.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Penataan Struktur Industri	4.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
program peningkatan kinerja BUMD	850.000.000,00	Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN KONEKTIVITAS WILAYAH	2.063.917.149.000,00	
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	957.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	6.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	62.375.300.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	41.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pengendalian banjir	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	67.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pembangunan infrastruktur pedesaan	25.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Peningkatan Jalan dan Jembatan	604.935.545.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
Program peningkatan pelayanan angkutan	3.250.000.000,00	Dinas Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	291.646.800.000,00	Dinas Perhubungan
Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral	209.504.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
PENGEMBANGAN KAWASAN KHUSUS PEMBANGUNAN BERBASIS KAMPUNG	12.781.800.000,00	
Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung	981.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung	1.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	10.300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
PERCEPATAN KESIAPAN PELAKSANAAN PON XX	901.511.000.000,00	
Peningkatan Jalan dan Jembatan	113.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program peningkatan pelayanan angkutan	2.550.000.000,00	Dinas Perhubungan
Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olahraga	10.000.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	424.500.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda
Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional	351.461.000.000,00	Dinas Olah Raga dan Pemuda

REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN	78.625.503.700,00	
Program pengembangan wawasan kebangsaan	4.200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Pendidikan Politik Masyarakat	7.037.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan	1.000.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan	900.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000.000,00	Biro Hukum
Program Pembinaan Mental Spritual	430.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	2.300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan
Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan	2.300.000.000,00	Biro Tata Pemerintahan
Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum	1.642.300.000,00	Biro Hukum
Program Dokumentasi dan Informasi Hukum	414.000.000,00	Biro Hukum
Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas	1.100.000.000,00	Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri
Program Pengembangan Data dan Informasi	150.000.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri	2.706.180.000,00	Biro Perbatasan dan Kerja Sama Luar Negeri
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	565.400.000,00	Inspektorat
Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	5.446.950.000,00	Inspektorat
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan daerah	6.375.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan pembangunan ekonomi	2.500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	1.900.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kerjasama Pembangunan	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	20.257.373.700,00	Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah
Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	2.300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda	1.200.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	8.500.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
Program Pengembangan Data dan Informasi	1.400.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.200.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG, PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN PENANGANAN BENCANA	14.871.695.000,00	
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	1.049.995.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	3.600.000.000,00	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	300.000.000,00	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	450.000.000,00	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim	650.000.000,00	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	1.800.700.000,00	Dinas Pengelola Lingkungan Hidup
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
Program perencanaan dan pengembangan hutan	1.596.000.000,00	Dinas Kehutanan
Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi	350.000.000,00	Dinas Kehutanan
Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi	75.000.000,00	Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral
Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Tata Ruang	2.000.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Kerjasama Pembangunan	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Program perencanaan kawasan	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
TOTAL	3.808.295.422.861,00	

5.3. Kegiatan Prioritas Beserta Pagu Anggaranannya

Total kegiatan prioritas yang dilaksanakan pada tahun 2018 direncanakan sebanyak 616 kegiatan, yang tersebar pada 123 program prioritas, dan 28 urusan pembangunan. Selengkapnya hal ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.6.
Rencana Pembiayaan Kegiatan-Kegiatan Prioritas Tahun 2018
Dirinci Menurut Urusan dan Program Prioritas

Urusan / Bidang	Program / Kegiatan Prioritas	Prioritas Daerah	Pagu
2	3	4	5
Urusan Wajib Pelayanan Dasar			2.489.125.150.161,00
Pendidikan			153.656.500.000,00
	Program Pendidikan Anak Usia Dini		2.150.000.000,00
	Fasilitasi dan Pendampingan Pengembangan PAUD Model Gerbangmas Hasrat Papua	2	700.000.000,00
	Jambore Nasional PAUDNI	2	800.000.000,00
	BOP PAUD-SD, PKBM, Pos Yandu Model, TK TUT Wuri Handayani, PAUD Kasih Mama	2	150.000.000,00
	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD	2	500.000.000,00
	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		19.300.000.000,00
	Visitasi dan Pendampingan CALISTUNG SD Kelas 1, 2 dan 3 Gerbangmas	2	1.000.000.000,00
	Program Pendidikan Menengah Atas		254.920.000.000,00
	Pembangunan Sekolah Unggulan Berasrama	1	100.000.000.000,00
	Lomba Debat Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia	1	770.000.000,00
	Pengembangan Materi Belajar Mengajar Menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi	1	2.500.000.000,00
	Lomba Kompetensi Siswa SMA Tingkat Prov dan Tk.Nasional	1	1.000.000.000,00
	Program Pendidikan Non Formal		7.650.000.000,00
	Akreditasi Lembaga PAUDNI	2	250.000.000,00
	Rapat Koordinasi Tim Pengendali Percepatan Tuntas Buta Aksara Provinsi	1	700.000.000,00
	Pelaksanaan Jambore PTK Pendidikan Non Formal	2	700.000.000,00
	Pembekalan KKN Tematik Percepatan Tuntas Buta Aksara di PKBM	1	5.000.000.000,00
	Program Pendidikan Luar Biasa		2.100.000.000,00

	Pengadaan buku-buku dan alat tulis siwa	2	150.000.000,00
	Pengadaaan alat praktik dan peraga siswa	2	350.000.000,00
	Pelatihan kompetensi tenaga pendidik	2	500.000.000,00
	Pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa	2	500.000.000,00
	Program Peningkatan SDM Pendidikan Tinggi		3.000.000.000,00
	Beasiswa Mahasiswa S1	2	1.000.000.000,00
	Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (S2)	2	1.000.000.000,00
	Beasiswa Pendidikan Doctor (S3)	2	1.000.000.000,00
	Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus		39.886.500.000,00
	Pembinaan dan Pengembangan PK/PLK	2	3.000.000.000,00
	Makan dan Minum Siswa SMA N 3 dan SMANKOR	2	12.036.500.000,00
	Biaya Operasional KPG,SMA N 3 Buper dan SMA N Keberbakatan Olahraga	2	6.150.000.000,00
	Pelatihan Guru dan Calon Kepala Sekolah	2	300.000.000,00
	Pembinaan Siswa SMANKOR Jayapura Mengikuti Kejuaraan	2	300.000.000,00
	PENGADAAN BUKU/MODUL MATA PELAJARAN	2	800.000.000,00
	Program Pendidikan Menengah Kejuruan		118.441.700.000,00
	Lomba Ketrampilan Siswa (LKS-SMK)	1	3.000.000.000,00
	Magang Guru Produktif dan Siswa	1	5.000.000.000,00
	Penyediaan Beasiswa bagi Anak Asli Papua SMK	1	3.000.000.000,00
	Lomba Debat Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia	1	500.000.000,00
	Sertifikasi Siswa SMK	1	1.000.000.000,00
Kesehatan			275.719.465.019,00
	Program Pengembangan Obat Asli Indonesia		4.106.721.480,00
	Pengembangan Obat Asli Daerah	2	852.310.480,00
	Workshop Obat Tradisional Berbasis Wilayah Adat	2	285.165.400,00
	Penilaian Pemanfaatan TOGA	2	33.356.000,00
	Pertemuan data jaringan informasi dan dokumentasi SP3T	2	50.034.000,00
	SOSIALISASI AKUPRESSUR BAGI DOKTER	2	307.930.900,00
	PELATIHAN AKUPRESSUR BAGI PETUGAS PUSKESMAS	2	916.978.200,00
	SOSIALISASI AKUPUNTUR BAGI TENAGA KESEHATAN	2	307.931.600,00
	BIMTEK YANKES TRADKOM INTEGRASI DI FKTP DAN FKTL	2	372.880.800,00

	SOSIALISASI IKLAN DAN PUBLIKASI PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL	2	316.882.000,00
	Blntek Pengobatan Tradisional	2	109.741.240,00
	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat		1.321.481.330,00
	Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	2	291.865.000,00
	Penyebarluasan informasi melalui media masa	2	333.560.000,00
	Program Perbaikan Gizi Masyarakat		1.308.192.550,00
	Pelatihan Surveillance Kewaspadaan Pangan, Gizi, Pemantauan Status Gizi di Daerah Bermasalah Kesehatan	2	675.459.000,00
	Pertemuan pencatatan dan pelaporan program gizi	2	350.238.000,00
	Sosialisasi 1000 hari pertama Kehidupan	2	282.495.550,00
	Program Pengembangan Lingkungan Sehat		1.318.264.500,00
	Peningkatan kemampuan petugas kesehatan dalam pelaksanaan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	1	291.865.000,00
	Pengawasan Kualitas Air	1	275.889.500,00
	Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Kesehatan Olahraga	1	291.865.000,00
	Pembinaan Kebugaran Jasmani	1	166.780.000,00
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		11.647.628.000,00
	Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit IMS- HIV/AIDS	2	1.667.800.000,00
	Pemberantasan penyakit DBD	2	166.780.000,00
	Pemberantasan penyakit Malaria	2	1.667.800.000,00
	Pemberantasan penyakit Filaria	2	166.780.000,00
	Pemberantasan Penyakit Diare	2	83.930.000,00
	Pemberantasan Penyakit Kusta	2	250.170.000,00
	Pemberantasan Penyakit Frambusia	2	125.085.000,00
	Eradikasi Polio, reduksi Campak dan eliminasi Tetanus	2	166.780.000,00
	Pengiriman Vaksin, logistik dan tempat penyimpanan Vaksin	2	800.000.000,00
	Kolaborasi Penanganan Penderita TB-HIV/AIDS	2	583.730.000,00
	Penanggulangan penyakit Taeniasis	2	200.780.000,00
	Peningkatan pelayanan Imunisasi di Provinsi dan Kabupaten.	2	603.000.000,00
	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		1.259.189.000,00

	Peningkatan Kemampuan Bidan di Desa untuk pencegahan penularan HIV/AIDS dari ibu ke Janin	2	917.290.000,00
	Peningkatan Kapasitas Tenaga dalam pencatatan dan pelaporan bagi pengelola data KIA	2	341.899.000,00
	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		708.815.000,00
	Pelatihan stimulasi intervensi , deteksi dini tumbuh kembang bayi Balita dan anak Prasekolah bagi pengelola Kabupaten/kota dan Puskesmas dan pengadaan alat permainan (APE)	2	325.221.000,00
	Program kebijakan dan manajemen pembangunan kesehatan		2.278.933.496,00
	Pendampingan perencanaan pada daerah Bermasalah Kesehatan	2	325.221.000,00
	Program upaya kesehatan perorangan		68.022.137.849,00
	Pelaksanaan Kartu Papua Sehat	2	1.584.410.000,00
	Pengembangan fasyankes di 5 (lima) regional dukungan pelaksanaan KPS	2	66.437.727.849,00
	Program upaya kesehatan perorangan		139.006.100.000,00
	Peningkatan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Papua	2	85.000.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan JKN/BPJS	2	54.006.100.000,00
	Program upaya kesehatan perorangan		10.691.900.000,00
	Peningkatan Pelayanan JKN/BPJS	2	691.900.000,00
	Pelaksanaan Kartu Papua Sehat	2	10.000.000.000,00
	Program Sumber Daya Kesehatan		44.881.768.500,00
	Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan	2	208.475.000,00
	Pelaksanaan sertifikasi oleh MTKP di Regional Wilayah	2	400.272.000,00
	Pelatihan analisis kebutuhan diklat di regional papua	2	325.221.000,00
	Peningkatan Kapasitas penyuluh tenaga kesehatan di lima regional	2	325.221.000,00
	Pelaksanaan Akreditasi Balai pelatihan tenaga kesehatan sebagai pusat pelatihan lokal terbaik di Papua	2	148.434.200,00
	Satuan tugas pelayanan kesehatan kaki telanjang/jalan kaki, pelayanan terapung dan terbang (Satgas kijang)	2	28.919.201.300,00
	Sekolah Menengah Kejuruan Analisis Kesehatan	2	2.501.700.000,00
	Program Peningkatan Pelayanan Laboratorium		10.682.259.000,00
	Pengadaan Peralatan Laboratorium	2	4.282.624.000,00

	Pengadaan bahan pemeriksaan Laboratorium	2	5.003.400.000,00
	Pemeriksaan Laboratorium untuk Pencegahan dan penularan penyakit Endemik/Epidemik	2	291.865.000,00
	Penjaminan mutu laboratorium	2	687.420.000,00
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			1.900.736.445.000,00
	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		1.293.450.000.000,00
	Pembangunan Jalan Usku - Kesnar (115), 75 km	4	20.000.000.000,00
	Pembangunan Ring Road Jayapura - Sentani (Lingkar Dalam), Jbt	4	100.000.000.000,00
	Pembangunan Jalan Maatadi (Deiyai)-Digikebo (Dogiyai)	4	15.000.000.000,00
	Pembangunan Jalan Serui - Ansus, (123), 71,15 Km	4	30.000.000.000,00
	Pembangunan Jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km)	4	35.000.000.000,00
	Pembangunan Jalan Taja - SP V - Kwarja (106)	4	20.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Holtekamp Jayapura (Landmark Papua)	4	190.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Wosi (100 M") (Wosi - Wogi - Kimbim)	4	20.000.000.000,00
	Pembangunan Jalan Keppi - Bade (181)	4	35.000.000.000,00
	Pembangunan Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini (154)	4	25.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Kali Bian	4	30.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Kali Kapare	4	15.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Kali Aparuka	4	15.000.000.000,00
	Pembangunan Jalan Elelim - Kobakma	4	30.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Kawa (40 M")	4	12.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Kanggime (Kali Toli) (80 M") (Kanggime - Mamit)	4	10.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Kauga (60 M") (Kaugapu - SP V)	4	23.000.000.000,00
	'Pembangunan Jalan Jagebob XIII - Bupul (STR.P)	4	15.000.000.000,00
	Pembangunan ruas jalan Obano - Kebo (Duntek - Munayepa - Iyei)	4	15.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Aga I (Enarotali - Sugapa)	4	10.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Aga II (Enarotali - Sugapa)	4	10.000.000.000,00
	Pembangunan Jembatan Sentosa I (25 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	4	4.250.000.000,00

Pembangunan Jembatan Sentosa II (30 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	4	6.500.000.000,00
Pembangunan Jembatan Bindes I (30 M") (Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110))	4	6.500.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kimi bawah (di ruas jalan Samabusa - Nabarua Bawah)	4	10.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Sanoba (di ruas jalan Samabusa - Nabarua Bawah)	4	10.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kali Ubiyong (25 M") (Arso XIV - Sawia - kwarja (114))	4	1.250.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kali Merah (25 M") (Arso XIV - Sawia - kwarja (114))	4	3.250.000.000,00
Pembangunan Jembatan Aikima Atas (40 M") (Aikima - Siepkosi)	4	18.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Aikima Bawah (40 M") (Aikima - Siepkosi)	4	18.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Pun (Bolakme - Kelila - Bokondini (167))	4	15.000.000.000,00
Pembangunan Jalan Wamena - Pugima - Mugi	4	20.000.000.000,00
Pembangunan Jalan Mamit -Umagi	4	30.000.000.000,00
Pembangunan Jalan Kapiroya - Timika	4	15.000.000.000,00
Pembangunan Jalan Kurima-Tangma-Uka	4	30.000.000.000,00
Pembangunan Jalan Ibukota Genyem - Bandara Genyem baru	4	10.000.000.000,00
Pembangunan Jalan Elelim (Yalimo) - Apalapsili - Anggruk (Yahukimo)	4	15.000.000.000,00
Pembangunan Jalan Poros Agats	4	25.000.000.000,00
Pembebasan Lahan Jembatan Wosi	4	5.050.000.000,00
Pembangunan Jembatan Bogonuk (40 M) (Ruas Kanggime - Bogonuk)	4	15.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kali Kulugi (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	4	5.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kali Melage (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	4	5.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kali Kut (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	4	5.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Kali Jetmi (Ruas Wamena - Kurima - Tangma)	4	5.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan S. Gau (Ruas Taja - SP V - Kwarja)	4	2.000.000.000,00
Pembangunan Jembatan Nawa (Ruas Taja - Lereh - Tengon)	4	2.300.000.000,00
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong		6.200.000.000,00
Perencanaan Drainase Lingkungan kompleks Kotaraja Grand	4	200.000.000,00

	Pembangunan Drainase Lingkungan Kompleks Kotaraja Grand	4	3.000.000.000,00
	Pembangunan Saluran Drainase Jl. Belut Expo Waena Kota Jayapura	4	3.000.000.000,00
	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		64.375.300.000,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Kuansun - Besum - Genyem (107)	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Berap - Nimbontong - Lereh - Tengon (110) Paket I	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Waena - Arso V (100 K) 53 Km Paket I	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Korem - Doubo	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Duber - Sorendiweri - Korido (136)	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183), 134 Km	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Warumbaim - Berap - Demta (109)	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Besum - Yanbra - Puai (118)	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Provinsi Papua	4	20.375.300.000,00
	Pemeliharaan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110) Paket II	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Waena - Arso V (100 K) 53 Km Paket II	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Taja - SP V - Kwarja (106) Paket I	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Taja - SP V - Kwarja (106) Paket II	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km) Paket I	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Enarotali (Paniai) - Sugapa, (139) (50 Km) Paket II	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km Paket I	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km Paket II	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Menawi - Sumberbaba (122), 40 Km Paket I	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Jalan Menawi - Sumberbaba (122), 40 Km Paket II	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Junction - Wardo (130) 40,94 Km	4	2.000.000.000,00
	Pemeliharaan Berkala Jalan Bts Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba (185)	4	2.000.000.000,00

	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya		17.733.955.000,00
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI. Lereh SP 5	3	2.669.100.000,00
	Peningkatan Jaringan Rawa DIR Salor	3	4.298.400.000,00
	Peningkatan Jaringan Rawa DIR Wasur	3	2.452.400.000,00
	Peningkatan jaringan irigasi DI.Legare SP 2	3	4.105.700.000,00
	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah		41.200.000.000,00
	Inventarisasi Emisi GRK & PEP RAD-GRK sektor Pengelolaan Limbah	8	100.000.000,00
	Pengembangan SPAM Distrik Yapen Selatan	4	3.000.000.000,00
	Pembangunan SPAM Kabupaten Jayawijaya	4	2.000.000.000,00
	Pengembangan SPAM Distrik Urifasei	4	2.000.000.000,00
	Pengembangan SPAM Distrik Nabire	4	10.000.000.000,00
	Perencanaan TPST Kota Jayapura	4	300.000.000,00
	Pembangunan DRAINASE di Kota Jayapura	4	2.000.000.000,00
	Pembangunan jaringan air bersih di kab Intan Jaya	4	1.500.000.000,00
	Pembangunan jaringan air bersih di Kampung Harapan	4	10.000.000.000,00
	Penyusunan DED Air Bersih di Provinsi Papua	4	7.300.000.000,00
	Masterplan Drainase Perkotaan di Provinsi Papua	4	3.000.000.000,00
	Program pengendalian banjir		50.584.435.000,00
	Pembangunan prasarana pengaman pantai	4	2.000.000.000,00
	Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		67.600.000.000,00
	Perencanaan Teknis Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Provinsi Papua	4	300.000.000,00
	Pembangunan Jalan Lingkungan Perumahan Graha Yotefa kelurahan Waena Distrik Heram	4	3.000.000.000,00
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Tanjung Ria Distrik Jayapura Utara	4	3.000.000.000,00
	Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Hamadi Distrik Jayapura Selatan	4	3.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan lingkungan Jl Belut Expo Waena Kota Jayapura	4	3.000.000.000,00
	Pembangunan Fasilitas Lapangan Olahraga Mandala	4	55.000.000.000,00
	Program pembangunan infrastruktur pedesaan		25.300.000.000,00
	Penataan Kawasan Tugu Patung Yesus	4	25.300.000.000,00
	Peningkatan Jalan dan Jembatan		897.935.545.000,00

	Peningkatan Jalan Waren - Botawa - Sumiangga (126)	4	15.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Kuprik - Jagebob - Erambu (183)	4	41.935.545.000,00
	Peningkatan Jalan Berap - Nimbotong - Lereh - Tengon (110)	4	40.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Arso XIV - Sawia - kwarja (114)	4	35.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Jayapura - Angkasa - Base"G - Dok II (101)	6	15.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Hamadi - Entrop (102)	6	2.500.000.000,00
	Peningkatan Jalan Biak - Adibai - Marau/Bosnik (132)	4	10.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Korem - Doubo (133)	4	30.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Wardo - Duber (134) 37,96 Km	4	35.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Serui - Ansus (123), 71,15 Km	4	15.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan BTS Kota Merauke - Kumbe - Bian - Okaba (185), 88,05 Km	4	50.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Timika - Batas - Tugu	6	20.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Taja - Lereh	4	20.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Illu (Puncak Jaya) - Tiom, (Lanny Jaya), (163)	4	25.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Tiom, (Lanny Jaya) - Illu (Puncak Jaya), (163)	4	25.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Karadiri (Bandara Baru Nabire) - Topo (35 Km)	4	20.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Legare - Samabusa	4	20.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Trikora (2 Jalur) (Mendukung PON)	6	5.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Garuda Spadem (2 Jalur) (Mendukung PON)	6	10.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Kamizaun (Mendukung PON)	6	5.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Arafuru (Mendukung PON)	6	5.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Payum (Mendukung PON)	6	5.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Vihara - Tanah Hitam (105 K)	4	5.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Entrop - Kantor Walikota - Skyline - Perumnas III	6	15.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Sewan - Petam	4	15.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Munukania - Aurimi	4	15.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Karubaga - Wunim - Bokondini (154)	4	25.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Kimbin - Wogi - Wosi	4	10.000.000.000,00

	Peningkatann Jalan Kampung Buton - GOR Volley (2Jalur) (Mendukung PON XX)	6	15.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Kuansu (Namlong)- Besum-Genyem. (107) 11,76 Km	4	10.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Besum - Yanbra - Puai (108)	4	10.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Burmeso - Gesa (118)	4	20.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Karubaga - Mamit	4	30.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Manda - Wolo - Kobakma (169) (30 Km)	4	30.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Duntek (Dogiyai)-Munayepa/ Iyei (Paniai) (141)	4	20.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Lepro - Onggaya (10) KM	6	5.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Sultan Syahrir (Mendukung PON XX)	6	3.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Sultan Peternakan (Mendukung PON XX)	6	7.500.000.000,00
	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	4	3.000.000.000,00
	Peningkatan Jalan Waena - Arso V (100.K) 53 Km	4	30.000.000.000,00
	Program Perencanaan Teknis Jalan dan Jembatan		43.500.000.000,00
	Koordinasi dan Perencanaan Program Infrastruktur Jalan dan Jembatan	4	2.000.000.000,00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Konstruksi		13.100.000.000,00
	Core Team Pengawasan Teknis Bidang Ke-PU-An	1	2.500.000.000,00
	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	1	500.000.000,00
	Pengembangan dan pemanfaatan data KMN dan KMD	1	500.000.000,00
	Pelatihan Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengn Mobile Traning Unit (MTU)	1	300.000.000,00
	Sertifikasi Ketrampilan Tenaga Kerja Konstruksi dengn Mobile Traning Unit (MTU)	1	300.000.000,00
	Penyusunan Basic dan Unit Price Bidang Ke PU-an	1	800.000.000,00
	Kalibrasi Peralatan UPTD Balai Pengujian PU	1	300.000.000,00
	Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	1	100.000.000,00
	Fasilitasi Akreditasi Laboratorium	1	200.000.000,00
	Bimtek Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)	1	300.000.000,00
	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		136.674.945.142,00

	Program Pengembangan Perumahan		204.358.700.000,00
	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu	1	10.000.000.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Keerom	1	5.102.500.213,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mappi	1	3.638.584.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Boven Digoel	1	2.685.687.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Kepulauan Yapen	1	1.679.916.250,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Waropen	1	4.970.220.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Paniai	1	3.883.390.750,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Dogiai	1	2.381.067.500,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Intan Jaya	1	4.805.405.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Deiyai	1	3.477.732.170,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Jayawijaya	1	15.520.005.625,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak Jaya	1	7.490.055.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Lanny Jaya	1	2.996.387.500,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Puncak	1	7.540.100.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Nduga	1	5.020.700.340,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Tengah	1	3.178.106.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yalimo	1	4.012.300.670,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Yahukimo	1	1.710.425.500,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Asmat	1	2.166.752.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Mamberamo Raya	1	6.530.315.700,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Sarmi	1	2.102.570.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Pegunungan Bintang	1	3.666.522.000,00
	Pembangunan Rumah Rakyat Layak Huni di Kabupaten Tolikara	1	22.844.956.924,00
	Pembangunan Perumahan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Supiori	1	4.917.522.750,00

	Pembangunan Perumahan Masyarakat Perbatasan di Kabupaten Keerom	1	2.453.722.250,00
	Program Lingkungan Sehat Perumahan		1.400.000.000,00
	Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan	1	200.000.000,00
	Penyuluhan dan pengawasan kualitas lingkungan sehat perumahan	1	200.000.000,00
	Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		1.500.000.000,00
	Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi rumah akibat bencana alam	8	1.500.000.000,00
Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat			14.187.795.000,00
	Program pengembangan wawasan kebangsaan		4.200.000.000,00
	Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama	7	2.000.000.000,00
	Fasilitasi pembauran kebangsaan	7	700.000.000,00
	Sosialisasi Ketahanan Bela Negara	7	800.000.000,00
	Sosialisasi Peningkatan Wawasan kebangsaan	7	700.000.000,00
	Program Pendidikan Politik Masyarakat		7.037.800.000,00
	FGD Indeks Demokrasi Indonesia	7	500.000.000,00
	Desk Pilkada	7	5.537.800.000,00
	Fasilitasi Kemitraan Eksekutif, Legislatif dan Parpol	7	1.000.000.000,00
	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam		5.426.320.000,00
	Pelatihan Teknis Sistem Pendistribusian Logistik Pada Masa Tanggap darurat Tentang Arus Informasi	8	356.420.000,00
	Rapid Assesment Pasca Bencana	8	393.575.000,00
	Pengembangan Sistem Informasi BPBD (Operasional Pusdalops)	8	300.000.000,00
	Program Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan		1.000.000.000,00
	Fasilitasi Pembinaan Ormas/LSM di Daerah	7	1.000.000.000,00
	Program Peningkatan Keamanan dan kenyamanan Lingkungan		900.000.000,00
	Publikasi dan Informasi Ketertiban Umum Bagi Masyarakat	7	150.000.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamanan Swakarsa Bagi Anggota Linmas dan Masyarakat	7	100.000.000,00
	Penegakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	7	250.000.000,00
	Patroli Wilayah	7	100.000.000,00

	Pengamanan dan Pengawasan Protokoler KDH/ Pejabat Penting	7	150.000.000,00
	Operasional Sekretariat PPNS	7	150.000.000,00
Sosial			8.150.000.000,00
	Perlindungan dan Jaminan Sosial		2.150.000.000,00
	Pelatihan dan Pengarahan Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	1	900.000.000,00
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam	1	1.250.000.000,00
	Pelayanan Kesejahteraan Sosial Berbasis Panti		6.000.000.000,00
	Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi anak dan remaja	1	1.700.000.000,00
	Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Lanjut Usia terlantar	1	1.600.000.000,00
	Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)	1	1.500.000.000,00
	Pelayanan dan Rehabilitasi sosial bagi Cacat Netra	1	1.200.000.000,00
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar			1.125.391.420.000,00
Tenaga Kerja			6.075.000.000,00
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		2.400.000.000,00
	Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	2	1.000.000.000,00
	Sosialisasi Standarisasi dan Setifikasi Kompetensi Kerja	2	150.000.000,00
	Quality Managenent System (QMS) BLTKI	2	100.000.000,00
	Pembinaan dan Pengukuran Produktivitas	2	100.000.000,00
	Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan	2	100.000.000,00
	Bimtek Metodologi Instruktur	2	100.000.000,00
	Pendataan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta/Pemerintah di 10 Kab/Kota	2	200.000.000,00
	Penyelesaian Perselisihan dan Pembinaan Hubungan Industrial	2	200.000.000,00
	Monitoring Pengupahan	2	150.000.000,00
	Pemasaran hasil Lulusan BLKI Provinsi Papua	2	200.000.000,00
	Pemasaran hasil dan Pembinaan Lulusan	2	100.000.000,00
	Program Peningkatan Kesempatan Kerja		3.175.000.000,00
	Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja	2	250.000.000,00
	Padat Karya Pedesaan	2	500.000.000,00
	Pamerran Bursa Tenaga Kerja (JOB FAIR) Provinsi Papua	2	200.000.000,00
	Peningkatan Kompetensi Instruktur pada Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	2	150.000.000,00

	Perluasan Kerja Melalui Sistim TTG	2	150.000.000,00
	Cheking TK AKAD/AKL di Perusahaan	2	150.000.000,00
	Pembekalan Wirausaha Baru (WUB)	2	125.000.000,00
	Pembekalan Petugas Antar Kerja di 20 Kab/Kota	2	250.000.000,00
	Pemagangan Luar Negeri bagi pencari kerja OAP	2	1.400.000.000,00
	Program Pengolahan dan Penyebarluasan Informasi Produktivitas		100.000.000,00
	Pembinaan Kader Desa/Kampung Produktivitas	2	100.000.000,00
	Program Pengawasan Ketenagakerjaan		500.000.000,00
	Pelatihan ahli K3 dari perusahaan	2	100.000.000,00
	Pembinaan Penyelesaian Perselisihan di perselisihan	2	100.000.000,00
	Sosialisasi Undangn-Undangn No. 1 Tahun 2017 tentang struktur dan skala upah	2	100.000.000,00
	Sosialisasi syarat-syarat dan norma kerja di perusahaan	2	100.000.000,00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			3.866.400.000,00
	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		2.850.000.000,00
	Workshop PUG bagi SKPD, Legislatif dan Yudikatif	2	250.000.000,00
	Penguatan Kapasitas SDM Progremer Anggaran Responsif Gender (ARG)	2	200.000.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Anak		3.416.400.000,00
	Fasilitasi upaya perlindungan perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	2	350.000.000,00
	Pelatihan Psykososial Perempuan Korban Kekerasan	2	200.000.000,00
	Fasilitasi Forum kesetaraan gender dan demokrasi	2	150.000.000,00
	Fasilitasi Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK	2	816.400.000,00
	Monitoring dan evaluasi kampung KB	2	200.000.000,00
	Pengadaan sarana pelayanan KB	2	200.000.000,00
	Pelayanan KIE bagi masyarakat	2	200.000.000,00
	Pembinaan kader pembantu KB	2	200.000.000,00
	Pengadaan buku keluarga berencana, dan KIE	2	200.000.000,00
	Studi Banding Pengelolaan KB	2	300.000.000,00
	Pelatihan dan Advokasi Keluarga Berencana di 29 Kabupaten/Kota	2	600.000.000,00
Pangan			7.518.900.000,00

	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		17.179.400.000,00
	Penanganan daerah rawan pangan	3	928.900.000,00
	Pengembangan cadangan pangan daerah	3	3.290.000.000,00
	Pengembangan desa mandiri pangan	3	2.000.000.000,00
	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan	3	800.000.000,00
	Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Pangan	3	500.000.000,00
Pertanahan			0
Lingkungan Hidup			6.800.700.000,00
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		3.600.000.000,00
	Pembinaan dan Pengawasan Limbah B3	8	150.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Komisi AMDAL Provinsi Papua	8	300.000.000,00
	Pengawasan Lingkungan Hidup	8	250.000.000,00
	Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium BPLH	8	850.000.000,00
	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Air Sungai di Provinsi Papua	8	350.000.000,00
	Pemantauan dan Pengendalian Kualitas Udara Ambien	8	250.000.000,00
	Pemantauan RKL/RPL	8	100.000.000,00
	Validasi KLHS RPJMD Kab/Kota	8	250.000.000,00
	Penyusunan RPPLH Tahap 2	8	200.000.000,00
	Penyediaan Sistem Pemantauan Kualitas Air Secara Kontinyu, otomatis dan online (DAK)	8	900.000.000,00
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		300.000.000,00
	Penyebarluasan Informasi Lingkungan Hidup	8	100.000.000,00
	Pekan Lingkungan Hidup Papua	8	200.000.000,00
	Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan dikawasan-kawasan konservasi laut dan hutan		450.000.000,00
	Pemberdayaan MAsyarakat Asli Papua dalam ekowisata di Provinsi Papua	8	200.000.000,00
	Penyelamatan Danau di Papua	8	250.000.000,00
	Program Mitigasi dan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim		650.000.000,00
	Identifikasi Gas Rumah Kaca	8	200.000.000,00
	Pengolahan Sampah di Kab/kota (PilotProject	8	200.000.000,00
	Program Kampung Iklim Kabuapten/Kota di Provinsi Papua	8	250.000.000,00

	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH		1.800.700.000,00
	Forum SKPD Lingkungan Hidup Se- Provinsi Papua	8	600.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkungan Hidup	8	200.000.000,00
	Penilaian Dokumen Lingkungan Hidup Kegiatan Wajib Amdal	8	450.000.000,00
	Penyusunan Produk Hukum	8	250.000.000,00
	Kampanye Go Adipura PON 20 di 5 Wilayah Adat	8	300.700.000,00
Administrasi Kependudukan dan Capil			0
Pemberdayaan Masyarakat Desa			2.481.800.000,00
	Program Pemberdayaan Masyarakat Kampung		3.465.800.000,00
	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	5	300.000.000,00
	Pengembangan Zona dan Komoditas Unggulan Laboratorium Lapang	5	384.500.000,00
	Pembinaan dan Pendampingan Kelompok Pengelola Laboratorium Lapang	5	297.300.000,00
	Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Distrik dan Kampung		5.700.600.000,00
	Pembinaan dan Fasilitasi Lembaga Masyarakat	5	300.000.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Prospek	5	1.200.000.000,00
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana			0
Perhubungan			298.046.800.000,00
	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan		13.200.000.000,00
	Penyusunan UKL/UPL Pembangunan Terminal Penumpang Type B di Kab. Keerom	4	500.000.000,00
	Program peningkatan pelayanan angkutan		5.860.000.000,00
	Pengadaan Angkutan Pedesaan	4	3.250.000.000,00
	Pengadaan Bus Penunjang Kegiatan PON XX	6	2.550.000.000,00
	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		315.396.800.000,00
	Pembangunan Pelabuhan Laut Waren di Kabupaten Waropen	4	10.000.000.000,00
	Pembangunan Pelabuhan Laut Miosbipondi di Kabupaten Supiori	4	6.000.000.000,00
	Pembangunan Pelabuhan Ampimoi di Kabupaten Kepulauan Yapen	4	8.000.000.000,00
	Pembangunan Bandar Udara Wanggar di Kabupaten Nabire	4	20.000.000.000,00
	Pembangunan Bandar Udara Botawa di Kabupaten Waropen	4	10.000.000.000,00

	Pembangunan Bandar Udara Mamit di Kabupaten Tolikara	4	40.000.000.000,00
	Pembangunan Bandar Udara Fawi di Kabupaten Puncak	4	10.000.000.000,00
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kota Jayapura	4	20.000.000.000,00
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kab. Nabire	4	14.696.800.000,00
	Pembangunan Terminal Tipe B di Kab.Keerom	4	7.000.000.000,00
	Pembangunan Dermaga Sungai Sipu-Sipu Distrik Jita di Kabupaten Mimika	4	10.000.000.000,00
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Jayapura	4	7.000.000.000,00
	Pembangunan Bandar Udara Panggema di Kabupaten Yahukimo	4	10.000.000.000,00
	Pembangunan Bandar Udara Ninia di Kabupaten Yahukimo	4	10.000.000.000,00
	Peningkatan Bandar Udara Kustra di Kabupaten Mamberamo Raya	4	11.750.000.000,00
	Pembangunan Bandar Udara Saminage di Kabupaten Yahukimo	4	10.000.000.000,00
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Jayawijaya	4	10.000.000.000,00
	Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kabupaten Merauke	4	14.000.000.000,00
	Pembangunan Dermaga Danau 4 (empat) Lokasi di Danau Sentani Kabupaten Jayapura	4	16.000.000.000,00
	Peningkatan Pelabuhan Laut Kimaam di Kabupaten Merauke	4	5.000.000.000,00
	Pembangunan Bandar Udara Kobakma di Kabupaten Mamberamo Tengah	4	17.500.000.000,00
	Pengembangan Pelabuhan Laut Kepi di Kabupaten Mappi	4	8.000.000.000,00
	Pembangunan Pelabuhan Laut Pulau Wakde di Kabupaten Sarmi	4	1.700.000.000,00
	Pengembangan Pelabuhan Laut Tanah Merah di Kabupaten Boven Digoel	4	10.000.000.000,00
	Pembangunan bandar Udara Kuyawage di Kabupaten Lanny Jaya	4	5.000.000.000,00
	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		100.000.000,00
	Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK sektor Transportasi	8	100.000.000,00
Komunikasi dan Informatika			2.550.000.000,00
	Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		750.000.000,00

	Pelatihan SDM Bidang Informasi dan Komunikasi Bagi Aparatur dan Masyarakat	2	750.000.000,00
	Program kerjasama informasi dengan mas media		3.400.000.000,00
	Pelayanan informasi dan komunikasi melalui media tradisional	1	300.000.000,00
	Pembangunan/Pengembangan Kampung IT	1	1.500.000.000,00
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah			6.185.000.000,00
	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah		7.866.950.000,00
	Memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	3	246.950.000,00
	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		1.059.550.000,00
	Pengembangan Kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal	3	364.550.000,00
	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		5.573.500.000,00
	Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian	3	356.500.000,00
	Pembinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi	3	350.000.000,00
	Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi	3	350.000.000,00
	Penyebaran model-model pola pengembangan koperasi	3	324.500.000,00
	Identifikasi Keragaman Koperasi	3	306.500.000,00
	Monitoring Pengawasan Koperasi Pelaksanaan RAT	3	324.500.000,00
	Pembinaan, pemantauan, pengendalian, pengawasan, dan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	3	250.000.000,00
	Sosialisasi penyaluran kredit pembiayaan melalui LPDB KUMKM	3	231.500.000,00
	Orientasi Layanan Pembentukan Badan Layanan Umum Daerah Dana Bergulir (BLUD-DB)	3	150.000.000,00
	Sosialisasi dan Penyaluran Rencana Tindak KUR, PKBL dan Dana dari Lembaga Keuangan	3	250.000.000,00
	Pelatihan Perkoperasian bagi Pengurus / Pengelola Koperasi (DAK Non Fisik)	3	624.000.000,00
	Pelatihan Perkoperasian dan Kewirausahaan bagi Pendamping (DAK Non Fisik)	3	1.906.000.000,00
	Bimtek KSP/USP dengan Peralatan Kerja	3	150.000.000,00
Penanaman Modal			0

	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		1.250.000.000,00
	Pengembangan potensi unggulan daerah	3	0
Kepemudaan dan Olah Raga			785.961.000.000,00
	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga		10.000.000.000,00
	Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat	6	10.000.000.000,00
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga		424.500.000.000,00
	Pembangunan Gedung Olahraga RINDAM	6	62.000.000.000,00
	Pembangunan Gedung Olahraga Volly	6	289.000.000.000,00
	Pembangunan GOR Otonom	6	73.500.000.000,00
	Program Pembangunan dan Pengembangan sarana dan prasarana olahraga yang berstandar nasional dan Internasional		455.590.700.000,00
	Pembangunan Arena Menembak	6	121.830.000.000,00
	Rehabilitasi/Pengembangan Lapangan Tenis	6	62.500.000.000,00
	Pembangunan Lapangan Softball dan Baseball	6	167.131.000.000,00
Statistik			0
Persandian			0
Kebudayaan			4.670.000.000,00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		4.445.000.000,00
	Festival Seni Kreasi Papua	2	1.200.000.000,00
	Pesta Budaya Papua	2	700.000.000,00
	Prametling Kegiatan Pesta Budaya	2	500.000.000,00
	Temu Taman Budaya Tingkat Nasional	2	400.000.000,00
	Program Pengelolaan Keragaman Budaya		3.135.000.000,00
	Pembuatan Film Dokumenter Kebudayaan Papua	2	450.000.000,00
	Festival Seni Tingkat Nasional	2	400.000.000,00
	Pelatihan Kesenian di Kampung	2	200.000.000,00
	Festival Teater di tingkat SLTA se Provinsi Papua	2	500.000.000,00
	Festival Budaya Saireri	2	320.000.000,00
Perpustakaan			0
Kearsipan			1.235.820.000,00
	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		1.235.820.000,00
	Pengembangan Minat dan Budaya Baca	2	60.000.000,00
	Penyediaan Bahan Pustaka Peperustakaan Umum dan Daerah	2	285.020.000,00
	Penyelenggaraan Peperustakaan Keliling	2	330.800.000,00

	Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Manajemen Pengelola Perpustakaan	2	300.000.000,00
	Otomasi Perpustakaan	2	200.000.000,00
	Reprografi bahan Pustaka	2	60.000.000,00
Urusan Pilihan			111.741.149.000,00
Kelautan dan Perikanan			7.050.000.000,00
	Program pengembangan budidaya perikanan		4.600.000.000,00
	Pengembangan bibit ikan unggul	3	400.000.000,00
	Bantuan sarana produksi kolam/karamba masyarakat	3	2.000.000.000,00
	Optimalisasi Lahan Usaha Pembudidaya Pemula	3	250.000.000,00
	Bantuan Bibit Ikan dan Pakan kepada Pembudidaya Air Tawar	3	1.500.000.000,00
	Program Pengembangan dan Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap		2.100.750.000,00
	Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap	3	200.000.000,00
	Rehabilitasi sedang/berat tempat pelelangan ikan	3	1.500.000.000,00
	Pendaftaran Nelayan Dalam Rangka Penerbitan Kartu Nelayan	3	200.000.000,00
	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan		50.000.000,00
	Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	3	50.000.000,00
	Program Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)		13.595.900.000,00
	Penunjang Kegiatan Balai Benih Ikan Sentra Berap-Kab. Jayapura	3	450.000.000,00
	Optimalisasi Fungsi dan Pelayanan BPPMHP Merauke	3	500.000.000,00
Pariwisata			4.100.000.000,00
	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata		9.500.000.000,00
	Survey pembangunan dan penataan manajemen hotel pemda	3	300.000.000,00
	Penataan dan pengembangan Kawasan Wisata Pantai Amai, Tablanusu dan Tanjung Bio Kendate	3	500.000.000,00
	pengembangan objek pariwisata unggulan	3	700.000.000,00
	pengembangan daerah tujuan wisata	3	2.600.000.000,00
Pertanian			48.116.800.000,00
	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani		3.900.000.000,00
	Pelatihan Petani dan Pelaku Agrobisnis	3	500.000.000,00

	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	3	500.000.000,00
	Peningkatan kemampuan lembaga petani	3	500.000.000,00
	Peningkatan sistem insentif dan disinsentif bagi petani/kelompok tani	3	750.000.000,00
	Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan dan produktivitas lahan tidur	3	1.650.000.000,00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		2.320.000.000,00
	Pengembangan pertanian pada lahan kering	3	1.500.000.000,00
	Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan, produk pertanian	3	450.000.000,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	3	370.000.000,00
	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)		16.500.000.000,00
	Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman Pangan dan Hortikultura	3	1.000.000.000,00
	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		19.446.800.000,00
	Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan	3	5.500.000.000,00
	Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan	3	300.000.000,00
	Sertifikasi bibit unggul pertanian/perkebunan	3	250.000.000,00
	Intensifikasi Tanaman Perkebunan	3	2.500.000.000,00
	Perluasan Areal Komoditas Perkebunan	3	4.800.000.000,00
	Pembinaan Petani	3	1.500.000.000,00
	Pemeliharaan Kebun Benih Tanaman Perkebunan	3	2.200.000.000,00
	Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan	3	2.396.800.000,00
	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		1.800.000.000,00
	Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan	3	1.500.000.000,00
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		2.400.000.000,00
	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	3	500.000.000,00
	Peningkatan Sumberdaya Kelembagaan Kesehatan Hewan	3	250.000.000,00
	Pencegahan, pengendalian, Pemberantasan penyakit hewan menular dan gangguan penyakit reproduksi ternak	3	400.000.000,00
	Program peningkatan produksi hasil peternakan		22.091.900.000,00

	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	3	1.000.000.000,00
	Pembibitan dan perawatan ternak	3	1.500.000.000,00
	Pengembangan agribisnis perternakan	3	2.000.000.000,00
	Pengembangan sarana dan prasarana produksi ternak	3	5.000.000.000,00
	Pengembangan ternak besar	3	4.500.000.000,00
	Pengembangan ternak kecil	3	4.800.000.000,00
Kehutanan			17.118.345.000,00
	Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan		4.156.700.000,00
	Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Silvikultur pada IUPHHK-HA	3	120.000.000,00
	Peningkatan Tertib Produksi dan Peredaran Hasil Hutan	3	236.700.000,00
	Pengembangan Usaha Pemanfaatan Kayu Masyarakat Hukum Adat	3	1.100.000.000,00
	Pengembangan Industri Kayu Masyarakat Hukum Adat	3	850.000.000,00
	Evaluasi Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu	3	150.000.000,00
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Ekonomi Produktif melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) (DAK)	3	1.500.000.000,00
	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan		4.100.000.000,00
	Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai dampak perusakan hutan	3	150.000.000,00
	Program perencanaan dan pengembangan hutan		13.241.645.000,00
	Pengembangan hutan masyarakat adat	3	615.645.000,00
	Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan	3	450.000.000,00
	Pengelolaan Cabang Dinas Kehutanan di Provinsi Papua	3	3.500.000.000,00
	Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Papua	3	6.500.000.000,00
	Pengembangan Sistem Informasi Geografis	8	150.000.000,00
	Pengawasan dan Pengendalian Penggunaan Kawasan Hutan	8	246.000.000,00
	Pengembangan Data dan Informasi Kehutanan	8	850.000.000,00
	Rancang bangun Pengembangan Potensi Hasil Hutan Bukan Kayu	8	350.000.000,00
	Program Peningkatan Kualitas dan Akses informasi		350.000.000,00
	Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK Sektor Lahan	8	350.000.000,00

Energi dan Sumberdaya Mineral			10.706.004.000,00
	Program pembinaan dan pemutakhiran sistem data dan informasi energi dan sumber daya mineral		209.504.000,00
	Promosi potensi energi dan sumber daya mineral di dalam dan luar negeri	4	209.504.000,00
	Program Pelayanan Air Bersih		3.750.000.000,00
	Pemboran air bawah tanah untuk masyarakat kampung sulit air bersih	1	3.250.000.000,00
	Survey detail pemanfaatan dan pengelolaan mataair	1	500.000.000,00
	Program Pembinaan, Pengawasan, Pengusahaan Mineral dan Batubara		600.000.000,00
	Pengawasan dan pembinaan pertambangan rakyat	3	0
	Pengawasan dan Pembinaan Usaha Pertambangan para Pemegang IUP Mineral dan Batubara	3	0
	Pembinaan dan Pengawasan Produksi Pertambangan Mineral Non Logam dan Batuan	3	0
	Pengawasan dan Penertiban Penambang Emas Tanpa Ijin (PETI)	3	0
	Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi		575.000.000,00
	Penyusunan PEP RAD-GRK dan Inventarisasi Emisi GRK sektor Energi	8	75.000.000,00
	Program Pengelolaan Listrik dan Pemanfaatan Energi		7.210.000.000,00
	Penyediaan dan Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	1	5.071.500.000,00
	Penyusunan DED PLTMH	1	800.000.000,00
	Penyusunan DED PLTS	1	800.000.000,00
Perdagangan			24.650.000.000,00
	Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan		1.900.000.000,00
	Fasilitasi penyelesaian permasalahan-permasalahan pengaduan konsumen	3	400.000.000,00
	Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa	3	300.000.000,00
	operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah	3	750.000.000,00
	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri		18.880.000.000,00
	Pengembangan pasar dan distribusi barang / produk	3	10.000.000.000,00
	Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan	3	4.000.000.000,00

	Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negeri	3	500.000.000,00
	Pengembangan industri kecil dan menengah		7.295.500.000,00
	fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya alam	3	1.000.000.000,00
	pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan cluster industri	3	1.200.000.000,00
	penyusunan kebijakan industri terkait dan penunjang industri kecil dan menengah	3	1.000.000.000,00
	fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro kecil dengan swasta	3	1.500.000.000,00
	Penataan Struktur Industri		5.000.000.000,00
	kebijakan keterkaitan industri hulu hilir	3	4.000.000.000,00
Perindustrian			0
Transmigrasi			0
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang			82.037.703.700,00
Administrasi Pemerintahan			13.042.480.000,00
	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan		2.000.000.000,00
	Pembentukan Produk Hukum Daerah	7	2.000.000.000,00
	Program Pembinaan Mental Spritual		430.000.000,00
	Pembinaan dan Peningkatan Iman dan Taqwa bagi Aparatur	7	130.000.000,00
	Rapat koordinasi lembaga-lembaga keagamaan dalam dan luar daerah	7	150.000.000,00
	Penyediaan aparatur pendamping keagamaan	7	150.000.000,00
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum		2.300.000.000,00
	RAKERDA Bupati dan Walikota se Provinsi Papua	7	1.100.000.000,00
	Penyusunan PERDASI tentang Kampung Adat dan Kampung Administrasi	7	400.000.000,00
	Penyusunan MEMORI Serah Terima Jabatan Gubernur	7	300.000.000,00
	Bimtek Penyusunan Pedoman Kerja Bagi para Kepala Distrik Non latarbelakang Ilmu Pemerintahan di Provinsi Papua	7	500.000.000,00
	Program Pembinaan dan Penataan Administrasi Pemerintahan		2.300.000.000,00
	Fasilitasi Pelatihan Bupati/Walikota se Provinsi Papua	7	700.000.000,00
	Pembuatan Peta Provinsi Papua	7	500.000.000,00
	Evaluasi Perkembangan Daerah Otonomi Baru (EPDOB)	7	500.000.000,00

	Penyelesaian Perselisihan Batas Daerah Provinsi Papua	7	600.000.000,00
	Program Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum		2.342.300.000,00
	Pembinaan dan Pengkajian Produk Hukum Kabupaten/Kota se Papua	7	1.342.300.000,00
	Konsultasi Ranperda Kabupaten/Kota	7	300.000.000,00
	Program Dokumentasi dan Informasi Hukum		514.000.000,00
	Penyebarluasan informasi hukum	7	200.000.000,00
	Penyediaan Bahan Pustaka dan Penataan Dokumen	7	114.000.000,00
	Pencetakan Lembaran Daerah, Berita Daerah dan JDIH	7	100.000.000,00
	Program Pengelolaan Batas Wilayah dan Lintas Batas		1.226.000.000,00
	Sosialisasi Basic Agreement Bagi Masyarakat Perbatasan	7	300.000.000,00
	Joint Verifikasi Pelintas Batas Wilayah RI-PNG	7	250.000.000,00
	Pemeliharaan Pilar batas RI-PNG	7	250.000.000,00
	Rakornis Pengelola Perbatasan RI-PNG	7	300.000.000,00
	Program Pengembangan Data dan Informasi		150.000.000,00
	Penyediaan dan Pengembangan Data Kesejahteraan Rakyat, Mental Spritual dan Bina Kemasyarakatan	7	150.000.000,00
	Program Peningkatan Hubungan Kerjasama Luar Negeri		2.706.180.000,00
	Border Liaison Meeting (BLM)	7	1.400.000.000,00
	Border Liaison Officer Meeting (BLOM)	7	750.000.000,00
	Penjajakan Kerjasama Luar Negeri	7	350.000.000,00
	Border Trade RI - PNG dan Negara Passfik Selatan	7	0
	Pelayanan Kunjungan Tamu Negera	7	206.180.000,00
	Pengawasan		6.012.350.000,00
	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		565.400.000,00
	Penanganan kasus pengaduan masyarakat/ Non PKPT di Lingkungan Pemerintah Daerah	7	565.400.000,00
	Program Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan		6.859.350.000,00
	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Provinsi Papua, Inspektorat Jenderal Departemen dan BPK RI	7	1.756.900.000,00

	Tuntutan perbendaharaan ganti rugi keuangan dan barang daerah	7	165.250.000,00
	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Ke Dalam Aplikasi SIM HP	7	476.300.000,00
	Monitoring Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	7	1.753.700.000,00
	Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Tingkat Regional dan Provinsi	7	1.065.550.000,00
	Pengelolaan LHKPN	7	229.250.000,00
Perencanaan			26.025.500.000,00
	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh		10.600.000.000,00
	Perencanaan Pengembangan Kawasan Strategis	7	300.000.000,00
	Penyusunan perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh	5	300.000.000,00
	Pendamping Program Gerbangmas	5	9.000.000.000,00
	Koordinasi dan sinkronisasi program Gerbangmas Hasrat Papua	5	1.000.000.000,00
	Program perencanaan pembangunan daerah		14.286.200.000,00
	Asistensi Musrenbang Kabupaten/Kota Dalam Rangka Penjaringan Asmara	7	850.000.000,00
	Musyawahar Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua (MUSRENBANGDA)	7	650.300.000,00
	Musyawahar Perencanaan Pembangunan Nasional (MUSRENBANGNAS)	7	675.200.000,00
	Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua	7	800.000.000,00
	Koordinasi Perencanaan Internal Bappeda	7	300.000.000,00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Internal Bappeda	7	300.000.000,00
	Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Provinsi Papua	7	800.000.000,00
	Peningkatan Pengendalian Administrasi Program Pembangunan	7	300.000.000,00
	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua	7	1.200.000.000,00
	Penyusunan Laporan Kegiatan APBN di Provinsi Papua	7	200.000.000,00
	Asistensi Monitoring dan Pelaporan Pembangunan Daerah	7	300.000.000,00
	Program perencanaan pembangunan ekonomi		6.561.000.000,00

	Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	7	500.000.000,00
	Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Keuangan	7	300.000.000,00
	Penyusunan Buku Indikator Data Pembangunan dan Analisis Makro Ekonomi Provinsi Papua	7	350.000.000,00
	Koordinasi Urusan Wajib Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan, Pariwisata	7	300.000.000,00
	Rapat Kerja Terbatas Pembangunan Bidang Ekonomi Papua	7	550.000.000,00
	Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	7	500.000.000,00
	Program Perencanaan Pembangunan Fisik Prasarana dan Lingkungan Hidup		4.800.000.000,00
	Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur	7	500.000.000,00
	Perencanaan dan Pengembangan Program Fisik Prasarana	7	300.000.000,00
	Perencanaan dan Pengembangan Program Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (SDA dan LH)	7	300.000.000,00
	Perencanaan dan Pengembangan Program Infrastruktur Transportasi, Cipta Karya	7	300.000.000,00
	Perencanaan dan Pengembangan Program Telekomunikasi dan Kelistrikan	7	300.000.000,00
	Penyusunan Profil Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua	8	300.000.000,00
	Pembinaan POKJA Rencana Aksi Daerah Gas Rumah Kaca (RAD GRK) Provinsi Papua	7	200.000.000,00
	Peningkatan kapasitas Perencana Pembangunan Rendah Emisi	8	200.000.000,00
	Program Perencanaan Tata Ruang		2.000.000.000,00
	Sinkronisasi dan Koordinasi BKPRD Provinsi Papua	8	300.000.000,00
	Penetapan kebijakan tentang RTRK	8	300.000.000,00
	Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang	8	300.000.000,00
	Peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua	8	500.000.000,00
	Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	8	300.000.000,00
	Perencanaan program pengembangan kawasan	8	300.000.000,00
	program peningkatan kinerja BUMD		850.000.000,00
	Fasilitasi Pertemuan Forum Koordinasi Mitra BUMD	3	300.000.000,00
	Fasilitasi penyiapan regulasi pengelolaan SDA	3	250.000.000,00

	Fasiltasi Kemitraan Swasta dan Pelaku Ekonomi	3	300.000.000,00
	Program Kerjasama Pembangunan		800.000.000,00
	Perencanaan Kerjasama Pembangunan Wilayah Adat	8	300.000.000,00
	Peningkatan Koordinasi Kerjasama Mitra Pembangunan Daerah (K2MPD) Provinsi Papua	7	500.000.000,00
	program perencanaan kawasan		500.000.000,00
	Perencanaan Koridor Pengembangan Infrastruktur	8	500.000.000,00
Keuangan			20.257.373.700,00
	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		26.310.379.000,00
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	7	1.705.500.000,00
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	7	1.000.000.000,00
	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	7	750.000.000,00
	Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	7	250.000.000,00
	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan aset daerah	7	888.000.000,00
	Pemeliharaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	7	203.000.000,00
	Revaluasi/appraisal aset/barang daerah	7	1.500.000.000,00
	Pengembangan Aplikasi Gaji	7	85.000.000,00
	Pengembangan Aplikasi Suplemen	7	85.000.000,00
	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Kas Daerah	7	460.000.000,00
	Pengembangan Sistem Informasi dan Basis Data Pengelolaan Keuangan Daerah Kabuapten/Kota se Papua	7	750.000.000,00
	Pembinaan, Pengawasan Asset Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	7	125.000.000,00
	Peningkatan Kapasitas Perencanaan dan Penganggaran	7	623.950.000,00
	Penyusunan Standar Satuan Harga	7	200.000.000,00
	Penyusunan Analisa Standar Belanja	7	200.000.000,00
	Pengamanan, Penertiban Asset Pemerintah Daerah di Dalam dan Luar Provinsi Papua	7	750.000.000,00
	Penyusunan/Pembahasan Peraturan Pengelolaan keuangan Daerah	7	280.000.000,00
	Pembahasan RKA SKPD	7	1.000.000.000,00

	Rapat Kerja Keuangan Daerah se Provinsi Papua	7	1.000.000.000,00
	Pelatihan bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	7	465.000.000,00
	Pelatihan Pengelolaan Administrasi Penggajian PNS	7	250.000.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Realisasi SP2D di setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua	7	750.000.000,00
	Penyusunan Laporan dan Rekonsiliasi Data Bidang Akuntansi	7	300.000.000,00
	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Pemerintah Provinsi Papua	7	500.000.000,00
	Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Pemerintah Provinsi Papua	7	1.697.000.000,00
	Monitoring dan Evaluasi Hibah, Bantuan Sosial Pemerintah Provinsi Papua	7	500.000.000,00
	Pembahasan RKA Perubahan SKPD	7	750.000.000,00
	Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Keuangan	7	3.189.923.700,00
Kepegawaian			14.600.000.000,00
	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		2.300.000.000,00
	Pelaksanaan Mutasi, Kenaikan Pangkat dan Pindah	7	1.500.000.000,00
	Peningkatan Pelayanan Administrasi PNS	7	800.000.000,00
	Program Peningkatan Pemberian Bantuan Hukum dan Penegakan Perda		1.200.000.000,00
	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Peraturan Perundang-Undangan Bidang Kepegawaian	7	500.000.000,00
	Sosialisasi Raperdasi Tentang Kebijakan Kepegawaian di Provinsi Papua	7	700.000.000,00
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		10.800.000.000,00
	Pengembangan Kualitas SDM	7	7.000.000.000,00
	Penyelenggaraan Seleksi Pendidikan dan Latihan Aparatur	7	1.000.000.000,00
	Bimbingan Teknis Penyusunan Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Daerah	7	500.000.000,00
	Program Pengembangan Data dan Informasi		1.400.000.000,00
	Pengembangan Database dan Pengupdate Data CPNS, PNS, Jabatan Struktur dan Fungsional	7	400.000.000,00
	Pemutahiran Data Kepegawaian dan Pengembangan Sistem Informasi Berbasis Web	7	1.000.000.000,00

	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		1.200.000.000,00
	Pendidikan dan Pelatihan Formal	7	1.200.000.000,00
Pendidikan dan Pelatihan			0
Penelitian dan Pengembangan			2.100.000.000,00
	Program Pengembangan Mutu Penelitian dan Pengembangan		2.100.000.000,00
	Kajian pengembangan tata niaga komunitas unggulan di Provinsi Papua	2	600.000.000,00
	Analisis Pemanfaatan Lingkungan terhadap Areal Pasca Tambang	2	300.000.000,00
	Pembangunan sistem e_jurnal litbang daerah	2	350.000.000,00
	Kajian Kebijakan Sektor Kehutanan bidang Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Hutan Adat	2	600.000.000,00
	Penguatan Jaringan penelitian daerah di Provinsi Papua	2	250.000.000,00
			3.808.295.422.861,00

BAB VI

PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua Tahun 2018, merupakan penjabaran pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Papua 2013 – 2018. Dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 dan hasil analisis, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2016. RKPD Tahun 2018 merupakan tahap pengembangan program dan kegiatan prioritas guna mewujudkan Visi dan Misi Provinsi Papua .

Dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sesuai dengan tujuan dan fungsinya, RKPD tahun 2018 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2018, memusatkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan jangka pendek tahun 2018. Penetapan prioritas rencana pembangunan tahun 2018, mengacu pada isu-isu strategis serta melalui pendekatan kewilayahan, yang kemudian difokuskan pada program dan kegiatan pembangunan daerah. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh SKPD Provinsi Papua dan seluruh Pemerintah Kabupaten/Kota serta seluruh pelaku pembangunan di Provinsi Papua berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2018, secara sinergitas dan terintegrasi. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, peran serta kontribusi masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh SKPD, BAPPEDA menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih

lanjut pelaksanaan RKPD Tahun 2016. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2016 tersebut menjadi dasar bahan penyusunan RKPD Tahun 2018 berikutnya;

2. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2018, RKPD Tahun 2018 dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018, hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Provinsi Papua;
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap SKPD harus menyusun dan membuat RENJA-SKPD masing-masing, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2018;
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum SKPD serta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas, dapat terakomodasi secara baik;
5. Secara proaktif, BAPPEDA Provinsi Papua, wajib melakukan monitoring, pengkajian pelaksanaan RKPD Tahun 2018 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3 (tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing SKPD dan hasilnya disampaikan kepada Gubernur;
6. Pada akhir tahun anggaran 2018, setiap kepala SKPD wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD Tahun 2018, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Gubernur melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dan BAPPEDA Provinsi Papua ;
7. RKPD Tahun 2018 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-

prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Keberhasilan implementasi pelaksanaan RKPD Provinsi Papua Tahun 2018 sangat tergantung kepada peran dari seluruh pemangku kepentingan. Untuk itu, Pemerintah Provinsi Papua mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan agar mensukseskan, mengawal, dan melaksanakan RKPD Provinsi Papua Tahun 2018, demi mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

**GUBERNUR PAPUA,
CAP/TTD
LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



**Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH
NIP. 19661202 198603 1 002**



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2017